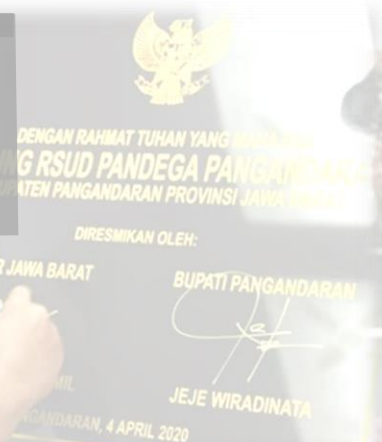




PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

RKPD
TAHUN 2021



Pemerintah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2020



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan;
- b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
33. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);

34. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 10 (sepuluh) tahun;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
6. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RKPD, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021;
8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan PD, adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah;

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pangandaran dan mengacu pada RKP, RKPD Provinsi Jawa Barat dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I. Pendahuluan;
 - b. Bab II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. Bab V. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - f. Bab VI. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. Bab VII. Penutup.
- (2) Uraian Rincian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD); dan
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI PANGANDARAN,



H. BEJEWIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 27 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



SETDA

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2020 NOMOR 62

DAFTAR ISI

	Halaman
PERATURAN BUPATI	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR/GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I - 7
1.4 Maksud dan Tujuan	I - 8
1.5 Sistematika Penyusunan RKPD	I - 9
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II - 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II - 1
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 61
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II - 63
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III - 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III - 19
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV - 1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 1
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2021	IV - 7
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V - 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI - 1
6.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama	VI - 1
6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Sasaran	VI - 2
BAB VII PENUTUP	VII - 1



DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel	2.1	Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran	II – 1
Tabel	2.2	Kondisi Tofografi Kabupaten Pangandaran	II – 2
Tabel	2.3	Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran	II – 4
Tabel	2.4	Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran	II – 6
Tabel	2.5	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran ...	II – 7
Tabel	2.6	Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran	II – 9
Tabel	2.7	Luasan Potensi Gempa Kabupaten Pangandaran	II – 10
Tabel	2.8	Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran	II – 10
Tabel	2.9	Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran	II – 11
Tabel	2.10	Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran	II – 12
Tabel	2.11	Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	II – 14
Tabel	2.12	Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	II – 15
Tabel	2.13	Persentase Penyebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	II – 16
Tabel	2.14	Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	II – 17
Tabel	2.15	Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	II – 18
Tabel	2.16	Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	II – 19
Tabel	2.17	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	II – 19
Tabel	2.18	Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019	II – 20
Tabel	2.19	PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2019 (Juta Rupiah)	II – 23
Tabel	2.20	PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2019 (Juta Rupiah)	II – 25
Tabel	2.21	Nilai Inflasi Kabupaten Pangandaran Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019	II – 27
Tabel	2.22	PDRB Perkapita Tahun 2016-2019	II – 28
Tabel	2.23	Gini Ratio Data Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 29
Tabel	2.24	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 29
Tabel	2.25	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran dan Komponennya Tahun 2016-2019	II – 30
Tabel	2.26	Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran dan Komponennya Tahun 2016-2019	II – 32
Tabel	2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 34
Tabel	2.28	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 34
Tabel	2.29	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pangandaran 2016-2019	II – 35



Tabel 2.30	Capaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 36
Tabel 2.31	Capaian Indikator Jalan di Kabupaten Tahun 2017-2019...	II – 37
Tabel 2.32	Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2019	II – 37
Tabel 2.33	Capaian Indikator Perumahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 39
Tabel 2.34	Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 39
Tabel 2.35	Capaian Indikator Sosial di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 40
Tabel 2.36	Capaian Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Pangandaran 2016-2019	II – 40
Tabel 2.37	Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 41
Tabel 2.38	Capaian Indikator Ketahanan Pangan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2015-2019	II – 41
Tabel 2.39	Capaian Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 44
Tabel 2.40	Capaian Indikator Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019.....	II – 45
Tabel 2.41	Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 46
Tabel 2.42	Capaian Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 46
Tabel 2.43	Jumlah Angkutan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 47
Tabel 2.44	Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 47
Tabel 2.45	Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2019	II – 48
Tabel 2.46	Capaian Indikator Investasi di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2019	II – 49
Tabel 2.47	Capaian Indikator Kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 50
Tabel 2.48	Capaian Indikator Kebudayaan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 50
Tabel 2.49	Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 51
Tabel 2.50	Capaian Indikator Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2019	II – 52
Tabel 2.51	Capaian Indikator Pertanian di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2019	II – 53
Tabel 2.52	Potensi Bidang Peternakan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 54
Tabel 2.53	Capaian Indikator Perdagangan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 56
Tabel 2.54	Capaian Penunjang Pemerintahan Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 57



Tabel 2.55	Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 58
Tabel 2.56	Angka PDRB Perkapita Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019.....	II – 59
Tabel 2.57	Jumlah Restoran dan Hotel di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 59
Tabel 2.58	Jumlah Pelanggan dan Pemakaian KWH Listrik di Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2019.....	II – 59
Tabel 2.59	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 60
Tabel 2.60	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2019	II – 60
Tabel 2.61	Capaian Hasil Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 terhadap Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019	II – 61
Tabel 3.1	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi dan Kabupaten Pangandaran	III – 1
Tabel 3.2	PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah)	III – 5
Tabel 3.3	PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2021 (Juta Rupiah)	III – 6
Tabel 3.4	Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2020	III – 9
Tabel 3.5	Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2020	III – 10
Tabel 3.6	Indikator Kemiskinan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017-2020	III – 11
Tabel 3.7	Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dan 2021	III – 11
Tabel 3.8	Pertumbuhan Perekonomian Global	III – 13
Tabel 3.9	Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran.....	III – 15
Tabel 3.10	Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Sektor.....	III – 16
Tabel 3.11	Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa barat Tahun 2020-2021	III – 19
Tabel 3.12	Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	III – 21
Tabel 3.13	Persentase Distribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	III - 22
Tabel 3.14	Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran	III - 24
Tabel 3.15	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran	III – 27
Tabel 3.16	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran	III – 31
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pangandaran	III – 33
Tabel 4.1	Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV – 3
Tabel 4.2	Penjelasan Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021	IV – 10
Tabel 5.1	Daftar Prioritas Rencana Program dan Kegiatan Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021	V - 2



Tabel 6.1	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Pangandaran Capaian Tahun 2019 dan Target Tahun 2021	VI - 1
Tabel 6.2	Proyeksi Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021	VI - 2



DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

			Halaman
Gambar	1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I - 8
Gambar	2.1	Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran.	II - 2
Gambar	2.2	Peta Topografi Kabupaten Pangandaran	II - 3
Gambar	2.3	Peta Kelas Lereng Kabupaten Pangandaran	II - 5
Gambar	2.4	Peta Geologi Kabupaten Pangandaran	II - 7
Gambar	2.5	Peta Hidrologi Kabupaten Pangandaran	II - 8
Gambar	2.6	Peta Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran	II - 9
Gambar	2.7	Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran	II - 10
Gambar	2.8	Peta Sebaran Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran	II - 11
Gambar	2.9	Peta Sebaran Potensi Gerakan Tanah Kabupaten Pangandaran	II - 12
Gambar	2.10	Peta Sebaran Potensi Rawan Banjir Kabupaten Pangandaran	II - 13
Gambar	2.11	Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran	II - 13
Gambar	2.12	Peta Data Penggunaan Lahan Kabupaten Pangandaran	II - 15
Grafik	2.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran dan Tahun 2017 - 2019	II - 27
Grafik	3.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 - 2021	III - 7
Gambar	3.1	Proyeksi Infrastruktur Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2021	III - 19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP. Penyusunan RKPD merupakan tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Dengan demikian, maka substansi RKPD mengacu kepada RPJM Daerah, RPJP Daerah, RPJM Nasional serta RKP.

RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan tahapan meliputi persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Prinsip-prinsip dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 meliputi:

1. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
4. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.



Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, menggunakan pendekatan:

1. **teknokratik**, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
2. **partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
3. **politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok pokok pikiran yang berasal dari DPRD;
4. **atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan *top-down* (atas-bawah) dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah dan juga arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, dalam penyusunan RKPD Tahun 2021, menggunakan pendekatan:

1. **holistik-tematik**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
2. **integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah; dan
3. **spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan, terkait pengembangan kawasan berbasis kewilayahan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan dan kecamatan.

Sesuai Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dengan seluruh pendekatan perencanaan yang ditunjang penerapan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi yang dikeluarkan / disusun oleh Kemendagri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), maka RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian daerah, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen RKPD memiliki substansi rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan



langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan Rancangan APBD, sehingga memiliki konsekuensi bahwa rencana kerja program, dan kegiatan dalam RKPD harus benar-benar terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.

Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Kabupaten Pangandaran untuk pengembangan dan pembangunan menuntut dilakukannya proses penyatuan persepsi dan aspirasi tentang prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi secara optimal kepada kebutuhan nyata masyarakat, sehingga diharapkan dapat diidentifikasi isu-isu strategis, masalah-masalah mendasar, prioritas program dan kegiatan, serta fokus pembangunan yang perlu dilakukan secara bertahap dalam upaya pencapaian visi daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD diharapkan tidak lagi memuat daftar panjang usulan kegiatan Perangkat Daerah, akan tetapi dapat lebih bersifat *SMART* dalam arti Spesifik (*Spesific*), Terukur (*Measurable*), dapat dicapai (*Achievable*), memperhatikan ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan tepat waktu (*Time*). Disamping itu, nilai keberlanjutan dalam pelaksanaan pembangunan penting untuk diwujudkan, agar dapat mencapai dan mempertemukan kebutuhan antar ruang dan waktu sekaligus menuntaskan upaya pemecahan masalah secara integral dan komprehensif. RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 juga disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sehingga, RKPD diharapkan dapat memberikan arah yang tepat, akurat dan benar-benar menopang kebutuhan pembangunan ditengah terbatasnya kemampuan anggaran Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2021 telah memasuki periode perencanaan pembangunan daerah tahun terakhir dengan visi **“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”** sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2021, diarahkan pada upaya **“Pemantapan Capaian RPJMD 2016-2021, Mewujudkan Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia Menuju Pembangunan Berkesinambungan”**. Fokus/tema ini mengarahkan pada pencapaian janji politik dan visi misi Kepala Daerah pada periode terakhir RPJMD serta melanjutkan program unggulan daerah untuk pelayanan dasar.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 74);
34. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 79);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan



- Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3);
41. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70);
42. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

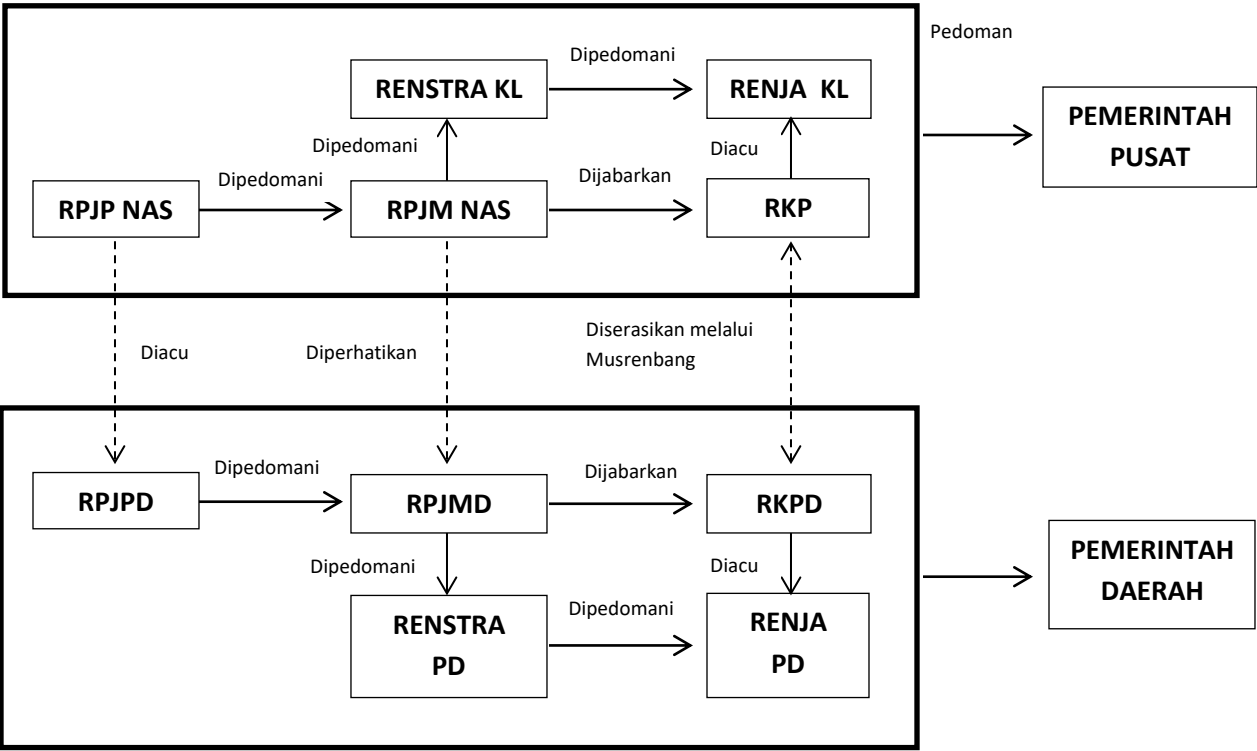
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD yang telah disepakati untuk digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja PD.

Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan. Oleh karenanya, substansi RKPD Tahun 2021 harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Secara substansif RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Nasional, RPJMD Kabupaten Pangandaran, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional, serta dokumen-dokumen perencanaan lainnya di tingkat kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1.4.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya merupakan dokumen perencanaan daerah selama satu tahun disusun untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan serta untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran mampu melaksanakan bersama-sama dengan masyarakat.

1.4.2 Tujuan



Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 adalah:

1. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021;
2. Menetapkan strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan Tahun 2021;
3. Memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2021;
4. Menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
5. Menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS serta RAPBD Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2021.

1.5. Sistematika Penyusunan RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan dokumen RKPD Tahun 2021 yang mencakup latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD serta maksud dan tujuan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2019.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memuat penjelasan tentang perkiraan kondisi ekonomi Tahun 2020 dan Tahun 2021, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan ekonomi daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat Daerah dan Nasional, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, serta usulan Perangkat Daerah.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, sinkronisasi prioritas pembangunan Nasional dan Daerah, rencanan pendukung alternatif pendanaan pembangunan dan rencana program dan kegiatan Tahun 2021.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menguraikan tentang Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama, Penetapan Indikator dan Target Kinerja Kunci dari berbagai aspek yaitu aspek



kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.



BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Kondisi Geografi

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat yang baru ditetapkan pada tahun 2012 berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012. Kabupaten Pangandaran terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Barat dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Cilacap).

Kabupaten Pangandaran memiliki Ibu Kota Kabupaten di Kecamatan Parigi, dengan cakupan wilayah terdiri atas 10 Kecamatan dan 93 Desa. Luas wilayah Kabupaten Pangandaran kurang lebih 1.133,7 Km², dengan distribusi luasan untuk masing-masing kecamatan seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Luas Administratif Kecamatan di Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Parigi	111,2	10	53	122	399
2	Cijulang	94,3	7	38	90	253
3	Cimerak	190,2	11	51	99	357
4	Cigugur	117,8	7	39	64	200
5	Langkaplancar	205,5	15	66	115	413
6	Mangunjaya	31,9	5	28	47	233
7	Padaherang	112,7	14	60	142	442
8	Kalipucang	104,2	9	29	80	290
9	Pangandaran	75,5	8	33	89	343
10	Sidamulih	90,4	7	33	67	258
	Jumlah	1.133,7	93	430	915	3.188

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

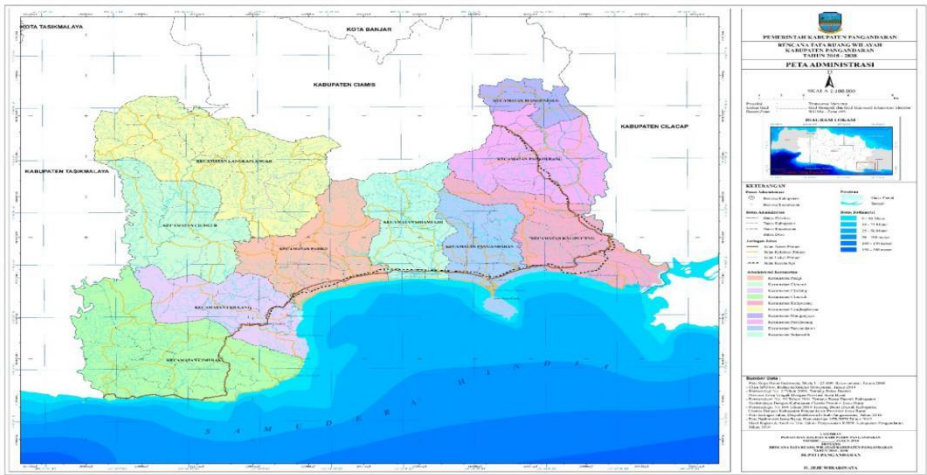
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, batas administratif wilayah Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Secara lebih detail, berikut adalah peta batas administratif Kabupaten Pangandaran yang menunjukkan batas Kabupaten dan batas Kecamatan.

Gambar 2.1

Peta Batas Administratif Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

B. Kondisi Topografi

Kabupaten Pangandaran berada pada ketinggian antara 0 – 1.000 m di atas permukaan laut (dpl). Elevasi Kabupaten Pangandaran cenderung semakin tinggi dari arah selatan ke utara kecuali bagian barat pesisir yang wilayahnya perbukitan karst. Kondisi masing-masing kecamatan tercantum dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2

Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran

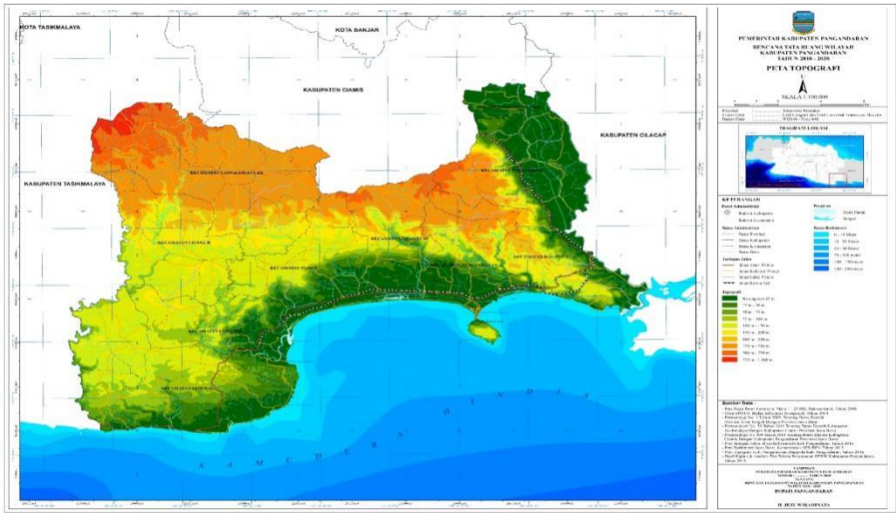
No	Kecamatan	Kondisi Tofografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	• Kondisi geografis: bagian selatan dominan pesisir bertebing curam dan ke bagian utara merupakan perbukitan kapur. • Ketinggian: 3-80 mdpl dengan daerah dataran rendah atau pantai.
2	Cijulang	• Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. • Ketinggian: 2-185 mdpl dengan daerah dataran rendah/pantai.
3	Cigugur	• Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir melainkan perbukitan dan dataran tinggi. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Cigugur relatif sama antara 200-500 mdpl.
4	Langkaplancar	• Wilayah ini merupakan dataran tertinggi di Kabupaten Pangandaran. • Ketinggian wilayah di Kecamatan Langkaplancar relatif sama antara 400-1.000 mdpl.
5	Parigi	• Ketinggian wilayah bervariasi antara 5-500 mdpl • Desa yang berada di dataran rendah yakni Desa Parigi, Karangjaladri, Cibenda, Karangbenda dan Ciliang.

No	Kecamatan	Kondisi Tofografi Kabupaten Pangandaran
6	Sidamulih	- Merupakan kecamatan yang berada di daerah pesisir pantai. - Ketinggian: 3-250 mdpl dengan daerah dataran tingginya yakni desa Kersaratu dan Kalijati.
7	Pangandaran	- Merupakan daerah pesisir pantai, merupakan ODTW Nasional dan memiliki Cagar Alam yang dilindungi. - Ketinggian: 3-500 mdpl.
8	Kalipucang	- Ketinggian wilayah bervariasi antara 2-400 mdpl, dengan desa yang berada di dataran tinggi yakni Desa Ciparakan (400 mdpl) dan Emplak (160 mdpl). - Daerah lainnya merupakan dataran rendah berkisar antara 2-8 mdpl.
9	Padaherang	- Wilayah ini bukan pesisir. - Ketinggian wilayah di Kecamatan Padaherang bervariasi antara 13-600 mdpl. - Daerah yang berada di dataran tinggi yakni Desa Panyutran (600 mdpl) dan Bojongsari (245 mdpl). - Sedangkan daerah lainnya merupakan dataran yang relatif sama berkisar antara 13-24 mdpl.
10	Mangunjaya	- Wilayah ini merupakan daerah bukan pesisir. - Ketinggian wilayah di Kecamatan Mangunjaya relatif sama antara 13-17 mdpl.

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

Sebagai gambaran topografi wilayah Kabupaten Pangandaran seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018



Jika dilihat dari kondisi atau tingkat kemiringan lerengnya, Kabupaten Pangandaran memiliki kemiringan lereng yang bervariasi antara 0% hingga lebih dari 40%. Kemiringan lereng yang besar terdapat di daerah perbukitan dan terdapat gawir sesar di bagian tengah timur Kabupaten Pangandaran yang memanjang arah tenggara-barat laut sehingga kemiringan lerengnya sangat curam. Kondisi masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Kondisi Kemiringan Lereng Kabupaten Pangandaran

No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
1	Cimerak	Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%.
2	Cijulang	- Kemiringan lereng merata pada hampir semua desa dengan Kemiringan lereng sekitar 5% - 15%. - Sebagian kecil wilayah di Desa Kertayasa dan Margacinta memiliki kemiringan lereng 15% - 25%.
3	Cigugur	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Harumandala dan Pagerbumi.
4	Langkaplancar	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian besar Desa Jayasari, Pangkalan, Bojongkondang, Bangunjaya, Langkaplancar, dan Cimanggu.
5	Parigi	- Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan Kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Selasari.
6	Sidamulih	- Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Kalijati, Sidamulih, dan Kersaratu.
7	Pangandaran	- Kemiringan lereng bervariasi antara 2% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil Desa Pagergunung dan Sukahurip.
8	Kalipucang	- Kemiringan lereng bervariasi antara 5% - lebih dari 40%. - Wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 40% terdapat di sebagian kecil wilayah Desa Putrapinggian.
9	Padeherang	- Kemiringan lereng bervariasi antara 0% - 40%. - Wilayah pada bagian timur jalan provinsi hampir merata memiliki kemiringan lereng 0% - 8%.

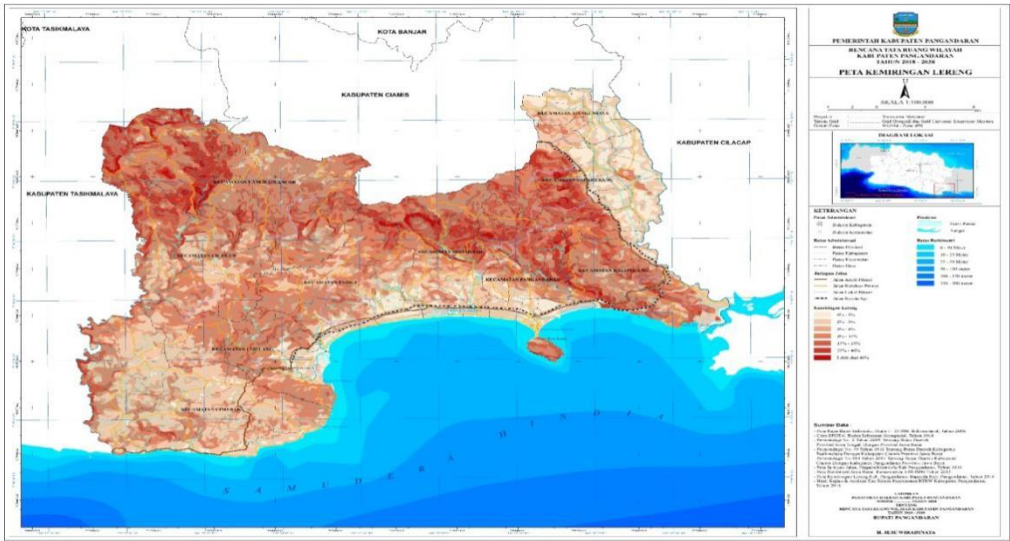


No	Kecamatan	Kondisi Topografi Kabupaten Pangandaran
		Wilayah pada bagian barat jalan provinsi memiliki Kemiringan lereng yang bervariasi antara 8% - lebih dari 40%.
10	Mangunjaya	Kemiringan lereng merata hampir pada seluruh desa dengan kisaran kemiringan lereng antara 0% - 5%.

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

Wilayah dengan kemiringan lereng >40% perlu dipertahankan tanaman tegakannya, karena jika ditebang akan berpotensi menimbulkan bencana longsor apabila tidak dikelola dengan baik. Gambaran sebaran topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.3
Peta Kelas Lereng Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

C. Kondisi Geologi

Menurut kondisi geologinya, Kabupaten Pangandaran merupakan daratan yang terbentuk pada periode tersier kecuali pada pantai yang landai merupakan daratan baru yang terbentuk akibat endapan laut yang berumur holosen. Kontrol struktur geologi sangat kuat di daerah ini. Di bagian tengah - timur terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara - barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa.

Satuan geologi yang terdapat di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dalam lingkungan tertentu, diantaranya:

- Satuan Geologi Lingkungan Dataran: Satuan berupa dataran dengan kemiringan lereng <5%. Ketinggian antara 0 - 50 m di atas permukaan air laut. Melampar di pesisir pantai antara Pangandaran - Parigi - Cijulang dan Kalipucang.
- Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Terjal: Kemiringan lereng >25%, ketinggian antara 100 - 700 m di atas permukaan laut, tersusun oleh breksi, batu pasir, batuan beku, batu gamping, dan tufa. Melampar dibagian tengah memanjang kearah Barat Daya Tenggara dan sebagian kecil di Bukit Pananjung membagi dua bagian zona pemisah air. Yang paling banyak dijumpai yaitu di Kecamatan Langkaplancar.
 - Perbukitan Terjal Padaherang-Kalipucang

- Tanah lapukan berupa lempung pasir-an-kerikilan, pasir lempungan, tebal berkisar antara 10 - 50 cm, daya dukung sedang-tinggi, agak kompak-kompak, permeabilitas sedang, porositas sedang. Muka air tanah berkisar antara 3 - 10 m, debit sumur gali <5 l/detik. Mata air debit <10 l/detik. Kualitas air tanah baik, jernih, tidak bau, warna air agak kekuningan.
 - Longsoran mudah terjadi pada bukit terjal daya dukung tinggi kompak dan keras. Peruntukan ruang sebaiknya untuk pengembangan hutan produksi dan yang lebih baik adalah untuk hutan lindung atau sebagai konservasi lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan baik pula untuk pengembangan komoditas perkebunan tanaman keras atau tanaman tahunan sebagai penguat tanah yang akan mengurangi gerakan tanah. Jalur jalan Kalipucang - Pangandaran bertumpu pada batuan yang kurang stabil. Sumber bahan galian terdiri atas batu belah lempung sebagai bahan bata merah, tras, dan tanah urug serta batu kapur.
- b. Perbukitan Terjal Pananjung
- Saat ini merupakan cagar alam dan hutan lindung untuk kepentingan pelestarian alam sekaligus sebagai obyek wisata. Fungsi kawasan lindung sangat baik yang berfungsi sebagai daerah resapan.
3. Satuan Geologi Lingkungan Perbukitan Karst (Batu Gamping): Merupakan morfologi yang khas batu gamping, batu gamping pasir-an, permukaan kasar dan kemiringan lereng curam. Morfologi ini melampar cukup luas di sekitar Pangandaran-Cujulang-Parigi hingga Cimerak dan meluas ke utara yaitu Padaherang-Kalipucang, dan penting sebagai daerah resapan. Debit air mata air >50 l/detik. Tanah lapukan umumnya berupa lempung berkerikil yang sangat subur untuk budidaya pertanian pada lahan kering. Ketebalan umumnya <1 m daya dukung sedang sampai dengan tinggi. Badan jalan yang bertumpu pada batuan ini sering terjadi jalan yang amblas, karena jenis batuan ini sangat labil. Adapun jenis batuan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Jenis Batuan di Kabupaten Pangandaran

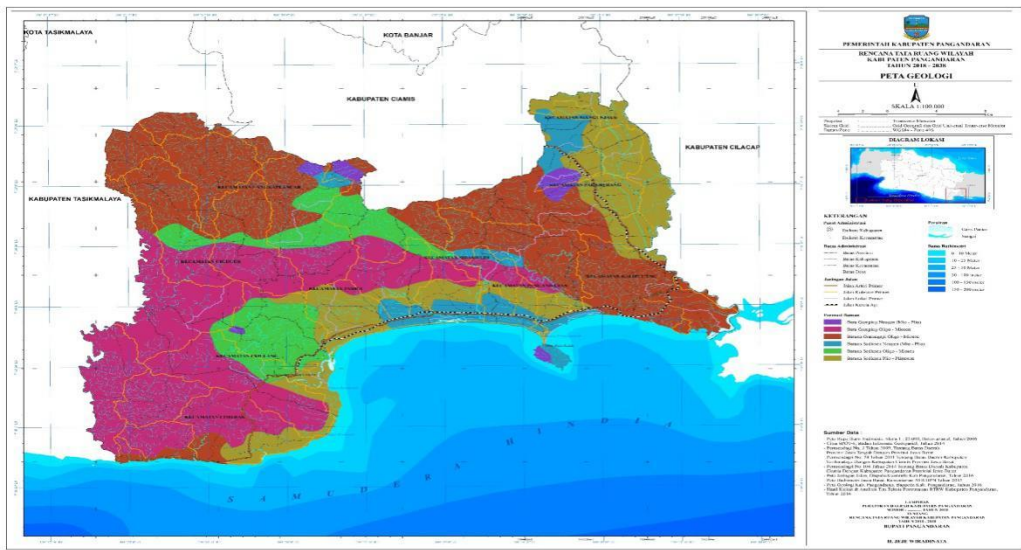
No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping Neogen (Mio - Plio)	1.649,77
2	Batu Gamping Oligo - Miosen	35.296,43
3	Batuan Gunungapi Oligo - Miosen	37.349,30
4	Batuan Sedimen Neogen (Mio - Plio)	6.869,57
5	Batuan Sedimen Oligo - Miosen	11.800,95
6	Batuan Sedimen Plio - Plistosen	20.358,12
Grand Total		113.324,15

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

Peta sebaran geologi di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

D. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh satu sungai besar, yaitu sungai Citanduy yang merupakan muara bagi beberapa sungai kecil dengan muara terakhir sungai Citanduy ini adalah Sagara Anakan. Sungai Citanduy ini mengalir dari Panumbangan sampai Kalipucang. Kabupaten Pangandaran berada dalam 2 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Ciwulan-Cilaki, dan DAS Citanduy. Luasan masing-masing DAS yang tercakup dalam wilayah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Pangandaran

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	DAS Ciwulan - Cilaki	91.250,39
2	DAS Citanduy	22.074,72
Grand Total		113.325,11

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

Hidrologi di Kabupaten Pangandaran dibedakan dalam 2 estimasi produktivitas air tanah, yaitu:

1. Akuifer dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir. Akuifer dengan produktivitas air sangat tinggi dengan kedalaman 10 meter terdapat pada fisiografi perbukitan bergelombang (lereng 15-40%). Komposisi litologi merupakan vulkan yang terdiri dari breksi gunung berapi, lava dan tufa, batu pasir, pasir tufaan, batu lanau, batu lempung sisipan lignit dan konglomerat. Akuifer ini terdapat di Kecamatan Pangandaran dan Parigi.
2. Akuifer dengan aliran melalui celahan, rekahan dan saluran. Akuifer ini terdapat dengan produktivitas sangat besar mencapai 10-100 liter/detik. Terdapat pada fisiografi datar bergelombang dengan komposisi litologi alivium terdiri dari lempung, lanau, pasir dan kerikil. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Cijulang dan Cimerak.

Air tanah dangkal di Kabupaten Pangandaran di kawasan pantai berasal langsung dari peresapan air hujan. Muka air tanah sangat bervariasi berkisar antara

gembur hingga agak teguh, warna coklat merah hingga kuning. Penyebarannya di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300-1000 meter, batuan induk dari *tuff*, material vulkanik, breksi batuan beku intrusi.

Jenis tanah podsol merah kuning merupakan tanah mineral yang telah berkembang, solum (kedalaman) dalam, tekstur lempung hingga berpasir, struktur gumpal, konsistensi lekat, bersifat agak asam (pH kurang dari 5.5), kesuburan rendah hingga sedang, dan peka erosi. Tanah tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih dari 2.500 mm/tahun. Luasan jenis tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:

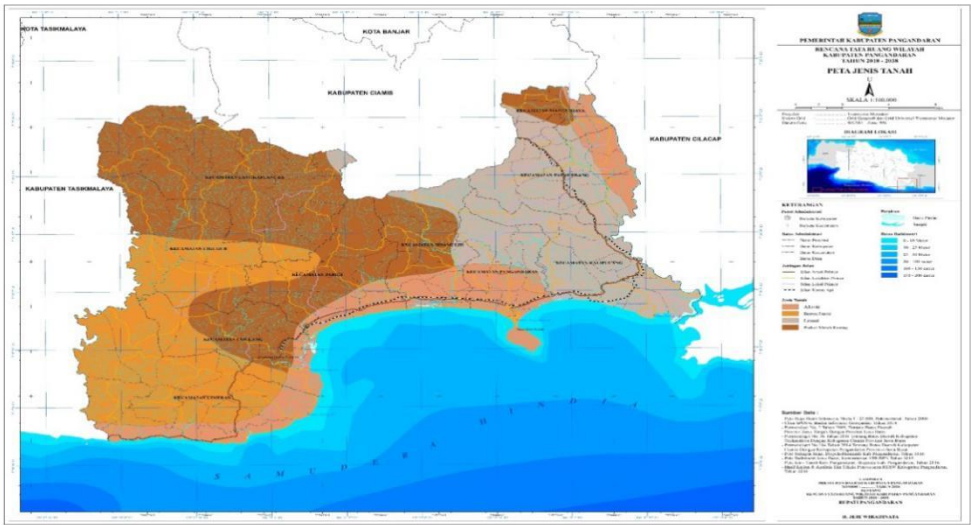
Tabel 2.6
Jenis Tanah di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Alluvial	17.789,60
2	Brown Forest	26.458,61
3	Latosol	25.848,21
4	Podsol Merah Kuning	43.228,93
Grand Total		113.325,35

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

Peta sebaran jenis tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.6
Peta Jenis Tanah Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

F. Kondisi Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam sering terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Beberapa jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran antara lain tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Tsunami rawan terjadi karena wilayah selatan Kabupaten Pangandaran berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, sementara banjir sering terjadi karena wilayah Kabupaten Pangandaran dilewati sungai besar dengan debit air yang cukup tinggi. Gempa bumi juga rawan terjadi karena terdapat patahan-patahan di wilayah Kabupaten Pangandaran, sementara bencana longsor dapat terjadi akibat jenis tanah

yang memang rawan dan kelerengan terjal di beberapa tempat di Kabupaten Pangandaran.

1. Rawan Bencana Gempa Bumi Tektonik dan Tsunami

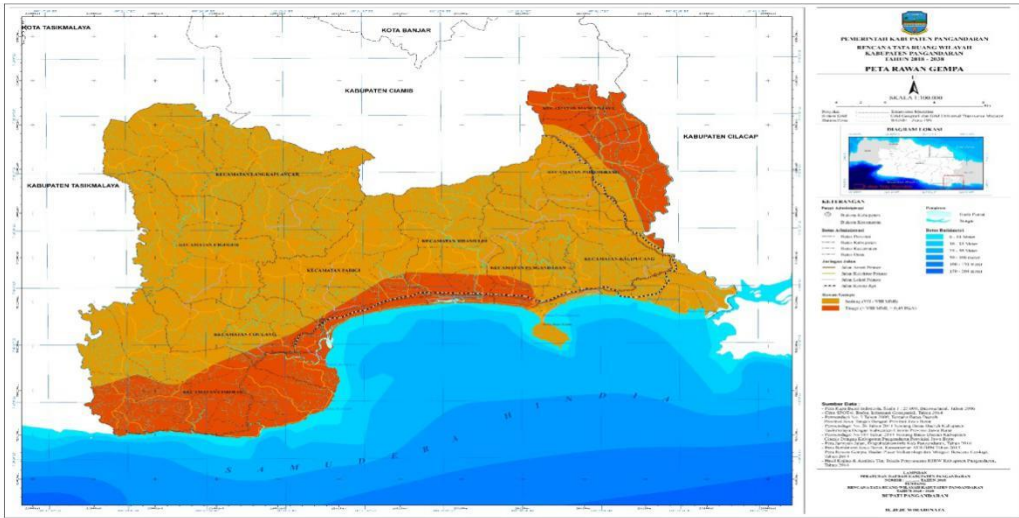
Di bagian tengah-timur Pangandaran terdapat patahan yang memanjang sepanjang perbukitan dengan arah tenggara-barat laut. Di daerah ini juga banyak dijumpai adanya lipatan-lipatan batuan sehingga kontrol geologi sangat berperan besar di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan daerah ini rawan gempa. Letak Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan berbatasan langsung dengan laut mengakibatkan Kabupaten Pangandaran juga sangan rawan terkena bencana tsunami. Pantai Pangandaran yang berbentuk teluk dan memanjang dengan kemiringan lereng yang landai menjadi semacam “kantung tsunami” sehingga kawasan pesisirnya rawan bencana tsunami. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan gempa dan tsunami:

Tabel 2.7
Luasan Potensi Gempa di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Gempa	Luas (Ha)
1	MMI. VII - VIII	84.879,54
2	MMI. > VII	28.445,56
Grand Total		113.325,10

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

Gambar 2.7
Peta Sebaran Potensi Gempa Kabupaten Pangandaran



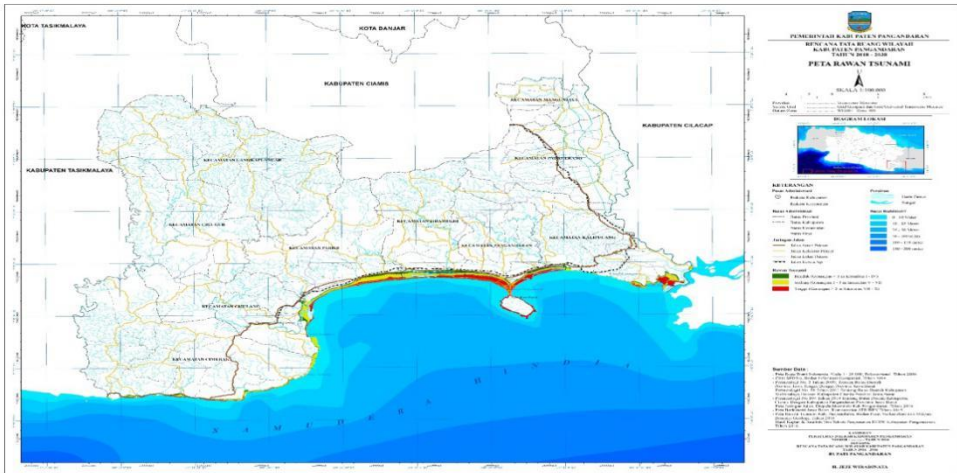
Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

Tabel 2.8
Luasan Potensi Tsunami di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Tsunami	Luas (Ha)
1	Zona Rawan Rendah Total	691,25
2	Zona Rawan Menengah Total	1.148,45
3	Zona Rawan Tinggi Total	1.425,42
Grand Total		3.265,12

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

Gambar 2.8
Peta Sebaran Potensi Tsunami Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

2. Rawan Bencana Gerakan Tanah

Kondisi tanah yang tidak stabil dan kemiringan lereng yang besar mengakibatkan daerah perbukitan Pangandaran rawan bencana gerakan tanah. Curah hujan tinggi serta alih fungsi lahan di daerah perbukitan juga menjadi faktor penyebab meningkatnya potensi gerakan tanah. Daerah perbukitan dengan kemiringan lereng yang besar sebaiknya dikelola dan dikonservasi dengan baik. Dengan adanya kawasan-kawasan yang rawan gerakan tanah, berarti lahan permukiman harus berada pada tingkat kemiringan lereng yang rendah. Potensi gerakan tanah di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel berikut:

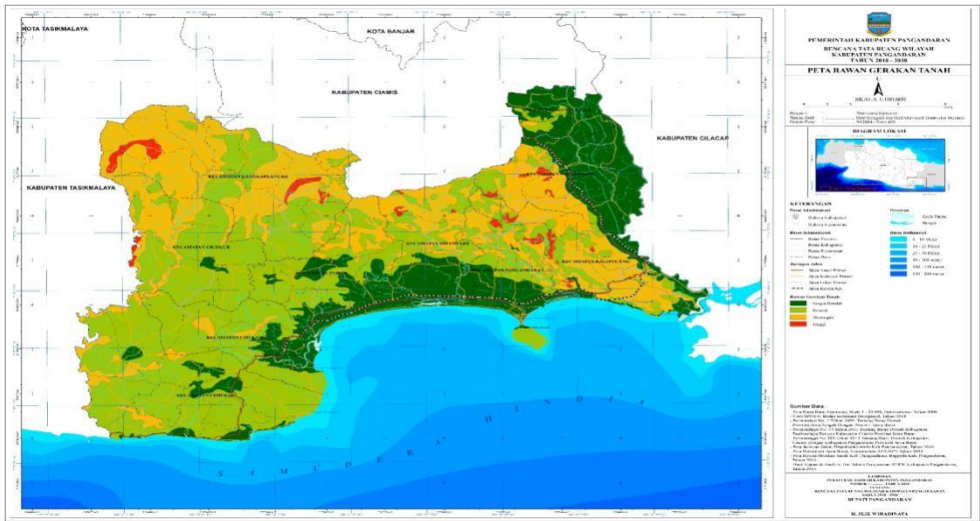
Tabel 2.9
Luasan Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
1	Sangat Rendah	25.774,32
2	Rendah	51.309,74
3	Menengah	34.519,48
4	Tinggi	1.721,57
Grand Total		113.325,11

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018



Gambar 2.9
Peta Sebaran Potensi Gerakan Tanah Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

3. Rawan Bencana Banjir

Wilayah Kabupaten Pangandaran yang berupa dataran rendah merupakan hasil proses pengendapan material laut dan sungai sehingga sesuai kodrat alam, daerah yang dekat dengan sungai merupakan daerah dataran banjir yang selalu tergenang jika debit air sungai meningkat. Dataran banjir ini adalah daerah yang cukup subur namun tidak dapat dikembangkan secara maksimal. Berikut adalah luasan wilayah Kabupaten Pangandaran yang rawan banjir:

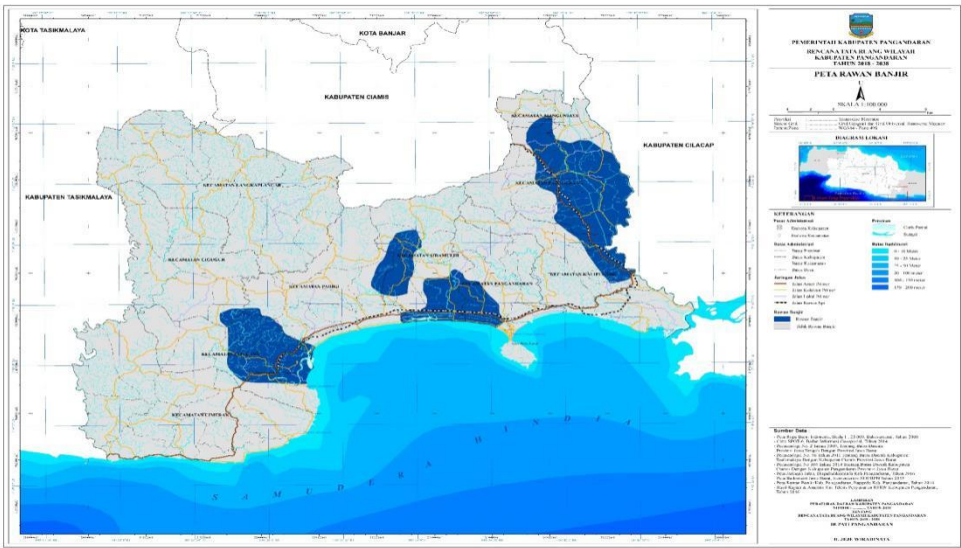
Tabel 2.10
Luasan Potensi Bencana Banjir di Kabupaten Pangandaran

No	Kerawanan Banjir	Luas (Ha)
1	Tidak Rawan Banjir	95.144,98
2	Rawan Banjir	18.180,35
Grand Total		113.325,33

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018



Gambar 2.10
Peta Sebaran Potensi Rawan Banjir Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

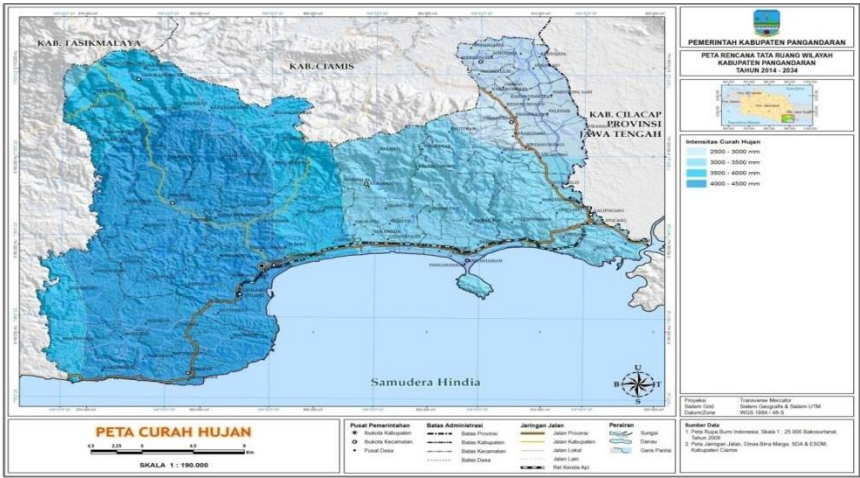
G. Kondisi Klimatologi/Iklim

Kabupaten Pangandaran beriklim tropis basah (*humid tropical climate*), dimana menurut hasil studi data sekunder, iklim dan cuaca itu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

- 1. Pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal circulation pattem*),
- 2. Topografi regional yang datar sampai bergunung di bagian selatan Jawa Barat, dan
- 3. Elevasi topografi dengan curah hujan yang cukup tinggi rata-rata setiap tahun berkisar antara 2.589 mm dengan suhu rata-rata 25 - 30⁰ C, dimana suhu tertinggi terletak pada daerah yang mendekati pantai wilayah timur serlatan Kabupaten Pangandaran.

Adapun Gambaran sebaran sebaran curah hujan dapat dilihat pada peta di bawah ini:

Gambar 2.11
Peta Curah Hujan Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018



H. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran sangat bervariasi, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Kabupaten yang cukup ramai perkembangan penduduknya. Penggunaan lahan terbesar yaitu penggunaan untuk perkebunan yaitu seluas 556,2 Km² atau 40,06%, kedua untuk semak belukar yaitu seluas kurang lebih 105,9 Km² atau sekitar 9,34%, yang berikutnya penggunaan untuk permukiman seluas 103,8 atau sekitar 9,15% dari total penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran. Untuk lebih rinci penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

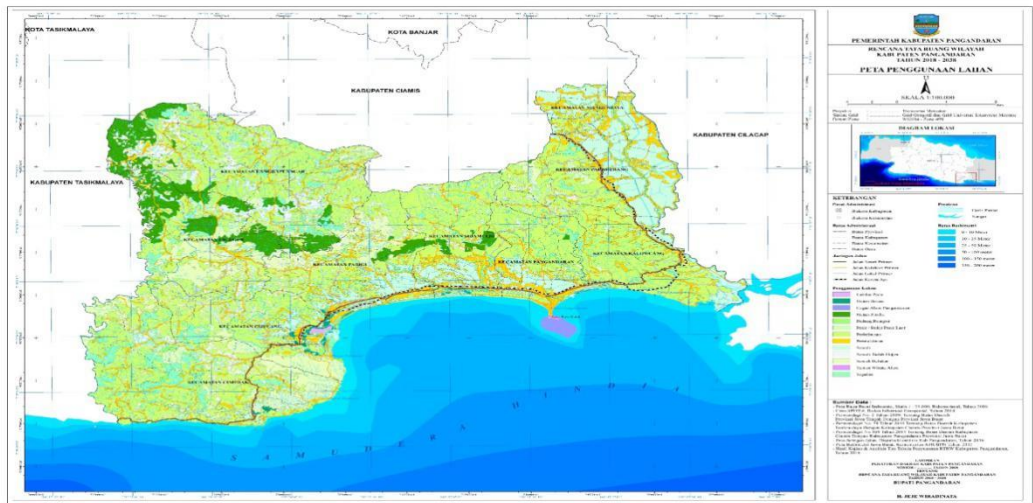
Tabel 2.11
Penggunaan Lahan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2014

Penggunaan Lahan	Luas (Km ²)
Air Danau / Situ	0,1
Air Empang	0,3
Air Kanal	0,2
Air Rawa	1,7
Bandara Nusawiru	0,9
Cagar Alam Pangandaran	4,7
Hutan Bakau	3,8
Hutan Rimba	73,1
Landas Pacu Lainnya	0,1
Padang Rumput	3,3
Pasir / Bukit Pasir Laut	2,8
Perkebunan	556,2
Permukiman	103,8
Sawah	128
Sawah Tadah Hujan	82,1
Semak Belukar	105,9
Sungai	11,4
Taman Wisata Alam	0,3
Tegalan	55
Total	1133,7

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

Adapun sebagai gambaran sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.12
Peta Data Penggunaan Lahan Kabupaten Pangandaran



Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pangandaran, 2018

I. Kondisi Demografi

1. Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Dalam konteks penduduk sebagai potensi SDM, mengandung arti bahwa penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Oleh sebab itu, perkembangan penduduk harus diarahkan pada peningkatan kualitas, pengendalian kuantitas, serta pengarahan mobilitasnya, mempunyai ciri dan karakteristik yang menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan data jumlah penduduk hasil pencatatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran tahun 2019 semester 1 yaitu sebanyak 422.615 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 211.220 orang dan perempuan sebanyak 211.395 orang. Angka sex rasio sebesar 99,92% yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang hampir sama atau seimbang.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Jumlah (KK)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Parigi	22.234	22.931	45.165	16.911
2	Cijulang	13.685	14.316	28.001	10.802
3	Cimerak	24.233	24.228	48.461	17.248
4	Cigugur	11.502	11.218	22.720	8.056
5	Langkaplancar	25.930	25.230	51.160	17.567
6	Mangunjaya	16.503	16.483	32.986	11.448
7	Padaherang	34.525	34.579	69.104	24.239
8	Kalipucang	19.364	19.271	38.635	13.499
9	Pangandaran	28.737	28.502	57.239	19.469
10	Sidamulih	14.507	14.637	29.144	10.808
Jumlah		211.220	211.395	422.615	150.047

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangandaran, Semester 1 Tahun 2019

2. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk ini dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Pada tahun 2019, penyebaran penduduk Kabupaten Pangandaran bervariasi antar kecamatan, mulai dari yang terendah sebesar 233,53 jiwa per km² yaitu di Kecamatan Cigugur dan kepadatan penduduk terendah kedua yaitu Kecamatan Kalipucang dengan tingkat kepadatan 282,46 jiwa per km². Sedangkan kepadatan penduduk tertinggi yaitu di Kecamatan Pangandaran dengan kepadatan 941,90 jiwa per km² dan tertinggi kedua yaitu di Kecamatan Padaherang dengan kepadatan 774,10 jiwa per km². Berikut ini gambaran luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran tahun 2019.

Tabel 2.13
Persentase Penyebaran Penduduk Per Kecamatan di
Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Parigi	111,2	45.165	406,160
2	Cijulang	94,3	28.001	296,935
3	Cimerak	190,2	48.461	254,789
4	Cigugur	117,8	22.720	192,869
5	Langkaplancar	205,5	51.160	248,953
6	Mangunjaya	31,9	32.986	1034.044
7	Padaherang	112,7	69.104	613,168
8	Kalipucang	104,2	38.635	370,777
9	Pangandaran	75,5	57.239	758,132
10	Sidamulih	90,4	29.144	322,389
Jumlah		1133,7	422.615	372,775

Sumber:
¹Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038
²Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangandaran, Semester 1 Tahun 2019

Jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 0,5% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dari tahun ketahun pada akhirnya akan memperluas lahan hunian dan mengurangi lahan usaha bagi penduduk itu sendiri. Indikator ini dapat ditunjukkan dari kepadatan penduduk Kabupaten Pangandaran yaitu dari 413 orang/km² pada tahun 2018 menjadi 418 orang/km² pada tahun 2019.

3. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk juga dapat dilihat dari perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Perbandingan tersebut didefinisikan sebagai rasio jenis kelamin atau sex rasio. Untuk lebih jelasnya nilai perbandingan sex rasio penduduk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 seperti pada tabel di bawah:

Tabel 2.14
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
1	Parigi	22.234	22.931	96,96
2	Cijulang	13.685	14.316	95,59
3	Cimerak	24.233	24.228	100,02
4	Cigugur	11.502	11.218	102,53
5	Langkaplancar	25.930	25.230	102,77
6	Mangunjaya	16.503	16.483	100,12
7	Padaherang	34.525	34.579	99,84
8	Kalipucang	19.364	19.271	100,48
9	Pangandaran	28.737	28.502	100,82
10	Sidamulih	14.507	14.637	99,11
Jumlah		211.220	211.395	99,92

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangandaran, Semester 1 Tahun 2019

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin ini sangat penting artinya untuk melihat keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan akan mempengaruhi kondisi dari sosial dan ekonomi rumah tangga serta keberlangsungan reproduksi. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Pangandaran tahun 2019 adalah 99,92%. Artinya jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Pangandaran lebih sedikit dari penduduk perempuan walaupun perbedaannya sangat sedikit sekali yaitu sekitar 175 orang.

Apabila ditinjau dari tingkat kepadatan penduduk pada setiap Kecamatan, maka konsentrasi penduduk paling banyak terpusat di Kecamatan Padaherang, Pangandaran, Langkaplancar, Cimerak dan Parigi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran. Dari indikator kepadatan penduduk tersebut dapat menunjukkan bentuk penyebaran penduduk, apakah tersebar merata atau tidak, yang dapat dijadikan sebagai gambaran kemampuan daerah dalam memberikan daya dukung berupa sarana atau prasarana dan daya tampung terhadap penduduk.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dan kepadatan penduduk diantaranya:

- a. Faktor fisiografis, bahwa penduduk selalu memilih tempat tinggal yang baik, strategis, tanah subur, relief baik, cukup air dan daerah aman.
- b. Faktor biologi, karena adanya perbedaan tingkat kematian, tingkat kelahiran dan angka perkawinan.
- c. Faktor kebudayaan dan teknologi, bahwa daerah yang masyarakatnya maju, pola berfikirnya bagus, dan keadaan pembangunan fisiknya maju, maka akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan daerah terbelakang.

Permasalahan lain terkait dengan kependudukan yaitu, masalah urbanisasi yang menyebabkan penduduk perkotaan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Intensitas mobilitas penduduk yang semakin tinggi tentu saja akan menuntut jaringan prasarana yang semakin baik dan luas yang dapat berdampak

secara jangka panjang terhadap perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan adanya keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan untuk mengantisipasi meningkatnya urbanisasi, diantaranya melalui peningkatan pembangunan infrastruktur perdesaan. Penduduk merupakan objek sasaran pembangunan sekaligus sebagai subjek pelaku pembangunan yang turut berperan dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Potensi dan tantangan pembangunan daerah turut ditentukan oleh keadaan riil kependudukan dan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Oleh karenanya pembangunan daerah harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral dari seluruh kebijakan pembangunan yang dilakukan. Komposisi jumlah penduduk berdasarkan struktur usia mulai dari usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas, komposisi ini menggambarkan angka beban ketergantungan (*dependency ratio*), hal tersebut dapat menggambarkan makin banyak jumlah penduduk yang produktif makin rendah angka ketergantungannya dan sebaliknya. Untuk lebih jelasnya angka komposisi penduduk di Kabupaten Pangandaran tahun 2019 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.15

Struktur Usia Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No	Struktur Usia	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	00 - 04	12.408	11.576	23.984
2	05 - 09	16.896	15.394	32.290
3	10 - 14	17.130	16.216	33.346
4	15 - 19	15.196	14.623	29.819
5	20 - 24	16.718	16.156	32.874
6	25 - 29	15.780	14.953	30.733
7	30 - 34	14.139	13.960	28.099
8	35 - 39	14.857	15.184	30.041
9	40 - 44	13.985	15.200	29.185
10	45 - 49	15.046	16.235	31.281
11	50 - 54	14.424	15.839	30.263
12	55 - 59	13.283	14.085	27.368
13	60 - 64	10.715	10.734	21.449
14	65- 69	8.735	8.209	16.944
15	70 - 74	5.060	5.464	10.524
16	>75	6.848	7.567	14.415
Jumlah		211.220	211.395	422.615

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangandaran, Semester 1 Tahun 2019

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di antaranya terlihat pada komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 ke atas) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) karena semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya serta mengembangkan kemampuan pada segala bidang.

Tabel di bawah ini menyajikan angka beban ketergantungan penduduk. Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Pangandaran sebanyak 291.112 orang atau setara 68,88%, sedangkan usia tidak produktif 131.503 orang atau setara 31,12% dari jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran.



Tabel 2.16
 Angka Beban Ketergantungan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
 di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Usia Produktif	Usia Tidak Produktif		Dependency Ratio
		(15 - 64)	0 - 14	65+	
1	Laki-laki	144.143	46.434	20.643	46,43
2	Perempuan	146.969	43.186	21.240	43,18
Laki-laki + Perempuan		291.112	89.620	41.883	45,17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangandaran, Semester 1 Tahun 2019

Tampak angka beban tanggungan telah kurang dari 50%. Hal ini berarti telah memasuki periode bonus demografi. Bila bonus demografi dimanfaatkan secara baik maka akan membuka *window of opportunity* atau kesempatan untuk mempercepat roda ekonomi menjadi lebih besar karena berlimpahnya penduduk usia produktif. Namun, bila periode bonus demografi tersebut tidak termanfaatkan maka bukan *window of opportunity* yang diperoleh tetapi yang ada bencana sosial. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas bisa jadi meningkat. Bonus demografi yang disertai pembangunan manusia akan memberi dampak besar bagi kemajuan daerah. Usia produktif secara bersama-sama menggerakkan roda ekonomi. Hal ini dapat berdampak pada pengangguran berkurang dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Pada akhirnya, puncak bonus demografi dan produktivitas penduduk diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

Tersedianya lapangan kerja akan mencegah sumber daya manusia berpendidikan tinggi mencari dan pindah ke Kabupaten lain. Semakin banyak sumber daya manusia berkualitas tinggal di daerahnya maka keberhasilan pembangunan manusia semakin kentara.

Terkait dengan besarnya angka ketergantungan akan mengurangi keluasan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turun dan naiknya angka IPM.

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) suatu daerah, makin banyak jumlah penduduk yang bersekolah dan menamatkan pendidikannya maka akan mendongkrak nilai IPM suatu daerah. Untuk lebih jelasnya struktur pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 2.17
 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Blm Tamat SD/ Sede- rajat	SD/ Sede- rajat	SLTP/ Sede- rajat	SLTA/ Sede- rajat	D I & D II	D III	S I	S II	S III	Jumlah
1	Parigi	8.810	3.141	17.739	7.039	6.040	343	379	1.547	121	6	45.165
2	Cijulang	6.221	1.723	10.885	4.246	3.576	182	233	864	68	3	28.001
3	Cimerak	10.965	3.191	22.869	7.072	3.400	133	141	655	35	0	48.461
4	Cigugur	5.173	1.734	10.579	3.065	1.621	106	62	368	11	1	22.720

No	Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Blm Tamat SD/ Sede- rajat	SD/ Sede- rajat	SLTP/ Sede- rajat	SLTA/ Sede- rajat	D I & D II	D III	S I	S II	S III	Jumlah
5	Langkaplancar	8.937	4.717	23.635	9.591	3.241	189	102	713	35	0	51.160
6	Mangunjaya	6.966	2.066	14.207	5.632	3.220	131	172	560	30	2	32.986
7	Padaherang	17.447	4.732	28.119	10.815	6.148	226	338	1.208	66	5	69.104
8	Kalipucang	9.106	2.752	16.514	5.754	3.595	104	163	607	35	5	38.635
9	Pangandaran	13.909	4.081	18.825	9.359	8.869	270	441	1.379	99	7	57.239
10	Sidamulih	6.588	2.226	12.820	3.720	2.891	118	176	571	31	3	29.144
Jumlah		94.122	30.363	176.192	66.293	42.601	1.802	2.207	8.472	531	32	422.615

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangandaran, Semester 1 Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang telah menamatkan pendidikan sampai jenjang pendidikan strata 1, 2 dan 3 sebanyak 9.035 orang atau setara dengan 2,13% dari jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran, tingkat Diploma sebesar 0,95%, SLTA/Sederajat sebesar 15,68% dan SLTP/Sederajat sebesar 41,69% dan SD/Sederajat sebesar 7,18%. Hal tersebut menggambarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangandaran mulai meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 94.122 orang atau 22,27%.

5. Jumlah Penduduk yang Bekerja

Dalam bidang ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun, sehingga angka pengangguran dapat dikurangi dengan semakin banyaknya angka pengangguran yang tersalurkan pada lapangan kerja yang tersedia.

Dalam bidang ketenagakerjaan, indikator kesempatan kerja (*demand for labour*) merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan/lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif sebagai sumber daya manusia. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Tabel 2.18
Data Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Belum/Tidak Bekerja	70.697	59.255	129.952	30,75



No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
2	Mengurus Rumah Tangga	35	87.974	88.009	20,82
3	Pelajar/Mahasiswa	15.011	12.602	27.613	6,53
4	Pensiunan	1.601	763	2.364	0,56
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2.305	1.704	4.009	0,95
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	141	2	143	0,03
7	Kepolisian RI (POLRI)	203	4	207	0,05
8	Perdagangan	1.854	1.265	3.119	0,74
9	Petani/Pekebun	43.638	24.286	67.924	16,07
10	Peternak	76	18	94	0,02
11	Nelayan/Perikanan	2.334	33	2.367	0,56
12	Industri	117	13	130	0,03
13	Konstruksi	28	4	32	0,01
14	Transportasi	161	-	161	0,04
15	Karyawan Swasta	5.518	2.070	7.588	1,80
16	Karyawan BUMN	336	42	378	0,09
17	Karyawan BUMD	52	20	72	0,02
18	Karyawan Honorer	1.239	1.487	2.726	0,65
19	Buruh Harian Lepas	12.919	2.031	14.950	3,54
20	Buruh Tani/Perkebunan	15.109	6.925	22.034	5,21
21	Buruh Nelayan/Perikanan	896	47	943	0,22
22	Buruh Peternakan	61	20	81	0,02
23	Pembantu Rumah Tangga	5	389	394	0,09
24	Tukang Cukur	34	-	34	0,01
25	Tukang Listrik	25	1	26	0,01
26	Tukang Batu	152	2	154	0,04
27	Tukang Kayu	672	-	672	0,16
28	Tukang Sol Sepatu	9	1	10	0,00
29	Tukang Las/Pandai Besi	90	1	91	0,02
30	Tukang Jahit	481	331	812	0,19
31	Tukang Gigi	5	-	5	0,00
32	Penata Rias	3	41	44	0,01
33	Penata Busana	-	2	2	0,00
34	Penata Rambut	6	7	13	0,00
35	Mekanik	330	1	331	0,08
36	Seniman	60	17	77	0,02
37	Tabib	6	-	6	0,00
38	Paraji	1	74	75	0,02
39	Perancang Busana	2	-	2	0,00
40	Penterjemah	4	1	5	0,00
41	Imam Masjid	118	-	118	0,03
42	Pendeta	2	1	3	0,00
43	Wartawan	16	-	16	0,00
44	Ustadz/Mubaligh	279	41	320	0,08



No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Orang		Jumlah	Persentase (%)
		Laki-Laki	Perempuan		
45	Juru Masak	1	7	8	0,00
46	Bupati	1	-	1	0,00
47	Wakil Bupati	1	-	1	0,00
48	Anggota DPRD Prov.	3	-	3	0,00
49	Anggota DPRD Kab/Kota	25	5	30	0,01
50	Dosen	15	11	26	0,01
51	Guru	383	560	943	0,22
52	Pengacara	3	-	3	0,00
53	Notaris	2	1	3	0,00
54	Arsitek	4	-	4	0,00
55	Akuntan	1	-	1	0,00
56	Konsultan	10	3	13	0,00
57	Dokter	24	26	50	0,01
58	Bidan		198	198	0,05
59	Perawat	59	71	130	0,03
60	Apoteker	6	9	15	0,00
61	Penyiar Radio	1	2	3	0,00
62	Pelaut	47	-	47	0,01
63	Peneliti	4	-	4	0,00
64	Sopir	1.250	1	1.251	0,30
65	Pialang	4	1	5	0,00
66	Paranormal	3	-	3	0,00
67	Pedagang	3.180	2.769	5.949	1,41
68	Perangkat Desa	956	178	1.134	0,27
69	Kepala Desa	67	3	70	0,02
70	Wiraswasta	28.516	6.050	34.566	8,18
71	Pekerjaan Lainnya	23	25	48	0,01
Jumlah		211.220	211.395	422.615	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pangandaran, Semester 1 Tahun 2019

Masih relatif tingginya jumlah yang belum dan atau tidak bekerja mengindikasikan bahwa usia yang masih belum siap bekerja (anak-anak) dan angkatan kerja yang cukup besar kurang lebih sebesar 30,75% dari total penduduk Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut menggambarkan yang masuk pada usia kerja masih belum terserap secara maksimal oleh sektor-sektor produksi, sebagai akibat lapangan pekerjaan yang masih kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang masih rendah. Oleh karenanya, upaya peningkatan kualitas SDM bagi penduduk menjadi mutlak terus difungsikan, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Karena investasi pada “*human capital*” ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Pangandaran.

Peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus harus dilakukan sebagai upaya penanggulangan pengangguran di Kabupaten Pangandaran. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya pemberian pelatihan terhadap pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Perluasan kesempatan kerja masih tetap menjadi perhatian pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan



pemberian kerja sementara di desa (padat karya) dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ditunjukkan dengan pertumbuhan PDRB, Laju Inflasi, PDRB Perkapita, Indeks Gini dan Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan serta Indeks Pembangunan Manusia

1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pangandaran

Secara kuantitatif, struktur ekonomi Kabupaten Pangandaran dapat digambarkan dengan nilai persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara keseluruhan pencapaian kinerja PDRB pada periode tahun 2016 - 2019 mengalami kecenderungan yang meningkat.

Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 11,322 Trilyun, meningkat sebesar Rp. 956,782 Milyar atau 9,23% dari tahun 2018 sebesar Rp. 10,366 Trilyun. Keadaan ini menggambarkan peningkatan yang cukup signifikan dari nilai produk barang yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 - 2019. Kendati demikian, perkembangan tersebut belum dapat dijadikan sebagai indikator dari peningkatan volume produk barang atau jasa di wilayah Kabupaten Pangandaran, karena pada besaran PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku masih terkandung nilai inflasi pada tahun 2019 yang sangat mempengaruhi harga barang/jasa secara umum.

Untuk menganalisis perkembangan dari volume produk barang/jasa umumnya digunakan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan. PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 - 2019 juga menunjukkan angka yang meningkat. Pada tahun 2019 PDRB atas dasar harga konstan yaitu sebesar Rp. 7,750 Trilyun atau meningkat sebesar Rp. 435,66 Milyar atau sekitar 5,95% dari tahun 2018 sebesar Rp. 7,315 Trilyun. Kondisi tersebut merupakan indikasi quantum (volume) produk barang/jasa secara umum mengalami peningkatan atau perekonomian Kabupaten Pangandaran secara makro berkembang positif selama periode dua tahun terakhir.

Tabel 2.19
PDRB Kabupaten Pangandaran berdasarkan
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016 - 2019 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2016		2017		2018		2019*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Primer	2.436.591,33	27,7	2.624.841,25	27,9	2.899.245,00	27,97	3.127.421,26	27,62
1	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	2.370.588,61	26,98	2.564.116,09	27,28	2.836.506,50	27,36	3.065.084,73	27,07
2	Pertambangan dan Penggalian	66.002,72	0,75	60.725,16	0,65	62.738,50	0,61	62.336,53	0,55
II	Skunder	1.186.640,53	13,5	1.265.092,29	13,5	1.404.869,00	13,55	1.555.056,31	13,73
1	Industri Pengolahan	425.430,96	4,84	455.736,42	4,85	501.953,75	4,84	540.706,07	4,78
2	Pengadaan Listrik dan Gas	5.779,10	0,07	7.143,72	0,08	7.577,50	0,07	7.973,87	0,07



No	Uraian	2016		2017		2018		2019*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
3	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	971	0,01	1.241,62	0,01	1.453,65	0,01	1.671,50	0,01
4	Konstruksi	754.459,47	8,59	800.970,53	8,52	893.884,10	8,62	1.004.704,87	8,87
III	Tersiaer	5.163.238,00	58,8	5.510.946,59	58,6	6.061.905,40	58,48	6.640.324,03	58,65
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.844.943,35	21	1.919.316,14	20,42	2.085.532,10	20,12	2.283.410,53	20,17
2	Transportasi dan Pergudangan	1.038.908,84	11,82	1.144.391,53	12,17	1.234.672,00	11,91	1.318.347,07	11,64
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	725.822,00	8,26	823.303,32	8,76	932.137,30	8,99	1.060.116,39	9,36
4	Informasi dan Komunikasi	143.409,22	1,63	146.819,49	1,56	158.387,80	1,53	166.214,79	1,47
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	177.684,76	2,02	185.383,36	1,97	201.704,20	1,95	208.116,75	1,84
6	Real Estate	233.808,67	2,66	242.240,22	2,58	269.483,80	2,60	298.425,31	2,64
7	Jasa Perusahaan	86.580,16	0,99	89.165,02	0,95	100.791,00	0,97	124.320,39	1,10
8	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	302.912,83	3,45	297.238,41	3,16	314.157,00	3,03	316.297,03	2,79
9	Jasa Pendidikan	465.782,86	5,3	501.889,01	5,34	584.416,30	5,64	658.673,62	5,82
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	19.154,93	0,22	20.887,63	0,22	23.070,40	0,22	25.668,68	0,23
11	Jasa lainnya	124.230,38	1,41	140.312,46	1,49	157.553,50	1,52	180.733,47	1,60
Produk Domestik Regional Bruto		8.786.469,86	100	9.400.880,12	100	10.366.019,40	100	11.322.801,61	100

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019

*) Angka Sementara

Sampai dengan tahun 2019, sektor andalan atau sektor yang memberi sumbangan terbesar didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 2019 sektor pertanian memberikan sumbangan nilai tambah sebesar Rp. 3,065 Trilyun atau mengalami peningkatan sebesar Rp. 228,578 Milyar yang dihitung atas dasar harga berlaku. Sektor pertanian apabila dihitung atas dasar harga konstan tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 58,66 Milyar dari tahun 2018, dimana pada tahun 2019 mencapai Rp. 1,814 Trilyun Rupiah.

Sektor pertanian mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan sektor lainnya terutama Perdagangan, Hotel dan Restoran, sehingga tidaklah mengherankan jika wilayah/daerah yang didominasi oleh sektor pertanian cenderung pertumbuhan ekonominya sangat lamban. Kendati demikian, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat tahan terhadap gejolak moneter yang ada, ini terbukti pada masa krisis, sektor pertanian merupakan penyanggah perekonomian di Indonesia pada umumnya. Dari sisi kontribusi nilai tambah terhadap PDRB atas dasar harga berlaku, sektor



pertanian pada tahun 2019 mencapai sebesar 23,41% sedikit mengalami penurunan, sektor pertanian pada tahun 2018 mencapai sebesar 24,01%, Tingginya peranan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Pangandaran banyak disumbang oleh subsektor tanaman bahan makanan, diikuti oleh subsektor lainnya, yaitu subsektor perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Namun apabila ditelaah lebih dalam, pada tahun 2016 - 2019 kontribusi nilai tambah di sektor pertanian cenderung semakin menurun, kendati terjadi peningkatan relatif lambat. Kondisi tersebut dapat disebabkan mengingat peningkatan nilai tambah dari sektor lainnya terjadi secara lebih cepat. Pada sisi lain, saat ini luas lahan pertanian cenderung terus mengalami penurunan karena peningkatan jumlah penduduk berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman. Apabila dipahami secara lebih luas kondisi tersebut telah memberikan suatu sinyal negatif terhadap hasil pembangunan karena salah satu indikator kemajuan negara berkembang adalah terjadinya pergeseran dari struktur ekonomi berbasis pertanian ke sektor lainnya.

Disamping pertanian, sektor yang memiliki kontribusi cukup dominan adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dimana pada tahun 2019 sektor Perdagangan Besar dan Eceran mampu menciptakan nilai tambah atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 2,283 Trilyun dengan kontribusi sebesar 20,17%, atau mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 2,085 Trilyun pada tahun 2018. Sementara atas dasar harga konstan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran pada tahun 2019 mencapai nilai Rp. 1,761 Trilyun atau meningkat 6,14% dari sebesar Rp. 1,659 Trilyun pada tahun 2018.

Kondisi tersebut merupakan indikasi dari peningkatan volume barang/jasa yang diperdagangkan di wilayah Kabupaten Pangandaran. Tingginya peranan sektor perdagangan terhadap perekonomian didominasi oleh sumbangan dari subsektor perdagangan besar dan eceran yang diikuti peranan subsektor hotel dan restoran. Pada dasarnya, subsektor Hotel dan Restoran di Kabupaten Pangandaran memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh, karena banyak lokasi pariwisata di Kabupaten Pangandaran yang dapat dikembangkan untuk skala nasional, atau bahkan sampai skala internasional. Namun dalam pengembangannya saat ini masih mengalami beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan sarana infrastruktur serta masih minimnya dukungan dari investor lokal maupun internasional dalam menanamkan investasinya di Kabupaten Pangandaran.

Disisi lain, sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, secara umum peranannya masih relatif rendah, dari periode 2016 - 2019 mengalami kenaikan nilai tetapi besarnya relatif sedikit. Pada tahun 2019 sektor industri atas dasar harga berlaku memberikan nilai tambah sebesar Rp.540,706 Milyar dengan kontribusi sebesar 4,78%, mengalami peningkatan sebesar 7,72% dari tahun 2018 yaitu sebesar Rp.501,953 Milyar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan nilai tambah dari sektor industri pengolahan secara bertahap akan mampu merubah struktur ekonomi di Kabupaten Pangandaran.

Tabel 2.20
PDRB Kabupaten Pangandaran
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016 - 2019 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2016		2017		2018		2019*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Primer	1.721.274,90	26,07	1.755.912,29	25,3	1.805.430,08	24,68	1.862.812,68	24,03
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.673.506,70	25,35	1.708.073,40	24,61	1.756.167,48	24,01	1.814.827,54	23,41
2	Pertambangan dan Penggalian	47.768,30	0,72	47.838,89	0,69	49.262,60	0,67	47.985,14	0,62



No	Uraian	2016		2017		2018		2019*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
II	Skunder	916.010,80	13,87	974.003,08	14	1.052.110,82	14,38	1.137.587,97	14,68
1	Industri Pengolahan	319.440,00	4,84	334.658,36	4,82	359.440,30	4,91	382.886,81	4,94
2	Pengadaan Listrik dan Gas	5.063,20	0,08	5.034,94	0,07	5.203,35	0,07	5.385,28	0,07
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	792,70	0,01	848,55	0,01	927,57	0,01	1.015,78	0,01
4	Konstruksi	590.714,90	8,95	633.461,23	9,13	686.539,60	9,39	748.300,10	9,65
III	Tersier	3.965.447,20	60,06	4.209.721,44	60,7	4.457.722,52	60,94	4.750.523,59	61,29
1	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.508.278,60	22,84	1.582.035,47	22,8	1.659.822,40	22,69	1.761.761,54	22,73
2	Transportasi dan Pergudangan	713.781,00	10,81	753.014,05	10,85	792.580,72	10,83	847.203,25	10,93
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	550.439,20	8,34	597.494,33	8,61	646.846,00	8,84	706.084,90	9,11
4	Informasi dan Komunikasi	124.673,90	1,89	139.436,59	2,01	152.124,70	2,08	166.235,40	2,14
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	135.917,20	2,06	140.246,91	2,02	146.516,80	2,00	147.995,66	1,91
6	Real Estate	181.243,70	2,74	198.090,22	2,85	217.208,60	2,97	238.268,97	3,07
7	Jasa Perusahaan	63.266,60	0,96	68.585,44	0,99	74.774,70	1,02	81.706,32	1,05
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	229.507,20	3,48	231.680,49	3,34	231.860,80	3,17	231.985,70	2,99
9	Jasa Pendidikan	332.155,90	5,03	360.851,17	5,2	385.327,60	5,27	404.745,11	5,22
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15.288,30	0,23	16.567,67	0,24	17.922,30	0,24	19.402,16	0,25
11	Jasa lainnya	110.895,80	1,68	121.719,10	1,75	132.737,90	1,81	145.134,58	1,87
Produk Domestik Regional Bruto		6.602.733,00	100	6.939.636,80	100	7.315.263,42	100	7.750.924,24	100

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019
 *) Angka Sementara

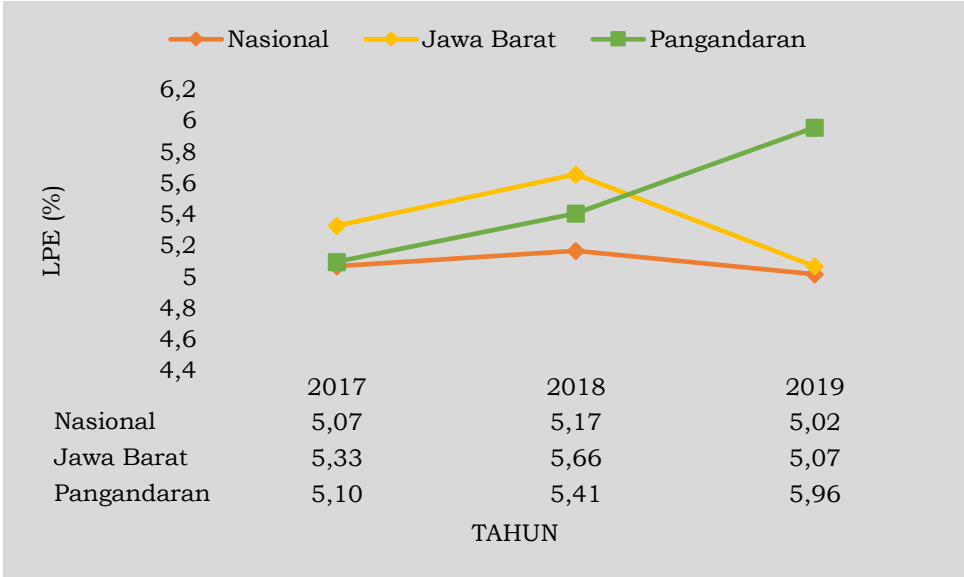
Berdasarkan Tabel 2.20 dapat diketahui bahwa perekonomian Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki kecenderungan kontribusi yang menurun disebabkan adanya peralihan lapangan usaha dari sektor pertanian ke sektor lain diantaranya jaja-jasa. Perkembangan pariwisata saat ini belum berdampak besar terhadap sektor industri pengolahan di Kabupaten Pangandaran.

2. Laju Inflasi



Sejalan dengan terus membaiknya aktivitas ekonomi di beberapa sektor PDRB tersebut, sedikit banyak berdampak pula pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran. Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat diketahui dari nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 2.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran
Tahun 2017 - 2019



Sumber: BPS Jawa Barat dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa LPE Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat, sedangkan pada tahun 2019 berada di atas LPE Provinsi Jawa Barat. Namun jika dilihat berdasarkan tren LPE Kabupaten Pangandaran nilainya konsisten meningkat dari tahun 2017 sebesar 5,10% menjadi 5,96% di tahun 2019. Jika dibandingkan Nasional, LPE Kabupaten Pangandaran dalam tiga tahun terakhir berada di atas LPE Nasional.

3. Laju Inflasi

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dipakai untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan di suatu daerah, secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan produksi yang terjadi disuatu daerah. Perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat pula dari kemampuan daya beli masyarakat. Kemampuan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh laju inflasi dan pendapatan penduduk. Data inflasi Kabupaten Pangandaran tahun 2018 berada pada kisaran 3,24% yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang berada di tingkat 3,56%.

Fluktuasi kenaikan harga komoditas bahan kebutuhan pokok relatif sering terjadi sepanjang tahun 2018 terutama kebutuhan bahan makanan pokok. Untuk melihat inflasi di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2018, dapat terlihat berdasar pada tabel Data Inflasi Kabupaten Pangandaran di bawah ini:

Tabel 2.21
Nilai Inflasi Kabupaten Pangandaran Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*
1	Inflasi Kabupaten Pangandaran	3,29	3,45	3,56	3,24	-
2	Inflasi Provinsi Jawa Barat	2,73	2,75	3,63	3,54	3,21

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis dan BPS Provinsi Jawa Barat, 2019

*) Angka Sementara

Di Provinsi Jawa Barat, BPS secara rutin menghitung inflasi di 7 kota (biasa disebut kota Indeks Harga Konsumen). Kota-kota tersebut yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Namun demikian ada pula kabupaten/kota lain yang menghitung inflasi, diantaranya Kabupaten Ciamis. Sedangkan Kabupaten Pangandaran belum tersedia data inflasi tahun 2019 karena tidak ada survei harga konsumen secara rutin, maka inflasi di Kabupaten Pangandaran dapat didekati dengan inflasi kabupaten/kota yang kondisi perekonomiannya mirip. Apabila angka inflasi di Kabupaten Pangandaran tahun 2019 didekati dengan angka inflasi di Kabupaten Ciamis, maka inflasinya sekitar 1,49%. Angka inflasi ini jauh lebih kecil dibandingkan angka inflasi tahun 2018. Hal ini berarti harga-harga cukup stabil atau tidak terjadi lonjakan harga-harga selama tahun 2019. Inflasi yang terkendali tersebut tetap memberi gairah pada perekonomian yang dibuktikan dengan naiknya Laju Pertumbuhan Ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat Kabupaten Pangandaran.

4. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 - 2019 terus meningkat. Pada tahun 2019, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) meningkat yaitu sebesar Rp. 28.357.764,-. angka ini mengalami peningkatan sebesar Rp.2.259.177,- atau 8,66% dari Rp. 26.098.587,- pada tahun 2018. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dari Rp. 18.417.681,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 19.412.058,- pada tahun 2019. Walaupun terjadi peningkatan, indikator tersebut belum sepenuhnya dapat digunakan untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Hal itu disebabkan PDRB per kapita dihitung atas dasar harga berlaku, sehingga tingkat inflasi perlu dipertimbangkan karena turut mempengaruhi daya beli masyarakat. Pada sisi lain, pola distribusi pendapatan regional Kabupaten Pangandaran perlu pula dievaluasi untuk menggambarkan mengenai sejauhmana tingkat pemerataan daya beli masyarakat. Namun demikian, pendapatan per kapita yang dipresentasikan oleh PDRB per Kapita dapat menggambarkan nilai produk yang dihasilkan di wilayah Pangandaran per penduduk selama satu tahun. Selain itu, dapat pula diartikan sebagai tingkat produktivitas penduduk di Kabupaten Pangandaran dan dapat merefleksikan tingkat pendapatan per penduduk di Kabupaten Pangandaran. PDRB Perkapita Kabupaten Pangandaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22
PDRB Perkapita Tahun 2016 - 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*
1	PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (Rp.)	22.106.728	23.793.793,20	26.098.587	28.357.764
2	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (Rp.)	16.618.599,29	17.560.000	18.417.681	19.412.058

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019

*) Angka Sementara



5. Indeks Gini

Gini Ratio merupakan angka yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah secara menyeluruh. Pemerataan perekonomian daerah dapat dilihat dari tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang sering diukur dengan koefisien gini dan persentase kemiskinan. Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Data gini ratio Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.23
Gini Ratio Data Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019*
Gini Ratio	0,33	0,35	0,34	-

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019
*) Angka Sementara

Adapun Gini Ratio Kabupaten Pangandaran pada tahun 2018 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Hal tersebut menggambarkan terdapat penurunan kesenjangan, akan tetapi penurunan tersebut relatif kecil atau bisa dikatakan secara umum tingkat ketimpangan antar kelompok relatif sama selama tahun 2017 dan 2018.

6. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran selama 4 tahun terakhir (tahun 2016 sampai tahun 2019) mengalami penurunan. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran menunjukkan kinerja yang cukup baik, setiap tahun persentase penduduk miskin semakin turun. Penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran turun dari 32.190 orang pada tahun 2018 menjadi 30.730 orang pada tahun 2019. Secara persentase, penduduk miskin Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 sebesar 7,71%, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 8,12%.

Tabel 2.24
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019*
1	Jumlah (orang)	40.140	39.460	32.190	30.730
2	Persentase (%)	10,23	10	8,12	7,71

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019
*) Angka Sementara

B. Fokus Kesejahteraan Sosial

IPM merupakan salah satu indikator yang menjadi Target Kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021, untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, dengan target pada akhir periode RPJMD yaitu sebesar 67,42 poin. Pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan seluruh warga masyarakat Kabupaten Pangandaran, yang didukung oleh seluruh anggota DPRD, secara umum telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan angka capaian IPM pada tahun 2019 sebesar 68,21



poin. Berdasarkan angka capaian tersebut telah melebihi angka target capaian akhir RPJMD yaitu sebesar 67,42 poin.

Capaian Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 sebesar 68,21, angka ini telah mencapai kategori “Sedang”. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 ini mengalami peningkatan dari 67,44 pada tahun 2018 menjadi sebesar 68,21 pada tahun 2019.

Meskipun angkanya bergerak perlahan, kondisi ini menjadi indikasi adanya peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang ditunjang oleh pembangunan tiga sektor utama yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang ekonomi.

Tabel 2.25

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran dan Komponennya Tahun 2016 - 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019*
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,79	66,6	67,44	68,21
Indeks Pendidikan	56,96	57,98	58,71	59,07
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.02	11,99	12,04	12,06
Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	07.07	07.06	7,58	7,67
Indeks Kesehatan	77,54	77,78	78,22	78,65
Angka Harapan Hidup (tahun)	70,4	70,24	70,84	71,12
Indeks Pengeluaran/Daya Beli	64,49	65,48	66,81	68,32
Daya Beli Masyarakat (Rp.)	8.312.000	8.265.000	8.968.000	9.423.000

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019

*) Angka Sementara

Tabel 2.25 memperlihatkan berbagai komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran periode tahun 2016 - 2019. Pada bidang pendidikan terlihat bahwa Angka Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 mencapai angka 12,06 tahun atau meningkat 0,02 tahun dari tahun 2018 yang mencapai angka 12,04 tahun. Jarak dengan angka maksimal (standard UNDP/ *United Nation Development Programme* 18 tahun) semakin pendek. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) menunjukkan peluang seorang anak sejak usia 7 tahun akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah di umur yang sama saat itu mencapai 12,06 tahun dengan batas maksimum 18 tahun.

Untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS), ada peningkatan dari tahun 2018 sebesar 7,58 tahun menjadi 7,67 tahun pada tahun 2019. Peningkatannya hanya 0,09 poin atau sudah mencapai 51,13% dari angka maksimal (standard UNDP/ *United Nation Development Programme* 15 tahun/setara lulus Akademi/D III). Indikator itu menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Kabupaten Pangandaran telah menempuh pendidikan selama 7,67 tahun atau setara menduduki bangku kelas 1 (satu) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Dalam kaitannya dengan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun masih perlu mendapat perhatian utama dengan meminimalisir angka drop out sekolah, meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dan meningkatkan angka kelulusan siswa di setiap jenjang jika dihubungkan dengan pencapaian komponen pendidikan yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga perlu usaha merubah persepsi



masyarakat tentang sekolah, dimana banyak masyarakat yang beranggapan buat apa sekolah tinggi kalau nantinya tetap menjadi “kuli” atau menjadi “ibu rumah tangga saja” bagi seorang wanita. Pandangan seperti ini akan membatasi kemauan masyarakat terutama masyarakat yang ekonominya kurang mampu dalam menyekolahkan anaknya. Perlu juga disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini, melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan pendidikan yang lebih intensif seperti Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun.

Di bidang pendidikan, penuntasan buta huruf dan penurunan angka rawan drop out murid sekolah tetap mendapat prioritas utama, disamping terus melakukan pembangunan dan revitalisasi gedung-gedung sekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi murid secara berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat, beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai daya beli masyarakat, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mengatur penyediaan barang publik (alokasi), mengendalikan inflasi dan pengangguran (stabilisasi), melaksanakan pemerataan (keadilan sosial) atau distribusi pendapatan melalui upaya pengembangan usaha skala mikro untuk mendongkrak pendapatan masyarakat yang relatif tertinggal.

Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran mengalami perbaikan dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 meningkat 0,43 poin yaitu dari 78,22 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 78,65 tahun pada tahun 2019 atau sudah mencapai 92,53% dari angka maksimal (standard UNDP/*United Nation Development Programme* 85 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran terus mengalami perbaikan setiap tahunnya.

Di bidang kesehatan upaya peningkatan derajat kesehatan dilakukan dengan upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan balita secara bertahap, penanganan status gizi pada balita, yang akan berdampak positif terhadap angka harapan hidup penduduk, tentunya dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan. Dengan demikian, atas dasar uraian mengenai indeks kesehatan di Kabupaten Pangandaran tersebut, secara umum menjadi pembuktian keseriusan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan pembangunan kesehatan. Upaya ini sebagai wujud menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor penentu jalannya sasaran pembangunan melalui pembangunan kesehatan yang berkualitas dan merata, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Diantara tiga komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia adalah komponen peningkatan daya beli masyarakat yang paling berat. Indikator ini sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro yang fluktuatif apalagi jika ada kebijakan kenaikan BBM yang akan menekan daya beli masyarakat. Indeks daya beli ini mengalami peningkatan 1,33 poin yaitu dari sebesar 66,81 tahun 2018 menjadi sebesar 68,32 pada tahun 2019. Berdasarkan indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tadi terlihat bahwa pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pangandaran telah dilakukan sesuai dengan pengembangan strategi pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan penekanan pada pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan peningkatan sumber daya manusianya, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ini selaras dengan strategi pembangunan nasional.

Perbedaan perubahan kecepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam suatu periode untuk suatu kabupaten dapat dilihat dari angka “Laju Pertumbuhan”. Angka tersebut menunjukkan perbandingan yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi angka laju pertumbuhan, semakin cepat kenaikan Indeks



Pembangunan Manusia (IPM). Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bernilai pada kisaran antara 0 dan 100. Namun demikian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dicapai suatu daerah hampir tidak mungkin bernilai 100.

Tabel 2.26
Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran
dan Komponennya Tahun 2016 - 2019

Uraian	2016	2017	2018	2019*
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65,79	66,6	67,44	68,21
Indeks Pendidikan (IP)	56,96	57,98	58,71	59,07
Indeks Kesehatan (IK)	77,54	77,78	78,22	78,65
Indeks Pengeluaran/Daya Beli (IDB)	64,49	65,48	66,81	68,32
Laju Pertumbuhan IPM	-	1,23	1,26	1,14
Laju Pertumbuhan IP	-	1,79	1,26	0,61
Laju Pertumbuhan IK	-	0,31	0,57	0,55
Laju Pertumbuhan IDB	-	1,54	2,03	2,26

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019

**) Angka Sementara*

Angka Laju Pertumbuhan inilah yang dapat dipergunakan sebagai indikator perkembangan pembangunan manusia disuatu daerah. Dengan demikian, tantangan bagi masing-masing daerah adalah bagaimana cara memaksimalkan nilai Laju Pertumbuhan mereka (mendekatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperoleh sedekat-dekatnya dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM ideal).

Selanjutnya pada Tabel 2.26 diatas diperlihatkan kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran dan indeks komponennya dengan menggunakan Laju Pertumbuhan. Dengan melihat tersebut, tampak bahwa capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pangandaran pada periode tahun 2018 - 2019 laju pertumbuhan sebesar 1,14%, yang ditunjang oleh kinerja pada Indeks Pendidikan (IP) dengan laju pertumbuhan sebesar 0,61 serta juga ditunjang oleh kinerja pada Indeks Kesehatan sebesar 0,55 dan ditunjang pula oleh kinerja pada Indeks Daya Beli sebesar 2,26.

Dengan melihat kinerja perkembangan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* Kabupaten Pangandaran tersebut, masih ada yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan nilai *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* dan angka Laju Pertumbuhan agar bisa tercapai angka yang ideal, diantaranya dengan meningkatkan jumlah sarana dan prasarana kesehatan, meningkatkan sarana penunjang akses ke unit kesehatan dan ditunjang dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta ketersediaan tenaga medis/non medis terlatih, terutama bagi wanita hamil dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan ketika proses persalinan, penyuluhan tentang kesehatan balita, peningkatan gizi yang harus terpenuhi untuk ibu hamil (bumil) dan balita serta keluarga, penyuluhan akan arti pentingnya pola hidup bersih dan sehat serta memudahkan akses pelayanan kesehatan utamanya bagi penduduk yang kurang mampu. Dalam rangka peningkatan indeks kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah membuat program dibidang kesehatan diantaranya, Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis, Pembangunan Sarana Kesehatan (RSUD dan Puskesmas), dan pembagian insentif untuk tenaga kesehatan (untuk meningkatkan pelayanan kesehatan).



Program-program yang berhubungan dengan bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah menerapkan Program Pangandaran Hebat untuk mendongkrak indeks Pendidikan, namun demikian program tersebut masih kurang dan perlu ditingkatkan, meminimalisir angka drop out sekolah, meningkatkan angka melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi dan meningkatkan angka kelulusan siswa di setiap jenjang sehingga nantinya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pangandaran lebih mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Komponen daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan baik makanan maupun non makanan. Permasalahan pokok dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Pangandaran. Tentunya hal itu hanya bisa dilakukan dengan memberikan lapangan pekerjaan, atau memberikan kemudahan dalam hal akses ke pusat-pusat ekonomi, peningkatan kapasitas agar kemampuan ekonomi mereka meningkat juga pengendalian inflasi daerah agar harga-harga kebutuhan pokok tetap dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dari ketiga komponen pembangunan manusia memang komponen ini yang paling berat. Pemerintah Daerah harus tepat dalam memberikan intervensi program kepada masyarakat agar kebijakan yang diambil tidak meninabobokan masyarakat tapi membangun kemandirian ekonomi masyarakat sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mereka sendiri.

C. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin deras arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Pangandaran sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Pangandaran seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya dan perilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar, hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Kepemudaan dan olahraga pembinaan generasi muda dilaksanakan melalui penyelenggaraan upacara bendera, penyelenggaraan pemuda produktif, kegiatan pemuda pelopor. Untuk menunjang pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pangandaran mengusulkan kegiatan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 untuk pembangunan Pusat Budaya yang berlokasi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran dan kegiatan ini merupakan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2021.

Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan atlet berprestasi, pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), kegiatan lomba gerak jalan, bimbingan teknis personal, lomba senam dan kegiatan senam masal, tes kesegaran jasmani bagi SMP dan SMA, penyelenggaraan gerak jalan santai.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi



tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Data Indikator dan variabel aspek pelayanan umum berdasar data Kabupaten Pangandaran, yaitu terdiri atas:

A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sosial. Berikut ini disajikan beberapa analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan wajib pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional maupun daerah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan modal yang sangat berharga bagi pembangunan, SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan dibidang teknologi, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Tingkat pendidikan di suatu daerah dapat terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Angka Partisipasi Sekolah

Hasil analisis perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.27
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 - 2019

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI				
01.01	Jumlah murid usia 7-12 thn	32.798	35.394	34.941	35.288
01.02	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	36.069	36.798	37.555	40.211
01.03	APS SD/MI	90,93	96,18	93,04	87,76
2	SMP/MTs				
02.01	Jumlah murid usia 13-15 thn	12.731	17.350	14.963	12.821
02.02	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	18.528	18.528	19.253	19.173
02.03	APS SMP/MTs	68,71	93,64	77,72	66,87

Sumber: Disdikpora kabupaten Pangandaran, 2019

Tabel di atas menyatakan bahwa pada tahun 2019 APS untuk SD/MI adalah sebesar 87,76, hal ini menunjukkan dari setiap 100 penduduk usia 7-12 tahun terdapat 88 anak yang bersekolah di jenjang SD/MI. Kondisi ini sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2018 dengan APS SD/MI sebesar 93,04. Pada jenjang SMP/MTS APS pada tahun 2019 sebesar 66,87 yang mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 77,72 artinya bahwa dari setiap 100 penduduk usia 13-15 tahun terdapat 67 anak yang bersekolah.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

Hasil analisis rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Pangandaran, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.28

*Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 - 2019*

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI				
01.01	Jumlah gedung sekolah	349	343	343	344
01.02	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	36.069	36.798	37.555	40.211
01.03	Rasio	1/103	1/107	1/109	1/117
2	SMP/MTs				
02.01	Jumlah gedung sekolah	76	85	85	86
02.02	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	18.528	18.528	19.253	19.173
02.03	Rasio	1/243	1/217	1/227	1/223

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran, 2019

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 rasio ketersediaan gedung sekolah SD/MI terhadap penduduk usia sekolah SD/MI adalah 1:109, artinya bahwa dalam setiap 1 gedung SD/MI dapat menampung 109 anak. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan rasio yaitu menjadi 1:117. Rasio gedung SMP/MTs terhadap penduduk usia sekolah SMP/MTS pada tahun 2018 adalah sebanyak1: 227 artinya satu gedung sekolah dapat menampung sejumlah 227 anak. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1:223 artinya satu gedung sekolah dapat menampung sejumlah 223 anak yang dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk kelompok usia 13 – 15 tahun.

c. Rasio Guru/Murid

Hasil analisis rasio jumlah guru/murid Kabupaten Pangandaran disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.29
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI				
01.01	Jumlah Guru (orang)	3.547	3.960	1.683	586
01.02	Jumlah Murid (orang)	38.357	39.079	39.246	39.015
01.03	Rasio	1/11	1/10	1/23	1/66
2	SMP/MTs				
02.01	Jumlah Guru (orang)	1.629	1.128	548	1.664
02.02	Jumlah Murid (orang)	19.509	19.610	19.026	19.036
02.03	Rasio	1/12	1/17	1/34	1/11

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran, 2019

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dinyatakan bahwa pada tahun 2018 rasio guru/murid jenjang SD/MI adalah sebesar 1:23 artinya setiap satu guru dibebani murid sejumlah 23 murid, sedangkan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 1:66 murid per satu orang guru. Hal tersebut seiring dengan berkurangnya jumlah guru yang disebabkan masa pensiun dan pindah ke struktural. Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2018 rasio guru/murid sebesar 1:34 dan pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 11 murid per satu orang guru.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Pencapaian Kinerja pada urusan kesehatan tahun 2016 - 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.30
Capaian Indikator Kesehatan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Rasio posyandu per 100 balita	2,93	2,31	1,83	2,1
2	Rasio puskesmas persatuan penduduk	1:27.046	1:27.268	1:27.838	1:28.174
3	Rasio poliklinik per satuan penduduk	1:67.614	1:25.264	1:27.838	1:26.413
4	Rasio pustu per satuan penduduk	1:11.591	1:11.686	1:11.930	1:12.075
5	Rasio RS per satuan penduduk	0	0	0	0
6	Rasio dokter per 100.000 penduduk	3,67	5,62	10,87	12
7	Rasio bidan per 100.000 penduduk	19,97	30,81	85,98	88
8	Rasio perawat per 100.000 penduduk	29,6	35,94	84,3	84
9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	93,00	99,15	99,23	98,4
10	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> (%)	93,55	86,02	88,17	93,5
11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100
12	Persentase TB BTA+ terhadap suspek (%)	10,13	14,20	31,05	43,6
13	<i>Incidence Rate</i> DBD per 100.000 penduduk	32,18	42,79	32,81	37,2
14	Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (%)	45,77	55,83	58,48	52,9
15	Pelayanan kesehatan bayi (%)	97,99	101,38	100	111,1
16	Jumlah Puskesmas	15	15	15	15
17	Jumlah Puskesmas pembantu	35	35	35	35
18	Angka Kematian Ibu (AKI)/ 100.000 kelahiran hidup	148,91	80,76	49,08	49,4
19	Angka Kematian Bayi (AKB)/ 1000 kelahiran hidup	8,93	7,91	5,40	5,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2019

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Prasarana Jalan

Indikator bidang pekerjaan umum Kabupaten Pangandaran dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kondisi jalan, irigasi dan sarana transportasi. Jalan sebagai

sarana penunjang transportasi memiliki peran sangat penting khususnya untuk sarana transportasi darat. Untuk mendukung transportasi darat di Kabupaten Pangandaran terdapat panjang jalan menurut status/kelas jalan yang ada.

Kondisi jalan yang ada saat ini di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 yaitu: jalan nasional sepanjang 95,05 km, yang kondisinya baik sepanjang 76,42 km, yang kondisinya sedang yaitu sepanjang 18,63 km dan yang kondisinya rusak tidak ada.

Panjang jalan provinsi sepanjang 8,89 km, berdasarkan kondisinya jalan yang baik sepanjang 2,05 km, jalan yang kondisinya sedang sepanjang 0,5 km dan jalan yang kondisinya rusak sepanjang 6,34 km dan rusak berat tidak ada.

Panjang jalan kabupaten sepanjang 504,31 km, berdasarkan kondisinya jalan yang baik sepanjang 401,20 Km, rusak sedang sepanjang 19,29 km, rusak ringan sepanjang 28,58 Km dan rusak berat sepanjang 55,14 km.

Panjang jalan keseluruhan di Kabupaten Pangandaran sepanjang 608,25 km, dengan kondisi baik sepanjang 479,67 km, kondisi rusak sedang sepanjang 38,42 km, kondisi rusak ringan sepanjang 34,92 km dan kondisi rusak berat sepanjang 55,14 km. Kondisi transportasi darat dan ASDP di Kabupaten Pangandaran meliputi kondisi jalan, terminal, angkutan sungai dan angkutan udara. Kabupaten Pangandaran memiliki ruas jalan yang cukup banyak dan dapat menghubungkan antar kecamatan dan desa, Ruas jalan yang ada dapat dijadikan sebagai pembentuk struktur ruang Kabupaten Pangandaran. Kendala yang dihadapi adalah dimensi jalan yang relatif kecil, serta banyaknya ruas jalan yang kondisinya rusak, diantaranya beberapa ruas jalan alternatif antara Kecamatan dan beberapa ruas jalan dikawasan perbatasan.

Kabupaten Pangandaran dilalui oleh ruas jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Ruas jalan nasional yang ada di Kabupaten Pangandaran melewati Kecamatan Cimerak, Cijulang, Parigi, Pangandaran, Kalipucang dan Padaherang. Ruas-ruas jalan tersebut berfungsi ganda, yaitu sebagai jalan antar provinsi (regional) sekaligus sebagai jalan utama antar kecamatan (lokal). Berikut tabel yang menggambarkan indikator bidang pekerjaan umum.

Tabel 2.31
Capaian Indikator Jalan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2019

No	Status Jalan	Panjang Jalan (Km)	Kriteria Jalan (Km)			
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
I.	Tahun 2017					
	Jalan Nasional	94,25	75,62	18,63	-	-
	Jalan Provinsi	8,89	2,05	0,5	6,34	-
	Jalan Kabupaten	500,24	181	57,71	78,06	183,47
II.	Tahun 2018					
	Jalan Nasional	94,25	75,62	18,63	-	-
	Jalan Provinsi	8,89	2,05	0,5	6,34	-
	Jalan Kabupaten	504,31	269,75	32,83	12,8	188,93
III.	Tahun 2019					
	Jalan Nasional	95,05	76,42	18,63	-	-
	Jalan Provinsi	8,89	2,05	0,50	6,34	-
	Jalan Kabupaten	504,31	401,20	19,29	28,58	55,14

Sumber: DPUTRPRKP Kabupaten Pangandaran, 2019

b. Prasarana Irigasi

Prasarana irigasi berdasarkan pengelolaannya terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya seperti pada tabel berikut in:.

Tabel 2.32
Kondisi Jaringan Irigasi Di Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2019

No	Jenis Irigasi	Luas (Ha)	Kriteria Irigasi (Ha) Tahun 2018			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Irigasi Teknis	2.225,60	481,21	786,39	786,40	958,00
2	Irigasi ½ Teknis	3.578,98	-	1.820,20	-	1.758,78
3	Irigasi Sederhana/Desa PU	1.950,48	16,22	121,82	94,96	1.812,44
4	Irigasi Sederhana/Desa Non PU	-	-	-	-	-
5	Tadah Hujan	2.577,91	-	55,00	55,00	2.522,91
6	Lebak	-	-	-	-	-
7	Pasang Surut	-	-	-	-	-
Jumlah		10.332,97	497,43	2.783,41	936,36	7.052,13
No	Jenis Irigasi	Luas (Ha)	Kriteria Irigasi (Ha) Tahun 2019			
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Irigasi Teknis	8.678,01	4.338,75	1.900,00	436,25	2.003,01
2	Irigasi ½ Teknis	3.924,38	1.939,60	940,18	-	1.044,60
3	Irigasi Sederhana/Desa PU	1.950,48	1.950,48	-	-	-
4	Irigasi Sederhana/Desa Non PU	-	-	-	-	-
5	Tadah Hujan	2.232,51	-	-	-	2.232,51
6	Lebak	-	-	-	-	-
7	Pasang Surut	-	-	-	-	-
Jumlah		16.785,38	8.228,83	2.840,18	436,25	5.280,12

Sumber: DPUTRPRKP Kabupaten Pangandaran, 2019

Dari data tersebut diatas menggambarkan Kabupaten Pangandaran harus bisa mempertahankan lokasi irigasi teknis karena sebagai lumbung pangannya daerah. Namun dibalik itu dari total luasan irigasi yang ada seluas 16.785,38 ha yang jauh meningkat dibandingkan tahun 2018 seluas 10.332,97, yang kondisinya baik 8.228,83 ha dan sisanya masuk dalam kondisi rusak sedang seluas 2.840,18 ha, rusak ringan 436,25 ha dan rusak berat seluas 5.280,12 ha, sehingga perlu untuk segera ditangani.

c. Penataan Ruang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB RTH pada tahun 2015 sebesar 0,163% sama dengan pencapaian pada tahun 2013. Disamping ruang terbuka hijau sebesar 0,163% tersebut, di Kabupaten Pangandaran banyak tanaman, baik tanaman perkebunan maupun tanaman hutan, sehingga Pangandaran tetap hijau, Ada beberapa lokasi yang merupakan lahan kritis, namun secara bertahap terus dilakukan penanganan/penghijauan. Seiring dengan visi misi Kepala Daerah Ruang terbuka hijau semakin ditingkatkan terutama di daerah kawasan wisata.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam bidang perumahan, indikator kinerja yang dinilai diantaranya adalah indikator rumah sehat, penduduk yang memiliki akses air minum yang layak, penyelenggara air minum memenuhi syarat kesehatan, dan penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat). Indikator-indikator tersebut diukur berdasarkan



jumlah pengguna air bersih, air minum dan sanitasi pada tahun tertentu, dibagi jumlah keseluruhan rumah tangga/KK pada tahun tertentu dikali 100%. Indikator rumah sehat di Kabupaten pada tahun 2019 adalah sebesar 77,3%, sama dengan tahun 2018. Untuk indikator penduduk yang memiliki akses air minum yang layak mencapai 62,83% pengguna pada tahun 2019 dan pada tahun 2018 mencapai 59,1%. Untuk indikator penduduk yang memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) pada tahun 2018 angka yang tercatat sejumlah 62% dan pada tahun 2019 diangka 55,03%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33

Capaian Indikator Perumahan di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Persentase rumah sehat (%)	69,35	70,3	77,3	77,3
2	Penduduk yang memiliki akses air minum yang layak (%)	35,45	46,4	59,1	62,83
3	Penduduk yg memiliki akses sanitasi layak (jamban sehat) (%)	47,4	55,8	62	55,03

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, 2019

5. Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan dan pemantapan ideologi bagi seluruh komponen masyarakat. Disamping itu untuk mengantisipasi kerawanan sosial politik maka dilakukan pembinaan dan monitoring yang terkait dengan kegiatan politik daerah, upaya yang telah dilakukan pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018, pencapaian tersebut sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.34

Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP (kali)	1	1	1	10
2	Kegiatan pembinaan politik daerah (kali)	1	1	0	11
3	Jumlah LSM/ORMAS	46	41	41	51

Sumber: Kantor Kesbangpol Kabupaten Pangandaran, 2019

6. Urusan Wajib Sosial

Pelaksanaan urusan sosial diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan anak terlantar, korban kekerasan dalam rumah tangga, karang taruna, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan dan lansia rawan sosial. Upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut seperti pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.35
 Capaian Indikator Sosial di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Sarana sosial:	-	22	22	23
	- Panti Asuhan	-	21	21	21
	- Panti Jompo	-	-	-	-
	- Panti Sosial	-	1	1	2
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	52.634	48.272	45.944
3	Penanganan penyandang masalah Kesejahteraan sosial	-	-	48.272	45.944

Sumber: Dinsos, PMD Kabupaten Pangandaran, 2019

B. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Ketenagakerjaan

Masalah pembangunan yang harus diatasi setiap daerah adalah jumlah pengangguran dan ketersediaan lapangan kerja. Hal ini sangat terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia. Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan diarahkan sebagai upaya pengurangan pengangguran dan melindungi tenaga kerja maupun perusahaan. Capaian pelaksanaan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2019 seperti digambarkan pada capaian indikator, yaitu: angkatan kerja pada periode tahun 2018-2019 mengalami penurunan yaitu 240.175 orang di tahun 2018 dan 234.003 orang di tahun 2019, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2018 yaitu 96,42% dan tahun 2019 yaitu 95,52% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2018 yaitu 3,58% dan pada tahun 2019 yaitu 4,48%, secara jelasnya dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 2.36
 Capaian Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019*
1	Angkatan Kerja (Orang)	223.403	243.702	240.175	234.003
2	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	95,8	96,66	96,42	95,52
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2	3,34	3,58	4,48

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019

*) Angka Sementara

2. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Pangandaran terus berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak, namun demikian, kesenjangan gender masih terjadi di berbagai sektor pembangunan. Hal ini disebabkan aspek psikososio-kultural yang masih menganggap derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Keadaan tersebut menghambat keterlibatan perempuan berperan aktif dalam pembangunan dan memperoleh segala bentuk pelayanan dasar. Kesetaraan gender selain berdampak pada perempuan secara tidak langsung berdampak pada anak. Hal ini mengingat sangat erat kaitannya antara perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik bagi anak dan besarnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan didalam rumah tangga. Pembangunan dan pemberdayaan perempuan juga sangat berdampak pada derajat kesehatan dan tingkat kesejahteraan

keluarga. Adapun capaian indikator pemberdayaan perempuan dan anak dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.37
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintahan	45%	45%	11,95%	-
2	Rasio KDRT	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus	0 Kasus
3	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	1 Kasus	1 Kasus	4 Kasus	0 Kasus

Sumber: DKBP3A Kabupaten Pangandaran, 2019

3. **Urusan Wajib Ketahanan Pangan**

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang Aman, Beragam, Bergizi, dan Seimbang, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Beberapa regulasi ketahanan pangan termasuk yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Ketahanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang “Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat” yang mengamanatkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Wajib mempertanggungjawabkan Urusan Ketahanan Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang “Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota” yang mengamanatkan urusan ketahanan pangan termasuk urusan wajib. Perkembangan regulasi ketahanan pangan dan ketersediaan pangan utama dapat dilihat pada table berikut ini:



Tabel 2.38
Capaian Indikator Ketahanan Pangan di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2015 - 2019

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Regulasi Ketahanan Pangan	Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran	Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran	Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran	Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran	Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 7 Tahun 2014 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran
		Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 521/Kpts.142-Huk/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketahanan Pangan di Kabupaten Pangandaran	Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 501/Kpts.206-Huk.Org/2016 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2016	Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah	Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah	Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah
			Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 800.5/Kpts.112-Huk.Org/2016 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) / Toko Tani Indonesia (TTI) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016	Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 800/Kpts.108-Huk/2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 800/Kpts.108-Huk/2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017	Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 800/Kpts.108-Huk/2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
				Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 800/Kpts.150-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah	Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 800/Kpts.150-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah	Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 800/Kpts.150-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Daerah
				Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 562/Kpts.178-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Pangandaran	Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 562/Kpts.74-Huk/2018 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Pangandaran	Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 562/Kpts.74-Huk/2018 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten Pangandaran
					Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 527/Kpts.72-Huk/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018	Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 527/Kpts.72-Huk/2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2018
2	Ketersediaan Pangan Utama/Padi (Ton)	42.712,81	27.412,13	29203,27	64.665,71	59.100,93

Sumber: Dinas KPKP Kabupaten Pangandaran, 2019

4. Urusan Wajib Pertanahan

Dalam bidang pertanahan, pada tahun 2014 telah dibentuk Tim Penegasan Batas Wilayah/Daerah dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 135.4/Kpst.16A-Huk.Org tentang TIM Penegasan Batas Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Pangandaran, pada tanggal 28 Januari 2014 telah dilaksanakan penegasan batas wilayah Kabupaten Pangandaran dengan Kabupaten Ciamis sebagai daerah pemekaran yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ditertibkan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 104 Tahun 2014 tentang Batas Wilayah Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Pangandaran, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 800.5/Kpst.255-Huk.Org/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Batas Daerah Kabupaten Pangandaran pada tanggal 26 Juni 2015.

5. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Setelah bertahun-tahun kita akrab dengan istilah Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals, disingkat MDGs), pada 2015 agenda pembangunan global ini resmi berakhir. Sebagai gantinya, 193 negara termasuk Indonesia, bersepakat mengadopsi agenda pembangunan global baru yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Lingkungan hidup merupakan salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai tempat kelangsungan hidup makhluk hidup yang di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus bersih dan berada pada ambang batas minimal pengaruh pencemaran, sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan dan aktivitas masyarakat. Pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh dinas dan pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat. DLHK sebagai leading sektor telah berupaya untuk menangani kasus-kasus lingkungan melalui koordinasi dengan instansi terkait, Camat, Kepala Desa dan tokoh masyarakat setempat yang terkena dampak. Berbagai langkah dan pendekatan dilakukan untuk penanganan dan penyelesaian masalah lingkungan. Persentase pelayanan sampah secara keseluruhan kecenderungannya meningkat dari 18,10% pada tahun 2018 menjadi 29,18% pada tahun 2019. Sedangkan untuk penegakan hukum lingkungan setiap tahunnya dilakukan secara rutin dan tertangani secara keseluruhan. Indikator urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.39

Capaian Indikator Lingkungan Hidup di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penanganan sampah (%)	17,80	17,61	18,10	29,18
2	Pencemaran status mutu air (%)	30	38,50	38,89	54,17
3	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%)	43,90	17,18	9,38	22,22
4	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan pddk (m ³)	-	1,14	37,24	37,24
5	Penegakan hukum lingkungan (%)	100	100	100	100
6	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB RTH (%)	-	75,48	75,48	73,40

Sumber: DLHK Kabupaten Pangandaran, 2019



6. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Dalam rangka tertib administrasi kependudukan, di Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan penyusunan database kependudukan yang dimulai dari tahun 2009 oleh Kabupaten Ciamis, sejak dimulainya program pembuatan KTP SIAK, sampai tahun 2018 database kependudukan telah tersedia melalui online dengan jaringan SIAK yang ada di tiap-tiap kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jawa Barat bahkan telah terhubung dengan pusat sehingga memudahkan pencatatan mutasi penduduk antar kabupaten/kota. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan mulai tahun 2007 yang diawali dengan pemutakhiran data kependudukan dan pembuatan database kependudukan. Selanjutnya dalam rangka penyempurnaan database, dilaksanakan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data kependudukan yang dilaksanakan tahun 2010 dan masih dalam tahun yang bersamaan juga diterbitkan Surat Pemberitahuan NIK kepada seluruh penduduk. Kemudian hasil pemutakhiran database tersebut dijadikan dasar dalam penerapan e-KTP di Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan mulai tahun 2011 sampai sekarang, Pelaksanaan penerapan KK/KTP SIAK di Kabupaten Pangandaran dilaksanakan mulai bulan April 2008 melalui Kabupaten Ciamis. KTP yang masa berlaku 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun sedangkan KK yang semula masa berlaku 3 (tiga) tahun menjadi seumur hidup kecuali ada perubahan biodata penduduk/tambah/kurang anggota keluarga, Pembuatan KTP dan KK SIAK dimulai tahun 2015.

Adapun capaian indikator kependudukan di Kabupaten Pangandaran dalam capaian indikator kependudukan Kabupaten Pangandaran dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Capaian Indikator Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk (%)	23,23	32,64	78,03	91,96
2	Rasio bayi berakte kelahiran (%)	91,72	90,46	88,11	82,54
3	Kepemilikan KTP (orang)	71.671	101.947	246.175	295.611
4	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran (%)	20,63	10,89	47,82	18,46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2019

7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat diupayakan untuk memberdayakan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Upaya tersebut dijabarkan melalui kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Binaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Posyandu aktif. Adapun rata-rata kelompok binaan PKK periode tahun 2018 – 2019 berjumlah 104 kelompok, hal Ini menggambarkan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Jumlah Posyandu aktif pada tahun 2019 sebanyak 528. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.41
Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Desa
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	104	104
2	Posyandu aktif	520	526	526	528

Sumber: Dinsos, PMD Kabupaten Pangandaran, 2019

8. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Gambaran pelaksanaan urusan wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Pangandaran sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat dari capaian indikator keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Peningkatan partisipasi PUS dalam program KB akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan angka kelahiran dapat diturunkan. Selain itu keikutsertaan keluarga Pra Sejahtera dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dengan belajar berusaha memperoleh tambahan penghasilan melalui ekonomi produktif di wilayah masing-masing. Perkembangan capaian indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42
Capaian Indikator Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata jumlah jiwa per keluarga	2,3	2,8	3,98	0,05
2	Cakupan peserta KB aktif	60.498	59.576	62.774	64.098
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1	38.606	-	39.367	27.412
4	Peserta KB Pria	198	198	1.305	1.486
5	Pasangan Usia Subur (PUS)	80.262	79.869	83.535	83.892
6	Persentase Peserta KB Aktif dengan PUS (Prevalensi)	92,71	74,59	75,15	76,4
7	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan (Jumlah Anggota)	60 (1.895)	61 (1.500)	52 (1.651)	63 (1.701)

Sumber: DKBP3A Kabupaten Pangandaran, 2019

9. Urusan Wajib Perhubungan

Berdasarkan data pada tahun 2019, di Kabupaten Pangandaran jumlah kendaraan menurun dibandingkan tahun 2018 yaitu dari jumlah total 2.685 kendaraan menjadi 2.587 kendaraan di tahun 2019. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.43
Jumlah Angkutan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

Jenis Kendaraan	Jumlah			
	2016	2017	2018	2019
Angkutan Pedesaan	14	14	20	13
Otolet/Mobil Penumpang	-	-	-	-
Otobis	6	6	12	-
Micro Bus	16	16	20	35
Mini Bus	24	21	21	17
Truck	614	707	717	917
Pick Up	1.656	1.639	1.800	1.477
Box	74	77	90	124
Tanki	-	2	4	-
Kereta Gandengan/ Truk	-	-	1	-
Kendaraan Sewa	-	-	-	-
Jumlah	2.418	2.496	2.685	2.587

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, 2019

10. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Kemajuan di bidang informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Perkembangan tersebut diikuti dengan berkembangnya sarana dan prasarana komunikasi seperti wartel, warnet, maupun informasi dalam bentuk pameran, perkembangan warnet dan wartel sekarang sudah mulai tergerus dengan berkembangnya teknologi telepon pintar (*Smart phone*)/ *Gadget*. Pada kelompok indikator ini yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu website milik pemerintah daerah pada tahun 2018 sebanyak 18 website menjadi 45 website pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh adanya ketentuan terkait percepatan implementasi *e-Government* di seluruh pemerintah daerah. Data perkembangan terkait urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Rasio wartel/warnet terhadap Penduduk	18	18	18	18
2	Jumlah Surat Kabar Nasional	4	4	4	4
3	Jumlah Surat Kabar Lokal	5	5	5	5
4	Jumlah penyiaran:				
	Radio Nasional (jaringan ke daerah)	1	1	1	1
	Radio Lokal	20	20	20	20
	TV lokal	-	-	-	-
	TV Nasional	12	12	12	12
5	Website milik pemerintah daerah	14	16	18	45

Sumber: Diskominfo Kabupaten Pangandaran, 2019



11. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi

Koperasi saat ini sudah cukup memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran dan apabila dilihat dari kegiatan usahanya maka koperasi telah menyentuh seluruh bidang perekonomian di masyarakat, namun demikian pemerintah daerah masih harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam pemberdayaan dan pembangunan koperasi. Adapun jumlah koperasi yang ada seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45
Capaian Indikator Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2019

No	Uraian	Periode Tahun		
		2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi	203	208	212
2	Koperasi Aktif	62	68	72
3	Koperasi Tidak Aktif	141	140	140
4	Jumlah Anggota	8.257	8.319	7.500
5	Modal Usaha	93.018.010.552	98.878.563.508	112.695.635.095
6	Sisa Hasil Usaha	1.109.234.479	2.347.310.000	2.503.891.113

Sumber: DPKUMKM Kabupaten Pangandaran, 2019

Tabel di atas dapat memberikan gambaran positif, meskipun jumlah anggota mengalami penurunan namun disisi lain terdapat peningkatan mulai dari jumlah koperasi aktif, jumlah modal usaha maupun sisa hasil usahanya. Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran anggota untuk menjalankan koperasi yang mereka dirikan, sehingga masih perlu pembinaan dan penyuluhan tentang manfaat berkoperasi.

Pemberdayaan Koperasi memerlukan kepekaan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, Lembaga Koperasi dan merumuskan kebijakan secara terintegrasi dan akuntabel yang dapat diterima secara baik oleh masyarakat dan lembaga koperasi. Permasalahan yang masih nampak dalam pengelolaan koperasi antara lain:

- 1) Masih rendahnya SDM pengelola Koperasi;
- 2) Sulitnya untuk mengakses permodalan dari pihak lembaga keuangan;
- 3) Belum adanya regulasi peraturan yang melindungi terhadap usaha-usaha yang telah berhasil dikelola oleh Koperasi misalnya di bidang pertanian;
- 4) Kelembagaan Koperasi yang masih bersifat konpensional;
- 5) Akses pemasaran yang belum berdaya saing; dan
- 6) Rendahnya jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat.

b. UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan peranan yang cukup signifikan dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Pangandaran. Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain:

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM;
- 2) Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha bagi UMKM;
- 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Pada hakekatnya sistem ekonomi kerakyatan yang perlu diwujudkan adalah sistem yang memungkinkan seluruh potensi masyarakat memperoleh kesempatan



yang sama untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui berbagai kegiatan ekonomi. Dengan demikian, diantara berbagai skala usaha tidak ada yang dirugikan bahkan dapat bermitra usaha secara lebih efektif dan saling menguntungkan. Dalam rangka menciptakan kesetaraan usaha, dilakukan langkah-langkah yang mendorong dan mendukung pelaku ekonomi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dan menengah untuk lebih mengembangkan usahanya diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya wawasan tentang manajemen usaha kecil;
- 2) Kurangnya informasi peluang pasar;
- 3) Kurangnya wawasan untuk mengakses permodalan.

Sejauh ini UMKM yang ada di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 10.882 unit pada tahun 2018 menjadi 11.419 unit pada tahun 2019, maka terjadi peningkatan sebanyak 537 unit (4,93%). Kegiatan UMKM yang ada pada umumnya bergerak pada komoditas gula merah, produk olahan makanan, kerajinan dan perdagangan.

12. Urusan Wajib Penanaman Modal

Berdasarkan Ijin Prinsip Penanaman Modal (IPPM) yang diterbitkan pada tahun 2019, tercatat nilai investasi di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp.471.716.357.987,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 266.425.145.992,- dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 205.291.211.995,- pada tahun 2018. Pada tabel di bawah disajikan perkembangan investasi di Kabupaten Pangandaran menurut sektor usaha tahun 2017 sampai dengan tahun 2019:

Tabel 2.46
Capaian Investasi di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2019

No	Sektor	Nilai Investasi (Rp)			Bertambah/ Berkurang (2018 dengan 2019)
		2017	2018	2019	
I	Sektor Primer	175.867.914.000	630.000.000	933.415.600	303.415.600
1	Pertanian	1.369.000.000	-	765.000.000	765.000.000
2	Perikanan	15.000.000	550.000.000	168.415.600	-381.584.400
3	Peternakan	174.483.914.000	80.000.000	-	-80.000.000
II	Sektor Sekunder	7.373.800.000	23.057.000.000	69.882.053.607	46.825.053.607
1	Industri	7.373.800.000	23.057.000.000	69.882.053.607	46.825.053.607
III	Sektor Tersier	359.947.650.000	181.604.211.996	400.900.888.780	219.296.676.784
1	Jasa	47.154.150.000	80.801.613.817	374.590.231.230	293.788.617.413
2	Keuangan	-	3.682.739.278	-	-3.682.739.278
3	Perdagangan	312.793.500.000	97.119.858.900	26.310.657.550	-70.809.201.350
Jumlah		543.189.364.000	205.291.211.995	471.716.357.987	266.425.145.992

Sumber: DPMPSTSP Kabupaten Pangandaran, 2019

13. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan terutama di bidang SDM, sebagai pemersatu langkah-langkah pendukung dalam pembangunan. Upaya pengembangan minat dan bakat pemuda, derajat melalui organisasi kepemudaan dan dengan menumbuhkembangkan budaya olah raga. Hasil penghitungan jumlah organisasi pemuda dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.47
Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Organisasi Kepemudaan	30	30	30	30
2	Jumlah Organisasi Olahraga	21	21	21	29
3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	6	6	9	2
4	Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	4	5
5	Lapangan/ Gedung Olahraga	82/42	82/42	372/117	372/117

Sumber: Disdikpora Kabupaten Pangandaran, 2019

14. Urusan Wajib Statistik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data yang akurat dan memadai, oleh karena itu, ketersediaan data dan informasi statistik yang handal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data dan informasi statistik berkualitas tidak saja menjadi tujuan pemerintah tetapi juga dibutuhkan oleh kalangan swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk pengembangan usaha dan kebutuhan lainnya. Masyarakat menuntut ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami, dan tepat waktu. Tuntutan kebutuhan data dan informasi belum sepenuhnya terpenuhi namun secara bertahap terus diupayakan ketersediaannya. Data produk-produk statistik Kabupaten Pangandaran bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis diantaranya buku Data Utama Kabupaten Pangandaran, buku PDRB Kabupaten Pangandaran, buku Indeks Harga Konsumen Kabupaten Pangandaran, buku Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Pangandaran, dan buku Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Pangandaran.

15. Urusan Wajib Kebudayaan

Untuk melihat bagaimana kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia, maka hal ini dapat terlihat dari peran pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan seni budaya dan sarana prasarana yang mendukungnya. Seiring dengan fokus dan pendataan situs cagar budaya terbaru pada tahun 2018 megalami kenaikan yang cukup signifikan. Salah satu indikator pengelolaan produk budaya sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.48
Capaian Indikator Kebudayaan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	6	15	18	4
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2	2	2	2
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	-	30	30

Sumber Disparbud Kabupaten Pangandaran, 2019

16. Urusan Wajib Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan mempunyai fungsi strategis bagi perkembangan daerah karena menangani arsip-arsip aktif, arsip inaktif dan dokumentasi daerah. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas



pengelolaan kearsipan diantaranya melalui pemberian bimbingan teknis pada pengelola kearsipan. Penanganan arsip seharusnya sudah menjadi kebutuhan yang amat penting dalam upaya penyelamatan arsip-arsip aktif maupun inaktif. Untuk itu perlu ada upaya bersama dari para pejabat struktural untuk memulai dan melaksanakan secara optimal dalam penyelamatan arsip-arsip penting. Pada tahun 2017 untuk urusan kearsipan sudah dibentuk dinas tersendiri yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus layanan urusan pilihan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Perkembangan luas lahan usaha perikanan darat khususnya yang dilakukan di kolam selama dua tahun terakhir cenderung meningkat. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan produksi perikanan dan konsumsi ikan. Keberhasilan pelaksanaan urusan perikanan dicapai melalui pembinaan kelompok perikanan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.49
Capaian Indikator Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Produksi perikanan (ton)	1.649,50	2.404,96	2.517,60	2.757,86
2	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	-	17,3	21,86	22,5
3	Cakupan bina kelompok Nelayan (KUB)	189	189	194	195

Sumber: Dinas KPKP Kabupaten Pangandaran, 2019

2. Urusan Pilihan Pariwisata

Secara umum Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran dibagi kedalam tiga kategori:

- a. Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya diantaranya: Batu Kalde yang bertempat di Cagar Alam Pangandaran, Gua Panggung berada di obyek wisata Cagar Alam Pangandaran, Sembah Agung di Desa Batukaras Kecamatan Cijulang dan Kampung Badud di Desa Margacinta Kecamatan Cijulang;
- b. Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam sebanyak 10 objek wisata yaitu, Pantai Karang Nini, Pantai Lembah Putri, Pantai Karapyak, Pantai Palatar Agung, Pantai Pangandaran, Pantai Karang Tirta, Pantai Batu Hiu, Pantai Batu Karas, Pantai Madasari dan Keusik Luhur;
- c. Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus diantaranya adalah objek wisata sungai Citumang, Karang Nini, Gua Donan, Wisata Cukang Taneuh/Green Canyon, Wisata Ciwayang, Santirah, Gua Lanang, Curug Jambe, Cagar Alam Pananjung, Wonder Hill Jojogan dan Pepedan Hill.

Untuk meningkatkan daya tarik wisata, maka diagendakan berbagai even kepariwisataan seperti Nyuguh, Hajat Bumi Selamintuna, Upacara Adat, Gelar Budaya

Tatar, Pentas Wayang Golek, Kreatifitas Seni, Upacara Adat Merlawu, Pentas Seni Hiburan Hari Raya, Hajat Laut, Ronggeng Gunung dan Kontes Burung Berkicau.

Untuk menunjang kepariwisataan, di Kabupaten Pangandaran cukup tersedia sarana akomodasi atau penginapan yang tersebar sejak memasuki wilayah Pangandaran. Sebagai penarik minat wisatawan, di Kabupaten Pangandaran terdapat cukup banyak obyek wisata, diantaranya terdapat 30 buah situs peninggalan sejarah dan kepurbakalaan serta patilasan peninggalan sejarah yang tersebar di beberapa kecamatan. Selain itu juga terdapat beberapa jenis hiburan yang tersedia dari berbagai perkumpulan atau organisasi kesenian.

Tabel 2.50

Capaian Indikator Pariwisata di Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 - 2019

No	Objek Wisata	2018		2019	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1	OW Pangandaran	2.138	2.787.767	1.231	2.663.980
2	OW Batu Hiu	113	217.963	188	180.316
3	OW Green Canyon	3.320	162.576	2.880	136.750
4	OW Batu Karas	2.265	592.980	1.456	519.468
5	OW Karapyak	-	276.582	15	268.989
Jumlah		7.836	4.037.868	5.770	3.769.503

Sumber: Disparbud Kabupaten Pangandaran, 2019

3. Urusan Pilihan Pertanian

a. Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Produksi padi sawah merupakan komoditas utama sektor pertanian di Kabupaten Pangandaran. Komoditi tanaman pangan dan hortikultura yang saat ini berkembang dan mempunyai prospek serta peluang pasar yang cukup baik, diantaranya adalah: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, tomat, cabe merah, cabe rawit, manggis, durian dan pisang.

Pertanian masih menjadi penggerak roda perekonomian, sehingga pengaruhnya terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi sangat signifikan, Kondisi ini juga menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih *concern* terhadap pengembangan potensi sektor pertanian. Cakupan sektor pertanian meliputi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan.

Secara umum, salah satu subsektor yang masih dominan adalah padi dan palawija, dengan luas panen seluas 32.101 Hektar pada tahun 2019, atau meningkat sebesar 288 Ha bila dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi padi pada tahun 2019 sebanyak 199.351,273 ton, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 197.301,93 ton. Sumbangan terbesar berasal dari padi sawah 196.979,698 ton atau 98,8% dan sisanya berasal dari padi gogo sebesar 1,2%.

Pertanian sebagai penggerak perekonomian masyarakat, terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap perekonomian, yaitu masih sebagai penyumbang tertinggi. Sektor ini telah berperan besar dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran, baik peran langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan subsektor dan sektor lainnya.

Pada sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan), beberapa komoditas dapat dikategorikan sebagai komoditi unggulan dan prospektif.

Saat ini pengembangan agribisnis komoditas unggulan muncul menjadi salah satu alternatif peluang investasi dalam pembangunan sektor pertanian. Mengemukanya fenomena tersebut dalam konteks perencanaan wilayah dan otonomi daerah, terjadi karena pendekatan tersebut diyakini dan telah teruji sebagai model yang layak dikembangkan menuju pertanian yang tangguh, khususnya dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani, serta pendapatan asli daerah.

Sasaran pembangunan pertanian Kabupaten Pangandaran ditetapkan berdasarkan program revitalisasi pertanian, meliputi kegiatan peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan peningkatan kesejahteraan petani, sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah adanya usaha di sektor hulu usahatani *on farm*, dan hilir *off farm (agroindustri)* dan usaha penunjang lainnya, peningkatan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peningkatan ekspor produk pertanian segar maupun olahan, peningkatan kapasitas dan posisi tawar petani, penguatan kelembagaan petani, peningkatan akses petani terhadap sumberdaya produktif dan peningkatan pendapatan petani nilai tambah.

Tabel 2.51

Capaian Indikator Pertanian di Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2019

No	Komoditi	Tahun 2017			
		L.Tanam (Ha)	L.Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	33.009	32.090	60,13	192.953,95
2	Padi Gogo	82	300	37,67	1.130,00
Jumlah		33.091	32.390	59,92	194.083,95
No	Komoditi	Tahun 2018			
		L.Tanam (Ha)	L.Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	31.941	31.699	62,10	196.865,74
2	Padi Gogo	546	92	38,26	436,19
Jumlah		31.813	31.813	62,02	197.301,93
No	Komoditi	Tahun 2019			
		L.Tanam (Ha)	L.Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	18.446	31.603	62,33	196.979,698
2	Padi Gogo	531	498	47,62	2.371,575
Jumlah		18.977	32.101	62,10	199.351,273

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, 2019

b. Komoditi Peternakan

Kabupaten Pangandaran juga memiliki potensi pengembangan komoditas peternakan, yaitu diantaranya: sapi, kerbau, kuda, domba, kambing serta unggas berupa ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik. Salah satu ternak unggulan di Kabupaten Pangandaran yang paling berpotensi untuk dikembangkan antara lain adalah kambing, ayam buras, ayam pedaging dan ayam petelur. Berikut diuraikan data jumlah ternak berdasarkan kelas jenis ternak di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Pangandaran:

Tabel 2.52
Potensi Bidang Peternakan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Komoditas	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
Jumlah Populasi (Ekor)					
1	Sapi Potong	15.376	16.587	17.386	17.639
2	Kuda	151	164	135	157
3	Kerbau	1.018	1.009	446	372
4	Domba	35.585	36.535	29.893	28.174
5	Kambing	16.507	16.530	14.956	13.786
6	Ayam Buras	751.974	534.542	385.576	385.140
7	Ayam petelur	137.521	145.885	172.172	335.164
8	Ayam Pedaging	239.419	243.876	505.176	150.100
9	Itik	52.745	53.464	33.925	27.922
Produksi Daging (Kg)					
1	Daging Sapi Lokal	516.052	600.478	746.673	747.393
2	Daging Kerbau	2.116	2.494	-	-
3	Daging Domba	118.855	86.610	94.954	53.023
4	Daging Kambing	14.152	14.940	16.626	8.795
5	Daging Ayam Buras	772.230	824.400	428.410	395.514
6	Daging Ayam petelur	128.068	78.089	425.301	315.246
7	Daging Ayam Pedaging	1.883.270	1.174.500	1.546.010	1.967.287
8	Daging Itik	41.183	39.650	28.420	21.801
Produksi Telur (Kg)					
1	Telur ayam Buras	461.174	571.000	236.468	826.045
2	Telur Ayam Petelur	1.264.039	1.340.920	4.156.190	3.832.800
3	Telur itik	344.861	352.460	221.881	182.562

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, 2019

4. Urusan Pilihan Kehutanan

Kabupaten Pangandaran mempunyai potensi lahan kawasan hutan seluas 47.562,60 Ha, dari luas wilayah Kabupaten Pangandaran 1.133,7 Km² , dengan cakupan luas hutan terdiri dari:

- a. Luas kawasan Hutan Negara meliputi areal seluas 17.047,56 Ha dan Hutan Produksi seluas 16.558,62 Ha yang dikelola Perum Perhutani KPH Ciamis, Hutan Konservasi Cagar Alam dan Suaka Margasatwa Pananjung Pangandaran yang dikelola Balai Besar KSDA - Jawa Barat seluas 488,94 Ha yang terdiri dari Cagar Alam Pananjung sesuai dengan SK. Nomor 44/Menhut-II/2020 yaitu seluas 454,62 Ha dan Taman Wisata Alam Pananjung Pangandaran seluas 34,32 Ha.
- b. Hutan Rakyat seluas 30.202,04 Ha yang tersebar di 10 Kecamatan dengan potensi kayu sebesar 304.292 m³ dengan rata-rata produksi per kecamatan kurang lebih 30.429,29 m³/tahun. Dengan populasi tegakan pada lahan milik yang biasa disebut Hutan Rakyat menjadi sumber utama penghasil kayu khususnya Sengon dan Mahoni (Rimba) untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku yang dewasa ini semakin besar.
- c. Hutan Mangrove dengan luas kurang lebih 310 Ha di Kabupaten Pangandaran tersebar di 6 (enam) Kecamatan pesisir pantai merupakan kawasan andalan Pangandaran yakni kawasan Pangandaran dengan kegiatan pengembangan pariwisata dan bisnis kelautan.



Selain kawasan hutan tersebut, Kabupaten Pangandaran mempunyai lahan milik yang cukup luas dan layak untuk ditanami tanaman kayu, Populasi (tegakan) tanaman kayu pada lahan milik yang biasa disebut 'Hutan Rakyat' diharapkan menjadi sumber utama penghasil kayu mengingat Hutan Negara yang mempunyai fungsi produksi sudah semakin terbatas untuk dapat mensuplai kebutuhan hasil hutan berupa kayu, kebijakan hutan kemasyarakatan (*social forestry*) dalam bentuk sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

a. Komoditi Perkebunan

Komoditi perkebunan di wilayah Kabupaten Pangandaran terbagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Perkebunan Besar Negara/Swasta tercatat seluas 4.324.351 Ha, yang pengelolaannya oleh PTPN Batulawang;
- 2) Perkebunan Rakyat, merupakan lahan masyarakat yang ditanami atau dikembangkan menjadi kawasan perkebunan, komoditi yang dikembangkan didominasi oleh komoditi kelapa dan cengkih.

b. Komoditi Perikanan

Walaupun Kabupaten Pangandaran mempunyai garis pantai yang panjang, lahan laut yang cukup luas dan kekayaan ikan laut yang berlimpah tetapi masyarakat Kabupaten Pangandaran tidak tergantung kepada alam dan masyarakat Kabupaten Pangandaran tidak melupakan potensi budidaya perikanan. Masyarakat Pangandaran menggali potensi air payau dengan membangun tambak-tambak ikan, Potensi perikanan air tawar tetap dilakukan dengan mengusahakan budidaya ikan air tawar yang bahkan memiliki luas sangat besar jika dibandingkan dengan usaha perikanan tambak.

Produksi ikan di laut tergantung kepada kondisi alam dan cuaca sehingga produksi ikan mengalami siklus musiman bukan hanya disebabkan kemampuan nelayan untuk melaut (faktor gangguan cuaca seperti badai) tetapi juga kondisi keberadaan ikan di laut menyebabkan panen ikan meningkat pada bulan-bulan tertentu, Berdasarkan data di tabel, produksi ikan laut terbesar terjadi pada triwulan ke-4 (bulan Oktober, Nopember dan Desember).

Penyediaan sarana dan prasarana perikanan terutama perikanan tangkap hasil laut yang berada di Kabupaten Pangandarn meliputi:

- Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bojongsalawe berada di Kecamatan Parigi;
- TPI Pangandaran berada di Kecamatan Pangandaran;
- TPI Batukaras berada di Kecamatan Cijulang;
- TPI Madasari berada di Kecamatan Cimerak;
- TPI Muaragatah berada di Kecamatan Cimerak;
- TPI Bagolo berada di Kecamatan Kalipucang;
- TPI Ciawitali berada di Kecamatan Kalipucang;
- TPI Majingklak berada di Kecamatan Kalipucang;
- TPI Nusawiru berada di Kecamatan Cijulang;
- TPI Legokjawa berada di Kecamatan Cimerak;
- Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) milik masyarakat;
- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang berada di Kecamatan Pangandaran;
- PPI Bojongsalawe berada di Kecamatan Parigi.

5. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral



Secara umum sektor pertambangan di Kabupaten Pangandaran menunjukkan perkembangan yang positif. Potensi sumber daya mineral antara lain andesit 20.000 M³, Gambut 59.000 M³, Batu Kapur 800 M³, Batu Kali 900 M³, Posfat 2.000 M³ dan Pasir 1.500 M³. Potensi tersebut tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Padaherang, Langkaplancar, Kalipucang, Sidamulih, Parigi, Cijulang, dan Cimerak. Saat ini potensi mineral logam seperti pasir besi, emas dan tembaga sedang dalam penelitian (eksplorasi).

Demikian halnya dengan potensi mineral non logam seperti batu gamping tanah liat, kwarsa yang merupakan bahan baku semen, saat ini dalam tahap eksplorasi juga. Apabila hasil eksplorasi dan studi kelayakannya dinyatakan positif, maka diharapkan sektor pertambangan akan menyumbang pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Wilayah Pangandaran juga memiliki potensi kawasan karst yang selanjutnya dapat dikembangkan menjadi kawasan geowisata.

Kabupaten Pangandaran memiliki sumber air (mata air) yang merupakan milik Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Mata air Kalisodong yang bertempat di Desa Selasari Kecamatan Parigi dengan debit air rata-rata 105,0 C/detik,
- b. Mata air Guha hawu yang bertempat di Desa Selasari Kecamatan Parigi dengan debit air rata-rata 7,5 C/detik,
- c. Mata air Madasari yang bertempat di Desa Masawah Kecamatan Cimerak dengan debit air rata-rat 7,5 C/detik,
- d. Mata air Cijumleng yang bertempat di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih dengan debit air rata-rata 32,5 C/detik.

Pemanfaatan potensi air baku tersebut pada saat ini masih terbatas hanya untuk air bersih. Disamping itu, potensi Sumber Daya Air yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan lain seperti, air irigasi dan pariwisata.

6. Urusan Pilihan Perdagangan

Pada tahun 2019, sektor perdagangan memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 20,17% menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 20,82%, selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.53

Capaian Indikator Perdagangan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB (%)	21,00	20,42	20,82	20,17
2	Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)	-	4.574.870	6.500.406,54	4.602.541,43
3	Cakupan bina usaha informal (PKL)	-	100%	100%	100%

Sumber: DPKUMKM Kabupaten Pangandaran, 2019

7. Urusan Pilihan Perindustrian

Peranan sektor industri yang merupakan sektor andalan di Jawa Barat, yang diarahkan untuk pengembangan agroindustri, yaitu mengolah potensi sumberdaya alam yang dimiliki khususnya sektor pertanian, kelautan dan kehutanan.

Peningkatan jumlah usaha industri tersebut masih didominasi oleh industri skala rumah tangga berupa olahan bahan makan, kerajinan dan aneka bahan bangunan serta konveksi. Dukungan Pemerintah terhadap pengrajin berupa bantuan

mesin dan penguasaan teknologi serta pembinaan keterampilan pengrajin berupa diklat-diklat teknologi produksi, sehingga memberi dampak pada peningkatan kapasitas industri serta peningkatan penyerapan tenaga kerja yang terampil. Namun sejauh ini industri yang ada baru sebatas industri kecil. Jumlah industri besar pada periode tahun 2017-2019 sebanyak 3 buah industri besar, sedangkan industri kecil dan menengah pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 63 buah dari 5.026 buah pada tahun 2018 menjadi 5.089 buah pada tahun 2019.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai produksi antara lain melakukan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan pada kelompok-kelompok industri baik industri agro maupun non agro, misalnya: dalam pengemasan produk, pembinaan GMP (*Good Manufacturing Practise*), memberikan bantuan peralatan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

8. Urusan Pilihan Transmigrasi

Pelaksanaan transmigrasi merupakan kerja sama antar pemerintah daerah baik daerah pengirim maupun daerah penerima dengan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator. Pada tahun 2019 tidak terdapat warga yang mengikuti program transmigrasi swakarsa.

D. Fokus Layanan Penunjang Pemerintahan

1. Urusan Penunjang Pemerintahan Administrasi Pemerintahan

Pemerintah daerah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, jumlah poskamling menggambarkan ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan. Semakin meningkatnya rasio antara jumlah Pos Siskamling dibanding dengan jumlah penduduk menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pengamanan diri meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan cepat dan jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang tetap menyebabkan rasio antara jumlah penduduk dan polisi Pamong Praja semakin meningkat. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Satpol PP dibantu Anggota Linmas yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten Pangandaran sebanyak 1908 orang.

Rasio jumlah Linmas dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Pangandaran pada periode tahun 2019 sebesar 46 anggota Linmas per 10.000 penduduk. Indikator Urusan Penunjang Pemerintahan bidang Administrasi Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.54
Capaian Penunjang Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Satpol PP	170	203	201	211
2	Jumlah Linmas	1856	1886	1908	1908
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja / 10.000 Penduduk	4:10.000	5:10.000	5:10.000	5:10.000
4	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	46:10.000	46:10.000	46:10.000	46:10.000
5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	21	-	-	-
6	Penegakan PERDA	3	-	3	10
7	Cakupan Patroli petugas Satpol PP	-	-	-	-



No	Indikator	2016	2017	2018	2019
8	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	-	-	15%	100%
9	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	-	12/8	62/42	58/95
10	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit/ 7,5 Km	15 Menit/ 7,5 Km	15 Menit/ 7,5 Km	15 Menit/ 7,5 Km

Sumber: Kantor Satpol PP dan BPBD Kabupaten Pangandaran, 2019

2. Urusan Penunjang Pemerintahan Perencanaan

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2025, perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021: sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Nomor 3 Tahun 2019 Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya, RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD, Ketersediaan dokumen tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.55
Capaian Indikator Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2017	2018	2019
1	Tersedianya dokumen perencanaan					
	RPJPD yg telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan:					
	RPJMD yg telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan:					
	RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Bappeda Kabupaten Pangandaran, 2019

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek daya saing daerah, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variable yang terdiri dari:

A. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah



Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Hasil analisis konsumsi rumah tangga perkapita dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.56
Angka PDRB Perkapita Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019*
1	PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku (Juta Rp.)	22.367.845,22	23.654.828,61	24.791.878,33	28.357.764
2	PDRB Perkapita atas dasar harga konstan (Juta Rp.)	16.618.599,29	17.211.405,70	17.644.147,48	19.412.058
3	Jumlah Penduduk (orang)	405.683	409.016	417.563	422.615
4	Dependency Ratio/ Angka Ketergantungan (%)	41,46	41,28	43,37	45,17

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019
*) Angka Sementara

B. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator Sarana Perekonomian, Jaringan Listrik dan Penataan Wilayah. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator pada fokus fasilitas wilayah/infrastruktur sebagai berikut:

1. Sarana Perekonomian

Jumlah Hotel berdasarkan pendataan tahun 2019 di Kabupaten Pangandaran mengalami penurunan pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018, sedangkan untuk restoran masih sama dengan tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.57
Jumlah Restoran dan Hotel di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Restoran (buah)	192	192	192	192
2	Jumlah Hotel (buah)	311	311	393	379
	- Hotel Berbintang	1	1	9	10
	- Hotel Non Berbintang	310	310	384	369

Sumber: PHRI Kabupaten Pangandaran, 2019

2. Jaringan Listrik

Berdasarkan data dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Tasikmalaya, bahwa prasarana listrik telah menjangkau seluruh desa di Kabupaten Pangandaran dengan jumlah pelanggan selama tahun 2019 sebanyak 113.719 pelanggan meningkat sebanyak 3.532 pelanggan jika dibandingkan dengan tahun 2018, adapun rincian pemakaian listrik dengan kategori sebagai berikut.

Tabel 2.58
Jumlah Pelanggan dan Pemakaian KWH Listrik di Kabupaten Pangandaran

No	Jenis Pelanggan	Jumlah Pelanggan		Jumlah Pemakaian KWH	
		2018	2019	2018	2019
1	Sosial	2.959	3.188	4.270.678	36.908.438
2	Rumah Tangga	96.551	100.605	91.653.733	92.435.271
3	Bisnis	9.126	8.300	29.547.649	32.975.756
4	Industri	34	29	8.266.646	8.485.240
5	Pemerintah	192	208	1.353.241	1.787.307
6	Penerangan Jalan Umum	1.325	1.389	3.685.370	3.884.235
Jumlah		110.187	113.719	138.777.317	176.476.247

Sumber: PT. PLN ULP Pangandaran, 2019

Dari tabel diatas memberikan gambaran bahwa pelanggan rumah tangga masih mendominasi pemakaian listrik di Kabupaten Pangandaran yaitu sebanyak 100.605 pelanggan, hal tersebut dapat diartikan jangkauan listrik dari PT. PLN (Persero) telah sampai ke pelosok desa. Sedangkan yang makin meningkat lainnya adalah pelanggan bisnis menggambarkan bisnis di kita semakin berkembang, berarti wilayah kita layak atau berpeluang bagi para investor untuk berinvestasi.

3. Penataan Wilayah

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mengacu pada Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran tahun 2018 - 2038.

b. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Kabupaten Pangandaran belum dapat disajikan karena baru dilakukan kajian pada tahun 2014.

C. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pangandaran tahun 2016 - 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59

Rasio Ketergantungan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019

No	Indikator	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Usia< 15tahun	83.313	82.192	86.996	89.620
2	Jumlah Penduduk usia> 64tahun	35.588	36.339	39.328	41.883
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	118.901	118.531	126.324	131.503
4	Jumlah Penduduk Usia15-64 tahun	286.782	287.152	291.239	291.112
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	41,46%	41,28%	43,37%	45,17%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2019

Tabel 2.60

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2019



No	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	2016	2017	2018	2019
1	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD (%)	9,95	7,31	20,72	10,51
2	SD/ Sederajat (%)	55,19	55,95	50,51	52,5
3	SLTP/ Sederajat (%)	19,39	20,46	15,79	20
4	SLTA/ Sederajat (%)	12	12,65	10,01	12,95
5	D1 - PT (%)	3,47	3,62	2,97	4,03
Total		100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, 2019

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Sebagai tolak ukur kinerja pembangunan Kabupaten Pangandaran selama periode waktu tahun 2016 - 2021, ditetapkan indikator kinerja pembangunan daerah dengan tolak ukur keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pencapaian indikator kinerja pembangunan ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2019 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 serta realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah. Diperoleh hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2019. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD. Evaluasi hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2019 terlampir pada Tabel T-C.19

Berdasarkan target capaian dan realisasi indikator kinerja Tahun 2019, Indikator Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, Index Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Pangandaran telah melampaui target capaian yaitu dengan capaian kinerja diatas 100%, sedangkan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih kurang dari target capaian.

Berikut disajikan tabel capaian indikator kinerja pada tahun 2019 dibandingkan dengan target yang diharapkan di tahun 2019:

Tabel 2.61
Capaian Hasil Pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 terhadap
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Tiap Tahun			Capaian Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2019 Terhadap Target Tahun 2019
			2018	2019	2020	2021	2019*	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67,44	67,67	68,17	68,78	68,21	100,80%
2	Persentase Penduduk Miskin	%	8,12	7,87	7,54	6,77	7,71	102,07%
3	Index Gini	Poin	0,34	0,3	0,34	0,33	-	-
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,58	3,46	3,91	3,69	4,48	129,47%
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,41	4,28	4,34	4,39	5,96	139,25%
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61,5	62,46	62,91	63,36	61,61	98,64%
7	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari Global Sustainable Tourist Council (GSTC)	Jumlah	-	0	0	1	0	-

Sumber: Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 - 2021 dan BPS Kabupaten Ciamis, 2019

**) Angka Sementara*



2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

A. Meningkatkan Kualitas dan Kesempatan Pendidikan

Kebijakan alokasi anggaran pendidikan 20% sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang, seperti yang telah dilaksanakan pada APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2014 sampai dengan 2019 dan masih ditingkatkan proporsinya pada tahun 2020 di APBD Kabupaten Pangandaran dengan meluncurkan Program Pendidikan 12 tahun Gratis/ Program Pangandaran Kertawiyata. Aspek-aspek utama yang masih harus mendapatkan perhatian lebih adalah mengenai peningkatan mutu pelayanan dan pemerataan serta perluasan kesempatan pendidikan.

Tantangan pembangunan bidang pendidikan adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah yang masih rendah, menuntaskan rehabilitasi ruang kelas yang rusak, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan perintisan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan kualitas hasil pendidikan, meningkatkan pendidikan kejuruan yang berbasis potensi lokal serta meningkatkan kuantitas dan kualitas guru. Hal ini dapat diatasi dengan sinergitas program dan penggunaan dana pendidikan secara efektif dan efisien. Permasalahan dalam kualitas dan kesempatan pendidikan sampai dengan tahun 2019 adalah:

1. Masih rendahnya RLS dan belum optimalnya HLS, yang antara lain disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan;
 - b. Masih kurangnya dana Bantuan Operasional pendidikan terutama untuk tingkat pendidikan menengah;
 - c. Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, sehingga masih banyak anak yang tidak terakses pendidikan.
2. Masih banyaknya bangunan sekolah yang rusak terutama SD/MI;
3. Masih kurangnya tenaga pendidik terutama untuk guru produktif di SMK dan tenaga kependidikan (TU, Penjaga Sekolah, Pustakawan, Laboran);
4. Masih rendahnya angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA;
5. Masih rendahnya APK PAUD;
6. Masih kurangnya tenaga pendidik PAUD yang memenuhi kualifikasi;
7. Belum jelasnya status kepegawaian guru PAUD terutama guru PAUD non formal.

Sedangkan permasalahan di bidang pemuda dan olah raga adalah:

1. Belum optimalnya pembinaan atlet serta penggalan potensi atlet daerah;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif.

B. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pembangunan bidang kesehatan harus lebih difokuskan pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) melalui penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI) serta Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Permasalahan yang masih ditemui di bidang kesehatan adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan, sementara tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan cenderung semakin meningkat. Perilaku hidup bersih dan sehat juga masih relatif rendah, walaupun pembinaan terhadap desa sehat siaga terus dilakukan yang telah mencakup 93 desa. Selain daripada itu, AKI dan AKB masih relative tinggi walaupun selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Begitu juga kasus penyakit menular terutama DBD, HIV/AIDS, TBC, dan Malaria masih tinggi, serta kasus gizi buruk masih ditemui walaupun



cenderung menurun. Ketersediaan dokter spesialisik belum optimal sehingga menjadi kendala untuk pemenuhan pelayanan kesehatan spesialisik.

C. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Daya beli masyarakat merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia, sehingga perlu diperhatikan dalam rangka mendongkrak IPM Kabupaten Pangandaran. Permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan daya beli adalah:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Masih lemahnya tingkat kemampuan permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Kondisi perekonomian nasional yang belum stabil berpengaruh terhadap lemahnya investasi di Kabupaten Pangandaran, dilain pihak pengembangan komoditas unggulan memerlukan padat modal sehingga tidak sebanding dengan harga produknya. Berkaitan dengan hal tersebut hanya beberapa komoditas saja yang masih dipandang layak untuk dikembangkan;
4. Dengan diberlakukannya perdagangan global, belum diimbangi dengan kesiapan para pelaku usaha lokal, sehingga tingkat daya saing dengan produk impor semakin melemah;
2. Masih lemahnya posisi tawar produk pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan;
3. Masih belum tertatanya tataniaga produk pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan;
4. Masih minimnya sarana prasarana infrastruktur penunjang kegiatan perekonomian masyarakat.

D. Mewujudkan Ketahanan Pangan Masyarakat

Tantangan yang besar dalam pembangunan ketahanan pangan adalah adanya tingkat permintaan pangan dan diperlukannya ketersediaan pangan yang besar dan harus terus ditingkatkan sebagai implikasi dari jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran yang relatif besar dan terus mengalami pertumbuhan. Dengan demikian pembangunan ketahanan pangan dari sisi aspek ketersediaan dituntut untuk mampu meningkatkan kapasitas produksi dari waktu ke waktu, sementara di lain pihak ketersediaan lahan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin terbatas. Peningkatan permintaan tidak hanya didorong oleh adanya pertumbuhan penduduk, tetapi juga peningkatan pendapatan perkapita, serta oleh adanya kesadaran akan kesehatan serta pergeseran pola makan.

Pencapaian AKG (Angka Kekurangan Gizi) yang belum terjadi secara merata baik antar golongan masyarakat maupun antar wilayah pedesaan dan perkotaan. Sistem distribusi pangan yang belum optimal menjadi salah satu pemicu timbulnya masalah pada subsistem ketersediaan pangan dan konsumsi. Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat adalah:

1. Kondisi cuaca ekstrim, sehingga menyebabkan tanaman buah-buahan tertentu produksinya berkurang;
2. Semakin berkurangnya tenaga kerja penggarap lahan akibat generasi muda kurang berminat lagi pada bidang budidaya pertanian;
3. Munculnya beberapa penyakit hewan menular di beberapa desa yang berpotensi menyebar ke wilayah lainnya;
5. Masih rendahnya pengawasan lalu lintas ternak sehingga masih banyak ternak yang lolos masuk ke Kabupaten Pangandaran tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang ditandatangani oleh Dokter Hewan berwenang setempat;



6. Untuk merangsang pembuahan dimusim berikutnya dilakukan pemeliharaan tanaman secara intensif;
7. Mengusulkan penetapan status pengelolaan lahan eks HGU kepada pemerintah pusat;
8. Rendahnya pengendalian mutu dan keamanan pangan;
9. Sistem distribusi pangan yang belum efisien;
10. Perkembangan harga yang masih sangat fluktuatif dan cenderung meningkat;
11. Masih lemahnya dukungan infrastruktur produksi pangan;
12. Rendahnya kondisi Nilai Tukar Petani;
13. Sumberdaya dan kelembagaan petani masih tradisional;
14. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk pertanian;
15. Keterbatasan dalam mengkases pembiayaan alternatif.

Ketahanan pangan lebih di fokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan protein hewani. Sasaran yang ingin dicapai antara lain meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan, terpenuhinya stok beras, tertatanya distribusi dan perdagangan beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan dan menurunnya tingkat kehilangan pasca panen.

E. Penanganan Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Pangandaran adalah:

1. Kemampuan pembina yang masih rendah;
2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk pembinaan keterampilan;
3. Kabupaten Pangandaran bukan merupakan Daerah Kawasan Industri, sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor swasta relatif rendah.

Jumlah Penduduk Kabupaten Pangandaran pada semester I tahun 2019 berjumlah 422.615 orang, namun dari sisi kualitas pendidikan yang masih belum baik, akses kepada kesehatan yang masih kurang, pendapatan yang rendah, kebutuhan kalori belum mencukupi mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan. Dampak dari kemiskinan tersebut adalah ketidakcukupan pengeluaran/belanja, kesehatan yang rendah, pendidikan rendah atau buta huruf, terisolir secara sosial, rasa tidak aman, kurangnya kebebasan dan beraspirasi, serta ketidakberdayaan. Penurunan jumlah penduduk miskin (angka kemiskinan) harus dilakukan secara komprehensif yang melibatkan berbagai komponen/ *stakeholder*.

Masalah kemiskinan dan pengangguran masih merupakan persoalan yang belum terselesaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Pangandaran, sebanyak 150.047 KK merupakan Rumah Tangga sasaran perlindungan sosial tahun 2015 menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 43.435 Rumah Tangga. Munculnya permasalahan baru yang menyebabkan kecenderungan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu krisis ekonomi global yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja, serta masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat khususnya kalangan petani dan nelayan akibat dari masih rendahnya nilai tukar produk pertanian dan fluktuasi harga produk pertanian.

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pangandaran menunjukkan perkembangan yang cukup berarti akan tetapi pertumbuhannya masih rendah. Hal ini menjadi tantangan di masa mendatang untuk lebih menciptakan lapangan kerja baru untuk menurunkan angka pengangguran yang masih tinggi. Secara umum tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami penurunan hal ini disebabkan adanya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pengangkatan Tenaga Guru Kontrak.



Angka beban tanggungan kembali berkurang selama kurun waktu 2014-2018, hal ini disebabkan dibentuknya kelompok-kelompok usaha Pemberdayaan Kelompok Masyarakat yang sudah ada melalui pemberian bantuan modal. Upaya-upaya pemberian kerja sementara Sistem Padat Karya dan pembentukan kelompok-kelompok usaha serta pemberdayaan kelompok usaha yang sudah ada sangat membantu dalam mengurangi Angka Pengangguran Terbuka.

Urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Pangandaran diarahkan pada meningkatkan kesempatan kerja melalui persiapan tenaga kerja berkualitas serta mendorong tenaga kerja mandiri untuk berpartisipasi di berbagai sektor. Peningkatan kemampuan tenaga kerja salah satunya melalui pendidikan dan pelatihan melalui lembaga-lembaga pelatihan baik pemerintah maupun swasta. Lembaga pelatihan di Kabupaten Pangandaran adalah lembaga pelatihan swasta yang menyelenggarakan kursus komputer, kursus Bahasa Inggris dan lainnya sedangkan lembaga pelatihan pemerintah belum ada dan masih dalam tahap perencanaan pembangunan BLK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan pekerja agar merasa aman dalam melaksanakan tugas, maka perusahaan memberikan fasilitasi standar kesejahteraan bagi pekerja dengan adanya peraturan perusahaan, terbentuknya unit kerja SPSI, terbentuknya lembaga kerjasama Bipartit, terbentuknya keselamatan dan kesehatan kerja, terbentuknya koperasi pekerja dan sistem pengupahan.

Tantangan di bidang ketenagakerjaan kedepan adalah ketersediaan tenaga kerja yang *skillfull* sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Oleh karena itu lembaga-lembaga pelatihan harus mampu menyediakan berbagai macam diklat yang responsif pasar dan kompetitif.

F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia guna terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang penting dan strategis. Pembangunan SDM di Kabupaten Pangandaran diarahkan untuk mewujudkan SDM yang mempunyai motivasi, berpengetahuan, berkemampuan, berkemauan untuk mengembangkan dirinya, serta mampu untuk hidup layak. Selama tahun 2017-2018 keberdayaan masyarakat Kabupaten Pangandaran menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain keberdayaan perempuan, keberdayaan pemuda, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

Tantangan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat kedepan adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah sehingga kurang dapat mengoptimalkan swadaya masyarakat. Disatu sisi, masih adanya persepsi konservatif terhadap peran perempuan dalam pembangunan namun disisi lain tuntutan kesetaraan gender semakin mengemuka sehingga perlu ruang aktualisasi bagi perempuan kedepan.

G. Penanganan Bencana Alam dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah:

1. Kegiatan usaha tani masih belum sepenuhnya memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, sehingga tingkat erosi dan sedimentasi masih relatif tinggi, Hal ini berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran petani, pemilikan lahan yang sempit, kultur masyarakat, serta belum lengkapnya peraturan yang mendukung upaya konservasi;
2. Gejala krisis air khususnya di musim kemarau dirasakan semakin meningkat, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Sumber-sumber mata air sebagian telah



- hilang atau debitnya sangat kurang pada musim kemarau sebagai akibat kerusakan daerah tangkapan airnya;
3. Kualitas kadar air cenderung semakin menurun akibat pencemaran dari limbah domestik (sampah, limbah dari rumah tangga) dan limbah industri;
 4. Sumberdaya tambang/bahan galian selama 5 tahun terakhir belum dikelola dengan baik dan benar. Pada umumnya pemanfaatan bahan tambang/galian merupakan usaha-usaha rakyat baik perorangan, maupun kelompok/badan hukum, tetapi pada umumnya belum memiliki izin dan cenderung merusak lingkungan;
 6. Kurangnya ketersediaan data potensi tambang/galian sehingga menjadi salah satu kendala rendahnya minat investasi di bidang tersebut;
 7. Krisis energi nasional khususnya yang berkaitan dengan bahan bakar dari fosil sebagai sumber energi dampaknya sudah mulai dirasakan di daerah;
 8. Belum tersedianya sarana, prasarana dan SDM Pengelola Laboratorium.

Sebagai modal dasar pembangunan, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Pangandaran mempunyai keragaman potensi sumberdaya alam cukup besar yang dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, gangguan keamanan hutan terutama berupa pencurian, penjarahan dan perambahan hutan menunjukkan gejala semakin meningkat. Hal ini antara lain disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan hutan yang kurang menunjang.

Masyarakat desa kawasan hutan pada umumnya masih dihadapkan pada masalah rendahnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sedangkan hutan rakyat areanya semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat untuk menanam kayu-kayuan. Sementara itu laju penebangan pohon juga semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya permintaan kayu untuk keperluan industri maupun bahan bangunan.

Usaha tani lahan kering khususnya di daerah berlereng menimbulkan resiko terjadinya erosi dan longsor. Kegiatan usaha tani tersebut saat ini masih belum sepenuhnya memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, sehingga tingkat erosi dan sedimentasi masih relatif tinggi. Hal ini berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan kesadaran petani, pemilikan lahan yang sempit, kultur masyarakat, serta belum lengkapnya peraturan yang mendukung upaya konservasi.

Dalam Tiga tahun terakhir ini, gejala krisis air khususnya di musim kemarau dirasakan semakin meningkat, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Sumber-sumber mata air sebagian telah hilang atau debitnya sangat kurang pada musim kemarau sebagai akibat kerusakan daerah tangkapan airnya. Kualitas kadar air juga cenderung semakin menurun akibat pencemaran dari limbah domestik (sampah, limbah dari rumah tangga) dan limbah industri.

Tingkat pengelolaan sampah yang belum optimal didukung oleh kondisi prasarana persampahan yang masih kurang dan sarana prasarana persampahan yang ada kondisinya sebagian besar rusak yang menyebabkan persentase penanganan sampah yang masih rendah yang hanya sebesar 29,18%.

Tempat proses akhir sampah yang digunakan untuk melayani pembuangan sampah kondisinya kurang memadai dan sudah melebihi daya tampung serta sudah melewati umur teknis. Selain itu, sistem pembuangan sampah yang terjadi masih bersifat "Pembuangan Terbuka"/ *Open Dumping*, sementara amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mensyaratkan bahwa TPA harus menggunakan sistem *Sanitary Landfill*.



Dalam hal pengolahan sampah, pemerintah daerah telah berupaya secara bertahap melakukan pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA, tetapi dikarenakan pemahaman masyarakat yang belum optimal serta keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan sampah secara terpadu, maka upaya tersebut belum optimal dapat diimplementasikan. Namun demikian upaya-upaya menuju ke arah pengelolaan sampah terpadu sudah mulai ditata sedemikian rupa, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, yaitu oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Kondisi prasarana pengelolaan limbah domestik sampai dengan saat ini masih kurang memadai bahwa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 2 unit (Bojong mengger dan Purbahayu) yang masih aktif digunakan, Selain itu, kondisi sarana truk tinja yang tersedia sebanyak 2 unit juga satu unit dalam kondisi rusak, Walaupun demikian, layanan yang tersedia masih belum dioptimalkan penggunaannya oleh masyarakat mengingat sosialisasi yang masih kurang kepada masyarakat mengenai keberadaan layanan untuk penyedotan limbah tinja. Cakupan pelayanan air limbah domestik masih sedikit terlayani, sehingga banyak yang masih menggunakan kolam/kebun/sungai/lubang tanah/lainnya sebagai tempat pembuangan tinja.

Sumberdaya tambang/bahan galian belum dikelola dan dimanfaatkan dengan optimal. Pada umumnya pemanfaatan bahan tambang/galian merupakan usaha-usaha rakyat baik perorangan, maupun kelompok/badan hukum, tetapi pada umumnya belum memiliki izin dan cenderung merusak lingkungan. Bahan-bahan tambang/galian yang sangat potensial antara lain meliputi; gambut, pasir, pasir besi, kalsit, pospat, batu kapur. Permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya ketersediaan data potensi tambang/galian sehingga menjadi salah satu kendala rendahnya minat investasi di bidang tersebut.

Pantai Kabupaten Pangandaran yang selain memiliki potensi antara lain pariwisata dan hasil laut (ikan dan udang) juga memiliki ancaman bencana yang perlu diwaspadai. Gelombang laut yang cukup besar mengakibatkan terjadinya abrasi di beberapa wilayah. Bencana tsunami serta peningkatan aktivitas di pantai mengakibatkan rusaknya hutan pantai, hutan mangrove, terumbu karang, serta penggunaan sempadan pantai yang kurang sesuai dengan peruntukannya.

Kekeringan, banjir, tanah longsor, pencemaran lingkungan, sampah merupakan kejadian yang rutin terjadi di Kabupaten Pangandaran. Sedangkan gempa bumi dan angin ribut merupakan bencana alam yang dapat terjadi insidentil. Berdasarkan kondisi tersebut maka pengendalian bencana alam yang bersifat rutin harus diantisipasi secara sinergis dan tuntas. Penanganan pengelolaan bencana difokuskan pada sistem kelola penanganan bencana dengan sasaran berkurangnya resiko kejadian bencana di Kabupaten Pangandaran, tertanganinya bencana/wabah secara cepat dan akurat, dan meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

H. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah dan Perdesaan

Infrastruktur wilayah dan perdesaan memiliki fungsi dan peranan yang cukup penting dalam pembangunan wilayah dan perdesaan sebagai pengarah pembentukan struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah dan perdesaan, pemacu pertumbuhan wilayah dan perdesaan serta pengikat wilayah dan perdesaan. Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah dan perdesaan baik dari segi ketersediaan dan kualitas masih merupakan persoalan besar di Kabupaten Pangandaran yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain berkaitan dengan kondisi jalan, jembatan dan irigasi yang rusak, rasio elektrifikasi rumah tangga yang baru mencapai 66,15% serta sarana dan prasarana dasar, khususnya rumah layak huni,



air bersih, persampahan yang belum memadai. Berdasarkan hasil evaluasi, pada tahun 2019 pada aspek ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan perdesaan akan mengoptimalkan aspek-aspek (a) sistem transportasi dalam mendukung aksesibilitas antar wilayah dan perdesaan, (b) kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi, (c) infrastruktur strategis di Kabupaten Pangandaran, seperti bandar udara, pelabuhan laut, jalan kabupaten dan desa, serta (d) sistem pengelolaan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan rumah tangga, pertanian dan industri berskala kecil dan menengah.

I. Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah

Permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah;
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan dan penganggaran;
3. Belum optimalnya aparatur pengelola keuangan daerah;
4. Kurangnya konsistensi dan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah;
5. Belum optimalnya tingkat kepatuhan pelaksanaan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
6. Peraturan perundangan pusat yang berkaitan dengan keuangan/penganggaran yang kadangkala tumpang tindih sehingga menimbulkan kesulitan dalam implementasi.

J. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa

Pembangunan bidang pemerintahan dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan dan peningkatan yang ditunjukkan oleh beberapa capaian kinerja pembangunan bidang aparatur, politik, hukum, serta ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Kinerja pemerintahan adalah perwujudan *good governance* dengan ciri *transparency* (keterbukaan), *faerness* (kewajaran), *responsibility* (tanggung jawab yang jelas), dan *efficiency* (peningkatan efisiensi) di segala bidang, Saat ini upaya perwujudan *good governance* dilakukan melalui reformasi birokrasi antara lain dengan penataan organisasi, perbaikan pelayanan publik, dan perbaikan manajemen sumberdaya manusia aparatur.

Permasalahan bidang pemerintahan umum adalah:

1. Terbatasnya waktu penyuluhan produk hukum kepada masyarakat;
2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur perangkat desa;
3. Masih terbatasnya kemampuan SDM pengelola keuangan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang masih baru.

Permasalahan bidang kepegawaian adalah:

1. Masih terbatasnya ASN yang mempunyai Sertifikat Pelatihan dan Sertifikat Tanda Lulus Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Terbatasnya quota pengadaan CPNSD dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi;
3. Masih terbatasnya quota peserta Diklatpim Tingkat II bagi aparatur pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat yang difasilitasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

Permasalahan bidang kearsipan adalah:

1. Belum adanya petugas kearsipan yang tetap pada Perangkat Daerah, Kecamatan dan Desa;



2. Pengelolaan arsip pada Instansi belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
3. Sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai.

Permasalahan bidang kesatuan bangsa adalah:

1. Terbatasnya sarana kerja anggota Satuan Linmas terutama di desa-desa, karena keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah; kurangnya keterampilan tenaga satuan Linmas dalam penanganan bencana serta penanganan para pengungsi;
2. Masih kurang optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
3. Ada kecenderungan/indikasi runtuhnya rasa nasionalisme dan patriotisme kebangsaan.

Permasalahan bidang perencanaan pembangunan daerah adalah:

1. Terbatasnya jumlah personal;
2. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan khusus perencanaan;
3. Belum terisinya jabatan fungsional perencana pada Bappeda;
4. Belum lengkap dan terkelola dengan baik basis data untuk perencanaan.

Tantangan pembangunan bidang politik kedepan adalah bagaimana mewujudkan masyarakat Kabupaten Pangandaran yang memiliki wawasan kebangsaan dan pengetahuan politik serta perannya dalam konstelasi pembangunan. Untuk mengaktualisasikan hal tersebut perlu diagendakan pendidikan politik untuk masyarakat.

Tantangan pembangunan bidang hukum adalah mewujudkan sistem hukum yang menjamin ditegakannya supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. Pembangunan hukum diarahkan pada upaya mewujudkan system hukum yang mampu berfungsi, baik sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan, maupun sarana untuk melakukan pembangunan.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Perencanaan pembangunan Kabupaten Pangandaran 2016 – 2021 menghadapi beberapa permasalahan baik yang terkait dengan masalah sosial budaya, ekonomi, infrastruktur dan permasalahan pemerintahan secara umum. Adapun beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya koordinasi kelembagaan di Kabupaten Pangandaran

Berbagai permasalahan tentang penegakan sistem birokrasi masih belum ideal, adanya kesenjangan antara aparatur dan kewenangan masih menjadi masalah utama bagi berjalannya sistem pemerintahan. Sehingga dengan itu semua maka roda pemerintahan menjadi sedikit terhambat untuk dapat menyesuaikan dengan Kabupaten lainnya.

- 2) Masih lemahnya penanganan limbah akibat aktivitas pariwisata

Pembangunan pariwisata tidak berarti hanya membangun daerah tujuan wisata (DTW) dari sisi fisik saja, akan tetapi juga membangun bidang sosial dan ekonomi juga. Aktivitas pariwisata yang berkelanjutan membutuhkan tidak hanya kelayakan dari aspek ekonomi, akan tetapi bagaimana agar aktivitas pariwisata tersebut dapat diterima keberadaannya oleh masyarakat – karena masyarakat mendapatkan insentif



dari keberadaan lokasi pariwisata tersebut – dan juga tidak merusak lingkungan. Survey Ripparda tahun 2015 menunjukkan adanya kecenderungan bahwa lokasi pariwisata yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan, cenderung akan meningkatkan aktivitas ekonomi informal di DTW tersebut, yang pada akhirnya berpotensi untuk mengurangi daya tarik wisata melalui penurunan kualitas lingkungan. Oleh sebab itu penanganan limbah akibat aktivitas wisata diharapkan dapat meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan kenyamanan wisatawan.

3) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kabupaten Pangandaran merupakan wilayah yang rawan terhadap kejadian bencana alam. Kejadian bencana alam sering terjadi di sebagian besar wilayah Kabupaten Pangandaran. Jenis bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pangandaran antara lain tsunami, gempa bumi, longsor, dan banjir. Hingga saat ini masih banyak pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang belum disesuaikan dengan peruntukan tata ruang. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan kedepan harus mempertimbangan aspek tata ruang dan juga aspek daya tampung dan daya dukung lingkungan.

4) Kurangnya Infrastruktur pengembangan wilayah

Kemajuan suatu wilayah sangat bergantung kepada ketersediaan dari infrastruktur yang ada di wilayahnya. Laporan PBB dalam World Development Report (WDR) tahun 1994 menggambarkan pentingnya infrastruktur – yang disebut sebagai social overhead capital – dalam peningkatan pembangunan. Infrastruktur bisa dibagi ke dalam 2 bidang, yaitu infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Yang dimaksud dengan infrastruktur pengembangan wilayah lebih memfokuskan pada infrastruktur ekonomi, yang terdiri atas; (1) utilitas publik seperti telekomunikasi, sistem air perpipaan, saluran air/drainase; (2) jaringan jalan; dan (3) prasarana transportasi lainnya seperti jalur kereta api, bandara dan pelabuhan.

Hubungan antara ketersediaan infrastruktur dan kemajuan pembangunan sangat erat. Teori Infrastructure Led Growth menyatakan bahwa daerah-daerah dengan kelengkapan infrastruktur yang lebih baik akan bisa menikmati keberhasilan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah yang kurang memiliki infrastruktur ekonomi. Minimnya ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan produktivitas modal menjadi rendah sehingga dibutuhkan modal yang sangat besar untuk menciptakan output pembangunan dalam jumlah tertentu. Rendahnya produktivitas modal ditandai dengan nilai ICOR (incremental capital output ratio) yang tinggi, angka ini biasa ditemui pada daerah-daerah yang sedang berkembang.

Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Pangandaran hingga saat ini masih relatif terbatas. Prasarana jalan, listrik, air bersih sistem perpipaan dan saluran drainase masih belum tersebar merata di seluruh wilayah. Sehingga potensi ekonomi yang besar belum dapat termanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

5) Belum optimalnya aksesibilitas ke kawasan-kawasan daerah tujuan wisata

Pengembangan pariwisata membutuhkan konektivitas yang baik antar satu daerah tujuan wisata dengan yang lainnya. Oleh sebab itu peningkatan aksesibilitas antar daerah tujuan wisata menjadi prasyarat penting pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Hingga saat ini akses pariwisata ke lokasi-lokasi tujuan wisata di pangandaran hanya terfokus pada aksesibilitas darat saja – yaitu jalan raya. Kondisi jalan raya yang ada juga belum begitu baik secara keseluruhan. Untuk pengembangan pariwisata ke depan



Kabupaten Pangandaran membutuhkan aksesibilitas lain, seperti bandara, jalur rel kereta api, jalan tol dan pelabuhan. Oleh sebab itu kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pangandaran sebagai salah satu tujuan wisata bertaraf internasional.

6) Belum efektifnya kemitraan dengan masyarakat lokal dalam industri pariwisata

Adanya kolaborasi pengembangan pariwisata Kabupaten Pangandaran dengan nilai-nilai budaya yang masih melekat di masyarakat. Tarian ronggeng ataupun jenis kesenian lain dapat dijadikan motor penggerak promosi pariwisata Kabupaten Pangandaran. Selain itu, pengembangan desa-desa wisata bisa menjadi jalan lain dari terjadinya kolaborasi kesenian daerah dengan industri pariwisata.

7) Kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

Beberapa kendala dari pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat seperti diantaranya adalah hambatan kelembagaan, sikap dan sumber daya. Hambatan kelembagaan dimaksudkan adalah dominasi pendekatan top-down yang mekanistik membuat pengembangan partisipatif sulit untuk dilakukan, meskipun pendekatan dengan konsep yang berpusat pada manusia dan bersifat partisipatif sudah mulai mendapat perhatian. Kendala sikap dimaksudkan masih belum kuatnya struktur hirarkis Pemerintah dan masih terdapat sikap-sikap Pegawai Negeri cenderung dilayani ketimbang melayani masyarakat. Keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah disatu sisi, serta kualitas sumber daya manusia yang masih rendah di sisi lain juga merupakan hambatan besar bagi pelaksanaan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Pangandaran sebagian besar belum mampu untuk bersaing secara global dikarenakan kualitas SDM masih sangat rendah. Rendahnya kualitas SDM berkorelasi juga dengan masih rendahnya sarana dan prasarana peningkatan kualitas SDM tersebut, seperti sarana pendidikan dan kesehatan yang masih terbatas.

8) Belum tergalinya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran secara merata sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu keunggulan Kabupaten Pangandaran adalah bervariasinya jenis potensi wisata yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Pangandaran. Aktivitas Pariwisata yang tersebar merata di seluruh kecamatan dan bisa menjadi leading sector karena memiliki keterkaitan ekonomi kebelakang maupun kedepan yang besar. Selain itu, memadukan sektor pariwisata sebagai unggulan utama dengan didukung oleh sektor ekonomi lainnya akan menambah kuat dan tangguhnya sektor perekonomian Kabupaten Pangandaran.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2021 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD tahun 2021. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Pangandaran baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2021. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2021 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kabupaten Pangandaran.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mewabahnya pandemi Covid-19 diseluruh penjuru dunia merubah tatanan perekonomian, kehidupan sosial dan berdampak signifikan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, regional maupun daerah. Pada tahun anggaran 2020 akibat melemahnya perekonomian dan menurunnya pendapatan daerah, alokasi pendanaan hampir seluruhnya *direfocussing* untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 baik dampak kesehatan, ekonomi maupun sosial.

Belum adanya kepastian kapan berakhirnya pandemi, serta mengacu pada arah kebijakan ekonomi nasional maupun regional, kebijakan ekonomi daerah masih mempertimbangkan pengaruh dampak Covid-19, diperlukan beberapa penyesuaian target yang telah ditetapkan pada RPJMD dengan tetap memperhatikan arahan nasional dan regional dibidang ekonomi, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai upaya menyelaraskan program pembangunan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

Secara umum gambaran tentang arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional, Provinsi dan
Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Jawa Barat	Kebijakan Kabupaten Pangandaran
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1. Akses Pendidikan untuk Semua 2. Desentralisasi Layanan Kesehatan	1. Reformasi Birokrasi 2. Kualitas Lingkungan Hidup



Kebijakan Nasional	Kebijakan Provinsi Jawa Barat	Kebijakan Kabupaten Pangandaran
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan 3. SDM berkualitas dan berdaya saing 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	3. Pertumbuhan Ekonomi Umat Berbasis Inovasi 4. Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata 5. Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara 6. Infrastruktur Konektivitas Wilayah 7. Gerakan Membangun Desa 8. Subsidi Gratis Golekmah 9. Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	3. Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata 4. Penurunan Resiko Bencana 5. Penguatan Kearifan Lokal 6. Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pemerintah 7. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender 8. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) 9. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial

Perumusan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Pangandaran selain bertujuan untuk mencapai sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah juga memperhatikan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Nasional dan Povinsi. Pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan upaya memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Tema RKP tahun 2021 mengalami penyesuaian, tema RKP sebelum Pandemi Covid-19 adalah “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tema RKP tahun 2021 setelah pandemi Covid-19 yaitu “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Fokus Pembangunan Nasional tahun 2021 ada empat yaitu Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional; Reformasi Sistem Jaringan Pengaman Sosial; dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Kebijakan strategis dilakukan dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021. Kebijakan Pembangunan Nasional tahun 2021 yang mendukung penanganan Pandemi Covid-19, yaitu:

1. Sosialisasi dan diseminasi informasi perkembangan, penanganan, dan pemulihan Covid-19 secara merata dan berkeadilan melalui berbagai media di pusat dan daerah;
2. Pengembangan teknologi pemilu (e-rekap & evoting);



3. Pendampingan dan pemberian bantuan terhadap WNI di luar negeri yang terdampak pandemi Covid-19;
4. Inisiasi kerja sama pembangunan menggunakan kerangka KSST di bidang kesehatan, antara lain pengembangan diagnostic kit dan vaksin;
5. Pelaksanaan knowledge sharing kebijakan atau praktik unggulan penanggulangan pandemi Covid-19;
6. Optimalisasi proses penanganan perkara dalam sistem peradilan secara elektronik;
7. Optimalisasi upaya penyelesaian perkara melalui alternatif penyelesaian sengketa dan penangguhan penahanan;
8. Optimalisasi pelaksanaan asimilasi dan reintegrasi warga binaan pemasyarakatan dalam rangka pengurangan kelebihan kapasitas;
9. Percepatan pemulihan sektor usaha melalui optimalisasi sistem kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU);
10. Penguatan pelayanan publik secara terpadu;
11. Penerapan pelayanan publik secara daring/elektronik (*e-service*) terutama untuk layanan dasar dan perijinan;
12. Peningkatan kualitas fasilitas kesehatan kemhan/TNI dan Polri serta peningkatan OMSP penanggulangan bencana serta kontigensi.

Selain itu, kebijakan dan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 yang diarahkan untuk memantapkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Jawa Barat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat tahun 2021 difokuskan pada pemulihan ekonomi yang diarahkan kepada penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja dan membangkitkan kembali aktivitas usaha yang sudah ada. Dalam rangka pelaksanaan pemulihan ekonomi tersebut ditetapkan beberapa strategi dan arah kebijakan, yaitu:

- a. Pemulihan Industri dan Perdagangan
 - Meningkatkan perlindungan dan keahlian tenaga kerja;
 - Mengakselerasi perwujudan kawasan industri terpadu dalam konteks pengembangan industri 4.0;
 - Meningkatkan implementasi pola kemitraan antara industri besar dengan IKM;
 - Meningkatkan ekspor melalui pengembangan pasar ekspor nontradisional dan peningkatan kerja sama perdagangan luar negeri;
 - Digitalisasi koperasi dan UMKM untuk peningkatan daya saing;
 - Peningkatan kapasitas fiskal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat melalui penyertaan modal daerah untuk membantu efektivitas kebijakan relaksasi kredit bagi IKM dan UMKM. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 III- 36.
- b. Perbaikan Sistem Pangan Meningkatkan ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan melalui peningkatan produksi dan pasokan pangan.
- c. Pembangunan pariwisata pemulihan kinerja pariwisata dengan:
 - Mengembangkan destinasi pariwisata dan meningkatkan kualitas ekonomi kreatif dan digital; dan



- Peningkatan promosi pariwisata berbasis digital dengan branding baru yang mengutamakan protokol kesehatan.
- d. Percepatan Investasi
 - Mengoptimalkan promosi investasi dan fasilitasi para calon investor;
 - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - Fasilitasi untuk percepatan proyek-proyek investasi yang terhambat pelaksanaannya.
- e. Pembangunan Infrastruktur Mendorong pembangunan infrastruktur yang bersifat padat karya.
- f. Penguatan Sektor Kesehatan
 - Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan jaminan kesehatan; dan
 - Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

Perkembangan perekonomian daerah juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah lain yang berada di sekitar Kabupaten Pangandaran. Faktor internal yang diupayakan untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan keunggulan perekonomian yang dilandasi oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Selain dari pada itu faktor non ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kestabilan kondisi sosial dan politik, diharapkan dapat mendukung dan mendorong peningkatan perekonomian daerah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Tahun 2018 – 2021

Kabupaten Pangandaran merupakan daerah tujuan wisata utama di Jawa Barat, dan juga termasuk kedalam salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hamparan pantai yang relatif panjang serta wilayah alam yang menarik merupakan atraksi utama pariwisata di daerah ini. Aktivitas primer – pertanian – serta aktivitas perdagangan, akomodasi dan makanan, minuman masih merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Pangandaran – dilihat dari kontribusi sektoral terhadap perekonomian secara keseluruhan (PDRB). Berdasarkan hasil analisis daya saing aktivitas perekonomian Kabupaten Pangandaran ditopang oleh beberapa kegiatan utama yaitu aktivitas pertanian (yang menjadi sektor basis, dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar, akan tetapi memiliki daya saing yang lemah karena terkategori termasuk sektor yang lambat tumbuh), serta aktivitas perdagangan dan juga aktivitas akomodasi dan makanan, minuman (aktivitas yang terkait dengan ekonomi pariwisata) merupakan aktivitas ekonomi basis, dan memiliki daya saing tinggi yang menjadi aktivitas ekonomi yang akan memiliki pertumbuhan progresif.

Selain itu, aktivitas ekonomi transportasi dan pergudangan merupakan aktivitas dengan share ketiga terbesar dalam PDRB, dan termasuk dalam sektor basis dengan karakteristik memiliki daya saing yang tinggi dengan pertumbuhan yang cepat. Aktivitas ekonomi ini di harapkan akan dapat menjadi sektor yang akan memiliki konektivitas terhadap aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya di Kabupaten Pangandaran, sehingga menjadi salah satu sektor penting untuk dikembangkan di masa yang akan datang. Ketiga sektor yang telah dijelaskan di atas merupakan sektor-sektor penting dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran di masa yang akan datang. Kondisi PDRB Kabupaten Pangandaran atas dasar harga berlaku dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.2
PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2018 - 2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2018		2019*		2020**		2021**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Primer	2.899.245,00	27,97	3.127.421,26	27,62	2.616.845,43	23,39	3.046.871,30	24,90
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.836.506,50	27,36	3.065.084,73	27,07	2.544.883,47	22,75	2.978.197,00	24,34
2	Pertambangan dan Penggalian	62.738,50	0,61	62.336,53	0,55	71.961,97	0,64	68.674,30	0,56
II	Skunder	1.404.869,00	13,55	1.555.056,31	13,73	1.503.301,96	13,44	1.662.804,80	13,59
1	Industri Pengolahan	501.953,75	4,84	540.706,07	4,78	534.590,35	4,78	583.453,00	4,77
2	Pengadaan Listrik dan Gas	7.577,50	0,07	7.973,87	0,07	6.579,21	0,06	7.875,50	0,06
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.453,65	0,01	1.671,50	0,01	1.149,40	0,01	1.584,30	0,01
4	Konstruksi	893.884,10	8,62	1.004.704,87	8,87	960.982,99	8,59	1.069.892,00	8,74
III	Tersiaer	6.061.905,40	58,48	6.640.324,03	58,65	7.066.721,65	63,17	7.528.510,60	61,52
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.085.532,10	20,12	2.283.410,53	20,17	2.326.365,43	20,80	2.497.407,00	20,41
2	Transportasi dan Pergudangan	1.234.672,00	11,91	1.318.347,07	11,64	1.578.315,59	14,11	1.599.471,00	13,07
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	932.137,30	8,99	1.060.116,39	9,36	968.869,81	8,66	1.125.285,00	9,19
4	Informasi dan Komunikasi	158.387,80	1,53	166.214,79	1,47	250.760,19	2,24	238.582,00	1,95
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	201.704,20	1,95	208.116,75	1,84	248.609,01	2,22	252.254,00	2,06
6	Real Estate	269.483,80	2,60	298.425,31	2,64	298.961,04	2,67	324.873,00	2,65
7	Jasa Perusahaan	100.791,00	0,97	124.320,39	1,10	129.101,86	1,15	140.241,00	1,15
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	314.157,00	3,03	316.297,03	2,79	325.674,07	2,91	329.792,00	2,69
9	Jasa Pendidikan	584.416,30	5,64	658.673,62	5,82	733.604,26	6,56	788.972,00	6,45
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23.070,40	0,22	25.668,68	0,23	27.907,53	0,25	29.907,60	0,24
11	Jasa lainnya	157.553,50	1,52	180.733,47	1,60	178.552,88	1,60	201.726,00	1,65
Produk Domestik Regional Bruto		10,366,019.40	100	11,322,801.61	100	11.186.869,04	100	12.238.186,70	100

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019 (Diolah Bappeda Kab. Pangandaran)

**) Angka Sementara*

***) Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan hasil estimasi, diperkirakan kontribusi tiap sektor PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2020 akan mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya pengaruh Covid-19, namun pada tahun 2021 akan kembali mengalami peningkatan. Distribusi sektor terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 24,34%, dengan komoditas utama adalah padi, jagung dan kelapa. Sektor selanjutnya adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 20,41%. Sedangkan sektor berikutnya adalah transportasi dan pergudangan, dan penyediaan akomodasi dan makan minum masing-masing sebesar 13,07% dan 9,19%. Perkiraan di tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Pangandaran nilainya sebesar



Rp. 11,187 Trilyun dan di tahun 2021 diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp 12,238 Trilyun.

Berikutnya adalah estimasi perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010, sebagai alternatif lain dalam melihat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah yang merupakan PDRB riil. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Kabupaten Pangandaran juga masih sangat didominasi oleh dua sektor utama yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Perkiraan di tahun 2020 PDRB ADHK Kabupaten Pangandaran nilainya sebesar Rp. 8,165 Trilyun dan di tahun 2021 diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar Rp. 8,209 Trilyun.

Tabel 3.3
PDRB Kabupaten Pangandaran Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2018 - 2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	2018		2019*		2020**		2021**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Primer	1.805.430,08	24,68	1.862.812,68	24,03	2.035.194,63	24,93	2.014.927,86	24,55
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.756.167,48	24,01	1.814.827,54	23,41	1.980.396,09	24,26	1.961.264,39	23,89
2	Pertambangan dan Penggalian	49.262,60	0,67	47.985,14	0,62	54.798,54	0,67	53.663,47	0,65
II	Skunder	1.052.110,82	14,38	1.137.587,97	14,68	1.168.473,54	14,31	1.186.771,81	14,46
1	Industri Pengolahan	359.440,30	4,91	382.886,81	4,94	399.749,67	4,90	403.497,91	4,92
2	Pengadaan Listrik dan Gas	5.203,35	0,07	5.385,28	0,07	5.897,28	0,07	5.807,24	0,07
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	927,57	0,01	1.015,78	0,01	871,07	0,01	839,19	0,01
4	Konstruksi	686.539,60	9,39	748.300,10	9,65	761.683,36	9,33	776.262,63	9,46
III	Tersiaer	4.457.722,52	60,94	4.750.523,59	61,29	4.961.155,42	60,76	5.007.264,31	61,00
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.659.822,40	22,69	1.761.761,54	22,73	1.857.857,92	22,75	1.865.471,08	22,72
2	Transportasi dan Pergudangan	792.580,72	10,83	847.203,25	10,93	886.438,21	10,86	892.500,33	10,87
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	646.846,00	8,84	706.084,90	9,11	715.416,41	8,76	730.931,04	8,90
4	Informasi dan Komunikasi	152.124,70	2,08	166.235,40	2,14	166.241,68	2,04	171.186,23	2,09
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	146.516,80	2,00	147.995,66	1,91	162.439,14	1,99	161.429,27	1,97
6	Real Estate	217.208,60	2,97	238.268,97	3,07	239.092,69	2,93	245.402,23	2,99
7	Jasa Perusahaan	74.774,70	1,02	81.706,32	1,05	82.415,41	1,01	84.262,17	1,03
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	231.860,80	3,17	231.985,70	2,99	262.252,56	3,21	256.447,51	3,12
9	Jasa Pendidikan	385.327,60	5,27	404.745,11	5,22	422.409,37	5,17	428.604,43	5,22
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.922,30	0,24	19.402,16	0,25	19.637,61	0,24	19.989,23	0,24



No	Uraian	2018		2019*		2020**		2021**	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
11	Jasa lainnya	132.737,90	1,81	145.134,58	1,87	145.865,77	1,79	149.581,41	1.82
	Produk Domestik Regional Bruto	7,315,263.42	100,00	7.750.924,24	100,00	8.164.823,59	100,00	8.208.963,98	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019 (Diolah Bappeda Kab. Pangandaran)

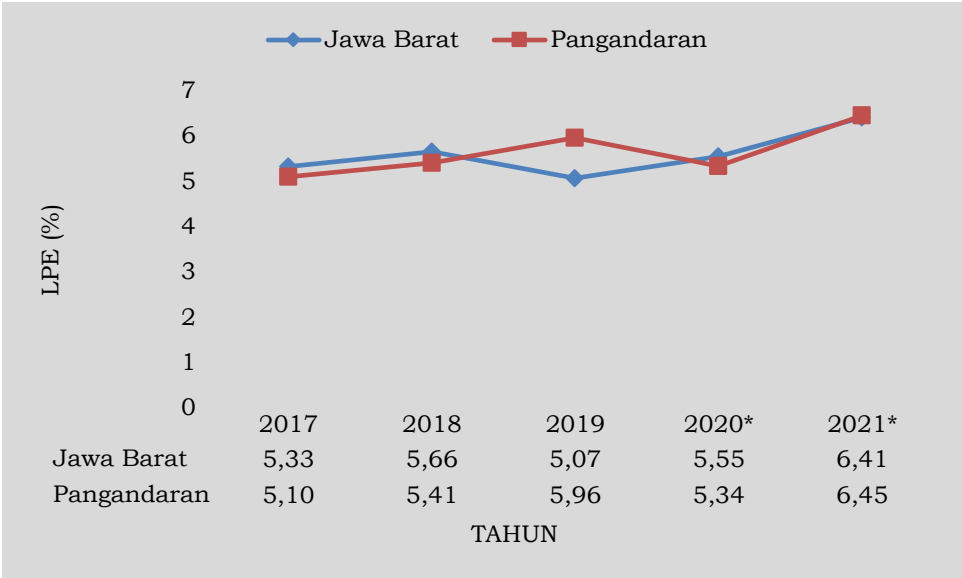
*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data diatas dapat diartikan bahwa terjadi penurunan kontribusi terhadap PDRB pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Pangandaran. Hal ini menjadikan adanya perubahan secara struktural dari perekonomian di Kabupaten Pangandaran. Saat ini sektor yang terkait dengan pariwisata menjadi fokus utama untuk diproyeksikan mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Pangandaran, seperti sektor perdagangan besar dan eceran, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyedia akomodasi dan minuman, serta sektor pendukung pariwisata lainnya. Secara historis sektor-sektor tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Sektor-sektor penunjang pariwisata diproyeksikan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Untuk itu, diperlukan suatu perencanaan pembangunan pariwisata yang terintegrasi di Kabupaten Pangandaran.

Sejalan dengan terus membaiknya aktivitas ekonomi di beberapa sektor PDRB tersebut, sedikit banyak berdampak pula pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran. Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat diketahui dari nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran seperti terlihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pangandaran dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 - 2020



Sumber: BPS Jawa Barat dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa LPE Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat, sedangkan pada tahun 2019 berada di atas LPE Provinsi Jawa Barat. Namun jika dilihat berdasarkan tren LPE Kabupaten Pangandaran nilainya konsisten meningkat dari tahun 2017 sebesar 5,10% menjadi 5,96% di tahun 2019. Berbeda halnya dengan



LPE Provinsi Jawa Barat yang berada pada kondisi tidak konsisten, karena capaian angkat yang turun-naik.

Selanjutnya atas dasar penjelasan tersebut, maka kondisi seperti ini tentunya memerlukan upaya tindak lanjut dalam rangka mempertahankan konsistensi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran. Salah satunya adalah dengan lebih memaksimalkan capaian kinerja dari indikator urusan bidang ketenagakerjaan yang sudah mengalami perkembangan positif. Sedangkan untuk mengatasi persoalan dapat dilakukan dengan membuka kesempatan bagi pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru yang berdasarkan pada kekhasan daerah (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran juga dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Daya beli masyarakat Kabupaten Pangandaran tahun 2019 sebesar Rp.9.423.000,- naik dari tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp.8.968.000,-. Begitupula dengan daya beli masyarakat pada tahun 2020 yang diproyeksikan menurun menjadi sebesar Rp.8.893.000,-. Meningkatnya daya beli masyarakat akibat peningkatan kegiatan ekonomi seiring dengan berlangsungnya dua *event* besar pada tahun 2018 yakni Pilgub dan Pilkada Jawa Barat serta rencana Pemilu serentak tahun 2019. *Event* besar seperti ini umumnya meningkatkan permintaan terhadap tenaga kerja informal pendukung acara serta meningkatkan penjualan ritel baik dari kelompok makanan dan minuman maupun pakaian. Salain itu, kebijakan Pemerintah Pusat yang meningkatkan alokasi anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dan dukungan masyarakat berpendapatan rendah (seperti PKH, Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Pangan, Bidik Misi, dan Dana Desa) pada APBN 2018 diharapkan juga turut berkontribusi kepada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurunnya daya beli Masyarakat pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic virus corona.

Percepatan pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Pangandaran yang terus berlanjut diperkirakan juga memberikan *multiplier effect* kepada pendapatan masyarakat. Pembangunan tersebut diantaranya adalah pembangunan RSUD Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan secara *multiyear*, pembangunan Puskesmas, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan ke wilayah strategis dan penataan objek wisata. Selain itu terdapat proyek *multiyear* dan jangka panjang yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi yaitu pembangunan pelabuhan Bojong Salawe, pembangunan kampus Universitas Padjadjaran dan Poltek Kelauatan Perikanan, pengembangan Bandara Nusawiru, pembangunan *Pangandaran Integrated Aquarium and Marine Research Institute* (PIAMARI), pembangunan jalan tol yang menghubungkan Cileunyi, Tasikmalaya sampai dengan Pangandaran dan reaktivasi kereta api dari Banjar sampai Pangandaran. Hal tersebut dapat meningkatkan dan mendorong para pengusaha untuk berinvestasi di Kabupaten Pangandaran.

Potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, terlihat dari nilai investasi di Kabupaten Pangandaran dengan kondisi tidak konsisten. Nilai investasi di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 471.716.357.987,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 266.425.145.992,- dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 205.291.211.995,- pada tahun 2018.



Dengan melihat data investasi tersebut, maka diperlukan adanya rencana tindak lanjut sebagai bentuk respon dalam mengatasi persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, karena peningkatan laju investasi merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk pertumbuhan perekonomian. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan adanya kebijakan untuk pembentukan kawasan khusus industri agar menjadi daya tarik bagi para investor untuk mengembangkan modalnya di Kabupaten Pangandaran. Hal tersebut sejalan dengan prioritas dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menjadikan Pangandaran sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata dan industri kemaritiman. Diharapkan dengan rencana tersebut, dapat meningkatkan daya tarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pangandaran. Selain itu, dengan adanya kebijakan yang lebih memihak ke sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) terutama dalam penataan dan pengembangan produk lokal yang dapat meningkatkan daya saing produk. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pembangunan ekonomi daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Perekonomian Kabupaten Pangandaran yang membaik juga didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali. Secara umum nilai inflasi Kabupaten Pangandaran dari tahun 2017 sampai dengan 2019 termasuk ke dalam tingkat inflasi ringan atau inflasi yang mencapai kurang dari 10% per tahun, meskipun nilainya fluktuatif. Pada kondisi ini inflasi masih wajar dan tidak mengganggu perekonomian secara menyeluruh, bahkan inflasi tahap ini diyakini mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah. Data inflasi Kabupaten Pangandaran tahun 2019 mencapai angka 3,25%, mengalami sedikit kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai angka 3,24%. Sedangkan pada tahun 2020 inflasi Kabupaten Pangandaran diproyeksikan mengalami sedikit kenaikan dengan angka 3,27%. Untuk melihat inflasi di Kabupaten Pangandaran pada tahun 2017-2020 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.4
Laju Inflasi Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2020

No	Tahun	Laju Inflasi
1	2017	3,56
2	2018	3,24
3	2019*	3,25
4	2020**	3,27

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, 2019 (Diolah Bappeda Kab. Pangandaran)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Inflasi mempunyai hubungan yang kuat dengan konsumsi, karena apabila terjadi inflasi maka harga-harga barang dan jasa akan naik sehingga berpengaruh terhadap jumlah konsumsi masyarakat yang artinya konsumsi masyarakat akan menurun. Hal ini disebabkan karena stabilitas harga yang tercermin dari tingkat inflasi mempunyai dampak yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berupaya dalam menstabilkan laju inflasi agar senantiasa tidak terjadi adanya *hyper inflation* yang nantinya akan berdampak terhadap melemahnya laju pertumbuhan ekonomi.

Selain hal tersebut diatas, keberhasilan perekonomian suatu daerah juga dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini akan terlihat kualitas sumber daya manusia sekaligus income rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan



indikator yang relevan dalam melihat pencapaian tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran akan mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Berdasarkan data ketenagakerjaan, pada tahun 2019 terdapat 234.003 orang angkatan kerja menurun dari tahun 2018 terdapat 240.175 orang angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pangandaran tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018 namun masih relatif kecil yaitu 4,48%, sedangkan untuk Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 95,52% yang artinya bahwa peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja cukup tinggi yaitu mendekati 100%. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Pangandaran tahun 2017 sampai tahun 2020 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2020

No	Indikator	2017	2018	2019*	2020**
1.	Angkatan Kerja (orang)	243.702	240.175	234.003	234.555
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,34	3,58	4,48	3,14
3.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,66	96,42	95,52	96,09
4.	Angka Beban Ketergantungan (%)	41,28	43,37	46,93	46,55

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Diolah Bappeda Kab. Pangandaran)
*) Angka Sementara
**) Angka Sangat Sementara

Masalah ketenagakerjaan tidak hanya dilihat dari tingkat pengangguran dan jumlah penduduk bekerja saja, namun perlu diperhatikan pula aspek kualitas ketenagakerjaan. Salah satunya adalah dengan memperhatikan angka beban ketergantungan. Angka beban ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Pada tahun 2018, angka beban ketergantungan di Kabupaten Pangandaran sebesar 43,37% yang artinya dari setiap 100 penduduk produktif masih menanggung beban sekitar 44 penduduk tidak produktif (dibawah umur 15 tahun dan 65 tahun keatas).

Selain bidang ketenagakerjaan, kondisi perekonomian juga berpengaruh terhadap angka ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan penduduk. Indeks gini (Gini Ratio) merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Gini Ratio Kabupaten Pangandaran termasuk dalam kategori ketimpangan sedang karena berada pada angka 0,3 sampai 0,5 yaitu sebesar 0,34 pada tahun 2019.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kabupaten Pangandaran tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018, baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Penciptaan kesempatan kerja yang lebih baik dan stabilitas harga dilansir merupakan determinan menurunnya angka kemiskinan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:



Tabel 3.6
Indikator Kemiskinan Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 - 2020

No	Indikator	2017	2018	2019*	2020**
1.	Angka Kemiskinan (orang)	39.460	32.190	30.730	30.400
2.	Persentase Kemiskinan (%)	10,1	8,12	7,71	9,41
3.	Gini Ratio	0,35	0,34	0,34	0,34

Sumber: BPS Kabupaten Ciamis, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Diolah Bappeda Kab. Pangandaran)
 *) Angka Sementara
 **) Angka Sangat Sementara

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dari tahun ke tahun terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan langsung kepada masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2018 mencapai 32.190 jiwa dan menurun menjadi 30.730 jiwa pada tahun 2019. Penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan sesuai dengan misi kelima RPJMD Kabupaten Pangandaran yaitu Membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Misi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Pangandaran yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang ditunjukkan dengan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga dan lain-lain. Melalui misi ini warga Kabupaten Pangandaran juga dibentuk untuk mempunyai keahlian, profesional, produktif dan mandiri serta dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya sehingga mampu menangkap kesempatan kerja dan/atau mengembangkan kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan juga diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Pangandaran tahun ini diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2020, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja perekonomian menjadi lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Proyeksi Pembangunan Ekonomi
Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020	Target Tahun 2021
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,21	68,17	68,78
2.	Tingkat Kemiskinan	%	7,71	7,54	6,77
3.	Indeks Gini	Indeks	0,345	0,34	0,33
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,48	3,91	3,69
5.	Persentase Pertumbuhan PDRB	%	5,96	5,34	6,45

Sumber: Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021 dan Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021



Berdasarkan perkembangan indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Pangandaran tahun 2019 maka diproyeksikan bahwa tahun 2020 dan 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pangandaran yang ditunjukkan dengan peningkatan persentase pertumbuhan PDRB mampu tumbuh hingga 5,34%-6,45%. Selanjutnya kebijakan pembangunan ekonomi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangandaran.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Global

Beberapa pergeseran dalam perekonomian global berlanjut dan memengaruhi dinamika ekonomi dunia 2019. Pergeseran tersebut saling berkaitan dan memengaruhi perkembangan ekonomi dunia dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada 2019. Pergeseran tidak hanya berkaitan dengan perilaku struktur perekonomian, tetapi juga berhubungan dengan respons kebijakan. Pergeseran dipicu empat hal utama, yakni dari kebijakan banyak negara yang berorientasi domestik (*inward looking orientation*) dan volatilitas arus modal dunia yang meningkat, hingga kepada dampak digitalisasi ekonomi yang naik pesat dan perilaku agen ekonomi yang berubah sebagai respons atas perkembangan digital. Perkembangan ini kemudian menimbulkan komplikasi pengendalian makroekonomi, yang kemudian direspons dengan menguatnya peran strategis bauran kebijakan ekonomi dalam memitigasi risiko yang muncul.

Pertama, kebijakan anti-globalisasi yang mendahulukan kepentingan ekonomi dalam negeri (*inward looking policy*) meluas di banyak negara. Kedua, volatilitas arus modal dunia meningkat sehingga memicu tetap tingginya ketidakpastian pasar keuangan dunia. Ketiga, peran digital makin luas di berbagai kegiatan ekonomi pada sektor riil dan sektor keuangan. Keempat, perilaku dan hubungan antar agen ekonomi terus berubah sejalan dengan revolusi digital dalam kegiatan ekonomi yang meningkat pesat. Kelima, respons kebijakan yang ditempuh tidak hanya bertumpu pada satu kebijakan, namun perlu terintegrasi dalam satu bauran kebijakan. Pergeseran dari sisi kebijakan ini merupakan dampak lanjutan dari empat pergeseran karakter ekonomi yang telah dikemukakan sebelumnya.

Kebijakan ekonomi berorientasi domestik yang berlanjut di banyak negara dominan memengaruhi dinamika perekonomian global 2019. Ketegangan hubungan perdagangan AS-Tiongkok 2019 menjadi pemicu kondisi ini. Ketegangan hubungan dagang juga meluas antara AS dengan Jepang, Perancis, Jerman, Meksiko, Australia, India, Brazil, dan Argentina, kemudian diikuti retaliasi dari masing-masing negara. Selain itu, risiko geopolitik juga silih berganti makin menambah tidak kondusifnya ekonomi global. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) yang terjadi secara berlarut-larut, serta isu politik dan reformasi ekonomi di Meksiko, Brazil, Lebanon, dan Aljazair meningkatkan risiko geopolitik dan berpengaruh kepada kondisi ekonomi global. Aksi protes dan kerusakan yang berkepanjangan di Hong Kong, Iran, Chili, dan Irak juga turut mengganggu upaya pemulihan ekonomi 2019 di berbagai wilayah negara berkembang.

Kondisi global yang kurang kondusif itu menurunkan pertumbuhan ekonomi global. Ketidakpastian terhadap prospek perdagangan dunia meningkat dan mengakibatkan keyakinan pelaku ekonomi menurun di banyak negara. Kondisi ini kemudian mengakibatkan volume perdagangan dunia pada 2019 terkontraksi sebesar 0,2%, terendah sejak krisis finansial global. Perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global melambat secara merata, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada 2019, ekonomi global hanya tumbuh 2,9%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan 2018 sebesar 3,6%, terendah sejak krisis finansial global. Ekonomi negara maju dan



negara berkembang tumbuh 1,7% dan 3,7% pada 2019, melambat dibandingkan dengan kinerja 2018 masing-masing sebesar 2,2% dan 4,5%.

Tabel 3.8
Pertumbuhan Ekonomi Global

Negara/ Kelompok Negara	2015	2016	2017	2018	2019 ¹
Dunia	3,5	3,4	3,8	3,6	2,9
Negara Maju	2,3	1,7	2,5	2,2	1,7
AS	2,9	1,6	2,4	2,9	2,3
Eropa	2,1	1,9	2,5	1,9	1,2
Jepang	1,2	0,6	1,9	0,3	0,7
Negara Berkembang	4,3	4,6	4,8	4,5	3,7
Asia	6,8	6,7	6,6	6,4	5,6
Tiongkok	6,9	6,7	6,8	6,6	6,1
India ²	8,0	8,2	7,2	6,8	5,3
Amerika Latin	0,3	-0,6	1,2	1,1	0,1
Eropa Timur	0,8	1,8	3,9	3,1	1,8
Timur Tengah dan Asia Tengah	2,6	5,0	2,3	1,9	0,8
Afrika Sub Sahara	3,1	1,4	3,0	3,2	3,3

Sumber: WEO IMF Oktober 2019, WEO IMF Update Januari 2020, Bloomberg

1 Berdasarkan rilis negara sampai dengan Maret 2020

2 Menggunakan tahun fiskal

Perekonomian global yang melambat telah mendorong ketidakpastian di pasar keuangan dunia tetap tinggi dan memengaruhi pola arus modal global. Ketidakpastian di pasar keuangan dunia meningkat sampai dengan Triwulan III 2019, tercermin pada beberapa indikator ketidakpastian dan risiko global, seperti Volatility Index (VIX)¹ dan Economic Policy Uncertainty (EPU) Index yang meningkat sampai dengan 19 dan 1947. Perkembangan yang kurang menguntungkan ini kemudian memicu melambatnya aliran masuk modal asing ke negara berkembang. Perekonomian AS yang juga menguat dan imbal hasil AS yang menarik, turut menurunkan aliran modal ke negara berkembang karena permintaan terhadap surat utang Pemerintah AS meningkat. Bahkan, kondisi ini sempat memicu terjadinya fenomena inversi yield pada Triwulan III 2019. Secara keseluruhan, berbagai dinamika ini berdampak pada melambatnya arus modal asing ke negara berkembang dan memberikan tekanan kepada banyak mata uang negara berkembang.

3.1.3 Kondisi Perekonomian Nasional

Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum tetap berdaya tahan, dengan capaian 5,02% pada 2019. Perkembangan ini didukung oleh penyesuaian ekonomi domestik yang berjalan baik dalam merespons gejolak eksternal. Impor yang menurun dapat menyerap gejolak global sehingga pertumbuhan secara triwulanan berada di atas 5,0% sampai dengan Triwulan III 2019, sebelum turun menjadi 4,97% pada Triwulan IV 2019. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kinerja 2018 sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tetap baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang lain di Asia, kecuali pertumbuhan ekonomi Tiongkok, India, dan Filipina.

Berbagai perkembangan serta indikator ekonomi global sampai akhir 2019 sempat mendorong optimisme prospek perbaikan perekonomian domestik pada 2020. Prospek perbaikan tersebut ditopang oleh efektivitas kebijakan makroekonomi yang



telah ditempuh banyak negara pada 2019. Selain itu, kemajuan kesepakatan dagang tahap pertama AS-Tiongkok pada akhir tahun 2019 juga memberikan optimisme perbaikan kondisi ekonomi global pada 2020. Kondisi ini mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di negara maju dan negara berkembang dalam dua bulan terakhir pada 2019, bahkan berlanjut pada Januari 2020. Beberapa indikator dini global seperti indeks manufaktur, indeks pemesanan ekspor, indeks produksi, dan indeks keyakinan juga menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga berpotensi lebih tinggi.

Dengan kondisi ini, Bank Indonesia pada akhir 2019 memprakirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 akan meningkat menjadi 3,1%. Optimisme perbaikan ekonomi global pada akhir 2019 sempat menurunkan ketidakpastian pasar keuangan global dan meningkatkan aliran modal asing ke negara berkembang. Sampai dengan Januari 2020, aliran modal ke negara berkembang meningkat baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun penanaman modal langsung. Perkembangan positif ini selanjutnya mendorong apresiasi banyak mata uang negara berkembang.

a. Covid-19 Menahan Pemulihan Ekonomi Global di 2020

Dalam perkembangannya, proses pemulihan ekonomi global tertahan setelah Covid-19 merebak di Tiongkok sejak akhir Januari 2020. Covid-19 mulai tersebar di Wuhan, Tiongkok dan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tingkat persebaran Covid-19 lebih cepat dengan masa inkubasi yang lebih panjang. Tingkat persebaran yang cepat disebabkan oleh munculnya virus tersebut jelang tahun baru Lunar, pada saat lalu lintas penumpang lebih tinggi di Tiongkok. Sementara itu, masa inkubasi Covid-19 yang lebih panjang dengan gejala yang asymptotic.

Penyebaran Covid-19 yang meluas berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih rendah dari pertumbuhan 2019 melalui beberapa jalur. Dampak pandemik Covid-19 menghambat aktivitas ekonomi global tersebut terutama terjadi melalui beberapa sektor, yakni jalur pariwisata, perdagangan dan investasi. Perlambatan aktivitas ekonomi juga disebabkan oleh strategi penanganan Covid-19 di berbagai negara yang terdampak berupa penutupan akses beberapa kota atau bahkan seluruh negara (lockdown). Penyebaran Covid-19 yang makin meluas ke negara-negara di luar Tiongkok menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi global yang lebih besar dari prakiraan sebelumnya. Pembatasan kunjungan pekerja atau wisatawan yang berasal dari negara terdampak, mengakibatkan penurunan kinerja pariwisata secara global. Aktivitas ekonomi yang terbatas akibat Covid-19, terutama pada negara mitra dagang, juga menghambat permintaan atas produk domestik dan menurunkan kinerja ekspor. Pembatasan kunjungan pekerja yang berasal dari negara terdampak dapat menurunkan realisasi investasi akibat terhentinya pengembangan industri baru yang membutuhkan tenaga kerja asing.

Perkembangan yang kurang menguntungkan ini pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia melalui permintaan, penawaran, dan juga keyakinan pelaku ekonomi. Dengan dinamika yang berubah cepat ini, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2020 dapat menjadi lebih rendah lagi menjadi 2,5% disertai dengan risiko ke bawah yang tetap besar.

Prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah tersebut meningkatkan kembali ketidakpastian pasar keuangan global. Data sampai pertengahan Maret 2020 menunjukkan Covid-19 memicu penyesuaian aliran dana global dari negara berkembang kepada aset keuangan dan komoditas yang dianggap aman. Satu sisi, harga saham di berbagai negara turun tajam, termasuk di negara maju, sementara imbal hasil obligasi negara berkembang juga meningkat tajam. Namun di sisi lain, investor mengalihkan likuiditasnya ke safe haven assets seperti surat berharga AS yang

mendorong imbal hasil obligasi surat berharga negara AS (US Treasury Bond) menurun tajam, harga emas meningkat pesat, dan indeks Dolar (DXY) terapresiasi.

Berbagai perkembangan ini pada akhirnya menekan mata uang dunia dengan tingkat volatilitas yang tinggi. Ke depan, dampak Covid-19 perlu terus dicermati mengingat sampai dengan laporan ini disusun, penyebaran Covid-19 terus berlangsung sehingga berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam, termasuk potensi dampaknya ke perekonomian Indonesia.

Peningkatan Perekonomian Domestik 2020 Tertunda Pada akhir 2019, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan meningkat dalam kisaran 5,1-5,5%. Prakiraan ini dipengaruhi oleh optimisme pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas yang diperkirakan menopang perbaikan kinerja ekspor dan investasi, terutama investasi nonbangunan. Perbaikan kinerja ekspor memberikan dampak pada peningkatan konsumsi akibat meningkatnya pendapatan, yang mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi. Perbaikan ekspor juga turut mendorong pertumbuhan investasi nonbangunan akibat meningkatnya kebutuhan barang modal untuk meningkatkan output. Selain itu, porsi penduduk berpendapatan kelas menengah yang semakin besar dan dominan berdampak positif terhadap kinerja konsumsi rumah tangga yang resilien dan menopang pertumbuhan ekonomi domestik.

Pasca merebaknya Covid-19 di Tiongkok, pada Februari 2020, Bank Indonesia memprakirakan prospek pertumbuhan ekonomi domestik sedikit menurun menjadi 5,0-5,5% pada 2020. Prospek ini dipengaruhi oleh dampak langsung dan tidak langsung penurunan ekonomi Tiongkok. Peran ekonomi Tiongkok dalam perekonomian Indonesia yang tidak kecil, khususnya melalui jalur pariwisata, ekspor, dan investasi, memengaruhi prakiraan ini. Pengaruh Covid-19 tidak hanya bersumber dari pengaruh langsung melalui perekonomian Tiongkok, tetapi juga pengaruh tidak langsung melalui jalur rambatan (*spillover effect*) ke negara lain dan perekonomian dunia yang secara keseluruhan juga akan melambat. Penyebaran Covid-19 kemudian memicu ketidakpastian di pasar keuangan global, yang berdampak terhadap penyesuaian portofolio.

Covid-19 yang terus meluas ke banyak negara, termasuk Indonesia, memberikan tekanan lebih besar pada prospek perekonomian domestik. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi di negara yang terdampak Covid-19, termasuk Indonesia, diakibatkan oleh terbatasnya pasokan barang antara dari negara lain untuk keperluan produksi, dan pembatasan aktivitas ekonomi untuk pencegahan penyebaran Covid-19. Hal ini dapat menimbulkan efek rambatan pada berkurangnya permintaan tenaga kerja dan tertahannya pendapatan serta konsumsi, sehingga mengurangi permintaan domestik. Melemahnya keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan terjadinya penyesuaian perilaku konsumsi masyarakat berupa penundaan konsumsi, terutama kunjungan ke tempat wisata dan ruang publik.

Kondisi global yang belum membaik akan menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk domestik dan terbatasnya permintaan domestik. Meningkatnya ketidakpastian menyebabkan investor melakukan penyesuaian portofolio dan menyebabkan aliran dana keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan memberikan tekanan pada Rupiah. Bank Indonesia memprakirakan Covid-19 akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka pendek, untuk kemudian pulih dalam lintasan meningkat. Dengan risiko tersebut, Bank Indonesia merevisi kembali prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 menjadi 4,2-4,6%.

Tabel 3.9

Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran



Komponen	2019	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
Produk Domestik Bruto	5,0	4,2-4,6	5,2-5,6
Konsumsi Swasta	5,2	4,6-5,0	5,0-5,4
Konsumsi Pemerintah	3,3	2,1-2,5	2,9-3,3
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,5	3,1-3,5	5,9-6,3
Ekspor Barang Jasa	-0,9	-5,6--5,2	6,0-6,4
Impor Barang Jasa	-7,7	-9,3--8,9	4,6-5,0

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Tabel 3.10
 Proyeksi Pertumbuhan PDB Sisi Sektoral

Komponen	2017	Proyeksi 2020	Proyeksi 2021
Produk Domestik Bruto	5,0	4,2-4,6	5,2-5,6
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,6	3,1-3,5	3,4-3,9
Pertambangan dan Penggalian	1,2	0,0-0,4	1,4-1,8
Industri Pengolahan	3,8	3,3-3,7	4,1-4,5
Listrik, Gas dan Air Bersih	4,3	4,0-4,4	5,1-5,5
Konstruksi	5,8	4,4-4,8	6,3-6,7
Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,8	4,1-4,5	5,5-5,9
Pengangkutan dan Komunikasi	8,1	7,4-7,8	8,0-8,4
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,1	5,6-6,0	6,2-6,6
Jasa-jasa	6,8	4,9-5,3	5,8-6,2

Sumber: BPS dan Bank Indonesia

Konsumsi swasta diperkirakan menurun pada 2020 dalam kisaran 4,6-5,0% Konsumsi Pemerintah diperkirakan tetap tumbuh positif dengan kualitas belanja yang lebih baik di tengah penerimaan Pemerintah yang diperkirakan melambat. Pemerintah juga memperkuat kebijakan untuk meminimalkan dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Pertumbuhan impor tertahan akibat permintaan domestik dan kinerja ekspor yang lemah, yang diperkirakan berkontraksi pada kisaran 8,9-9,3% pada 2020. Prospek NPI 2020 diperkirakan terjaga ditopang oleh penurunan defisit transaksi berjalan.

Inflasi pada 2020 diperkirakan terkendali dalam sasaran 3,0±1%. Intermediasi perbankan menghadapi tantangan akibat dampak Covid-19. Prospek perekonomian global dan domestik pada 2020 sangat tergantung pada proses penanganan dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Risiko berlanjutnya penyebaran Covid-19 dalam jangka waktu lebih lama dan menjangkau wilayah yang lebih luas dapat menyebabkan pertumbuhan PDB dunia dan volume perdagangan dunia yang makin melambat, yang kemudian dapat menurunkan harga komoditas yang lebih dalam. Hal tersebut dapat menyebabkan koreksi terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih rendah. Dengan semakin terhubungnya jalur perdagangan dan system keuangan



antarnegara saat ini, maka dampak penurunan pertumbuhan global dapat makin cepat tertransmisikan ke negara-negara lainnya. Penanganan yang ditempuh oleh negara-negara terdampak yang tidak efektif dan efisien berisiko menyebabkan propek pertumbuhan ekonomi global dan domestik menjadi lebih lambat dari prakiraan.

b. Prospek Perekonomian Domestik Membaik di 2021

Pertumbuhan ekonomi global 2021 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi global pasca berakhirnya tekanan Covid-19. Kebijakan stimulus yang dilakukan Pemerintah Tiongkok dan otoritas di banyak negara lainnya terus diarahkan untuk mengatasi dampak penyebaran Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter global yang akomodatif pada 2020 akan mendorong pertumbuhan investasi dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di periodeperiode setelahnya, termasuk 2021. Koordinasi antarnegara dan lembaga internasional yang terus diperkuat dalam menangani dampak penyebaran Covid-19 yang meluas, juga berkontribusi. Dengan prakiraan ini, pertumbuhan ekonomi global pada 2021 diperkirakan meningkat pada kisaran 3,7%, didorong perbaikan jalur perdagangan, pariwisata dan investasi. Sejalan dengan itu, volume perdagangan dunia dan harga komoditas diperkirakan tumbuh membaik seiring dengan meningkatnya permintaan global. Prospek perbaikan ekonomi dunia setelah berakhirnya Covid-19 mendorong pertumbuhan ekonomi 2021 yang diperkirakan kembali meningkat menjadi 5,2-5,6%.

3.1.4 Kondisi Perekonomian Jawa Barat

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makro ekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah dan panjang, kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makro ekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi factor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing economy dan digital economy yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas fintech (*financial technology*) dan e-commerce. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat melalui model koperasi yang pada dasarnya menganut prinsip sharing economy akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera. Potensi ketiga terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) Jalan,



(2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan laut, (5) Rel kereta api, dan (6) Terminal bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada tahun 2020 mendatang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memacu pembangunan infrastruktur dalam 5 (lima) tahun kedepan guna melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang melaju di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur dinilai menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing provinsi dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa itu. Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Barat mencetak pertumbuhan ekonomi 5,07% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di level 5,2%, hal ini merupakan dampak dari keberadaan infrastruktur sehingga bisa memacu roda perekonomian.

Konektivitas amat penting karena laju perekonomian provinsi ini ditopang oleh sektor pengolahan dan perdagangan. Pemerintah Pusat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan telah mencanangkan berbagai kegiatan strategis yang tersebar di seluruh Indonesia yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Hal ini diawali dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat juga terus dipacu sehingga diharapkan bisa meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional. PSN yang berlokasi di Jawa Barat berjumlah 32 PSN dan lebih dari separuhnya berkaitan dengan konektivitas. PSN yang berlokasi di Jawa Barat terdiri atas jalan tol (11 proyek), perkeretaapian (4 proyek), bandara (1 proyek), bendungan (8 proyek), pelabuhan (2 proyek), dan proyek lainnya (6 proyek). Pembangunan infrastruktur akan terus dilakukan mengingat keberadaannya telah terbukti mampu menopang perekonomian Jawa Barat. Secara rinci proyek strategis Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat pada kurun waktu tahun 2018-2023 tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1
Proyek Infrastruktur Strategis Nasional di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2021



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2021, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi penggunaan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2020 - 2021

No	Indikator Makro Pembangunan	2020	2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,91 - 72,52	72,52 - 73,13
2	LPE (%)	5,5 - 5,9	5,6 - 6,0
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	7,9 - 7,7	7,7 - 7,5
4	Inflasi (%)	2,5 - 3,5	2,75 - 3,75
5	Persentase Penduduk Miskin (%)	6,5 - 6,9	6,2 - 6,6
6	Gini Rasio	0,37 - 0,38	0,37 - 0,38
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,48	1,45

Sumber: Rancangan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang penting dalam perencanaan pembangunan, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dihasilkan suatu kebijakan keuangan daerah yang akurat dan cermat, Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam pencapaian suatu pembangunan daerah memerlukan dukungan penganggaran yang berasal dari berbagai sumber, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain lain PAD yang sah. Selain itu juga dari



Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum. Anggaran Pendapatan Daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Daerah.

3.2.1 Analisis Kinerja Keuangan Periode tahun 2016-2019

a. Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah dan pinjaman daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan meliputi bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAK, DAU dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:



Tabel 3.12
Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	927.984.285.088,00	1.269.719.750.823,00	1.137.934.599.483,31	1.474.724.169.544,00	18,68%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	66.328.233.352,00	87.109.217.456,00	112.008.960.409,31	114.813.035.209,00	20,81%
1.1.1	Pajak Daerah	29.210.103.586,00	36.882.607.231,00	52.958.098.523,00	53.923.967.341,00	23,89%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	10.016.013.682,00	27.936.508.843,00	37.504.191.049,00	35.887.478.953,00	69,62%
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.102.116.084,00	22.290.101.382,00	21.546.670.837,31	25.001.588.915,00	-1,69%
1.2	DANA PERIMBANGAN	698.287.088.845,00	811.595.965.687,00	787.754.579.727,00	864.020.472.345,00	7,66%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	54.646.265.845,00	65.249.813.704,00	59.285.031.032,00	51.784.034.581,00	-0,80%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	546.731.125.000,00	538.882.193.000,00	538.351.892.000,00	568.022.063.000,00	1,33%
1.2.3	Dana Alokasi khusus (DAK)	96.909.698.000,00	207.463.958.983,00	190.117.656.695,00	244.214.374.764,00	44,72%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	163.368.962.891,00	371.014.567.680,00	238.171.059.347,00	495.890.661.990,00	66,50%
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	36.815.590.316,00	38.119.854.495,00	41.857.708.966,00	44.720.429.740,00	6,73%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	0,00	0,00	0,00	533.700,00	100,00%
1.3.4	Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	64.875.961.575,00	214.718.992.185,00	64.451.591.381,00	284.339.049.156,00	167,38%
1.3.5	Alokasi Dana Desa dari APBN	61.677.411.000,00	78.242.441.000,00	76.670.519.000,00	89.358.559.000,00	13,80%
1.3.6	Dana BOS	0,00	39.933.280.000,00	38.191.240.000,00	42.741.511.394,00	3,78%
1.3.7	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	17.000.000.000,00	34.730.579.000,00	104,30%

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran



Berdasarkan tabel 3.12 diperoleh gambaran pendapatan daerah Kabupaten Pangandaran periode tahun 2016-2019 bahwa pendapatan daerah mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 18,68% meskipun realisasi tiap tahun mengalami naik turun. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan yang cukup konsisten tiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan paling besar yaitu 20,81%. Sedangkan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami realisasi penerimaan yang tidak konsisten karena besarnya naik turun dari tahun ke tahun yaitu masing-masing sebesar 7,66% dan 66,50%.

Selanjutnya dilakukan analisis sumber pendapatan yang dilakukan untuk memperoleh gambaran proporsi dari setiap sumber pendapatan daerah yang paling dominan kontribusinya yang dilakukan dengan cara menghitung persentase dari setiap objek pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran, dibandingkan dengan total realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Tabel 3.13
Persentase Distribusi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7,15%	6,86%	9,84%	7,79%
1.1.1	Pajak Daerah	3,15%	2,90%	4,65%	3,66%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1,08%	2,20%	3,30%	2,43%
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,92%	1,76%	1,89%	1,70%
1.2	DANA PERIMBANGAN	75,25%	63,92%	69,23%	58,59%
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5,89%	5,14%	5,21%	3,51%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	58,92%	42,44%	47,31%	38,52%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	10,44%	16,34%	16,71%	16,56%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17,60%	29,22%	20,93%	33,63%
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	3,97%	3,00%	3,68%	3,03%
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6,99%	16,91%	5,66%	19,28%
1.3.5	Alokasi Dana Desa dari APBN	6,65%	6,16%	6,74%	6,06%
1.3.6	Dana BOS	0,00%	3,15%	3,36%	2,90%

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan tabel 3.13 diperoleh gambaran bahwa persentase pendapatan yang terbesar di Kabupaten Pangandaran periode tahun 2016-2019 adalah dari komponen dana perimbangan. Komponen tersebut diproyeksikan akan menjadi penyumbang terbesar untuk sektor pendapatan daerah di Kabupaten Pangandaran pada periode berikutnya. Sebagaimana diketahui dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.



b. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Analisis belanja daerah digunakan untuk melihat realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tabel 3.14 diperoleh gambaran bahwa realisasi belanja tidak langsung periode tahun 2016-2019 mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 5,76%, sedangkan untuk belanja langsung sebesar 30,64%. Rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung terbesar yaitu pada belanja bantuan sosial sebesar 49,02%. Belanja bantuan sosial mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya rencana dan pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat, lembaga swadaya, lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Untuk belanja langsung rata-rata kenaikan terbesar yaitu pada belanja modal sebesar 44,97%. Belanja modal ditujukan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal terbesar yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis daerah (jalan, jembatan, gedung, puskesmas, RSUD, tanah, kendaraan dan lain-lain).



Tabel 3.14
Rata-rata Realisasi Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	979.953.999.668,50	1.307.759.932.586,36	1.161.646.578.170,45	1.461.491.519.435,00	16,03%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	563.394.640.912,00	625.920.188.235,00	617.984.847.570,00	663.983.924.443,00	5,76%
2.1.1	Belanja Pegawai	400.278.273.758,00	400.566.063.652,00	398.403.632.832,00	419.091.076.759,00	1,57%
2.1.2	Belanja Subsidi	8.096.832.000,00	8.517.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3	Belanja Hibah	12.088.445.000,00	22.134.717.631,00	29.375.050.000,00	37.321.751.171,00	47,62%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.300.000.000,00	2.583.692.000,00	3.500.000.000,00	3.948.175.000,00	49,02%
2.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.936.259.453,00	6.695.361.227,00	10.459.269.138,00	15.542.827.382,00	33,78%
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	134.443.479.276,00	185.171.402.300,00	175.759.694.600,00	187.595.457.600,00	13,13%
2.1.7	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	251.351.425,00	251.351.425,00	487.201.000,00	484.636.531,00	31,10%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2	BELANJA LANGSUNG	416.559.358.756,50	681.839.744.351,36	543.661.730.600,45	797.507.594.992,00	30,04%
2.2.1	Belanja Pegawai	22.530.003.915,00	21.346.602.915,00	26.454.764.500,00	28.192.798.770,00	8,42%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.831.975.017,00	233.571.250.810,00	232.308.593.160,80	270.260.276.155,00	16,98%
2.2.3	Belanja Modal	221.197.379.824,50	426.921.890.626,36	284.898.372.939,65	499.054.520.067,00	44,97%

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran



3.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dapat diproyeksikan kerangka pendanaan di Kabupaten Pangandaran untuk periode selanjutnya.

Penyajian proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, namun demikian untuk mempermudah mengendalikan dan membaca konsistensi dengan dokumen RPJMD yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pada uraian dibawah ini disajikan berupa matrik kedua permendagri yang menggambarkan pemetaan dari masing-masing permendagri.

a. Pendapatan Daerah

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari pusat (dana perimbangan), serta pendapatan lain-lain. Sampai saat ini sumber pendapatan dari PAD masih relatif kecil dibandingkan dengan dana perimbangan. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah;
2. Optimalisasi pemanfaatan/pemberdayaan aset daerah;
3. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak; dan
6. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021, arah kebijakan keuangan daerah untuk sektor pendapatan daerah pada tahun 2021 untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan akan memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pendapatan daerah. Upaya pengelolaan dan peningkatan PAD diantaranya dilakukan melalui:

1. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
2. Peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah melalui sosialisasi regulasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat;
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Menaikkan pajak melalui peningkatan/penyesuaian tarif dan perluasan Subyek dan Obyek Pajak dengan meninjau ulang beberapa ketentuan Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
5. Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;



6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
7. Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada SKPD yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada SKPD yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
8. Penerapan dan penegakkan ketentuan hukum bagi wajib pajak/retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya dan Pemberian penghargaan kepada wajib pajak/retribusi yang telah memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan;
9. Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Provinsi serta SKPD Penghasil.

Dalam upaya peningkatan kafasitas fiskal daerah kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat yang dapat di sharing dengan daerah (PPH Perseorangan, PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan) guna meningkatkan bagian bagi hasil pajak;
2. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3);
3. Meningkatkan koordinasi antara Instansi Pengelola Pajak Pemerintah dan Pajak Daerah;
4. Meningkatkan upaya penggalangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN/PHLN dan APBD Provinsi;
5. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
6. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel; menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain. Pada proyeksi pendapatan daerah belum termasuk penerimaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Provinsi. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 s.d. 2022

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020 (Kesepakatan)	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
1.1	Pendapatan Asli Daerah	112,008,960,409.31	114,813,035,209.00	105,583,953,740.00	350,075,000,000.00	346,862,600,000.00
1.1.1	Pajak Daerah	52,958,098,523.00	53,923,967,341.00	43,000,000,000.00	111,550,000,000.00	106,571,000,000.00
1.1.2	Retribusi Daerah	37,504,191,049.00	35,887,478,953.00	41,000,000,000.00	197,375,000,000.00	199,123,000,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21,546,670,837.31	25,001,588,915.00	21,583,953,740.00	41,150,000,000.00	41,168,600,000.00
1.2	Dana Perimbangan	787,754,579,727.00	864,020,472,345.00	771,811,183,862.00	639,670,530,862.00	641,607,000,000.00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	59,285,031,032.00	51,784,034,581.00	87,278,289,862.00	89,670,530,862.00	103,667,000,000.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	538,351,892,000.00	568,022,063,000.00	514,231,954,000.00	550,000,000,000.00	537,940,000,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	190,117,656,695.00	244,214,374,764.00	170,300,940,000.00	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	238,171,059,347.00	495,890,661,990.00	995,991,528,579.00	448,788,245,881.00	654,064,900,000.00
1.3.1	Hibah	-	-	-	-	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	41,857,708,966.00	44,720,429,740.00	48,198,518,568.00	48,198,518,568.00	51,368,900,000.00
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	-	533,700.00	-	-	-
1.3.5	Bantaun Keuangan Daeri Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya **)	64,451,591,381.00	284,339,049,156.00	396,572,054,056.00	-	-
1.3.6	Alokasi Dana Desa dari APBN	76,670,519,000.00	89,358,559,000.00	88,353,508,000.00	-	-



No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020 (Kesepakatan)	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
1.3.7	Dana BOS	38,191,240,000.00	42,741,511,394.00	41,655,100,000.00	-	-
1.3.8	Dana Insentif Daerah	17,000,000,000.00	34,730,579,000.00	421,212,347,955.00	400,589,727,313.00	602,696,000,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1,137,934,599,483.31	1,474,724,169,544.00	1,873,386,666,181.00	1,438,533,776,743.00	1,642,534,500,000.00

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran, APBD Kabupaten Pangandaran dan RPJMD Kabupaten Pangandaran



b. Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang direncanakan;
2. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah;
3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Besarnya plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah;
6. Pemerintah daerah dapat melakukan intervensi kebijakan belanja pada sektor-sektor strategis yang dapat mempengaruhi sistem dan mekanisme pasar secara menyeluruh;
7. Dalam kerangka kebijakan kemitraan swasta pemerintah daerah untuk mendukung belanja daerah harus dilandasi kajian yang seksama terhadap masa produktif dan pembagian keuntungan yang didasari atas prinsip keadilan.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021 serta berkontribusi terhadap capaian RPJMD tahun 2021, maka kebijakan belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung yang diarahkan untuk:

1. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD dan pendampingan DAK;
2. Mengusahkan alokasi belanja sebesar 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk kesehatan. Salah satu dukungan terhadap kebijakan tersebut adalah melalui program Pangandaran Hebat yaitu program bantuan pendidikan gratis bagi seluruh siswa untuk jenjang SD, SLTP dan SLTA; program Pangandaran Mengaji yaitu program untuk membentengi generasi muda dengan pendidikan karakter berupa pembekalan pada siswa dengan pendidikan ahlak dan agama; dan program pelayanan kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran.
3. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2021, meliputi:
 - Menggerakkan sektor-sektor ekonomi untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta pemulihan perekonomian pasca pandemic Covid-19;
 - Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di seluruh wilayah;



- Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perluasan cakupan layanan sosial dasar;
 - Pemenuhan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada;
 - Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah.
4. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional; dan
 5. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan dukungan terhadap program prioritas provinsi dan pusat.

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow program*. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Untuk belanja langsung hanya menganalisis anggaran program dan kegiatan yang diusulkan pada APBD, sedangkan untuk anggaran program dan kegiatan non APBD yang diusulkan oleh perangkat daerah diakomodir secara keseluruhan dengan tidak memperhatikan sisi pendapatannya. Proyeksi belanja daerah tahun 2021 sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.16
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2018 s.d. 2022

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020 (Kesepakatan)	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
2.1	Belanja Tidak Langsung	617,984,847,570.00	666,483,924,443.00	719,679,159,128.60	557,547,484,228.00	603,323,745,000.00
2.1.1	Belanja Pegawai	398,403,632,832.00	419,091,076,759.00	429,501,556,268.60	394,240,522,141.80	409,789,000,000.00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	8,640,625,000.00	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	1,500,000,000.00	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	29,375,050,000.00	37,321,751,171.00	59,481,200,000.00	22,218,109,000.00	37,271,200,000.00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3,500,000,000.00	3,948,175,000.00	19,348,000,000.00	1,500,000,000.00	9,424,000,000.00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	10,459,269,138.00	15,542,827,382.00	4,302,906,760.00	30,892,500,000.00	27,814,300,000.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	176,246,895,600.00	188,080,094,131.00	190,888,381,100.00	106,196,353,086.20	113,517,000,000.00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	-	2,500,000,000.00	6,016,490,000.00	2,500,000,000.00	5,508,245,000.00
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	617,984,847,570.00	666,483,924,443.00	719,679,159,128.60	557,547,484,228.00	603,323,745,000.00
2.2	Belanja Langsung	543,661,730,600.45	797,507,594,992.00	1,168,216,470,266.45	896,486,292,515.00	1,054,710,755,000.00
2.2.1	Belanja Pegawai	26,454,764,500.00	28,192,798,770.00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	232,308,593,160.80	270,260,276,155.00			
2.2.3	Belanja Modal	284,898,372,939.65	499,054,520,067.00			
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	543,661,730,600.45	797,507,594,992.00	1,168,216,470,266.45	896,486,292,515.00	1,054,710,755,000.00
	TOTAL JUMLAH BELANJA	1,161,646,578,170.45	1,463,991,519,435.00	1,887,895,629,395.05	1,454,033,776,743.00	1,658,034,500,000.00

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran, APBD Kabupaten Pangandaran dan RPJMD Kabupaten Pangandaran



c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Sebagai upaya antisipasi atas ketidak pastian pendapatan daerah pada tahun 2020 sehingga berpotensi pada munculnya hutang daerah, pada tahun 2021 diproyeksikan pelaksanaan efisiensi belanja agar terjadi surplus untuk pembentukan dana cadangan serta penyertaan modal dengan rincian sebagaimana tabel berikut.



Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 s.d. 2022

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020 (Kesepakatan)	Proyeksi/Target Tahun 2021	Proyeksi/Target Tahun 2022
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	3,811,288,680.05	117,008,963,214.05	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	-	3,811,288,680.05	17,008,963,214.05	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	100,000,000,000.00	-	-
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	3,811,288,680.05	117,008,963,214.05	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan		999,998,500.00	102,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah			2,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			100,000,000,000.00	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah				-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	999,998,500.00	102,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	-	2,811,290,180.05	14,508,963,214.05	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00

Sumber: LKPJ Kabupaten Pangandaran, APBD Kabupaten Pangandaran dan RPJMD Kabupaten Pangandaran



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2021 ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Tahun 2021, merupakan tahun kedelapan setelah berdirinya Pangandaran menjadi Kabupaten Pangandaran dan Tahun kelima setelah Bupati Terpilih yang merupakan Tahun terakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021. Sebagaimana amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten dan Kota, yaitu:

- a. bahwa Penyusunan RKPD tahun 2021 harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 dalam RPJMD, rencana kerja Pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Penyusunan RKPD harus memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan hasil inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D).
- c. Penyusunan RKPD harus mengacu pada pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional dan arah kebijakan Pemerintah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2021 diselaraskan dengan Visi Misi Bupati Terpilih Kabupaten Pangandaran yang telah dituangkan didalam RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, yaitu mewujudkan ***Kabupaten Pangandaran sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia***. Yang dimaksud Tujuan Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas dan masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan, yang berpotensi untuk dikembangkan dan ditata secara terpadu membentuk suatu kawasan pariwisata dengan menonjolkan kekhasan potensinya masing-masing. Dan yang dimaksud Berkelas Dunia adalah terpenuhinya standar kualitas yang tinggi dalam penyediaan infrastruktur, fasilitas dan penataan lingkungan alami, termasuk pembinaan pelaku wisata dan masyarakat sehingga mewujudkan pelayanan wisata yang berkualitas.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diuraikan ke dalam Misi-Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Bersih dan Melayani.
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas.
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi. Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan



pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Hubungan Misi, tujuan dan sasaran pembangunan pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 4.1
Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN	TARGET		
					2019	2019	2020	2021
Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani								
Terwujudnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Target kinerja = Indeks 60	1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap LKPD	Status Laporan	WTP	WTP	WTP	WTP
			Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	3	3
			Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)	Skor	3	2	3	3
			Nilai AKIP	Nilai	B	B	B	BB
			Persentase Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	Persen	94,15	87	88	90
		2. Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	Skor	58,65	60	65	70
			Tingkat Kematangan E-Government (0 s/d 5)	Indeks	2,32	2	2,25	3
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,57	45	55	60
		3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah	Persen	7,4	7,4	18,5	29,6
					Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik	Baik
Misi 2 :Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan								

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN	TARGET		
					2019	2019	2020	2021
Terciptanya Ruang Wilayah Kabupaten yang harmonis dan berwawasan lingkungan	Ketaatan terhadap RTRW Target kinerja : 40%	1. Meningkatnya kesesuaian pembangunan terhadap rencana tata ruang wilayah	Ketaatan terhadap RTRW	persen	20,72	20	30	40
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Target kinerja : Indeks 63,36	2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,62	62,46	62,91	63,36
Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas								
1. Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur yang berkualitas	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap = 95%	1. Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang berkualitas	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	83,38	65	75	85
			Tingkat kecelakaan lalu lintas	Orang/Sejuta Km Kendaraan per Tahun	0,003	0,032	0,031	0,029
			Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	Rasio	55	60	65	70
			Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	Persen	65	55	65	75
			Indeks Resiko Sanitasi	Indeks	38,27	38	36	34
2. Meningkatnya Mitigasi bencana dalam pembangunan.	Indeks Risiko Bencana Target kinerja = Indeks 140	2. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana	Indeks Risiko Bencana	Indeks	n.a	150,6	145	140
3. Terwujudnya sarana dan prasarana pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi Target kinerja = 80	3. Mewujudkan pemenuhan bangunan pusat pemerintahan	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	Persen	5,7	18	22	80
Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal								



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN	TARGET		
					2019	2019	2020	2021
Terwujudnya pelestarian seni budaya, pengamalan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan	Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan Target kinerja = 8	1. Terwujudnya masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan dan keagamaan	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persen	50	35	70	80
			Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	Persen	83	75	85	90
		2. Meningkatnya Kesatuan Bangsa	Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Angka	1	11	10	8
		3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik dan berorganisasi	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	82%	81%	81,5%	82%
Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing								
1. Meningkatnya kualitas pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Target kinerja = indeks 68,78	1. Meningkatnya layanan pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,21	67,67	68,17	68,78
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Target kinerja = 0,57%	2. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,528	0,57	0,57	0,57
3. Meningkatnya pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Target kinerja = indeks 66,55	3. Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	69,2	65,67	66,55	66,55
4. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Keolahragaan Target kinerja = indeks 85	4. Meningkatnya Daya Saing Pemuda & Olahraga	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Indeks	0,,539	0,25	0,26	0,27
			Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	0,75	0,75	0,80	0,85



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	CAPAIAN	TARGET		
					2019	2019	2020	2021
5. Menurunnya tingkat kemiskinan	Persentase penurunan angka miskin Target kinerja = 0,75%	5. Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penurunan angka kemiskinan	Persen	0,41	0,25	0,25	0,25
Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan								
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.	Persentase pertumbuhan PDRB Target kinerja = 4,40	1. Menurunnya kesenjangan antar wilayah	Indek Gini	Indeks	0,345	0,30	0,34	0,33
		2. Menurunnya tingkat pengangguran	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	persen	4,48	3,46	3,91	3,69
		3. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Persentase pertumbuhan PDRB	persen	5,96	4,28	4,34	4,40
			Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	persen	96	96	97	98
			Jumlah Koperasi yang sehat	Jumlah	1	1	2	2
			Pola Pangan Harapan	Poin	93,2	91	94	97
			Jumlah kunjungan wisata	Jumlah	4.119.987	5 Juta	5,5 Juta	6 Juta
			Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourism Council (GSTC)</i>	Jumlah	0	0	0	1

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021



4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2021

Prioritas pembangunan Tahun 2021 disusun berdasarkan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan dan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 di wilayah Kabupaten Pangandaran serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2021. Selain itu, dalam penetapan prioritas ini juga memperhatikan tantangan dan isu pembangunan nasional tahun 2021 serta isu strategis Provinsi Jawa Barat

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Skala prioritas pembangunan tahap ke-4 RJPMN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) (disadur dari UU RPJMN No.17/2007), yaitu Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

- A. Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2021 mengalami penyesuaian semula sebelum pandemi covid 19 adalah **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”** disesuaikan menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**
- B. Fokus Pembangunan
 - 1) Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
 - 2) Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
 - 3) Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial
 - 4) Reformasi Sistem Ketahanan BencanaDengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021
- C. Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2021 adalah agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 (sebagaimana Perpres Nomor 18 Tahun 2020) meliputi:
 - 1) Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
 - 2) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
 - 3) SDM berkualitas dan berdaya saing
 - 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
 - 5) Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
 - 6) Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
 - 7) Stabilitas politik dan transformasi pelayanan publikYang memperoleh penekanan di tahun 2021 adalah PN 1, 3, 5 dan 6.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2018-2023) dengan:

- A. VISI **“TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”**
- B. MISI :
 - 1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa
 - 2. Melahirkan Manusia Yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia Dan Produktif
 - 3. Mempercepat Pertumbuhan Dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan Dan Tata Ruang Yang Berkelanjutan
 - 4. Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Ekonomi Umat Yang Sejahtera Dan Adil
 - 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif Dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, Dan Kabupaten/Kota



C. Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah **“Peningkatan Daya Saing Daerah”**

D. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua
2. Desentralisasi pelayanan keseha
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata
5. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara
6. Infrastruktur konektivitas wilayah
7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa)
8. Subsidi gratis golekmah (Golongan Ekonomi Lemah)
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran (Tahun 2016-2021) dengan:

A. Visi **“KABUPATEN PANGANDARAN SEBAGAI TUJUAN WISATA BERKELAS DUNIA”**

B. Misi:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani;
2. Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan;
3. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas;
4. Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal;
5. Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing;
6. Membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021

Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran masih memfokuskan pada kebijakan strategis pembangunan utama 4 (empat) bidang yaitu:

- I. Bidang Pendidikan
- II. Bidang Kesehatan
- III. Bidang Infrastruktur
- IV. Bidang Pariwisata

Selain Empat bidang yang menjadi fokus pembangunan, dijabarkan dalam pula dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dengan mengintegrasikan penanganan dampak COVID-19 pada setiap prioitasnya, sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi
2. Kualitas Lingkungan Hidup
3. Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata
4. Penurunan Resiko Bencana
5. Penguatan Kearifan Lokal
6. Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan
7. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender
8. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
9. Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial.



D. Tema RKPD Tahun 2021 sebagaimana mana juga menjadi tema musrenbang yaitu: **“Pemantapan Capaian RPJMD 2016-2021, Mewujudkan Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia Menuju Pembangunan Berkesinambungan”**.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2021 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta berbagai permasalahan dan tantangan di berbagai bidang juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam Musrenbang RKPD.

Hasil yang ingin dicapai pada tahun 2021 dijadikan sebagai target Indikator Makro untuk tahun 2021, yaitu:

1. Indeks pembangunan manusia (IPM) target sebesar 68,78
2. Indeks pendidikan target sebesar 64,43
3. Angka Rata-rata lama sekolah target sebesar (Tahun) 7,38
4. Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun) 12,34
5. Indeks kesehatan target sebesar 78,37
6. Angka Harapan Hidup (Tahun) target sebesar 71,44
7. Indeks daya beli target sebesar 65,92
8. Daya Beli Masyarakat/Purchasing Power Parity (Rp) target sebesar 9.307.000
9. Angka Kematian Bayi (orang/1000) target sebesar 7,11
10. Laju Pertumbuhan Penduduk (%) target sebesar 0,57
11. Kemiskinan (%) target sebesar 6,77
12. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) target sebesar 4,39
13. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) target sebesar 3,69
14. PDRB PerKapita ADH Konstan (Rp.) target sebesar 19.412.058
15. Indeks Gini (poin) target sebesar 0,33
16. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) target sebesar 63,36

Program pembangunan daerah Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi unggulan daerah dan kekhasan daerah. Untuk menentukan Urusan Pemerintah mengacu pada ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, nomenklatur program mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai sebagaimana tabel berikut:



Tabel 4.2
Penjelasan Program dan Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah Tahun 2021

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	URUSAN WAJIB				
A.1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
I	URUSAN PENDIDIKAN				
1	Program Pangandaran Madani	Pangandaran Mengaji	%	85	DISDIKPORA
		Ajengan Masuk Sekolah (AMS)	%	94	DISDIKPORA
2	Program Pangandaran Hebat	Tingkat layanan pangandaran hebat	%	98	DISDIKPORA
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini	fasilitas pendidikan	%	90	DISDIKPORA
		Tingkat layanan PAUD	%	70	DISDIKPORA
4	Program Pendidikan Non Formal Dan Informal	Tingkat Layanan Pendidikan Non Formal Dan Informal	Orang	100	DISDIKPORA
5	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan	%	100	DISDIKPORA
		Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	80,25	DISDIKPORA
		Angka Partisipasi Murni (APM)	%	80,25	DISDIKPORA
		Pemenuhan Fasilitas Pendidikan	%	95	DISDIKPORA
		Penerapan pengembangan kurikulum dan pembelajaran efektif	%	95	DISDIKPORA
		Penerapan prinsip MBS berbasis keunggulan lokal	%	95	DISDIKPORA
		Peningkatan minat, bakat dan kreativitas siswa	%	90	DISDIKPORA
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tingkat Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	96	DISDIKPORA
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	DISDIKPORA
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	90	DISDIKPORA
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	99	DISDIKPORA
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	%	99	DISDIKPORA
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	DISDIKPORA
II	URUSAN KESEHATAN				
1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	DINAS KESEHATAN

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar	%	100	DINAS KESEHATAN
2	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	DINAS KESEHATAN
3	Program peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Cakupan pelayanan kesehatan pada lanjut usia	%	100	DINAS KESEHATAN
4	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar	%	45,56	DINAS KESEHATAN
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan penderita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	%	100	DINAS KESEHATAN
		Jumlah kasus gizi buruk	orang	61	DINAS KESEHATAN
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	%	65	DINAS KESEHATAN
		Cakupan desa sehat siaga aktif non pratama	%	60	DINAS KESEHATAN
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	%	100	DINAS KESEHATAN
8	Program Pengendalian, Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100	DINAS KESEHATAN
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan rumah sehat	%	75	DINAS KESEHATAN
		Cakupan akses air bersih	%	57	DINAS KESEHATAN
		Cakupan akses jamban keluarga	%	60	DINAS KESEHATAN
		Cakupan desa yang melaksanakan STBM	%	70	DINAS KESEHATAN
		Cakupan tempat-tempat umum yang memenuhi syarat	%	76	DINAS KESEHATAN
		Cakupan tempat-tempat umum yang dibina	%	18	DINAS KESEHATAN
10	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	Cakupan tempat pengolahan makanan dan minuman yang memenuhi syarat	%	85	DINAS KESEHATAN
		Cakupan tempat pengolahan makanan dan minuman yang dibina	%	100	DINAS KESEHATAN
11	Program Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Cakupan pelayanan kesehatan kerja	%	100	DINAS KESEHATAN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Cakupan kualitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	%	100	DINAS KESEHATAN
13	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Cakupan pelayanan kesehatan BLUD	%	100	DINAS KESEHATAN
14	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya	Cakupan puskesmas dengan sarana prasarana serta alat kesehatan yang memenuhi standar	%	100	DINAS KESEHATAN
15	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan rumah sakit dengan sarana prasarana serta alat kesehatan yang memenuhi standar	%	100	DINAS KESEHATAN
16	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan ketersediaan obat	%	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase distribusi obat ke puskesmas	%	100	DINAS KESEHATAN
17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Kesehatan	Cakupan sarana dan prasarana laboratorium yang memenuhi standar	%	100	DINAS KESEHATAN
18	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	DINAS KESEHATAN
19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	90	DINAS KESEHATAN
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	%	90	DINAS KESEHATAN
21	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	90	DINAS KESEHATAN
22	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	90	DINAS KESEHATAN
III	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Cakupan pembangunan jalan dan jembatan	%	10	DPUTRPRKP
2	Program Peningkatan jalan dan Jembatan	Persentase kondisi jalan dan jembatan	%	15	DPUTRPRKP
3	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Tingkat kemandapan jalan dan jembatan (kondisi baik dan sedang)	%	100	DPUTRPRKP
4	Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan	Tertanganinya jalan dan jembatan akibat bencana	%	100	DPUTRPRKP
5	Program Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong	Proporsi drainase dan gorong - gorong kabupaten dalam kondisi baik	%	50	DPUTRPRKP
6	Program Pembangunan turap/ talud/ brojong	Persentase pembangunan turap/ talud/ bronjong	%	15	DPUTRPRKP



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan ketersediaan database jalan dan jembatan	%	100	DPUTRPRKP
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Persentase sarana prasarana kebinarmargaan dalam kondisi baik	%	67	DPUTRPRKP
9	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase luas wilayah pertanian irigasi teknis dan semi teknis dalam kondisi baik	%	70	DPUTRPRKP
10	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Tersedianya wilayah resapan dan tangkapan air	Lokasi	0	DPUTRPRKP
11	Program pengendalian banjir	Persentase luasan wilayah banjir yang ditangani dengan baik	%	15	DPUTRPRKP
12	Program Perencanaan Tata Ruang	Cakupan ketersediaan dokumen tata ruang	Dokumen	1	DPUTRPRKP
13	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap dokumen rencana tata ruang	%	93	DPUTRPRKP
14	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	%	100	DPUTRPRKP
15	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	80	DPUTRPRKP
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	%	85	DPUTRPRKP
IV	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Ketersediaan instalasi pengolahan air limbah terpusat (IPAL) ; Cakupan ketersediaan layanan air	% ; %	59	DPUTRPRKP
2	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tingkat ketersediaan infrastruktur di wilayah strategis dan cepat tumbuh	%	-	DPUTRPRKP
3	Program pembangunan infrastruktur perdesaan	Persentase infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik	%	35	DPUTRPRKP
4	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase kawasan kumuh yang tertangani	%	21	DPUTRPRKP
5	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan rumah layak huni	%		DPUTRPRKP
V	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT				



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penanganan Daerah-Daerah Pasca Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama pasca tanggap darurat	Persen	90	BPBD
2	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK	Pesen	55	BPBD
3	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	80	BPBD
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan adminsitasi perkantoran	Persen	95	BPBD
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persen	90	BPBD
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Persen	90	BPBD
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PD	Persen	85	BPBD
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	95	BPBD
9	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan cakupan kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan	orang	550	BAKESBANGPOL
10	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Peningkatan jumlah masyarakat yang memahami wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	orang	650	BAKESBANGPOL
11	Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya kesadaran berpolitik masyarakat	%	81	BAKESBANGPOL
12	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Administrasi Perkantoran	%	100	BAKESBANGPOL
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	BAKESBANGPOL
14	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	%	81	BAKESBANGPOL
15	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	BAKESBANGPOL
16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	%	30,4	SATPOL PP
17	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	0,475	SATPOL PP
18	Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Penegakan PERDA	%	33,3	SATPOL PP



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	SATPOL PP
20	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	100	SATPOL PP
21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	SATPOL PP
22	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	SATPOL PP
23	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tuisi	%	100	SATPOL PP
VI	URUSAN SOSIAL				
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase Jumlah PMKS yang dibina	%	0,1	DINAS SOSIAL PMD
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	0,1	DINAS SOSIAL PMD
3	Program pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dibina	%	25	DINAS SOSIAL PMD
4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat dan Trauma yang terbina	%	1,4	DINAS SOSIAL PMD
5	Program Pembinaan eks penyandang penyandang penyakit sosial (eks narapida, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Persentase penyandang penyakit sosial yang ditangani	%	25	DINAS SOSIAL PMD
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga kesejahteraan keluarga Sosial (LKS) yang terbina	%	70	DINAS SOSIAL PMD
7	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Cakupan layanan perkantoran	%	90	DINAS SOSIAL PMD
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur Kondisi Baik	%	100	DINAS SOSIAL PMD
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur		90	DINAS SOSIAL PMD
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tuisi	%	90	DINAS SOSIAL PMD
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	DINAS SOSIAL PMD
A.2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				
I	URUSAN TENAGA KERJA				



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Orang	265	DTKIT
2	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diserap	Org	40	DTKIT
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Tenaga Kerja Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah kasus yang terselesaikan	Kasus	5	DTKIT
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	DTKIT
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	%	100	DTKIT
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Kasus pelanggaran	Kasus	1	DTKIT
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	DTKIT
II	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Persentase perempuan di lembaga legislatif	%	-	DKBP3A
		Persentase Forum Anak yang terbentuk (kab/kota, Kecamatan dan Kelurahan)	%	9,62	
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase Kelembagaan PUG aktif	%	41,67	DKBP3A
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	Per 1000 Perempuan	0,010	DKBP3A
		Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	%	20	
		Persentase anak korban kekerasan	%	0,03	
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	%	16	
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase peningkatan pemahaman Perempuan dalam Peningkatan ekonomi keluarga	%	30	DKBP3A
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	DKBP3A
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	100	DKBP3A



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	94,42	DKBP3A
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tuisi	%	87	DKBP3A
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	80,50	DKBP3A
III	URUSAN PANGAN				
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	Poin	97	DKPKP
IV	URUSAN PERTANAHAN				
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Pemanfaatan Tanah	Cakupan Lahan Milik Pemerintah Daerah yang termanfaatkan	%	100	SEKRETARIAT DAERAH
V	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase kualitas Air dan udara memenuhi baku mutu	%	37,20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	Program Pengendalian Dampak Lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan /Usaha	Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amdal, UKL-UPL dan SPPL Pelaku Usaha	%	54	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Penanganan Sampah	%	30	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jenis data dan Informasi Lingkungan Hidup yang Dapat dipublikasikan	Jenis	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas Taman yang Ditangani	Ha	4,63	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas Lahan yang terkonservasi	Ha	17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
VI	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
1		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	95	



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%	85	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	90	
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
VII	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Persentase Kader Pembangunan Masyarakat Desa yang di bina	%	20	DINAS SOSIAL PMD
2	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Masyarakat Perdesaan yang dibina	%	20	DINAS SOSIAL PMD
3	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Persentase Perempuan yang dibina	%	20	DINAS SOSIAL PMD
4	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	%	15	DINAS SOSIAL PMD
5	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang dapat memahami penyelenggaraan pemerintahan desa	%	25	DINAS SOSIAL PMD
6	Program Penataan Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa	Persentase Desa yang memiliki Administrasi Desa dan Pengelolaan Aset Desa yang baik	%	100	DINAS SOSIAL PMD
VIII	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
1	Program Keluarga Berencana	Penurunan Pasangan Usia Subur yang isterinya di bawah usia 20 tahun	%	1,85	DKBP3A
		Angka pemakaian kontrasepsi / CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	75,64	DKBP3A



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Ratio Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja pada kelompok PIK-R	%	9,33	DKBP3A
3	Program Pelayanan Kontrasepsi	Unmet Need KB	%	15,5	DKBP3A
4	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	Persentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) aktif	%	35	DKBP3A
5	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Ratio Peningkatan Pemahaman mengenai penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIVAIDS	%	9,33	DKBP3A
6	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase Peningkatan pemahaman kelompok Tribina Keluarga Berencana	%	26,24	DKBP3A
IX	URUSAN PERHUBUNGAN				
1	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas perhubungan yang layak	%	25	DINAS PERHUBUNGAN
2	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ dalam kondisi baik dan Operasional	%	25	DINAS PERHUBUNGAN
3	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terciptanya Lalu Lintas yang aman, lancar, tertib, dan selamat	%	100	DINAS PERHUBUNGAN
4	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan yang layak	%	25	DINAS PERHUBUNGAN
5	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum	%	35	DINAS PERHUBUNGAN
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	DINAS PERHUBUNGAN
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	100	DINAS PERHUBUNGAN
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	DINAS PERHUBUNGAN
X	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tingkat pengembangan sistem elektronik	tingkat	3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2	Program Pengembangan Infrastruktur dan Fasilitas TIK	Cakupan ketersediaan Data Center Pemda	%	70	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah aplikasi e-government yang dikelola	sistem	5	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Program Kemitraan untuk Pembangunan dan Pengembangan Pemanfaatan TIK	terciptanya refleksi aplikasi sistem pemerintahan	%	10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Tingkat tata kelola informasi dan komunikasi publik	tingkat	3	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
6	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat	%	10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	95	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	85	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
9	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	80	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	95	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
XI	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH				
1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro	Prosentase Usaha Mikro terhadap UMKM	%	98	DPKUMKM
2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Prosentase Koperasi Aktif	%	36,95	DPKUMKM
XII	URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase Peningkatan Investor	%	16,67	DPMPTSP
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Prosentase Peningkatan Investasi Daerah	%	27,87	DPMPTSP
3	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	Prosentasi Peningkatan Dokumen Perizinan	%	8,33	DPMPTSP
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	DPMPTSP
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	DPMPTSP
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	DPMPTSP



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	%	100	DPMPTSP
XIII	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	100	DISDIKPORA
2	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Penurunan Angka Penyalahgunaan Narkoba	%	98	DISDIKPORA
3	Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda	Peningkatan Kapasitas Pemuda Karang Taruna	%	100	DISDIKPORA
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Peningkatan Fasilitas Olahraga	%	60	DISDIKPORA
5	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	DISDIKPORA
XIV	URUSAN STATISTIK				
1	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Cakupan informasi statistik daerah	%	70	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
XV	URUSAN PERSANDIAN				
1	Program Keamanan Informasi dan Persandian	Cakupan penerapan sistem keamanan elektronik	%	6,9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
XVI	URUSAN KEBUDAYAAN				
1	Program Pelindungan Kebudayaan Lokal	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	Program Pengembangan Kebudayaan Lokal	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	%	70	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	Program Pemanfaatan Kebudayaan lokal	Persentase pemanfaatan kebudayaan lokal	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
XVII	URUSAN PERPUSTAKAAN				
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Prosentase koleksi yang di pinjam pertahun	%	20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	Program peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan	Meningkatnya pengunjung perpustakaan per tahun	Pengunjung	1800	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XVIII	URUSAN KEARSIPAN				
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan Sistem Administrasi Kearsipan	%	20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosentase Peningkatan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD	%	30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3	Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terpeliharanya sarana dan prasarana Kearsipan	%	30	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
4	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Cakupan layanan informasi kearsipan	%	90	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
B	URUSAN PILIHAN				
I	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	2.845	DKPKP
2	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Ton	107	DKPKP
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan Administrasi Perkantoran	%	100	DKPKP
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	100	DKPKP
5	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin Aparatur	%	100	DKPKP
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	DKPKP
II	URUSAN PARIWISATA				
1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi pariwisata	%	70	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase pengembangan kemitraan pariwisata	%	75	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata berkelanjutan	Persentase peningkatan pengembangan destinasi berkelanjutan	%	1	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5	Program Pengembangan Ekonomi Pariwisata	persentase pemanfaatan ekonomi di destinasi wisata bagi masyarakat lokal	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
6	Program Pengembangan Sosial Budaya pariwisata	persentase Pemanfaatan pariwisata bagi masyarakat, pengunjung dan budaya	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
7	Program Pengembangan Lingkungan Pariwisata	persentase pengembangan lingkungan pariwisata	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase layanan yang diberikan	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
9	Program pengembangan pelayanan publik	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tugas dan fungsi	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
13	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN yang memiliki disiplin aparatur	%	90	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
III	URUSAN PERTANIAN				
1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Kemitraan Usaha Tani	Jumlah Kerjasama	5	DINAS PERTANIAN
2	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan & Hortikultura	%	3	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya Produksi Komoditi Peternakan	%	0,85	DINAS PERTANIAN
		Menurunnya Kasus Penyakit Ternak	% Penurunan Kasus Penyakit Ternak	10	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	%	4	DINAS PERTANIAN
3	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Penumbuhan Kelompok Tani	%	0,09	DINAS PERTANIAN
		Meningkatnya Klasifikasi/ Kelas Kelompok Tani	%	60	DINAS PERTANIAN
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	90	DINAS PERTANIAN
5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	40	DINAS PERTANIAN
6	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	%	90	DINAS PERTANIAN
7	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	90	DINAS PERTANIAN
IV	URUSAN PERDAGANGAN				
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase pelaku usaha yang tertib niaga	%	52	DPMPSTSPKP
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan Nilai Ekspor	%	19	DPMPSTSPKP
3	Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Jumlah PKL dan Pedagang Asongan yang dibina	Jumlah Pedagang	2.700	DPMPSTSPKP
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pasar	Prosentase Pasar yang dibangun dan direvitalisasi	%	50	DPMPSTSPKP
V	URUSAN PERINDUSTRIAN				



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Jumlah Pelaku Usaha IKM	Pelaku Usaha	706	DTKIT
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentasi perekonomian petani tembakau meningkat	%	40	DTKIT
VI	URUSAN TRANSMIGRASI				
1	Program Transmigrasi Regional	Jumlah Calon Transmigrasi yang Akan diberangkatkan	Orang	10	DTKIT
2	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Transmigrasi Lokal	-	-	DTKIT
3	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Penurunan Keluarga Miskin yang Transmigrasi	KK	5	DTKIT
C	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				
I	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN				
1	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase Perencanaan Pembangunan Ekonomi	%		BAPPEDA
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan tahunan bidang Pemerintahan, sosial budaya terhadap implementasi	%		BAPPEDA
3	Program Perencanaan Pembangunan bidang Prasarana wilayah dan sumber daya alam	Cakupan ketersediaan dokumen prasarana wilayah dan sumber daya alam	%		BAPPEDA
4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan tahunan terhadap implementasi	%		BAPPEDA
5	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Cakupan data pembangunan daerah	%	80	BAPPEDA
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	BAPPEDA
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik	%	100	BAPPEDA
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	%	95	BAPPEDA
II	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah	Cakupan Program Penataan Kelembagaan dan Katatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan SPM, NSPK dan SOP	%	100	SEKRETARIAT DAERAH
2	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Cakupan Fasilitas Kegiatan KDH/WKDH	%	100	SEKRETARIAT DAERAH



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Produk Hukum yang diharmonisasikan	Buah	30	SEKRETARIAT DAERAH
4	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan Kerjasama Anar Pemerintah Daerah yang difasilitasi	Buah	7	SEKRETARIAT DAERAH
5	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Cakupan Pelaksanaan Program Kegiatan yang Sesuai dengan Perencanaan	%	95	SEKRETARIAT DAERAH
6	Program RAN HAM	Cakupan Dokumen Laporan RANHAM dan Laporan Kabupaten Peduli HAM	Dokumen	5	SEKRETARIAT DAERAH
7	Program Peningkatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja yang Baik		Tinggi	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PEMERINTAHAN)
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran, IKM	Bulan	12	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	100	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
10	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin aparatur	%	100	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
11	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN UMUM)
12	Program Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Cakupan Reaisasi Anggran Program Kegiatan yang sesuai dengan perencanaan	%	98	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN)
13	Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Peleporan Kinerja dalam Hasil Enalupsi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Nilai	A	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI)
14	Peogram Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	Cakupan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan Keagamaan	%		SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN KESRA)
15	Program Pengendalian Managemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Laporan Kebijakan Pelaksanaan KDH	Dokumen	15	SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN)
16	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Presentase kepuasan terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD	%	90	SEKRETARIAT DPRD
17	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%		SEKRETARIAT DPRD
18	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%		SEKRETARIAT DPRD
19	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat disiplin aparatur	%	100	SEKRETARIAT DPRD
20	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tusi	%	100	SEKRETARIAT DPRD
21	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	SEKRETARIAT DPRD



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	KECAMATAN PADAHERANG
23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN PADAHERANG
24	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	KECAMATAN PADAHERANG
		Cakupan Program Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	KECAMATAN PADAHERANG
25	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran, IKM	%	100	KECAMATAN MANGUNJAYA
26	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN MANGUNJAYA
27	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	0	KECAMATAN MANGUNJAYA
28	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	%	100	KECAMATAN MANGUNJAYA
29	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	KECAMATAN KALIPUCANG
30	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN KALIPUCANG
31	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN KALIPUCANG
32	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	KECAMATAN PANGANDARAN
33	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi	%	100	KECAMATAN PANGANDARAN
34	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	KECAMATAN PANGANDARAN
35	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	KECAMATAN SIDAMULIH
36	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN SIDAMULIH
37	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	KECAMATAN SIDAMULIH
38	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	KECAMATAN PARIGI
39	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN PARIGI
40	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	KECAMATAN PARIGI
41	Program Pembinaan dan Fasilitasi	Cakupan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	KECAMATAN PARIGI



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengelolaan Keuangan Desa				
42	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	%	100	KECAMATAN CIJULANG
43	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN CIJULANG
44	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	KECAMATAN CIJULANG
45	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	KECAMATAN CIJULANG
46	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	KECAMATAN CIMERAK
47	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN CIMERAK
48	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	KECAMATAN CIMERAK
49	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	KECAMATAN CIMERAK
50	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	KECAMATAN CIGUGUR
51	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN CIGUGUR
52	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	KECAMATAN CIGUGUR
53	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	KECAMATAN CIGUGUR
54	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	KECAMATAN LANGKAP LANCAR
55	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	KECAMATAN LANGKAP LANCAR
56	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	KECAMATAN LANGKAP LANCAR
57	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	%	100	KECAMATAN LANGKAP LANCAR
III	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN				
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Menurunnya rasio nilai temuan keuangan dari pengawasan pihak eksternal (BPK-RI) terhadap total APBD	%	≤0.17	INSPEKTORAT



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Jumlah SKPD yang kematangan penyelenggaraan SPIPnya berada pada level 3	Jumlah SKPD	28	INSPEKTORAT
3	Program Peningkatan Kualitas Hasil Pengawasan	Jumlah SKPD yang akuntabilitas kinerjanya Sangat Baik (BB)	Jumlah SKPD	29	INSPEKTORAT
4	Program Pengembangan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang telah melaksanakan pembangunan Z1 menuju WBK/WBBM	Jumlah SKPD	28	INSPEKTORAT
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	INSPEKTORAT
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik	%	100	INSPEKTORAT
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	INSPEKTORAT
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	INSPEKTORAT
IV	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN				
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan aset yang tercatat	%	100	BPKD
		Cakupan Ketersediaan Dokumen Penganggaran	%	100	BPKD
		Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	%	90	BPKD
		Persentase peningkatan ketetapan pajak daerah lainnya pertahun	%	20	BPKD
		Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap ketetapan daerah lainnya pertahun	%	95	BPKD
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	BPKD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kendaraan dinas/operasional yang tersedia	%		BPKD
		Cakupan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang tersedia	%	100	BPKD
		Persentase gedung kantor dan kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	%	100	BPKD
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur	%	100	BPKD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik	%	100	BPKD
V	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN				



NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	TAHUN 2021		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			SATUAN	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	%	100	BKPSDM
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat dan uji kompetensi	Orang	660	BKPSDM
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi	%	95,00	BKPSDM
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memenuhi Standar Kualitas dan Kuantitas	%	95,00	BKPSDM
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun	Laporan	6	BKPSDM

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusun rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang dituangkan dalam tabel rekapitulasi rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2021, yang berisi nama program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif, lokasi, perangkat daerah penanggungjawab dan keterkaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam matrik daftar prioritas rencana program dan kegiatan daerah tahun 2021 Kabupaten Pangandaran.

Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara/tentatif dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kompleksitas permasalahan pembangunan di Kabupaten Pangandaran yang masih cukup tinggi khususnya pada aspek pendanaan, tentu tidak mungkin dapat diatasi dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Pangandaran yang sangat terbatas, namun perlu difasilitasi dari APBN, APBD Provinsi dan mengoptimalkan peran swasta serta swadaya masyarakat.

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai pada tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagai mana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program prioritas yang rencananya akan dibiayai pada tahun 2021 *dimaping/dipetakan* sesuai Peraturan Menteri tersebut dengan disertakan Berita Acara Pemetaan.

Rekapitulasi program dan kegiatan prioritas tahun 2021 berdasarkan urusan dapat dilihat pada tabel 5.1 daftar prioritas rencana program dan kegiatan daerah tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Pangandaran.



TABEL V.1
DAFTAR PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan					Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe	
TOTAL														5.586.496.531.480	4.423.959.890.344				
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														4.006.797.484.439	2.834.549.927.629				
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														863.673.110.642	943.569.851.849				
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														417.083.361.249	302.451.072.890				
TOTAL UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														113.383.825.093	130.391.398.856				
TOTAL UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														143.614.626.991	164.761.897.594				
TOTAL UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														14.511.027.134	16.687.681.204				
TOTAL UNSUR KEWILAYAHAN														18.615.683.930	21.408.036.518				
TOTAL UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														8.817.412.002	10.140.023.804				
Unit Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA														954.263.044.881	1.043.637.877.307				
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											868.820.854.626	997.117.309.146	
1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											286.865.174.098	329.894.950.213	
1	01	01	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											138.416.952	159.179.495	
1	01	01	2.01	01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Renstra Disdikpora Tahun 2021 - 2025	1 Dokumen			58.896.000	67.730.400		
1	01	01	2.01	02		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Operator Perencanaan Jumlah dokumen perencanaan	1 Orang			69.695.952	80.150.345		
1	01	01	2.01	05		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis dokumen evaluasi yang dbeli	4 Dokumen			9.825.000	11.298.750		
1	01	01	2.02			Administrasi Keuangan											284.668.912.989	327.369.249.937	
1	01	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Pemmbayaran Gaji dan Tunjangan ASN Lingkup Disdikpora	1 Tahun			283.886.429.189	326.469.393.567		
1	01	01	2.02	06		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			1. Jasa Operator Pelaporan Jumlah Dokumen SAKIP dan Pelaporan 2.1 Jumlah dan jenis pemeliharaan aplikasi dan web yang di pelihara 2.2 Jumlah dan jenis pemeliharaan aplikasi dan web yang di pelihara	2 Orang 3 Aplikasi 1 Aplikasi			782.483.800	899.856.370		
1	01	01	2.03			Administrasi Umum											1.999.119.269	2.298.987.160	
1	01	01	2.03	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Materai yg dibeli Jumlah Pengiriman surat yg dilakukan	1600 Buah 50 Kali			22.000.000	25.300.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
1	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	4 Jenis			53.301.100	61.296.265	
1	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis tanah/gedung kantor yang disewa	3 Sewa Tanah			96.835.000	111.360.250	
1	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	3 Mobil 31 Motor			41.347.000	47.549.050	
1	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis dokumen pengelolaan keuangan	5 Orang			52.275.000	60.116.250	
1	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah SDM Non PNS	2 Orang			34.800.000	40.020.000	
1	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	100 Jenis			103.982.397	119.579.757	
1	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan Jumlah dan jenis Buku Kompilasi Data Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang dibuat Jumlah dan jenis Buku Statistik Pendidikan yang di buat	350 Jenis 100 Eksemplar 100 Eksemplar			53.058.991	61.017.840	
1	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	30 Jenis			10.116.990	11.634.538	
1	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah SDM Non PNS	1 Paket			36.396.045	41.855.452	
1	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	25 buah			22.920.000	26.358.000	
1	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	1300 Paket			12.559.500	14.443.425	
1	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	375 Kali			420.345.000	483.396.750	
1	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	10 Jenis			9.596.977	11.036.524	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan komputer yang dibeli Jumlah Pusat Data dan Manajemen Informasi yang di bangun	12 Komputer 1 Unit			666.008.442	765.909.708	
1	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	203 Stel			169.944.638	195.436.334	
1	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Non PNS	4 Orang			69.780.000	80.247.000	
1	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	3 Unit			90.717.189	104.324.767	
1	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis mebeleur yang dipelihara	8 Jenis			16.500.000	18.975.000	
1	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Jenis			16.635.000	19.130.250	
1	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									58.724.888	67.533.621		
1	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	120 Stel			58.724.888	67.533.621	
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN									555.746.228.346	637.081.488.924		
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar									322.530.942.038	370.271.505.344		
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun	1 Kegiatan 2 RKB 3 Unit 4 Paket 8 Kelas 284 Paket 1009 Meter2			144.566.195.432	165.612.046.747	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang di rehab Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang di rehab	6 Unit 497 Ruang			63.667.525.000	73.217.653.750	
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis mebeler yang di beli Jumlah dan jenis mebeler yang di beli	284 Paket 2500 Stel			73.293.500.000	84.287.525.000	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis Buku Raport Siswa SD yang di beli	100 Persen			778.584.000	895.371.600	
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah yang di Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BOS Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan BOS	282 Sekolah 1 Kegiatan			409.871.228	471.351.912	
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Ujian Sekolah Pelatihan pembuatan Soal Ujian Sekolah Pendataan Siswa SD Kelas 6 Penyusunan Kisi-Kisi Soal US SD Rapat Koordinasi Pelaksana Ujian Sekolah	50 Sekolah 284 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan			231.101.567	265.766.802	
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penerimaan Peserta Didik Baru Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah	282 Sekolah 80 Sekolah			194.381.005	223.538.156	
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ajangan AMS Jumlah Juara Jumlah Kegiatan Tingkat Kabupaten Jumlah Kegiatan Tingkat Provinsi	1000 Orang 4 Juara 3 Kegiatan 3 Kegiatan			1.266.623.662	1.456.617.211	
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pelatihan KTI (Karya Tulis Ilmiah) Jumlah yang menyusun	100 Orang 282 Orang Kepala Sekolah			1.532.660.144	1.762.559.166	
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sekolah dan siswa yang menyelenggarakan pangandaran hebat	284 Sekolah			36.590.500.000	42.079.075.000	
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama									157.565.128.111	181.199.897.329		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun	3 Lokal 100 Unit			30.753.385.000	35.366.392.750	
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun Jumlah Bangunan/Sarana dan Prasarana Sekolah yang di Bangun	53 Paket 300 meter			18.048.685.000	20.755.987.750	
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang di rehab Jumlah dan jenis bangunan sekolah yang di rehab	6 Unit 70 Ruang			13.001.540.000	14.951.771.000	
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebeluer Sekolah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis mebeler yang di beli Jumlah dan jenis mebeler yang di beli	53 Paket 2500 Stel			64.555.000.000	74.238.250.000	
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan UNBK yang di beli Jumlah dan jenis peralatan yang di beli	20 Paket 53 Paket			9.066.878.818	10.426.910.641	
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah yang di Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BOS Jumlah Sosialisasi Penyelenggaraan BOS	53 Sekolah 1 Kegiatan			155.704.700	179.060.405	
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Persiapan Gladi Bersih UBK Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Persiapan Simulasi UBK Jumlah Sekolah yang di Monitoring Kegiatan UBK Penyusunan Kisi kisi soal US SMP Rekon Data Peserta UBK Sosialisasi Pelaksanaan Ujian Sekolah	159 Orang 159 Orang 37 Sekolah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan			229.824.278	264.297.920	
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Penerimaan Peserta Didik Baru	24 Sekolah 53 Sekolah			103.138.657	118.609.456	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ajengan AMS Jumlah Juara Jumlah Kegiatan Tingkat Kabupaten Jumlah Kegiatan Tingkat Provinsi	793 Orang 4 Juara 4 Kegiatan 4 Kegiatan			1.107.687.599	1.273.840.739	
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pelatihan KTI (Karya Tulis Ilmiah) Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan KTSP	100 Orang 106 Orang			985.084.059	1.132.846.668	
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sekolah dan siswa yang menyelenggarakan pangandaran hebat	37 Sekolah			19.558.200.000	22.491.930.000	
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									58.050.802.362	65.401.314.041		
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumah TK Negeri yg dibangun Jumlah Bangunan yg di Bangun Jumlah Bangunan yg di Bangun Jumlah dan luas gedung sekolah yang di bangun	10 Lembaga 4 Unit 30 Paket 5 Lokal 2 Unit 102 Meter2 224 Meter2			4.531.812.000	4.328.006.600	
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Bangunan yg di Bangun Luas Bangunan yg di Bangun Panjang Pemagaran PAUD	14 Meter2 80 Meter 50 Meter			439.067.000	267.931.600	
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung yg Rehabilitasi	2 Paket			140.857.000	161.985.550	
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis buku dan alat tulis yang di beli Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	300 Paket 1 Unit 331 Unit			51.898.377.410	59.683.134.021	
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK BOP PAUD)	252 Lembaga			97.045.464	111.602.284	
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							205.683.500	-	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah juara kegiatan apresiasi peserta didik paud	1 Juara			43.295.400	49.789.710	
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan pelatihan KTI (Karya Tulis Ilmiah)	100 Orang			565.743.615	650.605.157	
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis pelayanan pendidikan pangandaran hebat berjalan untuk PAUD Jumlah sekolah dan siswa yang menyelenggarakan pangandaran hebat	110 % 252 Lembaga			128.920.973	148.259.119	
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									17.599.355.835	20.208.772.210		
1	01	02	2.04	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							187.380.000	185.000.000	
1	01	02	2.04	13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah angka kelulusan Paket B Jumlah angka kelulusan Paket C	150 Orang 175 Orang			17.546.398	20.178.358	
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ajengan Pangandaran Mengaji	6962 orang			17.028.658.750	19.582.957.562	
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Kegiatan yang di laksanakan bagi penilik	11 Orang			65.108.122	74.874.340	
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Juara	3 Lembaga			300.662.565	345.761.950	
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM									315.195.592	362.474.931		
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar									315.195.592	362.474.931		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan		
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe	
1	01	03	2.01	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Bimtek Penyelenggaraan Sekolah Berbasis Pariwisata Jumlah sekolah yang di Monitoring Penyelenggaraan Sekolah Berbasis Pariwisata MoU Penyelenggaraan Sekolah Berbasis Pariwisata Peningkatan Kurikulum Muatan Lokal Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal	568 Orang 50 Sekolah 1 Dokumen 100 Persen 1 Panduan			315.195.592	362.474.931			
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN									25.771.800.000	29.637.570.000				
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan									25.771.800.000	29.637.570.000				
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PTK Non PNS yang mendapatkan tunjangan	1947 Orang			25.479.000.000	29.300.850.000			
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Guru Bantu dan Guru Non PNS Daerah terpencil	42 Orang			292.800.000	336.720.000			
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA									122.456.590	140.825.078				
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota									122.456.590	140.825.078				
1	01	06	2.01	06	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Gerakan Literasi Nasional	200 Orang			122.456.590	140.825.078			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												85.442.190.255	46.520.568.161	
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												33.625.903.005	38.317.288.456	
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota												23.813.500.000	27.378.025.000	
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemuda yang mendapat peningkatan kapasitsa wirausaha	200 orang			50.000.000	50.000.000			
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Hibah	9 Paket			23.763.500.000	27.328.025.000			
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota												9.812.403.005	10.939.263.456	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis Lembaga yang di bina Jumlah dan jenis paskibraka yang di latih Jumlah dan jenis paskibraka yang di latih Jumlah dan jenis peserta yang di mengikuti lomba Jumlah dan jenis siswa dan materi yang di bina/diberikan Jumlah karang taruna yang di bina jumlah organisasi yang di bina	10 Lembaga 20 Orang 120 Orang 20 Peserta 180 Siswa 20 Karangtarun a 3 organisai 150 Orang			9.812.403.005	10.939.263.456		
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN									51.816.287.250	8.203.279.705			
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									42.047.801.800	6.612.500			
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis Sarana dan Prasarana Olahraga yang di bangun Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana yang di Bangun Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana yang di Bangun Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana yang di Bangun Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana yang di Bangun Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana yang di Bangun	13 Unit 1 Paket 3000 Meter2 3600 Meter2 8208 Meter2 32000 Meter2			42.047.801.800	6.612.500		
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									437.767.000	455.830.100			
2	19	03	2.02	03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Juara	3 Juara			437.767.000	455.830.100		
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga									6.359.133.900	7.313.003.985			
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah karang taruna yang di bina jumlah organisasi yang di	5 Cabor 2 organisai			6.359.133.900	7.313.003.985		
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi									2.971.584.550	427.833.120			
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Juara	3 Juara			2.471.579.550	427.833.120		
2	19	03	2.05	04	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi										500.005.000	-		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.00 DINAS KESEHATAN												246.433.058.837	283.455.779.417					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											246.433.058.837	283.455.779.417	
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											73.186.123.371	84.164.041.876	
1	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											257.391.000	295.999.650	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Renstra yang disusun	1 dokumen			25.800.000	29.670.000	
1	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen BOK dukungan manajemen Jumlah dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD yang disusun	5 dokumen			231.591.000	266.329.650	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan									63.105.646.056	72.571.492.964		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkup Dinas Kesehatan	1000 orang			62.038.246.056	71.343.982.964	
1	02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun Jumlah operator Simda BMD yang dikontrak Jumlah operator sistem informasi manajemen kesehatan yang dikontrak	4 orang 26 orang 21 orang			1.067.400.000	1.227.510.000	
1	02	01	2.03		Administrasi Umum									9.823.086.315	11.296.549.262		
1	02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah benda pos dan paket pengiriman yang disediakan	3000 buah			30.000.000	34.500.000	
1	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Frekuensi pembayaran rekening listrik, telepon, air dan internet	12 bulan			2.651.040.000	3.048.696.000	
1	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah juru masak yang dikontrak	16 orang			240.000.000	276.000.000	
1	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pengemudi yang dikontrak Jumlah unit kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	35 orang 100 unit			975.000.000	1.121.250.000	
1	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah operator Keuangan yang dikontrak Jumlah operator Pendapatan Daerah yang dikontrak	26 orang 1 orang			729.000.000	838.350.000	
1	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah tenaga kebersihan yang dikontrak	49 orang			917.560.131	1.055.194.151	
1	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah item ATK yang disediakan	45 item/jenis			160.070.616	184.081.208	
1	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan Jumlah barang cetak dan	55 buah 250000 lembar			194.090.000	223.203.500	
1	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah paket komponen instalasi listrik yang disediakan	20 item/jenis			76.612.310	88.104.156	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Frekuensi penyediaan bahan bacaan	12 kali			21.600.000	24.840.000	
1	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan	2500 porsi			103.292.000	118.785.800	
1	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah aktifitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang	150 kali			431.740.000	496.501.000	
1	02	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang disediakan Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan	15 unit 1 unit			992.350.000	1.141.202.500	
1	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	50 item/jenis			119.807.735	137.778.895	
1	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah komputer dan komponennya yang	12 bulan			1.528.296.411	1.757.540.873	
1	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Frekuensi pemeliharaan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang disediakan Jumlah tenaga pengamanan yang dikontrak	12 bulan 3 unit 66 orang			306.000.000	351.900.000	
1	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan			178.627.112	205.421.179	
1	02	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Frekuensi pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	12 bulan			93.000.000	106.950.000	
1	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Frekuensi pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	12 bulan			75.000.000	86.250.000	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT										170.355.281.176	195.966.335.108	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota										78.759.139.105	90.573.009.970	
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Puskesmas yang dibangun	8 paket			11.059.045.000	12.717.901.750	
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah gedung Farmasi yang dibangun	1 unit			5.997.695.000	6.897.349.250	
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Mou jejaring rujukan yang dihasilkan Jumlah paket aplikasi yang dikembangkan Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan pelayanan	27 dokumen 1 aplikasi 1 RSUD			69.973.628	80.469.672	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Puskesmas dengan penambahan/pengembangan	3 unit			4.000.000.000	4.600.000.000	
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas										2.877.400.000	3.309.010.000	
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Fasilitas Kesehatan lainnya yang di rehab/adanya pemeliharaan	15 unit			2.877.400.000	3.309.010.000	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	45 item/jenis			3.603.865.028	4.144.444.782	
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	45 item/jenis			3.881.127.900	4.463.297.085	
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah alat kesehatan dan alat medik lainnya yang disediakan	66 unit			33.792.442.549	38.861.308.931	
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah obat/vaksin yang disediakan	280 item/jenis			10.560.190.000	12.144.218.500	
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	5 item/jenis			20.000.000	23.000.000	
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang secara rutin mendapatkan perawatan/pemeliharaan	1 dokumen			20.000.000	23.000.000	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										88.689.193.786	102.050.334.610	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah ibu bersalin yang dilayani	4 dokumen			2.524.000.000	2.902.600.000	
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokuemen pelayanan kesehatan balita	4 dokumen			36.890.000	42.423.500	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah masyarakat Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	18825 orang			512.892.435	589.826.300	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen pelayanan kesehatan pada usia lanjut	4 dokumen			2.465.000	2.834.750	
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							755.757.600	869.121.240	
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV yang dilayani kesehatannya	3 dokumen			72.726.800	83.635.820	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen pelayanan kesehatan gizi masyarakat	5 dokumen			1.305.685.372	1.501.538.178	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	3 dokumen			30.947.302	35.589.397	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen pelayanan kesehatan lingkungan	8 dokumen			479.106.179	608.733.863	
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya yang ada	60 orang			49.142.511	56.513.888	
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Surveilans Kesehatan	3 dokumen			386.316.058	444.263.467	
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa	4 dokumen			40.952.350	47.095.202	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen yang dihasilkan Jumlah event kabupaten yang diselenggarakan Jumlah peserta yang di khitan	4 dokumen 10 event 40 Orang			522.124.481	600.443.153	
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4 dokumen			1.980.366.287	2.277.421.230	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jumlah pelayanan kesehatan P3K di hari besar selama setahun	202140 orang 4 event			60.330.056.083	69.379.564.495	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraaan Kabupaten/Kota Sehat	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah laporan kegiatan koordinasi Tim Pembina Kabupaten Pangandaran Sehat untuk efektifitas program/kegiatan Forum Kabupaten Pangandaran	1 dokumen			157.476.020	181.097.423	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah waktu yang disediakan untuk operasional pelayanan di Puskesmas	80 orang			18.836.112.335	21.661.529.185	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang dilakukan	6 dokumen			94.515.000	108.692.250	
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang melaksanakan akreditasi	6 fasyankes			571.661.973	657.411.269	
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi									1.179.169.942	1.356.045.433		
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	25 dokumen			25.082.320	28.844.668	
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	18 unit			395.000.000	454.250.000	
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	100 unit			759.087.622	872.950.765	
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota									1.727.778.343	1.986.945.095		
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen evaluasi IKM yang dihasilkan Jumlah dokumen IKM yang dihasilkan Jumlah sarana kesehatan	4 dokumen 15 dokumen 85 unit			224.557.724	258.241.383	
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aplikasi SPGDT yang disediakan Jumlah dokumen perumusan dan pelaksanaan yankes rujukan yang dihasilkan	1 aplikasi 5 dokumen			1.503.220.619	1.728.703.712	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
													Tolok	Targe			
1	02	03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN											1.530.322.160	1.759.870.484	
1	02	03	2.02	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota											750.320.580	862.868.667	
1	02	03	2.02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah peserta yang mengikuti uji komptenesi	100 orang			29.031.580	33.386.317	
1	02	03	2.02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM	111 orang			721.289.000	829.482.350	
1	02	03	2.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota											780.001.580	897.001.817	
1	02	03	2.04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan keterampilan dan kompetensinya	5 dokumen			780.001.580	897.001.817	
1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											666.890.432	766.923.996	
1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											321.313.600	369.510.640	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Frekuensi Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang	5 dokumen			321.313.600	369.510.640	
1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah											235.415.910	270.728.296	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh	3 dokumen			235.415.910	270.728.296	
1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											83.284.414	95.777.076	
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Sertifikat laik higiene sanitasi yang di terbitkan	2 dokumen			83.284.414	95.777.076	
1	02	04	2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan											26.876.508	30.907.984	
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	1 dokumen			26.876.508	30.907.984	
1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN											694.441.698	798.607.953	
1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota											502.865.253	578.295.041	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe	
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah waktu yang diperlukan untuk Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	1530 orang			502.865.253	578.295.041			
1	02	05	2.02		Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									191.576.445	220.312.912				
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan promkes dan GHBS	15 Puskesmas			191.576.445	220.312.912			
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.01 PUSKESMAS PADAHERANG													5.066.933.385	5.748.912.490					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												5.066.933.385	5.748.912.490	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												5.066.933.385	5.748.912.490	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Padaherang, Padaherang			Jumlah laporan kegiatan BOK Puskesmas Jumlah peserta BPJS rawat jalan yang dilayani	12 dokumen 6000 orang			5.066.933.385	5.748.912.490			
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.02 PUSKESMAS SINDANGWANGI													1.701.074.640	1.956.235.836					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												1.701.074.640	1.956.235.836	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												1.701.074.640	1.956.235.836	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Padaherang, Sindangwangi			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	10864 peserta			1.701.074.640	1.956.235.836			
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.03 PUSKESMAS MANGUNJAYA													2.794.802.447	3.214.022.814					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												2.794.802.447	3.214.022.814	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												2.794.802.447	3.214.022.814	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Mangunjaya			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	17298 peserta			2.794.802.447	3.214.022.814			
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.04 PUSKESMAS KALIPUCANG													3.641.746.284	4.131.145.074					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												3.641.746.284	4.131.145.074	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												3.641.746.284	4.131.145.074	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	19835 peserta			3.641.746.284	4.131.145.074			
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.05 PUSKESMAS PANGANDARAN													4.219.471.627	4.852.622.300					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												4.219.471.627	4.852.622.300	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												4.219.471.627	4.852.622.300	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		Pembangunan			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pangandaran			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baikPasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	25381 peserta			4.219.471.627	4.852.622.300				
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.06 PUSKESMAS SIDAMULIH														1.412.425.386	1.624.289.194					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													1.412.425.386	1.624.289.194	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													1.412.425.386	1.624.289.194	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	4713 peserta			1.412.425.386	1.624.289.194				
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.07 PUSKESMAS CIKEMBULAN														1.423.128.486	1.636.597.759					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													1.423.128.486	1.636.597.759	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													1.423.128.486	1.636.597.759	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	7067 peserta			1.423.128.486	1.636.597.759				
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.08 PUSKESMAS PARIGI														3.387.594.546	3.895.733.728					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													3.387.594.546	3.895.733.728	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													3.387.594.546	3.895.733.728	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	15530 peserta			3.387.594.546	3.895.733.728				
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.09 PUSKESMAS SELASARI														1.872.454.990	2.153.323.238					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													1.872.454.990	2.153.323.238	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													1.872.454.990	2.153.323.238	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Parigi, Selasari			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	7719 peserta			1.872.454.990	2.153.323.238				
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.10 PUSKESMAS CIJULANG														3.879.470.768	4.461.391.383					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													3.879.470.768	4.461.391.383	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													3.879.470.768	4.461.391.383	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	14793 peserta			3.879.470.768	4.461.391.383				
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.11 PUSKESMAS CIMERAK														2.221.459.293	2.554.678.187					
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN													2.221.459.293	2.554.678.187	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													2.221.459.293	2.554.678.187	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe			
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cimerak, Cimerak			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	13140 peserta			2.221.459.293	2.554.678.187		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.12 PUSKESMAS LEGOKJAWA														2.156.933.079	2.443.271.691			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											2.156.933.079	2.443.271.691	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											2.156.933.079	2.443.271.691	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cimerak, Legokjawa			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	19070 pasien			2.156.933.079	2.443.271.691		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.13 PUSKESMAS CIGUGUR														2.627.280.914	3.021.373.051			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											2.627.280.914	3.021.373.051	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											2.627.280.914	3.021.373.051	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Cigugur, Cigugur			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	16796 peserta			2.627.280.914	3.021.373.051		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.14 PUSKESMAS LANGKAPLANCAR														3.436.188.321	3.951.616.569			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											3.436.188.321	3.951.616.569	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											3.436.188.321	3.951.616.569	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	19150 peserta			3.436.188.321	3.951.616.569		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.15 PUSKESMAS JADIKARYA														1.924.273.073	2.212.914.034			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											1.924.273.073	2.212.914.034	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											1.924.273.073	2.212.914.034	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Jadikarya			Pasien terlayani dengan tingkat kepuasan yang baik	12280 peserta			1.924.273.073	2.212.914.034		
Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.16 RSUD PANDEGA														167.050.320.698	192.107.868.803			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											167.050.320.698	192.107.868.803	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											155.233.420.698	178.518.433.803	
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan	1 Paket			11.024.427.506	12.678.091.632		
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah sarana dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	3 Unit			1.415.062.698	1.627.322.103		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe					
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	1 Paket			90.306.294.390	103.852.238.548				
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah obat yang disediakan	1 Paket			11.581.444.425	13.318.661.089				
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah BMHP yang disediakan	1 Paket			11.004.206.940	12.654.837.981				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	12 Bulan			15.078.000.000	17.339.700.000				
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah Kegiatan Operasional RSUD yang Terlaksana	29 Kegiatan			5.119.334.739	5.887.234.950				
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah Perijinan RSUD yang dilaksanakan	1 Paket			625.000.000	718.750.000				
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah Porsi Makanan dan Minuman yang disediakan	604300 Porsi			9.079.650.000	10.441.597.500				
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									11.816.900.000	13.589.435.000					
1	02	03	2.03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Tersedianya Sumber Daya Manusia di RSUD	389 Orang			11.816.900.000	13.589.435.000				
Unit Organisasi : 1.03.1.04.0.00.01.00 DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN															2.575.653.014.463	1.190.874.594.554				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										2.566.193.561.199	1.181.581.067.050				
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										9.528.835.611	11.205.408.289				
1	03	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										109.161.000	125.535.150				
1	03	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah laporan kegiatan program yang disediakan	1 dokumen			109.161.000	125.535.150				
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan										5.652.553.869	6.747.684.285				
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai`	60 orang			5.614.530.197	6.703.957.061				
1	03	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah laporan yang disajikan	2 dokumen			28.111.224	32.327.908				
1	03	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah laporan keuangan semesteran yang disajikan	2 dokumen			5.571.224	6.406.908				
1	03	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah laporan keuangan tahunan yang disajikan	1 dokumen			4.341.224	4.992.408				
1	03	01	2.03		Administrasi Umum										3.748.050.490	4.310.258.064				
1	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			jumlah materai 6000, materai 3000 dan jasa pengiriman yang dibeli	3 pcs			10.000.000	11.500.000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
1	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tiap bulan	12 bulan			211.920.000	243.708.000	
1	03	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Gedung			180.000.000	207.000.000	
1	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	25 unit			253.200.000	291.180.000	
1	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	12 dokumen			69.600.000	80.040.000	
1	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumla tenaga kebersihan	4 orang			75.231.632	86.516.377	
1	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Tersedianya Alat Tulis Kantor	1 paket			280.869.077	322.999.439	
1	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket			8.850.000	10.177.500	
1	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	1 paket			158.292.000	182.035.800	
1	03	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket			141.320.186	162.518.214	
1	03	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Tersedianya surat kabar dan Buku Perundang - undangan	1 paket			30.480.000	35.052.000	
1	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Tersedianya makan dan minum	12 bulan			90.365.000	103.919.750	
1	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Terfasilitasinya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	1 paket			449.750.000	517.212.500	
1	03	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Tersedianya kendaraan dinas/operasional	0 unit			911.900.000	1.048.685.000	
1	03	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan	20 unit			85.898.528	98.783.307	
1	03	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan	9 unit			77.909.279	89.595.671	
1	03	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah mebeleur yang disediakan	40 unit			14.494.788	16.669.006	
1	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah janis gedung kantor yang dipelihara	6 jenis			519.420.000	597.333.000	
1	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	4 jenis			53.000.000	60.950.000	
1	03	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	3 jenis			3.750.000	4.312.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	03	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	7 jenis			121.800.000	140.070.000	
1	03	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										19.070.252	21.930.790	
1	03	01	2.04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah kartu absensi yang disediakan	398 pcs			19.070.252	21.930.790	
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)										160.962.550.620	131.784.898.165	
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										39.361.519.172	7.726.550.049	
1	03	02	2.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku										137.515.000	172.500.000	
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi/Pem eliharaan Sungai	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Panjang normalisasi air bersih yang dibangun	1 unit			39.153.421.724	7.472.880.233	
1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Panjang saluran air yang dibangun	2 paket			36.491.224	41.964.908	
1	03	02	2.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpeliharanya bangunan sungai	4 persen			34.091.224	39.204.908	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										121.601.031.448	124.058.348.116	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jaringan irigasi yang direncanakan	1 DI			44.691.224	51.394.908	
1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bendung yang dibangun	2 buah			21.999.232.000	25.057.616.800	
1	03	02	2.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Putrappinggan			Panjang jaringan irigasi yang dibangun	933 Meter			80.991.224	93.139.908	
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Panjang saluran air yang dibangun	2 paket			99.476.117.000	98.856.196.500	
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM										2.127.372.351	2.419.381.904	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota										2.127.372.351	2.419.381.904	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
1		03	03	2.01	04	Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jaringan air minum yang dibangun	100 persen			1.196.695.846	1.349.103.923	
1		03	03	2.01	11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jaringan air minum yang dibangun	100 persen			930.676.505	1.070.277.981	
1		03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH										13.306.978.060	15.869.219.219	
1		03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										13.306.978.060	15.869.219.219	
1		03	05	2.01	03	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tangki septik yang dibangun dan jumla sanitasi lingkungan	100 persen			13.306.978.060	15.869.219.219	
1		03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE										63.445.190.246	71.471.285.927	
1		03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota										63.445.190.246	71.471.285.927	
1		03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan drainase perkotaan yang disusun	60 dokumen			184.641.224	212.337.408	
1		03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	100 persen			63.260.549.022	71.258.948.519	
1		03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN										318.254.329.437	366.797.478.853	
1		03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota										318.254.329.437	366.797.478.853	
1		03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Daerah Kab/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			panjang jalan perdesaan dan panjang jembatan perdesaan	100 persen			318.254.329.437	366.797.478.853	
1		03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG										245.025.939.695	40.292.764.705	
1		03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung										245.025.939.695	40.292.764.705	
1		03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubahsuai, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun	5 Gedung			245.025.939.695	40.292.764.705	
1		03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA										73.995.612	85.094.954	
1		03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota										73.995.612	85.094.954	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Prosentase lingkungan pemukiman penduduk perdesaan yang layak huni	100 persen			73.995.612	85.094.954	
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN										1.751.126.642.267	538.962.548.639	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota										1.751.126.642.267	538.962.548.639	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	20 dokumen			1.200.000.000	1.380.000.000	
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Panjang jalan yang dibangun	10 Meter			67.344.538.433	65.425.396.474	
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Panjang jalan yang ditingkatkan	15 km			1.619.305.423.227	335.443.274.477	
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Panjang jalan yang direhabilitasi/dipemelihara	25000 Meter			6.431.613.447	71.256.950.454	
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Panjang jalan yang direhabilitasi/dipemelihara	0 Meter			34.135.660.512	39.398.264.589	
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Bentang jembatan yang dibangun	10 persen			22.659.706.648	26.058.662.645	
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan										49.700.000	-	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG										2.341.727.300	2.692.986.395	
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota										1.942.654.500	2.234.052.675	
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah detail rencana Tata Ruang	3 dokumen			1.942.654.500	2.234.052.675	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota										199.947.000	229.939.050	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Tata Ruang	0 kegiatan			199.947.000	229.939.050	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota										199.125.800	228.994.670	
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Yang Disusun	2 Laporan			199.125.800	228.994.670	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										9.459.453.264	9.293.527.504	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH										9.359.512.040	9.178.595.096	
1	04	03	2.03		Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha										9.359.512.040	9.178.595.096	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rutilahu yang dibangun	1300 unit			9.359.512.040	9.178.595.096	
1	04	04			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)										99.941.224	114.932.408	
1	04	04	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan										99.941.224	114.932.408	
1	04	04	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rusunawa yang dibangun	0 unit			99.941.224	114.932.408	
Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															8.817.412.002	10.140.023.804	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										8.817.412.002	10.140.023.804	
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										5.011.674.743	5.763.425.955	
8	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										35.081.000	40.343.150	
8	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah dokumen perencanaan program dan	4 dokumen			35.081.000	40.343.150	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan										3.832.490.291	4.407.363.835	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan	1 Tahun			3.648.339.291	4.195.590.185	
8	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Margacinta			Jumlah dokumen Laporan Kinerja Jumlah Jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga	1 dokumen 6 orang			169.151.000	194.523.650	
8	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen			5.000.000	5.750.000	
8	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi	1 dokumen			5.000.000	5.750.000	
8	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			5.000.000	5.750.000	
8	01	01	2.03		Administrasi Umum										989.465.426	1.137.885.241	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
8	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah Materai yang dibeli		500 buah			4.800.000	5.520.000	
8	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah rekening yang dibayarkan setiap bulan		3 rekening			31.200.000	35.880.000	
8	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah gedung yang disewa		1 unit			100.000.000	115.000.000	
8	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Margacinta			Jumlah Jasa Tenaga Pengemudi Jumlah kendaraan dinas/oerasional yang berizin		1 orang 4 unit			28.700.000	33.005.000	
8	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah Jasa Administrasi Keuangan		1 orang			35.173.000	40.448.950	
8	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Margacinta			Jumlah bahan dan alat kebersihan Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor		27 jenis 2 orang			44.332.920	50.982.858	
8	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jenis Alat Tulis Kantor		30 jenis			35.468.544	40.788.826	
8	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan		2 jenis			12.250.000	14.087.500	
8	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Margacinta			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		24 jenis			2.683.144	3.085.616	
8	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah peralatan rumah tangga		8 jenis			6.937.854	7.978.532	
8	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah jenis bahan bacaan tiap bulan		6 jenis			18.120.000	20.838.000	
8	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah jenis makanan dan minuman		3 jenis			20.020.000	23.023.000	
8	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah dokumen tindak lanjut rapat koordinasi ke		133 kali			390.072.000	448.582.800	
8	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Margacinta			Jumlah komputer yang di beli Jumlah perlengkapan gedung		3 unit 3 unit			122.134.747	140.454.959	
8	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah mebeleur		6 unit			13.626.953	15.670.996	
8	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Margacinta			Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor		1 unit 2 orang			57.639.000	66.284.850	
8	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah kendaraan yang dipelihara		4 unit			56.807.264	65.328.354	
8	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara		5 unit			4.500.000	5.175.000	
8	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara		8 unit			4.500.000	5.175.000	
8	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah mebeleur yang dipelihara		4 unit			500.000	575.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
8	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											154.638.026	177.833.729	
8	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya	27 stel			21.879.090	25.160.953		
8	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah pakaian Kerja Lapangan	27 stel			11.655.000	13.403.250		
8	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	27 stel			25.103.936	28.869.526		
8	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang,			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	30 orang			96.000.000	110.400.000		
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN											512.510.825	589.387.449	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan											512.510.825	589.387.449	
8	01	02	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terbentuknya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Pangandaran	50 orang			19.140.000	22.011.000		
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Profil Kesbangpol	1 dokumen			104.618.525	120.311.304		
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah diskusi dan Jumlah Peserta yang mengikuti diskusi wawasan kebangsaan Jumlah Kegiatan dan Jumlah Peserta yang memahami Bela Negara Jumlah kegiatan dan Jumlah Peserta yang memahami nilai-nilai luhur budaya bangsa Jumlah kegiatan dan Jumlah peserta yang memahami Pembauran kebangsaan Jumlah kegiatan dan Jumlah Peserta yang memahami rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	100 orang 300 orang 300 orang 100 orang 100 orang			388.752.300	447.065.145		
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											1.087.179.784	1.250.256.752	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Pa											1.087.179.784	1.250.256.752	
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen verifikasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial Jumlah kader parpol yang memahami pendidikan politik Jumlah kegiatan dan Jumlah Peserta pendidikan politik	1 dokumen 50 orang 1610 orang 50 orang			1.087.179.784	1.250.256.752		
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN											105.350.704	121.153.310	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan											105.350.704	121.153.310	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
8	01	04	2.01	01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil verifikasi Ormas,LSM dan OKP	1 dokumen			21.267.104	24.457.170				
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ormas, LSM dan OKP yang memahami pendidikan politik	50 orang			84.083.600	96.696.140				
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									527.143.230	606.214.715					
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya									527.143.230	606.214.715					
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Indeks Toleransi	1 dokumen			104.356.100	120.009.515				
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan dan Jumlah peserta yang memahami toleransi antar umat beragama Meningkatnya Pemahaman Ekonomi dan Sosial Masyarakat pelaku UMKM	100 orang 50 orang			69.957.450	80.451.068				
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan dan Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi penanggulangan narkoba	250 orang			352.829.680	405.754.132				
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									1.573.552.716	1.809.585.623					
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial									1.573.552.716	1.809.585.623					
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anggota Muspika Jumlah anggota yang menangani gangguan Keamanan Dalam Negeri Terpadu Jumlah kegiatan dan Jumlah Peserta yang memahami deteksi dini Jumlah tim pengawasan orang asing	26 orang 213 orang 80 orang 37 orang			646.355.296	743.308.590				
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anggota TKDPD	70 orang			927.197.420	1.066.277.033				
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA															14.033.206.980	16.138.188.026				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													14.033.206.980	16.138.188.026	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													3.990.417.382	4.588.979.989	
1	05	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													32.100.000	36.915.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	05	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jasa operator	1 orang			32.100.000	36.915.000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan									2.448.545.661	2.815.827.510		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							2.396.045.661	2.755.452.510	
1	05	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jasa operator	2 orang			49.500.000	56.925.000	
1	05	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen	1 dokumen			1.500.000	1.725.000	
1	05	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen	1 dokumen			1.500.000	1.725.000	
1	05	01	2.03		Administrasi Umum									1.129.778.657	1.299.245.455		
1	05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah materai	325 buah			2.437.500	2.803.125	
1	05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 rekening			66.600.000	76.590.000	
1	05	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah gedung yang disewa	1 unit			150.000.000	172.500.000	
1	05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin Jumlah SDM driver setiap bulan	10 unit 3 orang			95.700.000	110.055.000	
1	05	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jasa operator	1 orang			32.100.000	36.915.000	
1	05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	2 orang			45.540.055	52.371.063	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
1	05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis ATK yang dibeli	10 jenis			33.158.608	38.132.399	
1	05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	3 jenis			11.356.816	13.060.338	
1	05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	1 jenis			2.597.499	2.987.124	
1	05	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	13 jenis			13.934.000	16.024.100	
1	05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	3 jenis			36.818.000	42.340.700	
1	05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	1 tahun			159.995.450	183.994.768	
1	05	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	16 unit			161.437.056	185.652.614	
1	05	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	3 jenis			24.392.075	28.050.886	
1	05	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	12 unit			258.461.598	297.230.838	
1	05	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor	7 jenis			5.250.000	6.037.500	
1	05	01	2.03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan luas gedung kantor yang direhab	1 unit			30.000.000	34.500.000	
1	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									379.993.064	436.992.024		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian	1 paket			329.993.820	379.492.893	
1	05	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti	20 orang			49.999.244	57.499.131	
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									10.042.789.598	11.549.208.037		
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									9.554.453.798	10.987.621.867		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah anggota yang mengikuti Jumlah lokasi aset daerah yang di jaga keamanannya Jumlah Masyarakat yang meningkat pemahamannya tentang trantibum Jumlah obyek wisata yang difasilitasi pengamanannya pada hari besar nasional Jumlah pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah yang difasilitasi pengamanannya jumlah periode pengamanan kegiatan kontijensi Jumlah periode pengamanan Pejabat pimpinan daerah Jumlah Pilkades serentak yang dijaga keamanannya	31 orang 6 lokasi 150 orang 5 lokasi 1 kali 1 tahun 12 bulan 9 desa			8.255.218.848	9.493.501.675	
1	05	02	2.01	02	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumah lokasi ODGJ yang ditertibkan jumlah lokasi PKL dan bangunan liar yang	10 kecamatan 1 lokasi			100.081.450	115.093.667	
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah anggota satpolpp yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya tentang K3 jumlah linmas yang dilatih dalam penanganan bencana jumlah linmas yang ditingkatkan pemahamannya	50 orang 100 orang 1000 orang			387.600.000	445.740.000	
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis dan jumlah kendaraan yang dibeli	1 unit			811.553.500	933.286.525	
1	05	02	2.02		Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota									439.335.800	505.236.170		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
1		05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah masyarakat yang meningkat kesadarannya tentang bahaya minuman keras Jumlah masyarakat yang meningkat kesadarannya terhadap bahaya praktek	100 orang 100 orang			55.017.600	63.270.240				
1		05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan hasil pemantauan implementasi perda	4 laporan			24.998.700	28.748.505				
1		05	02	2.02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah laporan penanganan penegakan pelanggaran perda jumlah lokasi operasi pasar	4 laporan 10 lokasi			359.319.500	413.217.425				
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota									49.000.000	56.350.000					
1		05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti	2 orang			49.000.000	56.350.000				
Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH															34.447.819.231	39.614.992.115				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													34.447.819.231	39.614.992.115	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													4.700.362.322	5.405.416.669	
1	05	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													26.269.530	30.209.959	
1		05	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah dokumen perencanaan program dan	4 Dokumen			26.269.530	30.209.959				
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan													2.338.381.632	2.689.138.877	
1		05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah pegawai/pejabat yang di gaji	17 orang			2.270.346.632	2.610.898.627				
1		05	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penurunan Resiko Bencana	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah Dokumen yang dilaporkan jumlah jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga Jumlah tenaga Operator	1 Dokumen 2 orang 1 orang			68.035.000	78.240.250				
1	05	01	2.03		Administrasi Umum													2.131.042.685	2.450.699.087	
1		05	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah Materai Yang Dibeli	3300 Buah			17.400.000	20.010.000				
1		05	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah Rekening yang dibayar tiap Bulan	4 rekening			177.600.060	204.240.069				
1		05	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			jumlah gedung yang di sewa Jumlah perlengkapan gedung kantor	3 unit 5 unit			540.000.000	621.000.000				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
										Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1		05	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah Jasa Tenaga Pengemudi Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Berizin	2 orang 11 unit			83.900.000	96.485.000	
1		05	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah jasa administrasi keuangan	1 orang			21.000.000	24.150.000	
1		05	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah tenaga Kebersihan Kantor	4 orang			69.600.000	80.040.000	
1		05	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jenis Alat Tulis Kantor	30 paket			76.112.783	87.529.700	
1		05	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah jenis barang yang dicetak dan yang di gandakan	3000 lembar			23.500.000	27.025.000	
1		05	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah jenis komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50 unit			15.964.753	18.359.466	
1		05	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah peralatan rumah tangga	20 jenis			34.954.080	40.197.192	
1		05	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah jenis bahan bacaan tiap bulan	60 eksemplar			31.308.000	36.004.200	
1		05	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah jenis makanan dan minuman	100 paket			43.780.000	50.347.000	
1		05	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah dokumen tindak lanjut rapat koordinasi ke	140 dokumen			353.592.000	406.630.800	
1		05	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah komputer yang di beli	5 unit			198.445.170	228.211.945	
1		05	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah Mebeleur	2 unit			95.493.685	109.817.738	
1		05	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			jumlah gedung kantor yang dipelihara luas bangunan kantor yang dipelihara	2 gedung 100 m2			89.098.000	102.462.700	
1		05	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			jumlah kendaraan yang dipelihara	11 unit			201.794.154	232.063.277	
1		05	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis			20.000.000	23.000.000	
1		05	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah peralatan kantor yang dipelihara	5 unit			37.500.000	43.125.000	
1	05	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											204.668.475	235.368.746	
1		05	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	58 stel			70.962.925	81.607.364	
1		05	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah pakaian kerja lapangan	23 stel			133.705.550	153.761.382	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA											14.458.691.760	16.627.495.525	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota											808.035.572	929.240.908	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
										Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1		05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			jumlah keluarga yang di berikan pemahaman tentang penanggulangan bencana jumlah lokasi yang diadakan pengadaan peralatan penunjang pusdalops jumlah petugas gudang yang di bayar tiap bulan jumlah petugas pusdalops yang dibayar tiap bulan jumlah sekolah yang di berikan pemahaman tentang penanggulangan bencana	25 orang 1 lokasi 6 orang 12 orang 40 sekolah			808.035.572	929.240.908	
1	05	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									11.002.168.653	12.652.493.952		
1		05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Parigi,			jumlah peralatan kebencanaan yang di beli	20 paket			1.473.479.072	1.694.500.933	
1		05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah petugas gudang yang di bayar tiap bulan jumlah petugas tim reaksi cepat yang di bayar tiap	6 orang 7 orang			226.200.000	260.130.000	
1		05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rambu Evakuasi di wilayah Rawan Bencana	10 paket			497.711.524	572.368.253	
1		05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang Yang di latih (traua Healing) Jumlah Petugas yang paham mengenai pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)	150 orang 40 orang			953.970.925	1.097.066.564	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah desa yang dibentuk Jumlah desa yang dilatih dan dibentuk Jumlah Desa yang melaksanakan Mitigasi Bencana jumlah desa yang tertanggulangi kekeringan Jumlah kelompok desa tangguh bencana yang dibentuk Jumlah kelompok FKDM yang sudah di bina kembali sejak mereka di bentuk Jumlah Peserta Forum Relawan Kabupaten Pangandaran Jumlah Peserta Gladi Evakuasi yang paham penanganan dampak tsunami Jumlah Peserta Pelatihan Forum PRB Kabupaten Pangandaran Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana Jumlah Peserta Pelatihan Petugas PUSDalops dan Satgas Bencana Jumlah Peserta Simulasi Bencana	20 desa 8 desa 2 desa 80 desa 4 kelompok 5 kelompok 60 orang 40 orang 50 orang 40 orang 45 orang 40 orang 10 paket			7.850.807.132	9.028.428.202	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								2.648.487.535	3.045.760.665			
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			jumlah desa yang diberi bantuan sarana dan prasarana jumlah sarana dan prasarana yang di beli jumlah sarana dan prasarana yang di pelihara jumlahTim Reaksi Cepat (TRC) Yang di bayar tiap bulang	30 desa 18 paket 2 jenis 7 orang			223.194.200	256.673.330	
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah paket logistik yang diadakan	3500 paket			2.425.293.335	2.789.087.335	
1	05	04			PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN								15.288.765.149	17.582.079.921			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								15.288.765.149	17.582.079.921			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe			
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah barang yang di beli jumlah lembaga yang paham atas kebijakan pencegahan bahaya kebakaran jumlah lokasi diklat jumlah orang yang ikut berpartisipasi jumlah petugas damkar yang mengikuti pelatihan jumlah petugas kebakaran jumlah petugas yang terlatih	5 paket 200 lembaga 10 lokasi 30 orang 25 orang 22 orang 10 orang 2 unit			15.288.765.149	17.582.079.921		
Unit Organisasi : 1.06.2.13.0.00.01.00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													210.487.679.286	242.060.831.180				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL											58.593.972.365	67.383.068.220	
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											5.063.811.398	5.823.383.109	
1	06	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											138.150.000	158.872.500	
1	06	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen			78.000.000	89.700.000		
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah yang diikuti	235 kali			60.150.000	69.172.500		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan											2.470.952.858	2.841.595.787	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN	16 orang			2.357.952.858	2.711.645.787		
1	06	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen laporan kinerja Dokumen laporan rekon aset	3 dokumen 12 dokumen			83.000.000	95.450.000		
1	06	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen laporan keuangan semesteran	1 dokumen			15.000.000	17.250.000		
1	06	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 dokumen			15.000.000	17.250.000		
1	06	01	2.03		Administrasi Umum											2.424.931.995	2.788.671.795	
1	06	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Surat yang dikelola	1700 lembar			12.000.000	13.800.000		
1	06	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	5 rekening			78.604.920	90.395.658		
1	06	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah waktu penyediaan gedung kantor	1 tahun			180.000.000	207.000.000		
1	06	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin Jumlah SDM pengemudi setiap	13 unit 1 orang			81.500.000	93.725.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
1	06	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen laporan rekon keuangan	12 dokumen			68.000.000	78.200.000	
1	06	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	4 orang			69.600.000	80.040.000	
1	06	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	24 Jenis			49.999.224	57.499.108	
1	06	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	3 jenis			35.038.775	40.294.591	
1	06	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	5 jenis			16.033.905	18.438.991	
1	06	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah peralatan dan perlegkapan kantor yang dibeli	5 jenis 9 unit			169.147.294	194.519.388	
1	06	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	8 jenis			25.008.917	28.760.255	
1	06	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	1 tahun			25.200.000	28.980.000	
1	06	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	2 jenis			360.031.000	414.035.650	
1	06	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	102 kali			359.676.000	413.627.400	
1	06	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit kendaraan dinas yang dibeli	10 kendaraan			600.400.000	690.460.000	
1	06	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Jumlah SDM pengamanan setiap bulan	2 unit 4 orang			91.080.000	104.742.000	
1	06	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	2 unit			63.095.976	72.560.372	
1	06	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	16 unit			125.515.984	144.343.382	
1	06	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	15 unit			15.000.000	17.250.000	
1	06	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										29.776.545	34.243.027	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
1	06	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah stel pakaian	50 stel			17.176.545	19.753.027	
1	06	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah stel pakaian	50 stel			12.600.000	14.490.000	
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										8.478.411.791	9.750.173.560	
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										8.478.411.791	9.750.173.560	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumalh PSM yang dilatih Jumlah Anggota Karang Taruna yang dibina Jumlah orang yang dilatih Jumlah orang yang dilatih	186 Orang 93 Orang 200 Orang 300 Orang			1.901.254.752	2.186.442.965	
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anggota PSKS yang terlayani Jumlah orang yang dilatih Jumlah petugas dan pendamping sosial yang	14 Orang 100 orang 20 Orang			791.411.039	910.122.695	
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga yang dibina Jumlah LKS yang dibina Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang	134 lembaga 15 LKS 186 Orang			5.574.596.000	6.410.785.400	
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kasus Kekerasan keluarga yang tertangani	10 Kasus			211.150.000	242.822.500	
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										31.507.111.481	36.233.178.203	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										11.877.140.959	13.658.712.103	
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fakir miskin yang dibantu Jumlah Paket Logistik untuk Permasalahan Sosial	800 KK 350 paket			8.311.716.759	9.558.474.273	
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Orang terlantar yang ditangani	50 orang			121.800.000	140.070.000	
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah anak yang ditangani Jumlah Asistensi bagi keluarga Lanjut Usia Jumlah generasi muda yang diberi arahan dalam penanggulangan penyalahgunaan NAFZA Jumlah orang yang ditangani Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Jumlah Tuna Susila	10 anak 30 kelompok 100 Orang 110 orang 100 orang 100 Orang			1.371.064.200	1.576.723.830	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
1		06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumah lanjut usia yang ditangani Jumlah anak yang ditangani Jumlah Disabilitas yang dibantu Jumlah keluarga Lanjut Usia yang dibantu Family Suport Jumlah Keluarga miskin yang diberi bantuan home care Jumlah lansia terlantar yang dibantu Jumlah orang yang ditangani Jumlah penyandang cacat yang dilatih Jumlah Penyandang Disabilitas Ringan yang dilayani	5 orang 500 anak 50 Orang 63 KK 355 Orang 80 Orang 100 orang 10 Orang 30 Orang			1.764.636.000	2.029.331.400		
1		06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan data, sistem dan teknologi informasi yang dikelola	1 sistem			207.074.000	238.135.100		
1		06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KK yang diberi Rutilahu	100 KK			100.850.000	115.977.500		
1	06	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial							19.629.970.522	22.574.466.100				
1		06	04	2.02	14	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Jumlah Kelompok usaha Bersama bagi masyarakat miskin Pesisir yang di bantu Jumlah Kelompok usaha Bersama bagi masyarakat WRSE yang dibantu Jumlah kelompok yang dibantu Jumlah kelompok yang dibantu Jumlah kelompok yang dibantu Jumlah kelompok yang dibina	1 kegiatan 10 kelompok 10 kelompok 50 kelompok 100 kelompok 100 kelompok 665 KK 1 Perda			19.629.970.522	22.574.466.100		
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL										5.357.370.909	6.160.976.545	
1	06	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota										5.357.370.909	6.160.976.545	
1		06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PKH yang dibina	42 Orang			2.447.226.928	2.814.310.967		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe				
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data misikin yang di verivikasi dan validasi Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Iuran JKN Jumlah KK Jumlah laporan kegiatan Komda Lansia untuk meningkatkan efektifitas penanganan lansia di Kabupaten Pangandaran Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) untuk sinergitas pelaksanaan program penanggulangan	45573 KK 1 Dokumen 500 KK 1 Dokumen 1 Dokumen			2.910.143.981	3.346.665.578		
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA									7.842.247.418	9.018.584.530			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota									5.690.200.000	6.543.730.000			
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah permasalahan bencana yang tertangani	1 Kabupaten			330.000.000	379.500.000		
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Korban Bencana Jumlah korban yang ditangani	500 KK 1000 KK 4500 orang			5.360.200.000	6.164.230.000		
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota									2.152.047.418	2.474.854.530			
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Data Daerah Rawan Bencana Jumlah Kampung Siaga Bencana yang dibentuk	1 Dokumen 6 desa			1.501.755.103	1.727.018.368		
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah yang dibina	61 Orang			650.292.315	747.836.162		
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN									345.019.368	396.772.273			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota									345.019.368	396.772.273			
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Taman Makam yang dipelihara	1 taman makam			345.019.368	396.772.273		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											151.893.706.921	174.677.762.960	
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA											250.000.000	287.500.000	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa											250.000.000	287.500.000	
2	13	02	2.01	03	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah desa yang dibina	93 desa			250.000.000	287.500.000		
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA											94.200.000.000	108.330.000.000	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa											94.200.000.000	108.330.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
2	13	03	2.01	02	Fasilitasi Kerja sama Desa dengan Pihak Ketiga	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa wisata yang dibantu Jumlah desa yang dibangun Jumlah desa yang dibantu Jumlah kecamatan yang dibantu Jumlah kecamatan yang dibina pengelolaan prukades Jumlah kecamatan yang mendukung prukades	4 desa wisata 93 desa 30 desa 5 kecamatan 10 kecamatan 10 kecamatan			94.200.000.000	108.330.000.000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA										41.399.916.346	47.609.903.798	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa										41.399.916.346	47.609.903.798	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi Keuangan Desa Jumlah Dokumen laporan penggunaan ADD Jumlah Dokumen Monev Dana Desa Jumlah dokumen Monev dan Pelaporan pemberian stimulan pembangunan desa	93 dokumen 465 dokumen 93 dokumen 1 dokumen			161.994.487	186.293.660	
2	13	04	2.01	03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang dibantu jumlah desa yang diberi arahan tentang bantuan keuangan pembangunan desa	5 desa 1 kegiatan			250.000.000	287.500.000	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes	60 bulan			70.000.000	80.500.000	
2	13	04	2.01	05	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan BPD	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aparatur desa yang dilatih	372 orang			1.498.962.894	1.723.807.328	
2	13	04	2.01	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kegiatan musyawarah pembangunan desa	1 kegiatan			50.000.000	57.500.000	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bumdes yang dibantu jumlah bumdes yang dibina jumlah dokumen monev bumdes jumlah dokumen monev dan pelaporan pemberian stimulan pembangunan desa Jumlah Kader yang dilatih Jumlah Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa yang dibina Jumlah kelompok yang	105 bumdes 15 bumdes 1 dokumen 1 dokumen 93 Orang 10 kelompok 3 kelompok			38.533.164.325	44.313.138.974	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa yang sesuai kriteria Jumlah Dokumen data profil desa	10 desa 93 dokumen			835.794.640	961.163.836				
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT									16.043.790.575	18.450.359.162					
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyar									16.043.790.575	18.450.359.162					
2	13	05	2.01	01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lembaga adat yang dibentuk dan dibina	5 lembaga			50.000.000	57.500.000				
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Anggota PKK Kecamatan dan Desa yang di bina Jumlah kader Posyandu yang dibina Jumlah LPM yang dibina Jumlah Peserta anggota PKK yang dibina Jumlah sarana prasarana Posyandu yang dibangun	1890 orang 5169 orang 20 lembaga 300 orang 10 posyandu			12.663.909.964	14.563.496.459				
2	13	05	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan BSMSS yang terdampingi Jumlah Kegiatan TMMD yang terdampingi Jumlah Panjang Jalan yang diperbaki	1 kegiatan 1 kegiatan 500 meter			2.580.882.607	2.968.014.998				
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah desa yang dibina Jumlah Kelompok Perempuan yang dilatih Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan	93 desa 20 kelompok 93 orang			649.998.004	747.497.705				
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kelompok yang dibina Jumlah TTG yang mengikuti	10 kelompok 1 TTG			99.000.000	113.850.000				
Unit Organisasi : 2.07.3.31.3.32.01.00 DINAS TENAGA KERJA, INDUSTRI DAN TRANSMIGRASI													9.293.760.646	10.687.824.741						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													6.280.562.934	7.222.647.372	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													4.735.767.178	5.446.132.253	
2	07	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													135.950.000	156.342.500	
2	07	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Operator Perencanaan	3 Orang			135.950.000	156.342.500				
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan													1.461.564.594	1.680.799.283	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Pegawai	19 Orang			1.259.789.594	1.448.758.033				
2	07	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jasa Operator Pelaporan	13 Orang			201.775.000	232.041.250				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
2	07	01	2.03		Administrasi Umum									2.899.242.626	3.334.129.019		
2	07	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Surat Terkirim	400 Surat			5.087.500	5.850.625	
2	07	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Rekening yang dibayar	3 Rekening			60.517.440	69.595.056	
2	07	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	5 Unit			52.060.000	59.869.000	
2	07	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis dokumen pengelolaan keuangan	4 Dokumen			155.495.000	178.819.250	
2	07	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah SDM Kebersihan Kantor	2 Orang			57.716.465	66.373.935	
2	07	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	12 Jenis			67.893.594	78.077.633	
2	07	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	2 Jenis			19.152.000	22.024.800	
2	07	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	10 Jenis			27.941.488	32.132.711	
2	07	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	10 Jenis			4.362.435	5.016.800	
2	07	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	2 Jenis			14.292.000	16.435.800	
2	07	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	3 Jenis			44.605.000	51.295.750	
2	07	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	35 Kegiatan			424.790.000	488.508.500	
2	07	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	10 Jenis			137.500.000	158.125.000	
2	07	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	5 Jenis			1.562.748.740	1.797.161.051	
2	07	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	1 Set			171.478.468	197.200.238	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	07	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	300 m2			40.384.100	46.441.715	
2	07	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	5 Unit			40.293.396	46.337.405	
2	07	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	10 Jenis			6.105.000	7.020.750	
2	07	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Jenis			6.820.000	7.843.000	
2	07	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									239.009.958	274.861.451		
2	07	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis pakaian dinas dan perlengkapannya yang dibeli	60 setel			45.841.950	52.718.242	
2	07	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli	60 setel			8.368.008	9.623.209	
2	07	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis pendidikan dan pelatiha formal yang dilaksanakan	1 Kegiatan			92.400.000	106.260.000	
2	07	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah dan jenis Bimbingan Tekis Implementasi Perundang-undangan yang di	1 Kegiatan			92.400.000	106.260.000	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									430.396.725	494.956.234		
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)									430.396.725	494.956.234		
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Makro	1 Dokumen			41.134.125	47.304.244	
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Mikro	1 Dokumen			389.262.600	447.651.990	
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									840.237.450	966.273.067		
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									840.237.450	966.273.067		
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	1 Kegiatan			840.237.450	966.273.067	
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									196.146.425	225.568.389		
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota									196.146.425	225.568.389		
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Pencari kerja yang difasilitasi dalam mencari kerja	5000 Orang			177.127.905	203.697.091	
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Bimbingan Jabatan bagi perncari kerja	1 Kegiatan			19.018.520	21.871.298	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									78.015.156	89.717.429		
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									63.905.047	73.490.804		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Peraturan Perusahaan yang di sahkan legalitasnya	10 Perusahaan			34.065.385	39.175.193				
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Dokumen Hubungan ndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	10 Dokumen			29.839.662	34.315.611				
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									14.110.109	16.226.625					
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kerjasama antar unsur Pengusaha, Buruh dan Pemerintah	1 MoU			14.110.109	16.226.625				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN													2.744.708.587	3.156.414.875	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													1.929.004.776	2.218.355.493	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													1.929.004.776	2.218.355.493	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen			122.638.518	141.034.296				
3	31	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	10 Kegiatan			165.359.846	190.163.823				
3	31	02	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	5 Kegiatan			78.670.538	90.471.119				
3	31	02	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Perindustrian	6 Kegiatan			222.570.640	255.956.236				
3	31	02	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi	11 Kegiatan			1.304.423.193	1.500.086.672				
3	31	02	2.01	06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang dievaluasi	5 Kegiatan			35.342.041	40.643.347				
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI													568.847.079	654.174.140	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah													568.847.079	654.174.140	
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah izin IUI yang difasilitasi	50 Izin			439.948.736	505.941.046				
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Pengawasan IUI	2 Kegiatan			86.012.815	98.914.737				
3	31	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Pengamanan dan Penyelamatan Industri	1 Kegiatan			42.885.528	49.318.357				
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL													246.856.732	283.885.242	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota													246.856.732	283.885.242	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	31	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi terkait Pengumpulan , Pengolahan dan Analisis SINAS	1 Kegiatan			204.178.954	234.805.797	
3	31	04	2.01	02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Data Perindustrian yang di publikasikan	1 Dokumen			42.677.778	49.079.445	
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									268.489.125	308.762.494		
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI									109.817.000	126.289.550		
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi									109.817.000	126.289.550		
3	32	02	2.01	01	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Lokasi Kawasan transmigrasi baru	1 Lokasi			35.341.000	40.642.150	
3	32	02	2.01	02	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	1 Lokasi			37.008.500	42.559.775	
3	32	02	2.01	03	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Luas Tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi baru	1 Hektar			25.427.500	29.241.625	
3	32	02	2.01	04	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang	1 Kegiatan			12.040.000	13.846.000	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									129.625.750	149.069.613		
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									129.625.750	149.069.613		
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi terkait kerjasama pembangunan transmigrasi	2 Kegiatan			36.535.500	42.015.825	
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang disiapkan	1 Kegiatan			11.135.000	12.805.250	
3	32	03	2.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Penataan Kawasan Transmigrasi	1 Kegiatan			10.972.000	12.617.800	
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Realokasi penduduk ke lokasi transmigrasi yang baru dalam satu Kabupaten/Kota	1 Kegiatan			28.977.500	33.324.125	
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah KK Transmigran yang dibina	30 KK			15.307.500	17.603.625	
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi lokal	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal	1 Kegiatan			16.861.250	19.390.438	
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Transmigran yang mengikuti Kegiatan Sosialisasi di Lokasi Transmigrasi	30 KK			9.837.000	11.312.550	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan	
											Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
											Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI											29.046.375	33.403.331			
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian											29.046.375	33.403.331			
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dan Kewirausahaan bagi Transmigran	1 Kegiatan			17.006.375	19.557.331				
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Cikembulan			Jumlah Pengadaan Infrastruktur bagi transmigran	1 Kegiatan			12.040.000	13.846.000				
Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN														157.189.447.896	180.767.865.080					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP													157.189.447.896	180.767.865.080	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													6.198.276.192	7.128.017.620	
2	11	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													32.106.000	36.921.900	
2	11	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga Administrasi/Teknis Operator Perencanaan	1 Orang			32.106.000	36.921.900				
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan													3.727.071.441	4.286.132.157	
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pns DLHK	36 Orang			3.666.145.441	4.216.067.257				
2	11	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jasa Oprator kepegawaian Jumlah tenaga Administrasi/Teknis Operator Simda BMD	2 Orang 1 Orang			60.926.000	70.064.900				
2	11	01	2.03		Administrasi Umum													2.355.098.751	2.708.363.563	
2	11	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan			3.324.000	3.822.600				
2	11	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan			36.525.000	42.003.750				
2	11	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung yang disewa	2 Unit			130.000.000	149.500.000				
2	11	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah Tenaga pengemudi non PNS	20 Unit 1 Orang			62.000.000	71.300.000				
2	11	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga Administrasi/Teknis Operator Simda Keuangan Jumlah tenaga Administrasi/Teknis Operator Simda Pendapatan	1 Orang 1 Orang			58.409.000	67.170.350				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	11	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor Non PNS	2 Orang			55.659.736	64.008.696	
2	11	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis jenis ATK yang diadakan	56 Jenis			47.801.525	54.971.754	
2	11	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis jenis jumlah barang yang dicetak Penggandaan	5 Jenis 28500 lembar			104.012.785	119.614.703	
2	11	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Jenis			3.601.867	4.142.147	
2	11	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis jenis peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan Jumlah Personal Komputer yang Diadakan	3 Jenis 3 Unit			80.144.702	92.166.407	
2	11	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Jenis			6.663.720	7.663.278	
2	11	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jasa Operator Website Jumlah Jasa Publikasi Jumlah Surat kabar yg di	1 Orang 60 kali 19 Surat			51.348.000	59.050.200	
2	11	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis Mamin yang disediakan	3 Jenis			29.276.000	33.667.400	
2	11	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah waktu pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke dalam daerah Jumlah waktu pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke luar daerah	12 Bulan 12 Bulan			239.104.000	274.969.600	
2	11	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Pengamanan Kantor Non PNS Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2 Orang 12 Bulan			40.104.000	46.119.600	
2	11	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	20 Unit			1.391.374.416	1.600.080.578	
2	11	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 Bulan			4.500.000	5.175.000	
2	11	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan			11.250.000	12.937.500	
2	11	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									84.000.000	96.600.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
2	11	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	14 Orang			84.000.000	96.600.000	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP									484.619.584	557.312.522		
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota									148.417.500	170.680.125		
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen DIKPLHD	1 Buku			148.417.500	170.680.125	
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota									336.202.084	386.632.397		
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	1 Buku			271.516.084	312.243.497	
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD	1 Buku			64.686.000	74.388.900	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP									46.076.708.124	52.988.214.343		
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									44.804.044.000	51.524.650.600		
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Inventarisasi sumber pencemaran Dokumen Rencana Induk Jumlah Gedung Laboratorium Jumlah Mobile Laboratorium Jumlah Peserta pembinaan Jumlah Titik Sampling Kapasitas IPAL Domestik Kapasitas IPAL Domestik	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Unit 1 Unit 350 orang 33 Titik 30 M3 2500 M3			44.687.106.000	51.390.171.900	
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perserta yang Dibina Jumlah Titik Blopori	350 orang 20 Titik			116.938.000	134.478.700	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota									1.272.664.124	1.463.563.743		
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Tersusunnya Dokumen AMDAL Kawasan Perkantoran Tersusunnya Dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Tersusunnya Laporan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1 Dokumen 1 Buku 1 Buku			1.272.664.124	1.463.563.743	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)									13.607.437.174	15.648.552.750		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota									13.607.437.174	15.648.552.750		
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah taman yang dipelihara	11 lokasi			3.225.501.574	3.709.326.810	
2	11	04	2.01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Luas Lahan yang terkonservasi Luas Taman KEHATI	5 Lokasi 60 Ha			10.381.935.600	11.939.225.940	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)									10.655.545.340	12.253.877.141		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
2	11	05	2.01		Penyimpanan Sementara Limbah B3											663.854.340	763.432.491	
2		11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Raperda yang diusulkan Jumlah Raperda Yang Diusulkan Jumlah tangki penvedot tinja	1 Raperda 1 Raperda 1 unit			610.523.000	702.101.450	
2		11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pembinaan Limbah B3	220 orang			53.331.340	61.331.041	
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											9.991.691.000	11.490.444.650	
2		11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			jumlah IPLT yang dibangun	1 unit			9.991.691.000	11.490.444.650	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											265.082.000	304.844.300	
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											265.082.000	304.844.300	
						Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pelaku usaha yang sudah membuat dokumen lingkungan Jumlah Pengawasan yang dilakukan Jumlah peserta pembinaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup Jumlah Peserta sosialisasi penegakan hukum	205 Pelaku usaha 9 Kali 350 Pelaku usaha 110 Oang			265.082.000	304.844.300	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP											60.156.000	69.179.400	
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota											60.156.000	69.179.400	
2		11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	20 Kasus			60.156.000	69.179.400	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN											79.841.623.482	91.817.867.004	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah											79.800.123.652	91.770.142.200	
2		11	11	2.01	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Sosialisasi	1029 Orang			60.678.000	69.779.700	
2		11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Petugas Kebersihan Paket Pemeliharaan prasarana	170 orang 3 paket			3.769.641.632	4.335.087.877	
2		11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta sosialisasi	279 orang			44.599.500	51.289.425	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan		
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe					
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis jenis sarana pengelolaan persampahan yang diadakan jumlah alat berat exavator yang diadakan jumlah bank sampah yang dibangun Jumlah Grobak Sampah Yang diadakan jumlah incenerator yang diadakan Jumlah kendaraan mesin pembersih pantai Jumlah kendaraan mobil tangga yang diadakan jumlah kendaraan pickup double cabin yang diadakan jumlah kontainer sampah yang diadakan jumlah motor roda tiga yang diadakan Jumlah Pembangunan TPS3R Kecamatan Cigugur yang diadakan Jumlah Pembangunan TPS3R Kecamatan Cijulang yang diadakan Jumlah Pembangunan TPS3R Kecamatan Kalipucang yang diadakan Jumlah Pembangunan	4 Jenis 1 unit 1 Unit 42 unit 93 unit 1 unit 1 unit 1 Unit 1 unit 1 unit 200 unit			75.881.354.520	87.263.557.698			
2	11	11	2.01	06	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Kualitas Lingkungan Hidup		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah desa yang dinilai	93 desa			43.850.000	50.427.500			
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta									41.499.830	47.724.804				
2	11	11	2.03	02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Kualitas Lingkungan Hidup		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Sosialisasi Adiwiyata	240 orang			41.499.830	47.724.804			
Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL													20.112.024.205	25.212.553.085					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												20.112.024.205	25.212.553.085	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												14.727.784.374	16.936.952.030	
2	12	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												41.328.750	47.528.062	
2	12	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun	5 Dokumen			41.328.750	47.528.062			
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan												3.082.068.438	3.544.378.704	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan per bulan	17 Orang			3.056.488.438	3.514.961.704	
2	12	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun Jumlah SDM jasa administrasi dan teknis perkantoran Non ASN yang disediakan tiap bulan	5 Dokumen 1 Orang			17.805.000	20.475.750	
2	12	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran yang	2 Dokumen			6.865.000	7.894.750	
2	12	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen			910.000	1.046.500	
2	12	01	2.03		Administrasi Umum										11.574.191.986	13.310.320.784	
2	12	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah waktu pengelolaan surat menyurat	12 Bulan			4.910.000	5.646.500	
2	12	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah rekening yang dibayar tiap bulan	7 Rekening			292.701.600	336.606.840	
2	12	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi barang daerah	12 Laporan			38.670.000	44.470.500	
2	12	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan Jumlah SDM pengemudi yang disediakan tiap bulan	9 Unit 1 Orang			33.200.000	38.180.000	
2	12	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah laporan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah	12 Laporan			33.000.000	37.950.000	
2	12	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah SDM kebersihan yang disediakan per bulan	1 Orang			17.400.000	20.010.000	
2	12	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jenis jumlah alat tulis kantor yang dibeli	57 Jenis			64.951.305	74.694.001	
2	12	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jenis jumlah barang yang dicetak dan digandakan	3 Jenis			3.900.000	4.485.000	
2	12	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jenis jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	5 Jenis			986.958	1.135.002	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
2	12	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Jenis			5.217.424	6.000.038	
2	12	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah bahan bacaan yang disediakan per bulan	6 Eksemplar			4.810.000	5.531.500	
2	12	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2 Jenis			9.924.000	11.412.600	
2	12	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah waktu pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan			270.579.400	311.166.310	
2	12	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Mobilling Kependudukan yang diadakan	1 Unit			2.693.192.122	3.097.170.940	
2	12	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	31 Unit			45.727.348	52.586.450	
2	12	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Perekaman dan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Jumlah perlatan gedung kantor yang diadakan	12 Unit 27 Unit			7.866.212.561	9.046.144.445	
2	12	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala Jumlah SDM kemanan yang disediakan per bulan	2 Unit 1 Orang			59.350.000	68.252.500	
2	12	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	9 Unit			91.959.268	105.753.158	
2	12	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas yang dipelihara	50 Unit			37.500.000	43.125.000	
2	12	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									30.195.200	34.724.480		
2	12	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	60 Stel			18.295.200	21.039.480	
2	12	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah ASN yang mengikuti	20 Orang			11.900.000	13.685.000	
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK									1.162.415.450	1.336.777.767		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk									1.162.415.450	1.336.777.767		
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen data penduduk	2 Dokumen			83.460.000	95.979.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe					
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Identitas Kependudukan yang diterbitkan	317315 Dokumen			1.038.962.950	1.194.807.392				
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Pindah Datang yang diterbitkan	7200 Dokumen			39.992.500	45.991.375				
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL									142.673.000	164.073.950					
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil									142.673.000	164.073.950					
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Arsip yang dipelihara	20000 Arsip			37.258.000	42.846.700				
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penerbitan Akta Kematian Jumlah Penerbitan Akta Pencatatan dan Perkawinan yang disusun	125285 Akta 2760 Akta 19 Akta			105.415.000	121.227.250				
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN									4.079.151.381	6.774.749.338					
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan									16.624.000	19.117.600					
2	12	04	2.01	04	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah Informasi kependudukan yang dikelola	103 Dokumen			16.624.000	19.117.600				
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan									4.062.527.381	6.755.631.738					
2	12	04	2.03	06	Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah Perangkat SIAK yang dikelola Pelayanan, Penerbitan, Sosialisasi, Pengelolaan, Peningkatan Cakupan Informasi Administrasi Kependudukan	60 Unit 12 Bulan			3.729.022.011	6.372.100.563				
2	12	04	2.03	07	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah aplikasi yang dibuat	1 Aplikasi			115.410.221	132.721.754				
2	12	04	2.03	11	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Pananjung			Jumlah server database kependudukan yang diadakan	1 Unit			218.095.149	250.809.421				
Unit Organisasi : 2.08.2.14.0.00.01.00 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														34.976.002.317	40.222.402.662					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK													6.266.693.058	7.206.697.015	
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													2.768.520.725	3.183.798.833	
2	08	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													122.932.000	141.371.800	
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Dokumen Renstra	1 dokumen			14.095.000	16.209.250				
2	08	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Dokumen perencanaan SKPD	2 dokumen			108.837.000	125.162.550				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan										73.674.000	84.725.100	
2	08	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Dokumen laporan kinerja Dokumen laporan rekon aset Jumlah SDM pengelola administrasi umum setiap bulan	3 dokumen 12 dokumen 2 orang			73.674.000	84.725.100	
2	08	01	2.03		Administrasi Umum										2.371.395.861	2.727.105.239	
2	08	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah surat yang dikelola	562 buah			4.940.000	5.681.000	
2	08	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	36 rekening			43.799.612	50.369.554	
2	08	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah gedung yang disewa	3 unit			200.000.000	230.000.000	
2	08	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin Jumlah SDM pengemudi setiap	60 unit 1 orang			106.649.349	122.646.751	
2	08	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Dokumen laporan rekon keuangan	12 dokumen			26.718.000	30.725.700	
2	08	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	2 orang			34.800.000	40.020.000	
2	08	01	2.03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah peralatan kerja yang diservis	37 unit			39.000.000	44.850.000	
2	08	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	59 jenis			51.951.268	59.743.958	
2	08	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	12 jenis			15.491.900	17.815.685	
2	08	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	12 jenis			16.639.916	19.135.903	
2	08	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	14 jenis			51.433.848	59.148.925	
2	08	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	30 jenis			35.163.989	40.438.587	
2	08	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	2 jenis			14.520.000	16.698.000	
2	08	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	2 jenis			39.600.000	45.540.000	
2	08	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	122 kali			151.970.050	174.765.558	
2	08	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jenis dan jumlah kendaraan yang dibeli	20 unit			824.914.000	948.651.100	
2	08	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli Jumlah unit komputer yang	3 jenis 10 unit			234.784.762	270.002.476	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
2	08	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	20 unit			61.683.933	70.936.523	
2	08	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	10 unit			62.106.748	71.422.760	
2	08	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah SDM pengamanan	12 unit 2 orang			98.350.000	113.102.500	
2	08	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	1 unit			54.983.162	63.230.636	
2	08	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	60 unit			151.895.324	174.679.623	
2	08	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang	15 unit			50.000.000	57.500.000	
2	08	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									200.518.864	230.596.694		
2	08	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah stel	460 stel			43.974.592	50.570.781	
2	08	01	2.04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah potong	80 potong			31.500.000	36.225.000	
2	08	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah stel	360 stel			35.944.272	41.335.913	
2	08	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	19 orang			58.600.000	67.390.000	
2	08	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah Pegawai yang mengikuti	100 orang			30.500.000	35.075.000	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN									1.890.376.724	2.173.933.233		
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota									1.117.012.107	1.284.563.923		
2	08	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok	10 kelompok			254.071.086	292.181.749	
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok Jumlah KK binaan	1 kelompok 100 KK			422.014.289	485.316.432	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok	10 kelompok			50.763.500	58.378.025	
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termssuk PPRG	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa sekoci Jumlah peserta	100 KK 300 orang			390.163.232	448.687.717	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan	
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					
								Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
2	08	02	2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota											723.356.178	831.859.605	
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kali kegiatan organisasi Jumlah Perda yang dibuat	9 kegiatan 2 organisasi 1 dokumen			623.353.778	716.856.845	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perda yang dibuat	1 dokumen			100.002.400	115.002.760	
2	08	02	2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota											50.008.439	57.509.705	
2	08	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Purbahayu			Jumlah peserta	150 orang			50.008.439	57.509.705	
2	08	03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN											271.213.050	311.895.007	
2	08	03	2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota											20.876.150	24.007.572	
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kasus	10 kasus			20.876.150	24.007.572	
2	08	03	2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota											250.336.900	287.887.435	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kali kegiatan	2 kegiatan			200.336.900	230.387.435	
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta	150 orang			50.000.000	57.500.000	
2	08	04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA											100.000.000	115.000.000	
2	08	04	2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota											100.000.000	115.000.000	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kampung juara	1 Kalua			100.000.000	115.000.000	
2	08	05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK											120.314.750	138.361.962	
2	08	05	2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota											120.314.750	138.361.962	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data partisipasi perempuan dan anak	1 dokumen			100.771.000	115.886.650	
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen Gender dan Anak	1 dokumen			19.543.750	22.475.312	
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)										1.116.267.809	1.283.707.980	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										150.000.100	172.500.115	
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peringkat Kategori yang diraih	600 Nilai			150.000.100	172.500.115	
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota										966.267.709	1.111.207.865	
2	08	06	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sekolah tanpa gangguan kedali gawai Jumlah Sekolah yang melaksanakan Ngabaso	170 peserta 3 Desa			200.000.109	230.000.125	
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kali kegiatan Jumlah kelompok yang dibentuk	1 kegiatan 10 kelompok			449.498.800	516.923.620	
2	08	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Desa Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Anak Kabupaten Layak Anak	2 Desa 5 Desa 1 Kabupaten			316.768.800	364.284.120	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										28.709.309.259	33.015.705.647	
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										2.682.798.202	3.085.217.932	
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan										2.682.798.202	3.085.217.932	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai ASN	20 orang			2.682.798.202	3.085.217.932	
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK										1.025.663.842	1.179.513.418	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										149.425.500	171.839.325	
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta	100 orang			149.425.500	171.839.325	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota										876.238.342	1.007.674.093	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta	100 orang			65.302.000	75.097.300	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen	12 dokumen			75.005.000	86.255.750	
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen	1 dokumen			499.875.992	574.857.391	
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen	4 dokumen			30.000.950	34.501.092	
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta	200 orang			206.054.400	236.962.560	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)									24.560.900.465	28.245.035.535		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal									21.059.839.120	24.218.814.988		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah artikel yang dimuat	50 artikel			59.408.400	68.319.660	
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis media luar ruang	1 jenis			448.288.000	515.531.200	
2	14	03	2.01	05	Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta	385 orang			245.575.000	282.411.250	
2	14	03	2.01	06	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis media luar ruang	3 jenis			515.517.370	592.844.976	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	14	03	2.01	07	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen	1 dokumen			99.994.350	114.993.502	
2	14	03	2.01	09	Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta	180 orang			19.691.056.000	22.644.714.400	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)									301.420.219	346.633.252		
2	14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah unit LCD Proyektor	10 unit			101.686.788	116.939.806	
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta	250 orang			199.733.431	229.693.446	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota									3.007.915.847	3.459.103.224		
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah akseptor Jumlah peserta Jumlah peserta	200 akseptor 100 orang 300 orang			399.681.128	459.633.297	
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan Jumlah unit kendaraan roda dua	1 unit 40 unit			2.183.187.825	2.510.665.999	
2	14	03	2.03	09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pasangan usia subur yang telah mendapatkan pelayanan papsmear Jumlah peserta	100 orang 200 orang			179.999.862	206.999.841	
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis media luar ruang	3 jenis			245.047.032	281.804.087	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									191.725.279	220.484.071		
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi	2 lokasi			191.725.279	220.484.071	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan				
								Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe			
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)											439.946.750	505.938.762			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga											439.946.750	505.938.762			
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah anggota Jumlah orang	50 orang 100 orang			194.999.800	224.249.770				
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Serta Pemberdayaan dan Kesetaraan Gender		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok Jumlah kelompok	5 kelompok 15 kelompok			244.946.950	281.688.992				
Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.00 DINAS PERHUBUNGAN														70.647.791.186	81.244.959.863					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													70.647.791.186	81.244.959.863	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													31.553.340.163	36.286.341.187	
2	15	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													40.755.000	46.868.250	
2	15	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	3 dokumen			40.755.000	46.868.250				
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan													3.056.565.736	3.515.050.596	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah PNS	20 Orang			2.450.890.736	2.818.524.346				
2	15	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah laporan kinerja SKPD Jumlah pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah Jumlah pelaksanaan pengelolaan sistem informasi barang daerah Jumlah pelaksanaan rapat dan koordinasi di dalam daerah	4 dokumen 12 bulan 12 bulan 460 kali 21 orang			602.650.000	693.047.500				
2	15	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dokumen laporan keuangan smesteran	2 dokumen			3.025.000	3.478.750				
2	15	01	2.03		Administrasi Umum													28.456.019.427	32.724.422.341	
2	15	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah pelaksanaan surat menyurat	1 Paket			6.950.000	7.992.500				
2	15	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah pembayaran rekening air, listrik dan telpon yang dibayar tiap bulan Jumlah rekening listrik PJU yang dibayar	3 rekening 1 rekening			8.889.770.720	10.223.236.328				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
2	15	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor (BANPROV) Jumlah gedung kantor yang dibangun (BANPROV) Jumlah gedung kantor yang	1 dokumen 1 unit 1 unit			10.296.982.830	11.841.530.254	
2	15	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah kendaraan dinas yang berizin Jumlah tenaga pengemudi eselon II yang tersedia	10 unit 1 orang			33.200.000	38.180.000	
2	15	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah pelaksanaan pengelolaan sistem informasi keuangan SKPD	12 bulan			46.200.000	53.130.000	
2	15	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah SDM tenaga kebersihan	2 Orang			34.800.000	40.020.000	
2	15	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dan jenis ATK yang dibeli	49 Jenis			58.990.587	67.839.175	
2	15	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dan jenis barang yang di cetak	17 Jenis			84.428.514	97.092.791	
2	15	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dan jenis komponen listrik yang dibeli	3 Jenis			9.154.080	10.527.192	
2	15	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah komputer yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jumlah peralatan dan perlengkapan petugas LLAJ yang sesuai dengan kebutuhan Jumlah peralatan dan perlengkapan petugas LLAJ yang sesuai dengan	5 unit 5 unit 175 unit 19 unit			694.409.578	798.571.015	
2	15	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	26 Jenis			11.954.532	13.747.712	
2	15	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dan jenis bahan bacaan yang dibeli	10 Jenis			19.920.000	22.908.000	
2	15	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	1600 buah			35.250.000	40.537.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	15	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi ke luar daerah	104 kali			92.498.000	106.372.700	
2	15	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah kendaraan crane yang dibeli (banprov) Jumlah kendaraan dinas/operasional derex yang dibeli (banprov) Jumlah kendaraan dinas/operasional R2 yang dibeli (banprov) Jumlah kendaraan dinas/operasional R4 yang dibeli (banprov) Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibeli	1 unit 1 unit 20 unit 3 unit 1 unit			6.649.795.000	7.647.264.250	
2	15	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	7 Jenis			55.503.528	63.829.057	
2	15	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah peralatan kantor yang tersedia Jumlah peralatan kantor yang tersedia (banprov)	4 Jenis 17 jenis			1.082.967.067	1.245.412.127	
2	15	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah mebeleur yang tersedia	11 Jenis			66.143.319	76.064.817	
2	15	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah SDM tenaga pengamanan kantor	1 unit 2 orang			86.100.000	99.015.000	
2	15	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	10 unit			181.751.672	209.014.423	
2	15	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	11 Unit			9.500.000	10.925.000	
2	15	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	13 unit			9.750.000	11.212.500	
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)										39.094.451.023	44.958.618.676	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota										68.113.000	78.329.950	
2	15	02	2.01	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah dokumen perencanaan pembangunan gedung terminal	1 dokumen			68.113.000	78.329.950	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota										11.582.808.650	13.320.229.947	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah Paku Jalan Sesuai Kebutuhan	250 Buah			165.645.000	190.491.750	
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			jumlah lampu PJU yang sesuai dengan kebutuhan jumlah lampu PJU yang sesuai dengan kebutuhan (banprov) jumlah pagar pengaman jalan yang sesuai dengan kebutuhan jumlah pagar pengaman jalan yang sesuai dengan kebutuhan (banprov) jumlah panjang marka jalan yang sesuai dengan kebutuhan jumlah panjang marka jalan yang sesuai dengan kebutuhan (banprov) jumlah pos gatur portable yang sesuai dengan kebutuhan jumlah rambu-rambu lalu lintas yang sesuai dengan kebutuhan jumlah rambu-rambu yang sesuai dengan kebutuhan (banprov) jumlah traffic light sesuai dengan kebutuhan (banprov)	200 Buah 250 Buah 50 Buah 160 Buah 3143 Meter 56580 Meter 5 unit 210 Buah 285 Buah 6 titik 3 titik			10.777.028.650	12.393.582.947	
2	15	02	2.02	03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			jumlah alat pemberi isyarat lalu lintas dalam kondisi baik jumlah lampu PJU dalam kondisi baik jumlah rambu-rambu dalam kondisi baik jumlah warning light dalam kondisi baik	4 unit 100 unit 100 unit 8 unit			640.135.000	736.155.250	
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C									5.188.527.125	5.966.806.194		
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			jumlah terminal wisata yang dibangun	1 unit			4.996.041.000	5.745.447.150	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			jumlah halte yang dibangun	3 unit			192.486.125	221.359.044		
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor											20.858.308.325	23.987.054.574	
2	15	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			jumlah alat uji kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan (BANPROV) Jumlah barang koasi yang tersedia Jumlah DED yang di perlukan (BANPROV) jumlah gedung PKB yang dibangun (BANPROV) Jumlah tenaga teknis dan administrasi pengujian	1 Paket 1 Paket 1 paket 1 Unit 6 Orang			20.858.308.325	23.987.054.574		
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota											1.011.119.356	1.162.787.259	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			jumlah pelaksanaan patroli gabungan jumlah pelaksanaan pengamanan acara kedinasan dan lainnya jumlah pelaksanaan pengamanan hari lebaran natal dan tahun baru jumlah pelaksanaan pengamanan hari libur sekolah dan akhir pekan jumlah pelaksanaan pengamanan lalu lintas tamu VIP jumlah pelaksanaan pengawasan kendaraan di jalan jumlah pelaksanaan traffic counting jumlah pelaksanan pengamanan dan	24 hari 48 hari 24 Hari 100 hari 12 hari 4 hari 24 hari 365 hari			970.685.500	1.116.288.325		
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			jumlah pelaksanaan pengawasan PPNS LLAJ jumlah pelaksanaan	5 Kali 24 Kali			40.433.856	46.498.934		
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											90.534.090	104.114.203	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah penerbitan angkutan umum Jumlah pengemudi yang mengikuti sosialisasi	6 Kali 50 Orang			90.534.090	104.114.203		
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota											295.040.477	339.296.549	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
2	15	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Wonoharjo			Jumlah awak angkutan umum yang mendapatkan sertifikat AKUT Jumlah dokumen analisis database pelayanan angkutan Jumlah pelaksanaan sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan Jumlah tempat pemberhentian angkutan	6 Orang 1 target 6 kali 5 Unit			295.040.477	339.296.549				
Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.00 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN													215.244.568.866	247.531.254.197						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA													214.795.595.163	247.014.934.438	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													3.671.063.848	4.221.723.426	
2	16	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													32.163.000	36.987.450	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen Renstra dan Renja SKPD	1 paket			250.000	287.500				
2	16	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	1 orang			31.913.000	36.699.950				
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan													2.541.025.700	2.922.179.555	
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar tiap bulan	1 Tahun			2.489.285.700	2.862.678.555				
2	16	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah tenaga jasa pengelola sistem informasi Barang daerah jumlah Tenaga Pengelola Sistem Kepegawaian	1 orang 1 orang			51.090.000	58.753.500				
2	16	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen			300.000	345.000				
2	16	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			350.000	402.500				
2	16	01	2.03		Administrasi Umum													1.097.875.148	1.262.556.421	
2	16	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai dan dokumen terkirim	250 lembar			7.300.000	8.395.000				
2	16	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rekening sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 rekening			58.191.552	66.920.285				
2	16	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Gedung Kantor tiap tahun	1 unit			110.000.000	126.500.000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	16	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan yang diservis dan berizin Jumlah Tenaga pengemudi setiap bulan	4 unit 1 orang			29.200.000	33.580.000	
2	16	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah tenaga jasa pengelola sistem informasi Keuangan daerah Jumlah Tenaga jasa pengelola sistem pendapatan	1 orang 1 orang			84.164.000	96.788.600	
2	16	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan Kantor	2 orang			34.800.000	40.020.000	
2	16	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis Alat Tulis Kantor yang dibeli	66 jenis			70.002.963	80.503.407	
2	16	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis barang yang dicetakan dan/atau digandakan	3 jenis			17.250.000	19.837.500	
2	16	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis komponen listrik/ penerangan yang dibeli	4 jenis			8.439.281	9.705.173	
2	16	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis Peralatan Rumah Tangga yang dibeli	16 jenis			9.090.117	10.453.635	
2	16	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	12 bulan			18.000.000	20.700.000	
2	16	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis makanan dan minuman yang dibeli	12 bulan			24.997.000	28.746.550	
2	16	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	12 bulan			250.723.000	288.331.450	
2	16	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	6 unit			27.497.953	31.622.646	
2	16	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis Komputer yang dibeli Jumlah dan Jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	7 unit 2 unit			137.629.601	158.274.041	
2	16	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis mebeulair yang dibeli	7 unit			49.795.677	57.265.029	
2	16	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan luas Gedung Kantor yang dipelihara jumlah tenaga Penjaga Kantor setiap bulan	1 unit 3 orang			53.700.000	61.755.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	16	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis kendaraan yang dipelihara	4 unit			87.594.004	100.733.105	
2	16	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12 Unit			9.000.000	10.350.000	
2	16	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dan jenis peralatan gedung kantoryang dipelihara	8 unit			7.500.000	8.625.000	
2	16	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Mebeleur yang dipelihara	6 jenis			3.000.000	3.450.000	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK										7.851.526.699	9.029.255.703	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										7.851.526.699	9.029.255.703	
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti,jumlah pengaduan masyarakat yang	10 Pengaduan			89.735.836	103.196.211	
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah media dan saluran komunikasi Pemda yang dikelola tersedianya media online, media sosial, radio, mobiletron dan media cetak untuk penyebaran informasi publik	2 Jenis 1 paket			6.500.355.673	7.475.409.024	
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah informasi publik yang dipublikasikan	2 Jenis			300.384.000	345.441.600	
2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kemitraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kelompok Informasi Masyarakat serta Komunitas	3 kemitraan			961.051.190	1.105.208.868	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										203.273.004.616	233.763.955.309	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										36.000.000	41.400.000	
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah nama domain dan sub domain	20 sub domain			36.000.000	41.400.000	
2	16	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										203.237.004.616	233.722.555.309	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kebijakan yang disusun/dikeluarkan Jumlah Penatalaksanaan dan Pengawasan serta evaluasi SPBE	1 dokumen 1 Kegiatan			189.282.000	217.674.300	
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen rencana induk	1 dokumen			499.999.930	574.999.920	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan		
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah infrastruktur data center yang dikelola jumlah kapasitas bandwith yang tersedia Jumlah Pusat Server yang dibangun	4 unit 35 mbps 1 unit			11.713.881.674	13.470.963.925			
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aplikasi e-government yang dibangun/dikembangkan	3 sistem			150.004.000	172.504.600			
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah perangkat kamera pemantau	620 set			60.642.599.300	69.738.989.195			
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jaringan intra pemerintah yang terbangun jumlah jaringan internet yang terpasang jumlah kamera pemantau jumlah layanan pada command center pemda jumlah perangkat sistem pengawasan internal jumlah perangkat video wall jumlah sistem penunjang command center jumlah website yang dikelola	180000 meter 35 Titik 8 Titik 12 bulan 380 set 35 jenis 5 sistem 1 sistem			130.041.237.712	149.547.423.369			
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									278.961.703	320.805.959				
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									278.961.703	320.805.959				
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota									278.961.703	320.805.959				
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Buku Data Sektoral Kabupaten Pangandaran	1 dokumen			176.876.285	203.407.728			
2	20	02	2.01	02	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Statistik yang meningkat pemahamannya	55 orang			102.085.418	117.398.231			
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									170.012.000	195.513.800				
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI									170.012.000	195.513.800				
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									125.012.000	143.763.800				
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aplikasi yang bersertifikat elektronik	3 sistem			125.012.000	143.763.800			
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota									45.000.000	51.750.000				
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM dan Materil Sandi	1 Kegiatan			45.000.000	51.750.000			
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU													43.932.118.444	50.521.936.210					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												43.932.118.444	50.521.936.210	
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												5.690.092.304	6.543.606.149	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
2	18	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											36.494.000	41.968.100	
2	18	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	6 Dokumen			31.350.000	36.052.500		
2	18	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	6 Dokumen			5.144.000	5.915.600		
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan											2.045.270.366	2.352.060.921	
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS DPMPSTP Kabupaten Pangandaran	16 Orang			1.920.032.366	2.208.037.221		
2	18	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyedia Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah sistem informasi kepegawaian Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah Jumlah Sistem/Website SKPD yang dipelihara	2 Orang/Bulan 1 Sistem 1 Sistem 1 Website			118.950.000	136.792.500		
2	18	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan keuangan semesteran	2 Laporan			3.144.000	3.615.600		
2	18	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan			3.144.000	3.615.600		
2	18	01	2.03		Administrasi Umum											3.257.812.938	3.746.484.878	
2	18	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 Surat			6.650.000	7.647.500		
2	18	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3 Rekening			138.640.000	159.436.000		
2	18	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala Jumlah tenaga pengemudi	6 Unit 1 Orang/Bulan			38.800.000	44.620.000		
2	18	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan	1 Sistem 1 Sistem			81.950.000	94.242.500		
2	18	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga kebersihan kantor	2 Orang/Bulan			72.000.000	82.800.000		
2	18	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	115 Jenis			219.941.380	252.932.587		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
2	18	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	50 Jenis			97.301.000	111.896.150	
2	18	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	50 Jenis			2.917.875	3.355.556	
2	18	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	17 Jenis			38.297.253	44.041.841	
2	18	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	10 Media			36.174.000	41.600.100	
2	18	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4 Jenis			104.300.000	119.945.000	
2	18	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah aktifitas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	140 Kali 140 Kali			1.028.300.000	1.182.545.000	
2	18	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	12 Jenis			213.462.935	245.482.375	
2	18	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibeli	10 Jenis			235.777.772	271.144.438	
2	18	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	30 Jenis			328.682.907	377.985.343	
2	18	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah gedung kantor yang disewa Jumlah tenaga pengamanan kantor	1 Gedung Kantor 1 Gedung Kantor 2 Orang/Bulan			138.000.000	158.700.000	
2	18	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah danJenis Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Mobil			112.849.200	129.776.580	
2	18	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	5 Unit			218.768.616	251.583.908	
2	18	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	35 Jenis			50.000.000	57.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	18	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	35 Jenis			95.000.000	109.250.000	
2	18	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									350.515.000	403.092.250		
2	18	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	80 Orang			46.050.000	52.957.500	
2	18	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	16 Orang			304.465.000	350.134.750	
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									776.421.500	892.884.725		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									247.773.500	284.939.525		
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah produk hukum (Kajian kebijakan penanaman modal) yang	1 Produk Hukum			247.773.500	284.939.525	
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									528.648.000	607.945.200		
2	18	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Pangandaran	1 Dokumen			261.088.000	300.251.200	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian dan Peluang Investasi Daerah Jumlah Sistem Informasi Penanaman Modal Di	1 Dokumen 1 Sistem			267.560.000	307.694.000	
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									697.626.000	802.269.900		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									697.626.000	802.269.900		
2	18	03	2.01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah cetakan CD Potensi Daerah Jumlah Dokumen Potensi unggulan yang	500 Keping 1 Dokumen			59.576.000	68.512.400	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah event pameran investasi yang diikuti Jumlah Kerjasama Pengembangan Investasi	6 Event 4 Kali			638.050.000	733.757.500	
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL									36.563.136.180	42.047.606.607		
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota									36.563.136.180	42.047.606.607		
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Pelayanan Perizinan Cakupan PTSP Jumlah Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pangandaran Jumlah Pengadaan Sarana Dan Prasarana MPP Kabupaten Pangandaran	1 Fasilitas Pelayanan 1 Fasilitas Pelayanan 1 Gedung MPP 2 Pkt PngdaanSar pras			35.699.297.728	41.054.192.387	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen SOP Pelayanan Perizinan Jumlah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Obyek Pendapatan Jumlah Obyek Perizinan yang Diidentifikasi Jumlah Pendataan dan Penyusunan Dokumen Potensi Perizinan Jumlah Perizinan yang di Evaluasi dan di Verifikasi	1 Dokumen 350 Objek Pendapatan 1000 Potensi Pendapatan 2000 Potensi Perizinan 1500 Dokumen			588.407.880	676.669.062	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Brosur/Liflet dan sarana informasi masyarakat lainnya Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Bangunan yang melanggar ketentuan Jumlah Papan Reklame dan sarana informasi masyarakat lainnya Jumlah penyelenggaraan pelayanan pengaduan,kebijakan dan pelaporan layanan Jumlah Responden Jumlah Sarana	1000 Lembar 1 Tahun 10 Titik 1 Tahun 150 Responden 1 Sarana Informasi			73.784.612	84.852.304	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Raperda Jumlah Juklak dan Juknis Pelayanan Perijinan Jumlah Peserta Diklat PTSP Jumlah Peserta Pelatihan (Teknis Perizinan, Pelatihan Komunikasi dan Kepribadian, Pelatihan Aplikasi Perizinan) Jumlah Peserta Peningkatan dan Pelatihan SDM Aparatur Pelayanan Perijinan Investasi Jumlah Peserta sosialisasi pelayanan perijinan dan non	2 Dokumen 1 Dokumen 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Kecamatan			201.645.960	231.892.854	
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL									204.842.460	235.568.829		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									204.842.460	235.568.829		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah PMDN dan PMA yang di Monitoring	90 Perusahaan			45.606.000	52.446.900	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kerjasama Kerjasama Di Bidang Investasi yang Dijalin Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Jumlah Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Di Bidang Penanaman Modal Dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha Jumlah PMDN dan PMA	2 Kali 2 Kali 2 Kali 50 Perusahaan			60.873.960	70.005.054				
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Jumlah Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	2 Kali 2 Kali			98.362.500	113.116.875				
Unit Organisasi : 3.30.2.17.0.00.01.00 DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UMKM													14.938.826.417	17.179.650.380						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH													6.581.512.906	7.568.739.842	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI													82.144.000	94.465.600	
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota													82.144.000	94.465.600	
2	17	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi Aktif	72 Koperasi Aktif			71.966.000	82.760.900				
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi yang diperiksa	72 Koperasi Aktif			10.178.000	11.704.700				
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI													15.148.000	17.420.200	
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													15.148.000	17.420.200	
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi	35 Koperasi Aktif			15.148.000	17.420.200				
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN													274.149.000	315.271.350	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota													274.149.000	315.271.350	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi	30 Koperasi			274.149.000	315.271.350				
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI													137.399.500	158.009.425	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota													137.399.500	158.009.425	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Koperasi	30 Koperasi			137.399.500	158.009.425				
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)													982.921.500	1.130.359.725	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan										982.921.500	1.130.359.725	
2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen			607.472.000	698.592.800	
2	17	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaku UMKM	250 Pelaku UMKM			375.449.500	431.766.925	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM										5.089.750.906	5.853.213.542	
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil										5.089.750.906	5.853.213.542	
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Usaha Mikro yang Difasilitasi	250 Pelaku Usaha Mikro			5.089.750.906	5.853.213.542	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										8.357.313.511	9.610.910.538	
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										5.679.497.603	6.531.422.244	
3	30	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										122.255.000	140.593.250	
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen	1 Dokumen			39.033.000	44.887.950	
3	30	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen perencanaan	6 Dokumen			83.222.000	95.705.300	
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan										2.570.888.572	2.956.521.858	
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah ASN	17 Orang			2.365.884.572	2.720.767.258	
3	30	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			191.004.000	219.654.600	
3	30	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah laporan keuangan semesteran	2 Laporan			7.000.000	8.050.000	
3	30	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan			7.000.000	8.050.000	
3	30	01	2.03		Administrasi Umum										2.790.748.981	3.209.361.328	
3	30	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah surat yang dikelola	3000 Surat			6.010.000	6.911.500	
3	30	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 Rekening			75.746.315	87.108.262	
3	30	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang disediakan	2 Gedung			250.000.000	287.500.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
3	30	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan yang berijin	9 unit			32.700.000	37.605.000	
3	30	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah jasa administrasi keuangan	1 Orang			42.916.000	49.353.400	
3	30	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM kebersihan Setiap Bulan	3 Orang			52.200.000	60.030.000	
3	30	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	110 Jenis			304.350.251	350.002.789	
3	30	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	7 Jenis			305.952.575	351.845.461	
3	30	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	7 Jenis			28.299.601	32.544.541	
3	30	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	7 Jenis			44.781.133	51.498.303	
3	30	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	10 media			18.000.000	20.700.000	
3	30	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah makanan dan minuman yang disediakan	4 jenis			160.690.000	184.793.500	
3	30	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	160 Kali			432.045.000	496.851.750	
3	30	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Operasional	2 Unit			69.365.000	79.769.750	
3	30	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perlengkapan gedung kantor	10 unit			134.870.806	155.101.427	
3	30	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan gedung kantor	7 unit			252.518.190	290.395.918	
3	30	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah mebeleur	1 paket			261.608.618	300.849.911	
3	30	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 gedung kantor			107.912.500	124.099.375	
3	30	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah mobil jabatan yang diperlihara rutin/berkala	1 mobil			68.581.312	78.868.509	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	30	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	8 kendaraan			115.201.680	132.481.932	
3	30	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	2 gedung kantor			27.000.000	31.050.000	
3	30	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									195.605.050	224.945.808		
3	30	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	50 set			19.060.650	21.919.748	
3	30	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	100 set			37.485.000	43.107.750	
3	30	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai yang mengikuti	10 Orang			90.000.000	103.500.000	
3	30	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai yang mengikuti	45 Orang			22.350.000	25.702.500	
3	30	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pegawai yang mengikuti	50 Orang			26.709.400	30.715.810	
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN									1.399.561.000	1.609.495.150		
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan									1.309.774.000	1.506.240.100		
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	5 Dokumen			1.234.700.000	1.419.905.000	
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen	1 Dokumen			75.074.000	86.335.100	
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya									89.787.000	103.255.050		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pedagang yang Dibina	2500 Pedagang			89.787.000	103.255.050	
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING									250.499.008	288.073.859		
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									13.584.900	15.622.635		
3	30	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen	2 dokumen			13.584.900	15.622.635	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									223.329.208	256.828.589		
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kegiatan pengawasan	4 kegiatan			174.219.908	200.352.894	
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah paket yang disediakan	5000 paket			49.109.300	56.475.695	
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									13.584.900	15.622.635		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe					
3	30	04	2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen	3 dokumen			13.584.900	15.622.635				
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR									400.647.000	460.744.050					
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									400.647.000	460.744.050					
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta	1000 Orang			400.647.000	460.744.050				
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN									375.924.000	432.312.600					
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan									375.924.000	432.312.600					
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah alat yang ditera	1500 unit			358.689.000	412.492.350				
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah UTTP yang diawasi	1500 unit			17.235.000	19.820.250				
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI									251.184.900	288.862.635					
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri									251.184.900	288.862.635					
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah produk yang di promosikan	7 Produk			100.038.000	115.043.700				
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah peserta	450 Orang			151.146.900	173.818.935				
Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01.00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN															43.610.303.502	50.151.849.026				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													43.252.152.368	49.739.975.222	
2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													5.360.533.150	6.164.613.123	
2	23	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													30.145.000	34.666.750	
2	23	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	4 Dokumen			30.145.000	34.666.750				
2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan													2.709.945.286	3.116.437.079	
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah Pegawai ASN	20 Orang			2.598.775.286	2.988.591.579				
2	23	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah jasa tenaga administrasi dan teknis Non PNS Jumlah Tenaga Operator SIMDA BMD Laporan Lakip	4 Orang 2 Orang 1 Dokumen			108.420.000	124.683.000				
2	23	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Laporan Keuangan semesteran	1 Dokumen			1.125.000	1.293.750				
2	23	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			1.625.000	1.868.750				
2	23	01	2.03		Administrasi Umum													2.479.172.864	2.851.048.794	
2	23	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah Materai	100 Buah			1.500.000	1.725.000				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
2	23	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	5 Rekening			285.299.280	328.094.172	
2	23	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah Sewa Gedung Kantor	1 Unit			100.000.000	115.000.000	
2	23	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin Jumlah Pengemudi	5 Unit 1 Unit			33.300.000	38.295.000	
2	23	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah tenaga Administrasi Keuangan	1 Orang			47.055.000	54.113.250	
2	23	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	2 Orang			116.104.872	133.520.603	
2	23	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah Alat Tulis Kantor	42 Jenis			50.398.210	57.957.941	
2	23	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	10 Jenis			21.967.388	25.262.496	
2	23	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	20 Jenis			26.515.211	30.492.493	
2	23	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis			28.154.280	32.377.422	
2	23	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	7 Eks			11.280.000	12.972.000	
2	23	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jenis makanan dan minuman yang dibeli	3 Jenis			39.996.000	45.995.400	
2	23	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	32 Kali			280.837.000	322.962.550	
2	23	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	32 Kali			350.705.385	403.311.193	
2	23	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah Peralatan Kantor	18 Unit			206.966.508	238.011.484	
2	23	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah Mebeleur Kantor	32 Kali			217.790.193	250.458.722	
2	23	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah Gedung yang di pelihara Jumlah Tenaga Jasa Keamanan Kantor	1 Unit 4 Orang			440.600.000	506.690.000	
2	23	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah kendaraan Jabatan yang dipelihara	1 Unit			71.205.712	81.886.569	
2	23	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	4 Unit			101.997.825	117.297.499	
2	23	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit			47.500.000	54.625.000	
2	23	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									141.270.000	162.460.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
2	23	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	50 Stel			21.270.000	24.460.500	
2	23	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan	17 Orang			120.000.000	138.000.000	
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										37.782.315.191	43.449.662.468	
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										13.021.964.397	14.975.259.056	
2					Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah iklan layanan perpustakaan Jumlah sistem Database Perpustakaan Jumlah TIK Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Pengadaan Digital Pustaka dan E-Learning untuk Perpustakaan untuk	10 Jenis 1 Sistem 1 paket 2 Paket			2.016.983.887	2.319.531.470	
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah kerja sama jejaring Perpustakaan Jumlah Layanan Perpustakaan Keliling Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling Jumlah Pameran	1 Paket 10 Kecamatan 1 Unit 4 Kali 4 Kegiatan			7.111.827.875	8.178.602.056	
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sidamulih			Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Jumlah media perpustakaan digital Jumlah Pameran	2000 Eksemplar 75 Koleksi 4 Pameran			3.444.185.987	3.960.813.885	
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah Koleksi Buku perpustakaan yang diolah Jumlah sarana prasarana yang dipelihara	2000 Eksemplar 30 Unit			394.800.828	454.020.952	
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah dokumen statistik perpustakaan	1 Dokumen			54.165.820	62.290.693	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										24.760.350.794	28.474.403.412	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
2	23	02	2.02	01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah kegiatan bimbingan minat dan bakat Jumlah kegiatan pengembangan minat dan budaya baca jumlah pengelola perpustakaan yang mengikuti bimtek Pengadaan Buku Perpustakaan Kecamatan Tahun Anggaran 2021 Pengadaan Buku Perpustakaan Madrasah Diniyah Tahun Anggaran 2021 Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2021 Peningkatan Prasarana Penunjang Perpustakaan Kecamatan Tahun anggaran 2021 Peningkatan Prasarana Penunjang Perpustakaan Madrasah Diniyah Tahun anggaran 2021 Peningkatan Prasarana Penunjang Perpustakaan Pondok Pesanteren Tahun anggaran	240 orang 200 perpustakaa n 200 pemustaka 10 Perpustakaa n 30 Perpustakaa n 20 Perpustakaa n 10 Perpustakaa n 30 Perpustakaa n 20 Perpustakaa n 1 kegiatan 93 desa			6.492.341.986	7.466.193.284	
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah Gedung Perpustakaan	1 Unit			17.471.596.562	20.092.336.046	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			JUmlah lomba perpustakaan terbaik jumlah perpustakaan dan pustakawan yang di beri pengawasan dan diberi penyuluhan Jumlah perpustakaan yang di bina Jumlah sekolah yang mengikuti lomba minat baca	20 perpustakaa n 24 perpustakaa n 73 perpustakaa n 3 kegiatan			426.180.656	490.107.754	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah kegiatan koordinasi pengembangan perpustakaan	24 perpustakaa n			39.085.590	44.948.428	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah peserta duta literasi		2 kegiatan			331.146.000	380.817.900	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO											109.304.027	125.699.631	
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota											36.302.513	41.747.890	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah koleksi bahan perpustakaan langka		10 Koleksi			36.302.513	41.747.890	
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota											73.001.514	83.951.741	
2	23	03	2.02	02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pemerintahan		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Sukaresik			Jumlah koleksi warisan budaya daerah		10 Kecamatan			73.001.514	83.951.741	
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN											358.151.134	411.873.804	
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP											282.373.634	324.729.679	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota											86.820.000	99.843.000	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Instrumen Kearsipan		1 Dokumen			86.820.000	99.843.000	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota											108.100.000	124.315.000	
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah Arsip Statis yang di Perservasi		20 Box			108.100.000	124.315.000	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota											87.453.634	100.571.679	
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Layanan Informasi Kearsipan melalui SIKN					71.145.634	81.817.479	
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Terlaksananya Pembinaan Kearsipan		10 Dokumen			16.308.000	18.754.200	
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP											75.777.500	87.144.125	
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota											75.777.500	87.144.125	
2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih,			Jumlah Arsip yang Terselamatkan		10 Box			75.777.500	87.144.125	
Unit Organisasi : 3.25.2.09.0.00.01.00 DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN																58.360.219.549	67.114.252.482	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											6.969.698.220	8.015.152.953	
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN											4.030.467.677	4.635.037.829	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota											4.030.467.677	4.635.037.829	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Lantai Jemur yang dibangun Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang diperbaiki Jumlah Rice Milling Unit yang dibangun		3 Unit 2 Unit 6 Unit 4 Unit			3.880.467.752	4.462.537.915	
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen perencanaan		3 dokumen			149.999.925	172.499.914	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan		
								Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe	
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT											2.581.330.543	2.968.530.124	
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan											1.814.731.050	2.086.940.707	
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kelompok wanita tani jumlah penerima benih/bibit tanaman	1 kelompok 5 kelompok			699.018.550	803.871.332		
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah laporan perkembangan harga bahan pangan pokok	12 dokumen			27.000.000	31.050.000		
2	09	03	2.01	05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah alat penunjang pertanian (motor roda 3) jumlah alat pertanian (cultivator)	30 unit 10 unit 1 dokumen			1.088.712.500	1.252.019.375		
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi											766.599.493	881.589.417	
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			intensitas uji keamanan pangan jumlah dokumen HPS jumlah kategori penerima penghargaan adhiyarya pangan nusantara jumlah lokasi pengawasan keamanan pangan segar	3 kali 1 dokumen 5 kategori 10 lokasi 10 kelompok			766.599.493	881.589.417		
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN											357.900.000	411.585.000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan											63.200.000	72.680.000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah laporan FSVA jumlah laporan Neraca Bahan Makanan	30 buku 1 dokumen			63.200.000	72.680.000		
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota											294.700.000	338.905.000	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah desa rawan pangan yang di intervensi jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dewan ketahanan pangan	2 lokasi 1 dokumen 3 kelompok			210.000.000	241.500.000		
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah cadangan pangan daerah yang tersedia	100 ton			84.700.000	97.405.000		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN											51.390.521.329	59.099.099.529	
3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											4.471.524.676	5.142.253.378	
3	25	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											110.000.100	126.500.115	
3	25	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			Jumlah dokumen perencanaan Jumlah Peserta Bimbingan	7 dokumen 22 orang			110.000.100	126.500.115		
3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan											3.066.209.092	3.526.140.456	
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah gaji bulanan yang di bayarkan	14 bulan			2.976.224.092	3.422.657.706		

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
										Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	25	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah dokumen laporan triwulan Jumlah jasa tenaga operator simda BMD Jumlah jasa tenaga operator simda pendapatan Jumlah laporan /monev program / kegiatan	4 dokumen 1 orang 1 orang 24 dokumen			86.585.000	99.572.750		
3	25	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah dokumen laporan semester	2 dokumen			1.300.000	1.495.000		
3	25	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah dokumen laporan akhir tahun	1 dokumen			2.100.000	2.415.000		
3	25	01	2.03		Administrasi Umum									1.158.175.484	1.331.901.807			
3	25	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah materai jumlah pengadministrasi kepegawaian jumlah pengadminitrasi	550 buah 1 orang 2 orang			46.155.000	53.078.250		
3	25	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 rekening			65.132.400	74.902.260		
3	25	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah kendaraan yang berizin jumlah SDM sopir	11 unit 1 orang			51.400.000	59.110.000		
3	25	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			Jumlah jasa tenaga operator simda keuangan	1 orang			32.700.000	37.605.000		
3	25	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah SDM kebersihan setiap bulan	2 orang			22.612.955	26.004.898		
3	25	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jenis ATK yang di beli	95 jenis			84.699.799	97.404.769		
3	25	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jenis barang yang di cetak dan di gandakan	5 jenis			37.718.250	43.375.988		
3	25	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah komponen instalasi listrik yang di beli	10 jenis			2.439.080	2.804.942		
3	25	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah bahan bacaan yang di beli tiap bulan	15 buah			32.388.000	37.246.200		
3	25	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jenis makanan dan minuman yang di beli	3 jenis			36.302.000	41.747.300		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	25	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18 kali			108.859.500	125.188.425	
3	25	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan yang dibeli	5 unit			170.720.000	196.328.000	
3	25	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah kendaraan yang di beli jumlah komputer yang di beli	5 unit 5 unit			18.871.322	21.702.020	
3	25	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis peralatan gedung kantor yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah mesin/kartu absensi yang dibeli	10 jenis 5 unit 1 unit			123.478.866	142.000.696	
3	25	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jenis mebeleur yang di beli	20 jenis			65.160.401	74.934.461	
3	25	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah gedung kantor yang dipelihara jumlah SDM keamanan setiap bulan	3 gedung 2 orang			65.075.000	74.836.250	
3	25	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah kendaraan yang di pelihara	5 unit			168.031.560	193.236.294	
3	25	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jenis perlengkapan kantor yang di pelihara	20 jenis			25.014.000	28.766.100	
3	25	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jenis peralatan gedung kantor yang di pelihara	15 jenis			1.417.351	1.629.954	
3	25	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									137.140.000	157.711.000		
3	25	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Kondangjajar			jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	4 kali			137.140.000	157.711.000	
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP									25.322.111.050	29.120.427.708		
3	25	02	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota									22.128.020.570	25.447.223.656		
3	25	02	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah lokasi hajat laut/syukuran nelayan	8 lokasi			110.000.000	126.500.000	
3	25	02	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan Jumlah sarana dan prasarana perikanan yang	2 dokumen 4 unit			11.850.790.800	13.628.409.420	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
3		25	02	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah ABPI berupa GPS jumlah ABPI berupa Radio jumlah alat bantu penangkapan ikan jumlah alat bantu penangkapan ikan (GPS) jumlah alat penangkapan ikan Jumlah kapal penangkapan ikan yang terbangun jumlah kapal ukuran 15-20 GT	20 unit 20 unit 50 unit 10 KUB 400 unit 5 unit 6 unit 6 unit			10.167.229.770	11.692.314.236		
3	25	02	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota												1.794.090.480	2.063.204.052	
3		25	02	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi peserta asuransi nelayan Jumlah kendaraan operasional kenelayanan Jumlah nelayan yang mendapatkan pemberdayaan	500 orang 1 unit 50 orang			485.899.900	558.784.885		
3		25	02	2.02	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kelompok pengolah dan pemasar yang mendapatkan pemberdayaan Jumlah laporan kegiatan pendukung kegiatan yang bersumber provinsi dan pusat Jumlah penerima sarana usaha kelautan dan perikanan Jumlah petambak garam	25 kelompok 1 dokumen 3 kelompok 3 kelompok			1.308.190.580	1.504.419.167		
3	25	02	2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)												1.400.000.000	1.610.000.000	
3		25	02	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah bangunan TPI yang di pelihara jumlah karcis lelang jumlah penerima alat penunjang pelelangan jumlah penyelenggara pelelangan ikan jumlah TPI yang memiliki	2 unit 11000 blok 1 koperasi 8 koperasi 1 tpi			1.400.000.000	1.610.000.000		
3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												20.482.986.426	23.555.434.390	
3	25	03	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil												9.644.853.960	11.091.582.054	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangandaran, Padaherang, Cibogo Kab. Pangandaran, Pananjung			jumlah benih ikan Jumlah benih ikan mas dan tawes Jumlah benih ikan (tawes dan nila) Jumlah benih ikan (tawes dan nilem) Jumlah Benih Ikan yang di tebar jumlah calon induk ikan Jumlah calon induk ikan (nila) Jumlah Jalan Produksi Jumlah Kecamatan yang di Restocking Jumlah Minapadi jumlah penerima induk ikan unggul Jumlah penerima induk ikan unggul (Gurame) Jumlah penerima induk ikan unggul (Lele) Jumlah penerima induk ikan unggul (Nila) jumlah penerima jaringan listrik Jumlah penerima pakan induk ikan (Gurame) Jumlah penerima pakan induk ikan (Lele) Jumlah penerima pakan induk ikan (Nila)	33000 ekor 50000 ekor 20000 ekor 66000 ekor 1000000 ekor 10 paket 1 paket 3 lokasi 10 kecamatan 1 kelompok 5 kelompok 11 kelompok 16 kelompok 22 kelompok 1 kelompok 11 kelompok 16 kelompok 22 kelompok 2 kelompok 4 kelompok 3 kelompok 2 paket 4 paket 2 paket			9.644.853.960	11.091.582.054	
3	25	03	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										10.838.132.466	12.463.852.336	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
3		25	03	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen perencanaan Jumlah Rehab Kolam Bak Induk/Calon Induk (25 x 1,5m) x 3 jumlah sarana prasarana yang di bangun Pembangunan Bak Sterilisasi Roda Kendaraan dan Bak Disinfeksi Alas Kaki (7 x 4 m) Pembangunan Sumur Bor Air Tawar Unit Pembenihan Rehab Kolam Bak Induk/Calon Induk (15 x 1,5 m) x 3 Rehab Kolam Bak Larva/Pendederan (16 x 14 m) Rehab Kolam Bak Pemijahan (16 x 14 m)	5 dokumen 3 kolam 2 unit 1 kolam 1 kolam 3 kolam 1 kolam 1 kolam 1 kolam			10.126.795.111	11.645.814.378	
3		25	03	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan	Kab. Pangandaran, Cimerak, Batumalang			jumlah benih ikan berkualitas jumlah pelayanan BBI	200000 ekor 2 fungsi			330.787.355	380.405.458	
3		25	03	2.04	06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat									380.550.000	437.632.500	
3		25	04			PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN									793.999.375	913.099.281	
3		25	04	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota									793.999.375	913.099.281	
3		25	04	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah alat selam Jumlah kelompok masyarakat pengawas Jumlah kendaraan operasional pengawasan yang dipelihara Jumlah laporan identifikasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan perikanan jumlah lokasi sumberdaya ikan jumlah papan/plang peringatan/himbauan/sosiali sasi jumlah perahu tempel Jumlah sarana penunjang	6 paket 11 kelompok 1 unit 2 kelompok 10 lokasi 21 unit 1 unit 1 paket 22 unit 2 unit			693.999.767	798.099.732	
3		25	04	2.01	02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam									99.999.608	114.999.549	
3		25	05			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN									319.899.802	367.884.772	
3		25	05	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil									200.000.000	230.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
3	25	05	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah poklachsar yang di bina	10 kelompok			200.000.000	230.000.000				
3	25	05	2.03		Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota								119.899.802	137.884.772						
3	25	05	2.03	01	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitas kegiatan FORIKAN Jumlah Fasilitas kegiatan P2WKSS Jumlah penerima produk olahan perikanan	1 kegiatan 1 kegiatan 6 unit			119.899.802	137.884.772				
Unit Organisasi : 3.26.2.22.0.00.01.00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN														238.449.030.309	97.021.592.308					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													19.968.104.990	22.963.320.738	
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN													18.341.690.000	21.092.943.500	
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota													17.893.990.000	20.578.088.500	
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kunjungan Wisatawan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diinternalisasi Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dikolaborasikan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diolah menjadi produk Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang disebarluaskan Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditingkatkan pengayaan keberagamannya Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang ditingkatkan pengayaan keberagamannya Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terinovasi Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang	5000000 Orang 1 Objek 3 Objek 2 Objek 1 Produk 1 Objek 1 Objek 2 Objek 3 Objek 1 Objek 1 Objek 1 Objek			17.809.290.000	20.480.683.500				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah budayawan yang mengikuti dialog kebudayaan		50 Orang			84.700.000	97.405.000	
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										447.700.000	514.855.000		
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang mempertahankan pakem		2 Objek			326.700.000	375.705.000	
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah diplomasi pemajuan kebudayaan yang dilakukan		2 Diplomasi			121.000.000	139.150.000	
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL										302.500.000	347.875.000		
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota										302.500.000	347.875.000		
2	22	03	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pihak yang menjalin kerjasama kebudayaan		8 Pihak			302.500.000	347.875.000	
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH										90.469.000	104.039.350		
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										90.469.000	104.039.350		
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis media publikasi informasi mengenai pelindungan objek pemajuan kebudayaan		2 Media			90.469.000	104.039.350	
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA										1.233.445.990	1.418.462.888		
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										1.170.606.000	1.346.196.900		
2	22	05	2.01	01	Register Cagar Budaya	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen database objek pemajuan kebudayaan yang termutakhirkan		1 Dokumen			66.550.000	76.532.500	
2	22	05	2.01	02	Pencegahan dan Penanggulungan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen peraturan untuk melindungi artefak bersejarah dan arkeologi termasuk yang beradadi bawah air serta bukti tindakan penegakannya Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terpelihara dari kerusakan atau		1 Dokumen 1 Objek			1.030.000.000	1.184.500.000	
2	22	05	2.01	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang terselamatkan		1 Objek			74.056.000	85.164.400	
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota										62.839.990	72.265.988		
2	22	05	2.02	03	Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya	Penguatan Kearifan Lokal		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kajian objek pemajuan kebudayaan		1 Dokumen			62.839.990	72.265.988	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										218.480.925.319	74.058.271.570		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										8.171.559.555	9.397.293.486		
3	26	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										149.350.000	171.752.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
3	26	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD yang disusun Jumlah operator pengelola sistem informasi	2 Dokumen 2 Orang			95.850.000	110.227.500	
3	26	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD yang dibuat	12 Dokumen			53.500.000	61.525.000	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan									5.928.902.329	6.818.237.678		
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Dibayarkan	12 Bulan			5.715.697.329	6.573.051.928	
3	26	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang berhasil disusun Jumlah operator aplikasi sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah Jumlah operator yang mengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah	19 Dokumen 4 Orang 2 Orang 2 Orang			206.550.000	237.532.500	
3	26	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang disusun	1 Dokumen			3.025.000	3.478.750	
3	26	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	1 Dokumen			1.210.000	1.391.500	
3	26	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen			2.420.000	2.783.000	
3	26	01	2.03		Administrasi Umum									1.778.948.796	2.045.791.114		
3	26	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah surat yang dikelola	5000 Lembar			3.334.750	3.834.962	
3	26	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening yang dibayar	250 Rekening			302.500.000	347.875.000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
										Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
3	26	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak tahunan Jumlah tenaga sopir untuk mendukung mobilitas pejabat eselon 2 dan eselon 3	20 Unit 2 Orang			89.284.400	102.677.060		
3	26	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah operator yang mengelola Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	2 Orang			53.500.000	61.525.000		
3	26	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga kebersihan perkantoran	4 Orang			108.897.370	125.231.975		
3	26	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis ATK yang dibeli	60 Jenis			139.150.000	160.022.500		
3	26	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen yang digandakan	30250 Lembar			38.260.000	43.999.000		
3	26	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	20 Jenis			30.241.149	34.777.321		
3	26	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	10 Jenis			24.391.495	28.050.219		
3	26	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis bahan bacaan yang dibeli	50 Jenis			46.800.000	53.820.000		
3	26	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah makanan dan minuman yang dibeli untuk keperluan kegiatan	1000 Dus			60.500.000	69.575.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
3	26	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	50 Kali			302.488.000	347.861.200	
3	26	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli Jumlah alat studio yang dibeli	5 Jenis 5 Unit			24.199.938	27.829.929	
3	26	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis peralatan gedung kantor yang dibeli Jumlah komputer/laptop yang dibeli	10 Jenis 5 unit			211.652.762	243.400.676	
3	26	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis mebeleur yang dibeli	5 Jenis			48.399.788	55.659.756	
3	26	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah petugas keamanan kantor luas halaman dan taman kantor dinas yang ditata	12 Unit 2 Orang 2500 m2			94.900.000	109.135.000	
3	26	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kendaraan yang dipelihara	16 Unit			145.199.144	166.979.016	
3	26	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	5 Jenis			55.250.000	63.537.500	
3	26	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									314.358.430	361.512.194		
3	26	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian dan perlengkapannya yang dibeli	40 Stel			19.265.400	22.155.210	
3	26	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian kerja lapangan yang dibeli	40 Stel			20.538.000	23.618.700	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
3	26	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibeli		40 Stel			20.500.000	23.575.000	
3	26	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti Peningkatan kualitas dan produktivitas aparatur Jumlah pegawai yang mengikuti team building		40 Orang 40 Orang 40 Orang			193.590.640	222.629.236	
3	26	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti Sosilaisasi Peraturan Perundangundangan		40 Orang			24.199.950	27.829.942	
3	26	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		40 Orang/Jenis			36.264.440	41.704.106	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA										172.647.442.784	58.552.851.202		
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota										148.796.151.500	36.988.866.225		
3	26	02	2.01	02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kepariwisataan		7 Dokumen			2.224.333.500	832.983.525	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah destinasi Ekowisata yang dikembangkan Jumlah destinasi wisata alam yang dikembangkan Jumlah Destinasi Wisata Alam yang ditata Jumlah destinasi Wisata Bahari yang dikembangkan Jumlah Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner yang dikembangkan Jumlah destinasi wisata buatan yang dikembangkan Jumlah destinasi wisata Kawasan Terintegrasi yang dikembangkan Jumlah Destinasi Wisata Kota dan Desa yang dikembangkan Jumlah destinasi Wisata Petualangan yang dikembangkan Jumlah Destinasi Wisata Sejarah yang dikembangkan Jumlah Wisata MICE dan Event yang dikembangkan Jumlah Wisata Olah Raga yang dikembangkan umlah destinasi wisata	1 Destinasi 20 Destinasi 5 Destinasi 5 Destinasi 3 Destinasi 2 Destinasi 1 Destinasi 4 Destinasi Wisata 4 Destinasi 1 Destinasi 1 Destinasi 1 Destinasi			146.571.818.000	36.155.882.700	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota									23.669.791.284	21.355.259.977		
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah destinasi wisata yang pelayanan pariwisata terpadu	5 Destinasi Wisata			10.236.425.802	6.136.889.672	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
3	26	02	2.03	04	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis sarana dan prasarana aksesibilitas wisatawan di destinasi wisata yang dikembangkan Jenis sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan dikembangkan Jumlah destinasi GSTC yang memiliki sarana dan prasarana wisata yang mengakomodasi keperluan penyandang disabilitas Jumlah pusat informasi di destinasi wisata yang dibangun Jumlah sarana dan prasarana perlindungan alam liar yang dibangun untuk mendukung penerapan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Jumlah sarana tempat pengaduan wisatawan yang	5 Jenis 7 Jenis 5 Destinasi 1 Unit 5 Unit 1 Unit			5.184.141.050	5.731.762.208	
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah destinasi wisata yang memberikan pelayanan Keselamatan Wisata Tirta Jumlah Destinasi Wisata Yang Memberikan Pelayanan Sapta Pesona Jumlah destinasi wisata yang memiliki pelayanan pariwisata terpadu Jumlah masyarakat di destinasi wisata yang ikut terlibat dalam pengembangan kepariwisataan Jumlah masyarakat di destinasi wisata yang memperoleh pembinaan kesadaran wisata Jumlah masyarkat yang memperoleh	5 Destinasi Wisata 5 Destinasi Wisata 5 Destinasi Wisata 50 Orang 50 Orang 50 Orang			6.160.345.175	7.084.396.951	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	26	02	2.03	07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis media informasi yang informatif dan disajikan multibahasa untuk menginterpretasikan tapak Jumlah destinasi wisata yang dinilai oleh GSTC-D Jumlah destinasi wisata yang memiliki tata kelola destinasi yang baik Jumlah destinasi wisata yang mengembangkan strategi peningkatan kepuasan pengunjung Jumlah dokumen kebijakan mengenai akuisisi properti yang disusun Jumlah dokumen Kerjasama kemitraan dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan Jumlah dokumen MOU yang dihasilkan Jumlah dokumen panduan bagi para tour guide di destinasi wisata Jumlah dokumen Panduan yang didesain untuk meminimalkan dampak yang merugikan situs dan meningkatkan perilaku pengunjung yang positif	2 Media 1 Destinasi 5 Destinasi 5 Destinasi 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 50 Orang 1 Pertemuan 100 Orang 1 Tim Koordinasi			2.088.879.257	2.402.211.146	
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota										181.500.000	208.725.000	
3	26	02	2.04	02	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekomendasi TDUP dan seni budaya yang dibuat Presentase SDM Pengelola yang Memahami Prinsip-Prinsip Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan	500 rekomendasi 50 Usaha Pariwisata			108.900.000	125.235.000	
3	26	02	2.04	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah usaha pariwisata yang mendapatkan fasilitasi permodalan	5 Usaha Pariwisata			72.600.000	83.490.000	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA										2.701.320.000	3.106.518.000	
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										2.701.320.000	3.106.518.000	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
										Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3		26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jenis media promosi jenis media promosi pariwisata yang dibuat Jumlah calendar event yang disusun Persentase kunjungan wisata pada musim sepi Persentase peningkatan kunjungan wisata di musim sepi kunjungan	2 jenis 2 media 1 dokumen 2 % 1 %			1.139.820.000	1.310.793.000	
3		26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah event promosi yang diikuti	5 event			907.500.000	1.043.625.000	
3		26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Database Kepariwisataa Termasuk Situs Alam Dan Budaya yang Akurat Dan Termutakhirkan jumlah dokumen data Opini Masyarakat Lokal Aspirasi, keprihatinan dan kepuasan masyarakat lokal tentang manajemen destinasi yang dimonitor, dicatat dan dilaporkan secara berkala dan tepat waktu jumlah dokumen Monitoring dan laporan tentang data pengeluaran pengunjung yang disusun jumlah dokumen Monitoring dan laporan tentang data tingkat hunian hotel yang disusun jumlah dokumen pelaporan mengenai data kepuasan pengunjung kepada publik pelaksanaan monitoring, tingkah laku dan karakter dari pengunjung lokal, domestik dan mancanegara di destinasi wisata yang disusun jumlah dokumen pelaporan mengenai data kepuasan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen			466.450.000	536.417.500	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
										Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3		26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen kerjasama kemitraan dengan industri pariwisata dalam hal promosi pariwisata yang dibuat Jumlah kerjasama segmentasi pasar pariwisata yang dijalin Jumlah usaha pariwisata yang memiliki program CSR	2 dokumen 2 kerjasama 10 usaha pariwisata			187.550.000	215.682.500	
3		26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL										32.592.077.800	277.804.925	
3		26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota										32.592.077.800	277.804.925	
3		26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jenis sarana dan prasarana ekonomi kreatif yang dibangun Jumlah Dokumen Perencanaan Gedung Creative Center jumlah produk ekonomi kreatif yang terlindungi HKI	5 Jenis 1 Dokumen 1 Produk 1 Lokasi			32.592.077.800	277.804.925	
3		26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF										2.368.525.180	2.723.803.957	
3		26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar										2.368.525.180	2.723.803.957	
3		26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Organisasi yang bergerak di bidang pariwisata yang dibina jumlah pelaku usaha kreatif yang mendapat pembinaan jumlah usaha pariwisata yang dibina jumlah usaha pariwisata yang mendapat pendukungan dan perdagangan adil di	5 Organisasi 100 Orang 3 Usaha Pariwisata 5 Usaha Pariwisata			1.261.025.550	1.450.179.382	
3		26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah kerjasama kemitraan ekonomi kreatif Jumlah pelaku pariwisata yang memperoleh pembinaan SDM kepariwisataan	2 Kerjasama 70 Orang			411.749.820	473.512.293	
3		26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi jumlah usaha pariwisata yang distandarisasi	50 Orang 10 Usaha Pariwisata			181.499.800	208.724.770	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan				
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan				
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe						
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	Kualitas Infrastruktur Dasar, Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis media promosi kreatif yang dibuat Jumlah dokumen kebijakan ekonomi kreatif Jumlah produk wisata yang berbasis kearifan lokal Jumlah repositories produk ekonomi kreatif yang dibuat Jumlah subsektor ekonomi kreatif yang berhasil dikembangkan menjadi bernilai ekonomi Jumlah usaha kreatif yang mendapatkan fasilitas permodalaan Persentase produk kreatif	2 Jenis 1 Dokumen 5 Produk Usaha 1 Dokumen 5 Subsektor 5 Usaha Kreatif 80 Persen			514.250.010	591.387.512					
Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.01.00 DINAS PERTANIAN															135.841.403.378	156.217.613.884					
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN														135.841.403.378	156.217.613.884	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														9.233.880.513	10.618.962.589	
3	27	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														304.057.000	349.665.550	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Renstra	1 dokumen			60.000.000	69.000.000					
3	27	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan	7 dokumen			244.057.000	280.665.550					
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan														5.388.050.138	6.196.257.659	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima Gaji dan Tunjangan	45 orang			5.156.180.138	5.929.607.159					
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Operator kepegawaian setiap bulan	1 orang			26.600.000	30.590.000					
3	27	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Capaian Kinerja	5 dokumen			145.670.000	167.520.500					
3	27	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 dokumen			12.650.000	14.547.500					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	27	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Prognosis	1 dokumen			33.700.000	38.755.000	
3	27	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen			13.250.000	15.237.500	
3	27	01	2.03		Administrasi Umum									3.385.140.165	3.892.911.189		
3	27	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Surat Yang Dikelola	2100 buah			24.810.000	28.531.500	
3	27	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rekening listrik dan rekening internet yang dibayar setiap bulan	13 rekening			334.020.000	384.123.000	
3	27	01	2.03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Keamanan Jumlah SDM Operator BMD setiap bulan	2 orang 1 orang			97.400.000	112.010.000	
3	27	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Yang Berizin Jumlah SDM Jasa Pengemudi Yang Dibayar	23 unit 2 orang			142.100.000	163.415.000	
3	27	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Operator keuangan setiap bulan Jumlah SDM Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga setiap bulan	1 orang 6 orang			229.000.000	263.350.000	
3	27	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah SDM kebersihan	2 orang			53.200.000	61.180.000	
3	27	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis ATK	90 jenis			321.643.803	369.890.373	
3	27	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Berang Cetakan dan Penggandaan	6 jenis			80.425.000	92.488.750	
3	27	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Komponen Listrik	19 jenis			8.071.094	9.281.758	
3	27	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 paket			11.053.501	12.711.526	
3	27	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli	2184 eksemplar			37.965.000	43.659.750	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	27	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	6220 dus			139.950.000	160.942.500	
3	27	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	60 kali			198.485.000	228.257.750	
3	27	01	2.03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Roda Empat	2 unit			866.750.000	996.762.500	
3	27	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli Jumlah Komputer Yang	5 jenis 12 unit			292.791.546	336.710.278	
3	27	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	5 jenis			125.670.845	144.521.472	
3	27	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Waktu Sewa Gedung Kantor Luas Bangunan Yang Dipelihara	1 tahun 405 m2			253.280.000	291.272.000	
3	27	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	2 jenis			124.574.376	143.260.532	
3	27	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	5 jenis			43.950.000	50.542.500	
3	27	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									156.633.210	180.128.191		
3	27	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas Yang Dibeli	1 paket			109.563.300	125.997.795	
3	27	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas Yang Dibeli	1 paket			47.069.910	54.130.396	
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN									27.383.658.197	31.491.206.926		
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian									363.202.000	417.682.300		
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Tersedianya Alat-Alat dan Mesin Peternakan Tersedianya Teknologi Peternakan	20 orang 30 unit 1 dokumen			363.202.000	417.682.300	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota									27.020.456.197	31.073.524.626		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sertifikat Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Jumlah Ternak Khas Pangandaran Tersedianya Cadangan Benih	1 jenis 1 jenis 38 ton			192.579.548	221.466.480	
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Intensifikasi Tanaman Cengkeh Intensifikasi Tanaman Kelapa jumlah bibit domba/kambing, hijau pakan berkualitas, obat ternak dan kandang Jumlah bibit Manggis dan Durian Jumlah Bibit Ternak Sapi Potong, Bibit Ternak Domba,Bibit Ternak Kambing Jumlah Event Pernakan Yang diikuti Jumlah Event Promosi Pertanian/Perkebunan Yang diikuti Jumlah Kawasan Pengembangan Buah Jeruk Jumlah Kebun Buah Jumlah Produksi Cabai, Buncis , Tomat, Cabai Keriting, Cabai Rawit Jumlah Produksi Jagung Jumlah Produksi Jahe , Laos, Kencur, Kapulaga Jumlah Produksi Kedelai Jumlah Produksi Padi Organik Luas Kawasan Hijauan Pakan Ternak	20 ha 20 ha 1 paket 2000 batang 1 paket 1 event 1 event 1 unit 1 unit 2845 ton 11143 ton 5989 ton 1688 ton 45 ton 20 ha 160 ha 50 orang 1 paket 1 paket 1 paket			26.827.876.649	30.852.058.146	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN										86.255.048.200	99.193.305.431	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian										572.982.050	658.929.358	
3	27	03	2.01	02	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Database Potensi Produk Pangan Jumlah Dokumen Optimalisasi Data Pernakan Jumlah Dokumen Statistik Perkebunan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen			572.982.050	658.929.358	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian										85.682.066.150	98.534.376.073	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jaringan Irigasi	3 unit			35.465.246.285	40.785.033.228	
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Embung	2 unit			728.515.000	837.792.250	
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah JUT	25 unit			9.500.514.333	10.925.591.483	
3	27	03	2.02	04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dam Parit	10 unit			16.743.857.525	19.255.436.154	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Alat Pemeriksa Jumlah Balai Benih Jumlah kandang dan pasar hewan Jumlah Puskesmas Jumlah PUSKESWAN Yang Direhabilitasi Jumlah Raperda Pedoman Operasional Poskeswan Jumlah Sarana dan Prasarana POS IB Jumlah Sarana dan Prasarana PUSKESWAN jumlah sarana dan prasarana puskesmas Pangandaran	60 jenis 1 unit 2 unit 1 unit 1 dokumen 1 paket 20 paket 1 paket			23.243.933.007	26.730.522.958	
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER									1.874.610.386	2.155.801.944		
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota									977.064.660	1.123.624.359		
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Jenis Obat- Obat-an Hewan Jumlah Ternak Tersedianya obat-obat hewan	3 jenis 2000 ekor 30 jenis			640.166.840	736.191.866	
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Ternak	3221 ekor			336.897.820	387.432.493	
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota									330.234.586	379.769.774		
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Bimtek	93 orang			330.234.586	379.769.774	
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner									425.110.000	488.876.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Sampel Pengujian Jumlah Sarana dan Prasarana Kesmavet (Kesehatan Masyarakat Veteriner),	1050 buah 11 jenis			425.110.000	488.876.500	
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan									142.201.140	163.531.311		
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah penerapan Kesmavet dan Kesrawan	3 kali			142.201.140	163.531.311	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN									4.250.287.974	4.887.831.170		
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota									4.250.287.974	4.887.831.170		
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah obat-obatan untuk pengendalian OPT Jumlah Peserta	700 kg 1 dokumen			200.000.240	230.000.276	
3	27	05	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Benih Padi, Insektisida, Rodentisida, Fungisida Jumlah Alat-Alat Teknologi Perkebunan Jumlah Alat-Alat Teknologi Pertanian/Perkebunan Jumlah Alsintan Kelompok Tembakau Jumlah APPO Kelompok Tembakau Jumlah Gudang Jumlah Peserta Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Perkebunan Tepat Guna" Jumlah Peserta Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Tanaman Pangan & Hortikultura Tepat Guna Jumlah Peserta Pelatihan Budidaya Kelapa Jumlah Peserta Pelatihan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Petani Tembakau di Lingkungan Penghasil Bahan Baku IHT Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Budidaya	10660 kg 2 unit 3 unit 1 unit 20 orang 150 orang 150 orang 1 dokumen 50 unit 1 paket			4.050.287.734	4.657.830.894	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN									150.000.000	172.500.000		
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota									150.000.000	172.500.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan		
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe					
3	27	06	2.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pupuk Urea Bersubsidi yang diawasi, Jumlah Pupuk SP-36 Bersubsidi yang diawasi, Jumlah Pupuk Za Bersubsidi yang diawasi, Jumlah Pupuk NPK Bersubsidi yang diawasi, Jumlah Pupuk Organik Bersubsidi yang	16632 ton			150.000.000	172.500.000			
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN									6.693.918.108	7.698.005.824				
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian									6.693.918.108	7.698.005.824				
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Penerima BOP Jumlah Peserta Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Kelompok Bidang Perkebunan Jumlah Peserta Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Gapoktan dan KEP) Jumlah Program Penyuluhan Pertanian Tk. Desa, Kecamatan, Kabupaten Jumlah RDK dan RDKK Pelatihan Metodologi Penyuluh Pertanian Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Peningkatan Kesejahtraan Tenaga Penyuluh	172 orang 105 orang 50 kelompok 15 lembaga 104 dokumen 104 dokumen 70 orang 15 orang 186 orang 48 orang			5.810.515.583	6.682.092.920			
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Peningkatan dan Pemerataan Kesejahteraan Sosial		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (Gapoktan dan KEP) Jumlah Peserta Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	15 Lembaga 105 orang			883.402.525	1.015.912.904			
Unit Organisasi : 4.01.2.10.0.00.01.00 SEKRETARIAT DAERAH															62.690.119.687	72.093.637.640			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												825.078.000	948.839.700	
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												69.165.000	79.539.750	
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.												69.165.000	79.539.750	
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Penyelesaian Kasus Peratanahan	1 Kasus			69.165.000	79.539.750			
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT												99.713.000	114.669.950	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
								Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
								Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe					
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota										99.713.000	114.669.950			
2	10	07	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen yang Disusun	1 Dokumen			99.713.000	114.669.950			
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH										590.331.000	678.880.650			
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah										590.331.000	678.880.650			
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Desa Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pertanahan	44 Desa 1 Kegiatan			590.331.000	678.880.650			
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH										65.869.000	75.749.350			
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota										65.869.000	75.749.350			
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen Kajian Pertanahan	1 Dokumen			65.869.000	75.749.350			
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH												61.865.041.687	71.144.797.940	
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												26.705.128.688	30.710.897.991	
4	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										49.150.000	56.522.500			
4	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen Perencanaan	4 Dokumen			49.150.000	56.522.500			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan										14.748.012.412	16.960.214.274			
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Pegawai ASN	90 Orang			14.623.892.412	16.817.476.274			
4		01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen LAKIP Sekretariat Daerah Jumlah SDM Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Jumlah SDM Penyelenggaraan	1 Dokumen 3 Orang 1 Orang			107.760.000	123.924.000		
4	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	2 Dokumen			8.180.000	9.407.000			
4	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			8.180.000	9.407.000			
4	01	01	2.03		Administrasi Umum										11.565.756.276	13.300.619.717			
4	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumla Materai	3678 Buah			24.690.000	28.393.500			
4	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	37 Rekening			513.534.500	590.564.675			
4	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah SDM Pengemudi Non PNS Jumla STNK	17 Orang 9 Unit			276.500.000	317.975.000			
4	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah SDM Penyelenggaraan	10 Orang			258.680.000	297.482.000			
4	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	14 Orang			463.767.258	533.332.347			
4	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Alat Tulis Kantor	1 Paket			195.357.690	224.661.343			
4	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket			120.439.175	138.505.051			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
4	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	37 Jenis			61.684.647	70.937.344	
4	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Kebutuhan Sewa Gedung / Tempat / Lahan / Tenda / Sound System Jumlah Komputer yang dibeli Jumlah Tanah yang	1 Paket 1 Paket 4 Lokasi			1.757.913.976	2.021.601.072	
4	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 Orang 1 Paket			42.785.904	49.203.790	
4	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Paket			85.896.000	98.780.400	
4	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	12 Bulan			2.489.300.000	2.862.695.000	
4	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 Bulan			2.578.265.700	2.965.005.555	
4	01	01	2.03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Perlengkapan Rumah Dinas yang Dibeli	1 Paket			181.793.607	209.062.648	
4	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Dibeli	1 Paket			252.414.446	290.276.613	
4	01	01	2.03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Peralatan Rumah Dinas yang Dibeli	1 Paket			435.028.703	500.283.008	
4	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	1 Paket			178.568.364	205.353.619	
4	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	1 Paket			160.470.814	184.541.436	
4	01	01	2.03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	3 Bangunan			122.760.000	141.174.000	
4	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara Jumlah Jasa Pengamanan Kantor	4 Bangunan 2 Orang			339.751.584	390.714.322	
4	01	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Mobil Jabatan Yang Terpelihara	14 Unit			553.203.908	636.184.494	
4	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	8 Unit 5 Unit			183.400.000	210.910.000	
4	01	01	2.03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Perlengkapan Rumah Jabatan yang Terpelihara	3 Unit			30.000.000	34.500.000	
4	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang	1 Paket			37.050.000	42.607.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
4	01	01	2.03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Peralatan Rumah Jabatan yang Terpelihara	1 Paket			90.000.000	103.500.000	
4	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang	1 Paket			110.000.000	126.500.000	
4	01	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Mebeleur yang Terpelihara	1 Paket			22.500.000	25.875.000	
4	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									342.210.000	393.541.500		
4	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Pakaian Dinas yang dibeli	34 Steel			290.025.000	333.528.750	
4	01	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Pakaian Khusus yang dibeli	1 Paket			52.185.000	60.012.750	
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									24.863.254.099	28.592.742.214		
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan									1.820.360.000	2.093.414.000		
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang di Fasilitas Jumlah Dokumen Penyusunan Bahan/ Hasil Pelaksanaan Rakor/ Kerja Dalam dan Luar Pejabat Pemerintah Daerah Jumlah Kecamatan yang telah Menerapkan Aplikasi PATEN Jumlah Penerapan SPM	7 Dokumen 12 Dokumen 4 Kecamatan 6 Urusan Bidang 2 Dokumen			1.820.360.000	2.093.414.000	
4	01	02	2.02		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									22.321.262.899	25.669.452.334		
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Lembaga yang mendapatkan hibah	250 lembaga			15.009.721.700	17.261.179.955	
4	01	02	2.02	02	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas KPA Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Fasilitas TPUKS/M Jumlah Kegiatan Pentas PAI Tingkat Kabupaten Jumlah Kegiatan Pentas PAI Tingkat Provinsi Jumlah Kordinasi dan Fasilitas Bidang Kesejahteraan Sosial (Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pendidikan) Jumlah lembaga yang Layak mendapatkan Hibah	6 Kegiatan 5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun 300 Lembaga			1.154.973.900	1.328.219.985	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
4		01	02	2.02	03	Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Calon Jemaah Haji Jumlah Kegiatan Amaliah Ramadhan Jumlah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah organisasi kepemudaan islam yang dibina Jumlah organisasi Lembaga Keagamaan yang di bina Jumlah Pelayanan Kegiatan Keagamaan Jumlah Pembinaan LPTQ	500 Orang 10 Kegiatan 4 Jenis 10 Lembaga 16 Lembaga 20 Kegiatan 1 Kegiatan			6.156.567.299	7.080.052.394	
4	01	02	2.03		Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah										636.491.000	731.964.650	
4		01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Legalisasi Rancangan dasar kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah/ desa	33 Buah			292.415.000	336.277.250	
4		01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Pendampingan Perkara Jumlah Permasalahan Hukum Jumlah Rencana	3 Kasus 12 Dokumen Laporan 37 OPD			207.831.000	239.005.650	
4		01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumentasi dan Informasi Hukum yang di Unggah Melalui Website Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	63 Produk Hukum 321 Buku			136.245.000	156.681.750	
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah										85.140.200	97.911.230	
4		01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen Kerjasama Daerah yang Difasilitasi	7 Buah			85.140.200	97.911.230	
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN										4.904.707.200	5.640.413.280	
4	01	03	2.01		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian										1.240.153.700	1.426.176.755	
4		01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah pemantauan dan evaluasi pelestarian lingkungan hidup Jumlah Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BUMDes dan Lembaga	10 Kecamatan 4 Kecamatan			532.611.500	612.503.225	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
4		01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah destinasi wisata yang termonitoring dan terevaluasi Jumlah komoditas produksi tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan Jumlah pelaku usaha (UMKM) yang terfasilitasi dalam pemasaran produk dengan perusahaan menengah dan besar Jumlah pelaku usaha (UMKM) yang terfasilitasi dalam peningkatan modal usaha Pengendalian komoditas	5 Objek Wisata 10 Kecamatan 25 Pelaku Usaha 20 Pelaku Usaha 10 Kecamatan			707.542.200	813.673.530	
4		01	03	2.02		Administrasi Pembangunan								2.945.153.500	3.386.926.525		
4		01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan pembangunan dibandingkan dengan rencana Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Lingkup Setda Jumlah Dokumen Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Biaya Jumlah Kebijakan Program	12 Laporan 9 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen			1.584.833.500	1.822.558.525	
4		01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Reformasi Birokrasi				Jumlah Data Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jumlah Data Realisasi Fisik Kegiatan Jumlah Dokumen Data Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kinerja Internal Sekretariat Daerah Jumlah Dokumen Data Progres Realisasi Anggaran	2 Dokumen 12 Dokumen 1 Dokumen 12 Laporan			1.360.320.000	1.564.368.000	
4		01	03	2.03		Pengadaan Barang dan Jasa								719.400.000	827.310.000		
4		01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Reformasi Birokrasi				Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Kegiatan Pengelolaan LPSE Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah Pengelolaan Rencana Umum Pengadaan (Sirup)	1 Kegiatan 1 Paket 145 Dokumen 1 Kegiatan			719.400.000	827.310.000	
4		01	04			PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM								5.391.951.700	6.200.744.455		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
4	01	04	2.01		Pelaksanaan Administrasi Umum										1.307.387.500	1.503.495.625				
4	01	04	2.01	01	Fasilitasi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah SDM TU Pimpinan, Administrasi Teknis Perkantoran dan	19 Orang			472.350.000	543.202.500				
4	01	04	2.01	03	Pengelolaan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Fasilitasi Operasional KDH/WKDH	1 Tahun			835.037.500	960.293.125				
4	01	04	2.02		Penataan Organisasi										876.477.100	1.007.948.665				
4	01	04	2.02	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen Uraian Tugas Lingkup Pemda Kabupaten Pangandaran Jumlah Kode Jabatan dan beban kerja pada setiap	11 Buah 9 Dokumen			359.460.000	413.379.000				
4	01	04	2.02	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kelembagaan OPD Jumlah Standar Operasional Prosedur Jumlah Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen 90 Perangkat Daerah 875 Buah			210.003.800	241.504.370				
4	01	04	2.02	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Indeks Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran	2 Dokumen			307.013.300	353.065.295				
4	01	04	2.03		Protokol dan Komunikasi Pimpinan										3.208.087.100	3.689.300.165				
4	01	04	2.03	01	Fasilitasi Keprotokolan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Kegiatan Keprotokolan	16 Kali			399.822.400	459.795.760				
4	01	04	2.03	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Kunjungan Kerja/ Inspeksi KDH/ WKDH	375 Kali			784.632.200	902.327.030				
4	01	04	2.03	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Informasi Kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang	5 Jenis			2.023.632.500	2.327.177.375				
Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01.00 SEKRETARIAT DPRD														51.518.783.406	59.246.600.916					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD													51.518.783.406	59.246.600.916	
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													11.040.410.255	12.696.471.794	
4	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													45.500.000	52.325.000	
4	02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen (Renstra, Renja, IKU/IKI, PK, RKA, RKA-P, DPA, dan DPPA) yang tersusun	8 Dokumen			45.500.000	52.325.000				
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan													4.690.802.070	5.394.422.380	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah ASN yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan setiap bulan	25 Orang/Bulan			4.225.102.070	4.858.867.380				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
										Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
4		02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			dokumen (SPIP, LKPJ, SAKIP, LAKIP, LPPD, IKM) yang tersusun jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang tersusun Jumlah SDM jasa administrasi teknis perkantoran Jumlah SDM Penunjang Kegiatan Perkantoran dan	6 Dokumen 12 Dokumen 21 Orang 24 Orang			464.000.000	533.600.000	
4		02	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			dokumen (SPIP, LKPJ, SAKIP, LAKIP, Ladokumen Laporan Keuangan semester yang tersusunPPD, IKM) yang tersusun	2 Dokumen			750.000	862.500	
4		02	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			dokumen (SPIP, LKPJ, SAKIP, LAKIP, Ladokumen Laporan Keuangan semester yang tersusunPPD, IKM) yang tersusun	1 Dokumen			950.000	1.092.500	
4	02	01	2.03			Administrasi Umum										5.845.266.185	6.722.056.114	
4		02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	95 Paket 4736 lembar			39.500.000	45.425.000	
4		02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	17 Rekening			431.400.000	496.110.000	
4		02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah gedung kantor yang tersedia	1 Unit			91.950.000	105.742.500	
4		02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jasa pengemudi kantor yang dibayar tiap bulan Jumlah Kendaraan yang	5 Orang 25 Unit			160.000.000	184.000.000	
4		02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang	12 Dokumen			44.000.000	50.600.000	
4		02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Paket Jasa Kebersihan	1 Paket			432.843.992	497.770.591	
4		02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang dibeli	1 Paket			81.302.357	93.497.711	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
4	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	7 Jenis			69.059.650	79.418.598	
4	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	10 Jenis			63.524.774	73.053.490	
4	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli Jumlah dan jenis komputer	9 Jenis 25 Unit			232.894.952	267.829.195	
4	02	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	35 Jenis			110.752.528	127.365.407	
4	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	15000 Exemplar			72.000.000	82.800.000	
4	02	01	2.03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan logistik kantor yang dibeli	4 Jenis			131.390.654	151.099.252	
4	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah makanan dan minuman yang dibeli	10737 Orang			561.350.000	645.552.500	
4	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	364 Dokumen			1.588.293.000	1.826.536.950	
4	02	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan logistik kantorJumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli yang	2 Jenis			117.435.715	135.051.072	
4	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan aJumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dibelilogistik kantorJumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dibeli	4 Jenis			231.122.358	265.790.712	
4	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis mebeleur yang dibeli	3 Jenis			88.269.765	101.510.230	
4	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara Jumlah Paket Jasa Keamanan	3 Unit 1 Paket			658.852.440	757.680.306	
4	02	01	2.03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah mobil jabatan yang dipelihara	7 Unit			331.292.000	380.985.800	
4	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	19 Unit			217.232.000	249.816.800	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
4	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	13 Jenis			90.800.000	104.420.000	
4	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									458.842.000	527.668.300		
4	02	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	25 Orang			66.000.000	75.900.000	
4	02	01	2.04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil sosialisasi	8 Dokumen			31.500.000	36.225.000	
4	02	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pegawai yang mengikuti	25 Orang			361.342.000	415.543.300	
4	02	02			PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN									29.201.297.176	33.581.491.752		
4	02	02	2.01		Layanan Administrasi DPRD									1.613.111.333	1.855.078.033		
4					Fasilitasi Rapat DPRD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah rapat paripurna yang terfasilitasi Jumlah rapat-rapat alat kelengkapan yang terfasilitasi Jumlah SDM Administrasi dan Teknis Perkantoran	79 Dokumen 170 Dokumen 27 Orang			1.613.111.333	1.855.078.033	
4	02	02	2.02		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									27.588.185.843	31.726.413.719		
4	02	02	2.02	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terbayarkan Gaji dan	40 Orang/Bulan			27.265.660.843	31.355.509.969	
4	02	02	2.02	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibeli Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang dibeli	190 Stel 120 Stel			242.525.000	278.903.750	
4	02	02	2.02	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang terjamin kesehatan nya	40 Orang			80.000.000	92.000.000	
4	02	03			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD									11.277.075.975	12.968.637.370		
4	02	03	2.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD									2.179.116.110	2.505.983.526		
4	02	03	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Naskah Akademik yg tersusun Jumlah Raperda Jumlah Raperda Inisiatif	4 Raperda 20 Raperda 4 Raperda			2.179.116.110	2.505.983.526	
4	02	03	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD									3.667.571.479	4.217.707.200		
4	02	03	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bimtek/workshop yang diikuti anggota DPRD yang terfasilitasi	236 Orang			3.357.876.000	3.861.557.400	
4	02	03	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Publikasi Peraturan Daerah melalui Website JDIH	24 Perda			102.815.896	118.238.280	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe					
4	02	03	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dikumen dengar pendapat yang diterima DPRD	28 Dokumen			206.879.583	237.911.520				
4	02	03	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat									2.543.548.486	2.925.080.759					
4	02	03	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja dalam daerah yang diikuti anggota	190 Dokumen			600.760.000	690.874.000				
4	02	03	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah fasilitasi reses yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	120 Dokumen			1.942.788.486	2.234.206.759				
4	02	03	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah									390.458.400	449.027.160					
4	02	03	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah keejasama dengan mass media	15 Media Online 15 Media Cetak			390.458.400	449.027.160				
4	02	03	2.08		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD									2.496.381.500	2.870.838.725					
4	02	03	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen hasil kunjungan kerja luar daerahyang diikuti anggota DPRD	120 Dokumen			2.496.381.500	2.870.838.725				
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.00 KECAMATAN PADAHERANG															2.312.806.346	2.659.727.297				
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN													2.312.806.346	2.659.727.297	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													2.134.395.451	2.454.554.768	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													45.194.000	51.973.100	
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Perencanaan Setiap Bulan	1 Orang			42.194.000	48.523.100				
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			3.000.000	3.450.000				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													1.623.081.060	1.866.543.219	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	1 Tahun			1.503.723.060	1.729.281.519				
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah SDM Kepegawaian Setiap Bulan Jumlah SDM Simda BMD Setiap Bulan	4 Dokumen 1 Orang 1 Orang			117.358.000	134.961.700				
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1 Orang			1.000.000	1.150.000				
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 Dokumen			1.000.000	1.150.000				
7	01	01	2.03		Administrasi Umum													388.034.591	446.239.779	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	240 Surat			1.080.000	1.242.000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Rekening Jasa Sumber Daya Yang Di Bayar Setiap Bulan	2 Rekening			35.100.000	40.365.000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas yang Diservis dan Mempunyai Izin	8 Unit			7.500.000	8.625.000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Administrasi Keuangan Setiap Bulan	1 Orang			37.114.000	42.681.100	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan Setiap Bulan	1 Orang			23.308.808	26.805.129	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	160 Jenis			20.404.446	23.465.113	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	40 Jenis			9.400.000	10.810.000	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	50 Jenis			5.995.834	6.895.209	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan yang dibeli setiap bulan	24 Jenis			4.560.000	5.244.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli	12 Kali			23.987.000	27.585.050	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	6 Kali			8.033.000	9.237.950	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	4 Unit			25.517.992	29.345.691	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8 Unit			88.943.740	102.285.301	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Meubeleur yang dibeli	1 Unit			21.515.243	24.742.529	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah SDM Pengamanan Setiap Bulan	2 Unit 2 Orang			39.622.000	45.565.300	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Kendaraan Yang Dipelihara	5 Unit			32.952.528	37.895.407	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang dipelihara	4 Unit			3.000.000	3.450.000	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								78.085.800	89.798.670			
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas	24 Stel			6.085.800	6.998.670	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	11 Orang			66.000.000	75.900.000	
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 Orang			6.000.000	6.900.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									71.600.000	82.340.000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									30.200.000	34.730.000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	320 Kali			30.200.000	34.730.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									25.200.000	28.980.000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan PATEN	2 Orang			25.200.000	28.980.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									16.200.000	18.630.000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan Yang Mendapat Izin	30 Unit			8.100.000	9.315.000	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat yang dilayani	72000 Orang			8.100.000	9.315.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									22.840.000	26.266.000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									22.840.000	26.266.000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	14 Desa			5.880.000	6.762.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	14 Desa			16.960.000	19.504.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									83.970.895	96.566.529		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									83.970.895	96.566.529		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Administrasi Pemerintahan Desa	14 Desa			16.960.000	19.504.000	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Semua Kelurahan			Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif di	2 Kegiatan			50.050.895	57.558.529	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Padaherang, Padaherang			Jumlah Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	14 Desa			16.960.000	19.504.000				
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.00 KECAMATAN MANGUNJAYA														1.855.306.894	2.133.602.927					
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN															
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													1.855.306.894	2.133.602.927	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													1.738.742.588	1.999.553.975	
																		41.847.000	48.124.050	
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Perencanaan Setiap Bulan	1 Orang			38.797.000	44.616.550				
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			3.050.000	3.507.500				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													1.258.452.315	1.447.220.162	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	1 Tahun			1.196.085.070	1.375.497.830				
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah SDM Kepegawaian setiap bulan Jumlah SDM Simda BMD	4 Dokumen 1 Orang 1 Orang			60.587.245	69.675.332				
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4 Dokumen			960.000	1.104.000				
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 Dokumen			820.000	943.000				
7	01	01	2.03		Administrasi Umum													344.386.073	396.043.983	
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Surat yang Dikelola, Surat Bermaterai serta Jumlah Dokumen Terkirim	240 Surat			1.080.000	1.242.000				
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar setiap bulan	2 Rekening			26.928.800	30.968.120				
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Dinas yang diservis dan berizin	6 Unit			5.500.000	6.325.000				
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah SDM Jasa Operator Non PNS Jumlah SDM Tenaga Administrasi	4 Dokumen 1 Orang 1 Orang			58.097.000	66.811.550				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	1 Orang			17.400.000	20.010.000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	160 Jenis			13.325.512	15.324.339	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	40 Jenis			5.000.000	5.750.000	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	60 Jenis			2.987.720	3.435.878	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan yang dibeli setiap bulan	2 Jenis			4.560.000	5.244.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Makanan dibeli	12 Kali			8.775.000	10.091.250	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang diikuti	6 Kali			6.056.000	6.964.400	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Unit			28.147.693	32.369.847	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	11 Unit			54.046.830	62.153.854	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Meubeler yang dibeli	2 Unit			34.126.350	39.245.302	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah dan Luas Gedung yang dipelihara Jumlah SDM Pengamanan setiap bulan	2 Kegiatan 2 Orang			36.093.500	41.507.525	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Kendaraan yang dipelihara	6 Unit			38.511.668	44.288.418	
7	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	3 Unit			2.250.000	2.587.500	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	2 Unit			1.500.000	1.725.000	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									94.057.200	108.165.780		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas	25 Stel			4.057.200	4.665.780	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan					
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan					
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe				
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	14 Orang			84.000.000	96.600.000						
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Bimtek	1 Orang			6.000.000	6.900.000						
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									66.433.000	76.397.950							
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									30.200.000	34.730.000							
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	320 Kali			30.200.000	34.730.000						
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									27.360.000	31.464.000							
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan PATEN	2 Orang			27.360.000	31.464.000						
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									8.873.000	10.203.950							
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan yang mendapatkan Izin	45 Unit			5.962.000	6.856.300						
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat yang dilayani	33726 Orang			2.911.000	3.347.650						
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									5.185.000	5.962.750							
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									5.185.000	5.962.750							
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Musrenbang Desa yang dimonitor	5 Desa			3.150.000	3.622.500						
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	5 Desa			2.035.000	2.340.250						
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									44.946.306	51.688.252							
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									44.946.306	51.688.252							
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	5 Desa			2.010.000	2.311.500						
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan	2 Kegiatan			41.006.306	47.157.252						
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Pangandaran, Mangunjaya, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	5 Desa			1.930.000	2.219.500						
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09.00 KECAMATAN KALIPUCANG															1.538.546.917	1.769.328.954						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN															1.538.546.917	1.769.328.954	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
											Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
											Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			Targe
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												1.391.434.985	1.600.150.232		
7	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												29.513.000	33.939.950		
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Simral Perencana setiap bulan	1 Orang			27.254.000	31.342.100			
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			2.259.000	2.597.850			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan												979.714.338	1.126.671.489	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Kalipucang			Jumlah Pegawai ASN	11 Orang			936.000.338	1.076.400.389			
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen			41.864.000	48.143.600			
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4 Dokumen			925.000	1.063.750			
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 Dokumen			925.000	1.063.750			
7	01	01	2.03		Administrasi Umum												296.959.097	341.502.961	
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	750 Surat			3.750.000	4.312.500			
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening			29.640.000	34.086.000			
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	4 Unit			3.500.000	4.025.000			
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen			25.559.000	29.392.850			
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan	1 Orang			26.533.939	30.514.030			
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Penyediaan Alat Tulis Kantor	160 Jenis			36.359.347	41.813.249			
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dandigandakan	40 Jenis			9.500.000	10.925.000			
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			enis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	50 Jenis			9.612.263	11.054.102			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	24 Jenis			11.280.000	12.972.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	12 Kali			17.965.000	20.659.750	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	30 Kali			20.920.000	24.058.000	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan perlengkapan Kantor	3 unit			5.218.342	6.001.093	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan perlengkapan Kantor	2 unit			10.974.286	12.620.429	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan peralatan Kantor	2 unit			9.313.920	10.711.008	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	1 unit			40.083.000	46.095.450	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	4 unit			27.000.000	31.050.000	
7	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Kantor	1 Paket			3.750.000	4.312.500	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Jenis			6.000.000	6.900.000	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									85.248.550	98.035.832		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian Dinas	22 set			5.093.550	5.857.582	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	12 Orang			72.000.000	82.800.000	
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti	3 Orang			8.155.000	9.378.250	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									70.250.000	80.787.500		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									28.700.000	33.005.000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam Daerah yang dilaksanakan	350 kali			28.700.000	33.005.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									37.800.000	43.470.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah penyelenggara PATEN	3 Orang			37.800.000	43.470.000				
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									3.750.000	4.312.500					
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah masyarakat yang dilayani	36000 Orang			3.750.000	4.312.500				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									6.415.000	7.377.250					
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									6.415.000	7.377.250					
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Desa Yang dimonitoring	9 Desa			6.415.000	7.377.250				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									70.446.932	81.013.972					
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									70.446.932	81.013.972					
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	4 Kali			11.230.000	12.914.500				
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Kecamatan dan Monitoring	2 Kegiatan			49.636.932	57.082.472				
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	4 Kali			4.790.000	5.508.500				
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Kalipucang, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	9 Kali			4.790.000	5.508.500				
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.00 KECAMATAN PANGANDARAN															1.896.138.922	2.180.559.761				
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN													1.896.138.922	2.180.559.761	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													1.748.291.310	2.010.535.007	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													35.770.000	41.135.500	
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Perencana Setiap bulan	1 orang			35.770.000	41.135.500				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													1.278.459.601	1.470.228.541	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	14 bulan/tahun			1.222.065.601	1.405.375.441				
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah SDM Kepegawaian Setiap bulan Jumlah SDM SIMDA BMD setiap bulan	4 Dokumen 1 orang 1 orang			54.954.000	63.197.100				

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen			720.000	828.000	
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 Dokumen			720.000	828.000	
7	01	01	2.03		Administrasi Umum									365.966.209	420.861.141		
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	300 Surat			1.725.000	1.983.750	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar Tiap Bulan	3 rekening			34.200.000	39.330.000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis berizin	3 unit			2.500.000	2.875.000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Aplikasi Keuangan setiap Bulan	1 orang			35.514.000	40.841.100	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			jumlah SDM kebersihan setiap bulan	1 orang			39.714.237	45.671.373	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang Dibeli	180 Jenis			22.485.164	25.857.939	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah barang yang di cetak dan digandakan	48 Jenis			8.556.359	9.839.813	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah komponen Instalasi Listrik yang dibeli	60 jenis			4.542.686	5.224.089	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan Yang Dibeli setiap Bulan	10 Jenis			9.480.000	10.902.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Makanan dan minuman yang di beli	12 Kali			14.850.000	17.077.500	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan konsultasi Keluar Daerah yang Diikuti	6 Kali			21.956.000	25.249.400	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	4 unit			5.218.342	6.001.093	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 unit			60.236.993	69.272.542	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Mebeleur Yang Dibeli	2 unit			15.981.000	18.378.150		
7		01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah dan Luas Gedung Kantor Jumlah SDM Pengamanan setiap Bulan	1 unit 2 orang			39.731.000	45.690.650	
7		01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah Kendaraan yang Dipelihara	3 unit			39.525.428	45.454.242	
7		01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	4 unit			3.750.000	4.312.500	
7		01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor yang dipelihara	8 unit			6.000.000	6.900.000	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										68.095.500	78.309.825		
7		01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas	11 stel			8.095.500	9.309.825	
7		01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti	10 orang			60.000.000	69.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										72.683.000	83.585.450		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										25.740.000	29.601.000		
7		01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah Yang Dilaksanakan	320 Kali			25.740.000	29.601.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										37.800.000	43.470.000		
7		01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan Paten	3 orang			37.800.000	43.470.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat										9.143.000	10.514.450		
7		01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan Yang Mendapatkan Izin	35 unit			4.855.000	5.583.250	
7		01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat yang Dilayani	30000 orang			4.288.000	4.931.200	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										13.746.000	15.807.900		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										13.746.000	15.807.900		
7		01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Musrenbang Desa Yang di monitor	8 Desa			2.166.000	2.490.900	
7		01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kali			11.580.000	13.317.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										61.418.612	70.631.404		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										61.418.612	70.631.404	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	12 Kali			11.580.000	13.317.000	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di	2 kegiatan			38.258.612	43.997.404	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Pangandaran, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	12 Kali			11.580.000	13.317.000	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.00 KECAMATAN SIDAMULIH													1.929.641.852	2.219.088.129			
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN										1.929.641.852	2.219.088.129	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										1.831.032.910	2.105.687.846	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										41.967.000	48.262.050	
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Perencanaan setiap bulan	1 Orang			38.317.000	44.064.550	
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen			3.650.000	4.197.500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan										1.340.940.350	1.542.081.403	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	1 Tahun			1.277.848.105	1.469.525.321	
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga	1 Orang			61.262.245	70.451.582	
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen			985.000	1.132.750	
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 Dokumen			845.000	971.750	
7	01	01	2.03		Administrasi Umum										373.658.360	429.707.113	
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	280 Lembar			1.692.000	1.945.800	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	2 Rekening			38.400.000	44.160.000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	12 Bulan			3.500.000	4.025.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Simda Keuangan setiap bulan	1 Orang			37.417.000	43.029.550	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	1 Orang			23.661.939	27.211.230	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	30 Jenis			26.110.750	30.027.362	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	48 Jenis			8.641.644	9.937.891	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	12 Jenis			2.299.096	2.643.960	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	4 Jenis			6.360.000	7.314.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	3 Jenis			32.340.000	37.191.000	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	6 Kali			24.206.000	27.836.900	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	12 Bulan			71.541.481	82.272.703	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Mabeleur	12 Bulan			11.375.450	13.081.767	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Pengamanan setiap bulan	2 Orang			37.344.000	42.945.600	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan			45.019.000	51.771.850	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor	12 Bulan			3.750.000	4.312.500	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									74.467.200	85.637.280		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Waktu pengadaan pakaian Dinas	10 Stel			8.467.200	9.737.280	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	10 Orang			60.000.000	69.000.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah waktu Pelaksanaan Bimbingan teknis implementasi peraturan Perundang-undangan	1 Tahun			6.000.000	6.900.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									59.087.000	67.950.050		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									31.925.000	36.713.750		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	350 Kali			31.925.000	36.713.750	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									15.400.000	17.710.000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggara Paten	12 Bulan			15.400.000	17.710.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									11.762.000	13.526.300		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan yang mendapatkan Izin	12 Bulan			6.432.000	7.396.800	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat yang dilayani	12 Bulan			5.330.000	6.129.500	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									2.604.000	2.994.600		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									2.604.000	2.994.600		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat	4 Kali			2.604.000	2.994.600	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									36.917.942	42.455.633		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									36.917.942	42.455.633		
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di	2 Kegiatan			33.106.942	38.072.983	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Sidamulih, Semua Kelurahan			Jumlah Musrenbang Desa yang di Monitoring	7 Desa			3.811.000	4.382.650	
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.00 KECAMATAN PARIGI															1.842.106.004	2.118.421.903	
7					UNSUR KEWILAYAHAN												
7	01				KECAMATAN										1.842.106.004	2.118.421.903	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										1.712.019.378	1.968.822.283	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									39.607.000	45.548.050		
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	1 Orang			35.762.000	41.126.300	
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	7 Dokumen			3.845.000	4.421.750	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan									1.233.065.639	1.418.025.485		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	1 Tahun			1.179.348.639	1.356.250.935	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah SDM Pengelola Barang Milik Daerah Jumlah SDM Pengelola	4 Dokumen 1 Orang 1 Orang			52.777.000	60.693.550	
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan	2 Dokumen			470.000	540.500	
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	2 Dokumen			470.000	540.500	
7	01	01	2.03		Administrasi Umum									369.118.059	424.485.766		
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	1500 Lembar			3.625.000	4.168.750	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening			38.400.000	44.160.000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin	6 Unit			4.000.000	4.600.000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Pengelola administrasi keuangan SKPD	1 Orang			35.077.000	40.338.550	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	1 Orang			21.606.740	24.847.751	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	180 Jenis			24.022.649	27.626.046	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	48 Jenis			3.650.000	4.197.500	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	60 Jenis			8.073.990	9.285.088	
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah/ Jenis Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	10 Jenis			29.950.074	34.442.585	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	10 Jenis			8.160.000	9.384.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	12 Kali			12.790.000	14.708.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	12 Kali			10.920.000	12.558.000	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	8 Unit			590.436	679.001	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	8 Unit			48.518.734	55.796.544	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Mabeleur	8 Unit			14.242.813	16.379.235	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 Kegiatan			41.416.000	47.628.400	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah waktu pemeliharaan kendaraan dinas	12 Bulan			49.074.623	56.435.816	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan Gedung Kantor	12 Bulan			15.000.000	17.250.000	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									70.228.680	80.762.982		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah pengadaan pakaian Dinas	21 Stel			10.228.680	11.762.982	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	10 Orang			60.000.000	69.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									74.511.000	85.687.650		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									43.025.000	49.478.750		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dalam daerah yang Dilaksanakan	12 Bulan			43.025.000	49.478.750	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									25.200.000	28.980.000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggara Paten	2 Orang			25.200.000	28.980.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									6.286.000	7.228.900		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan yang mendapatkan Izin	30 Unit			4.190.000	4.818.500	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Waktu Pelayanan Nonperizinan	1 Tahun			2.096.000	2.410.400	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									8.104.000	9.319.600		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									6.640.000	7.636.000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Juml;ah Musrenbang Desa Yang Dimonitoring	10 Desa			2.336.000	2.686.400		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	4 Kali			4.304.000	4.949.600		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan									1.464.000	1.683.600			
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat	1 Tahun			1.464.000	1.683.600		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									47.471.626	54.592.370			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									47.471.626	54.592.370			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Tahun			4.204.000	4.834.600		
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang di Kecamatan	2 Kegiatan			39.063.626	44.923.170		
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	1 Tahun			4.204.000	4.834.600		
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.00 KECAMATAN CIJULANG															1.762.106.243	2.026.422.178		
7					UNSUR KEWILAYAHAN													
7	01				KECAMATAN											1.762.106.243	2.026.422.178	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											1.646.442.333	1.893.408.682	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											39.401.000	45.311.150	
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Perencanaan setiap bulan	1 Orang			36.055.000	41.463.250		
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			3.346.000	3.847.900		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan											1.232.510.303	1.417.386.848	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan	1 Tahun			1.173.814.303	1.349.886.448		
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah SDM Kepegawaian setiap bulan Jumlah SDM Simda BMD setiap bulan	4 Dokumen 1 Orang 1 Orang			57.196.000	65.775.400		
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen			750.000	862.500		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe			
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)		1 Dokumen			750.000	862.500	
7	01	01	2.03		Administrasi Umum									306.498.530	352.473.309			
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim		240 Lembar			1.080.000	1.242.000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan		2 Rekening			38.400.000	44.160.000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin		5 Unit			3.500.000	4.025.000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Aplikasi Keuangan setiap bulan		1 Orang			33.713.000	38.769.950	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan		1 orang			23.254.459	26.742.628	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli		180 Jenis			17.289.392	19.882.801	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan		48 Jenis			7.820.906	8.994.042	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli		60 Jenis			1.735.940	1.996.331	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan		36 Jenis			8.160.000	9.384.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli		12 Kali			14.004.000	16.104.600	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti		6 Kali			22.136.000	25.456.400	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor		1 Unit			5.218.342	6.001.093	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		6 Unit			31.003.255	35.653.743	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah dan Luas Gedung Kantor yang dipelihara Jumlah SDM Pengamanan		1 Unit 2 Orang			38.641.000	44.437.150	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Kendaraan yang dipelihara	5 Unit			47.042.236	54.098.571	
7	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Unit			7.500.000	8.625.000	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	8 Unit			6.000.000	6.900.000	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									68.032.500	78.237.375		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian Dinas	23 Stel			8.032.500	9.237.375	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti	10 Orang			60.000.000	69.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									67.070.000	77.130.500		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									21.640.000	24.886.000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	320 Kali			21.640.000	24.886.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									37.800.000	43.470.000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan PATEN	3 Orang			37.800.000	43.470.000	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									7.630.000	8.774.500		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan yang mendapatkan Izin	35 Unit			4.170.000	4.795.500	
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat yang dilayani	27431 Orang			3.460.000	3.979.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									7.640.000	8.786.000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									7.640.000	8.786.000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Musrenbang Desa yang di monitoring	7 Desa			3.200.000	3.680.000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	12 Kali			4.440.000	5.106.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									40.953.910	47.096.996		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									40.953.910	47.096.996		
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa	12 Kali			4.440.000	5.106.000	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di	2 Kegiatan			32.073.910	36.884.996	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan		
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	12 Kali			4.440.000	5.106.000			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11.00 KECAMATAN CIMERAK														2.006.616.848	2.307.609.377				
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN												2.006.616.848	2.307.609.377	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												1.681.667.996	1.933.918.197	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												38.180.000	43.907.000	
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Perencanaan Setiap Bulannya	1 Orang			36.820.000	42.343.000			
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			1.360.000	1.564.000			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan												1.202.445.973	1.382.812.869	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS Yang di Bayarkan	1 Tahun			1.147.074.473	1.319.135.644			
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah SDM Kepegawaian Setiap Bulannya Jumlah SDM SIMDA BMD Setiap Bulannya	4 Dokumen 1 Orang/Bulan 1 Orang/Bulan			53.869.000	61.949.350			
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Smesteran	1 Dokumen			744.500	856.175			
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 Dokumen			758.000	871.700			
7	01	01	2.03		Administrasi Umum												364.425.773	419.089.640	
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Non PNS, Surat yang dikelola, Surat Bermaterai serta Jumlah Dokumen Terkirim	515 Buah			2.325.000	2.673.750			
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Rekening Jasa Sumberdaya Air dan Listrik yang dibayar setiap bulan	4 Rekening			38.400.000	44.160.000			
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang di Servis dan Berizin	13 Unit			3.900.000	4.485.000			
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Aplikasi Keuangan Setiap Bulannya	1 Orang/Bulan			36.144.000	41.565.600			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan Setiap Bulannya	12 Orang/Bulan			23.832.052	27.406.860	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang di beli	50 Jenis			19.411.080	22.322.742	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di Cetak dan digunakan	40 Jenis			9.475.453	10.896.771	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	15 Jenis			4.479.424	5.151.338	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan yang di beli tiap bulannya	5 Jenis			8.160.000	9.384.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli	12 Kali			17.050.000	19.607.500	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang diikuti	24 Kali			25.513.000	29.339.950	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	6 Unit			16.266.684	18.706.687	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	6 Unit			15.833.615	18.208.657	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Mebeuler yang dibeli	20 Set / Unit			37.561.817	43.196.090	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah dan Luas Gedung Kantor Yang dipelihara Jumlah SDM Pengamanan Setiap Bulannya	2 Unit 2 Orang/Bulan			40.552.000	46.634.800	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Kendaraan Yang dipelihara	13 Unit			53.521.648	61.549.895	
7	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung yang dipelihara	5 Unit			4.500.000	5.175.000	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah dan Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang di Pelihara	8 Unit			7.500.000	8.625.000	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									76.616.250	88.108.688		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas	26 Stel			16.616.250	19.108.688	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat		10 Orang			60.000.000	69.000.000			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											247.112.000	284.178.800			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											16.325.000	18.773.750			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah yang dilaksanakan		360 Kali			16.325.000	18.773.750			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											219.707.000	252.663.050			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan PATEN		2 Orang/Bulan			219.707.000	252.663.050			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat											11.080.000	12.742.000			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Bangunan yang mendapatkan izin		35 Unit			4.770.000	5.485.500			
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Masyarakat yang di layani		28000 Orang			6.310.000	7.256.500			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											11.113.000	12.779.950			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											11.113.000	12.779.950			
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Musrenbang Desa yang di Monitoring		11 Desa			3.422.000	3.935.300			
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat		4 Kali/Kegiata n			7.691.000	8.844.650			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											66.723.852	76.732.430			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											66.723.852	76.732.430			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa		4 Kali/Kegiata n			7.691.000	8.844.650			
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di		2 Kegiatan			51.341.852	59.043.130			
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cimerak, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan		4 Kali/Kegiata n			7.691.000	8.844.650			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.00 KECAMATAN CIGUGUR															1.718.150.427	1.975.872.992				
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN													1.718.150.427	1.975.872.992	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													1.629.991.687	1.874.490.441	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													39.970.000	45.965.500	
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah SDM SIMRAL Perencanaan Setiap Bulan		1 orang			36.120.000	41.538.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			3.850.000	4.427.500	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan									1.155.010.527	1.328.262.106		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan yang Dibayarkan	1 Tahun			1.095.749.777	1.260.112.244	
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah SDM Kepegawaian setiap bulan Jumlah SDM Simda BMD setiap bulan	4 Dokumen 1 orang 1 orang			57.359.000	65.962.850	
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Kauangan Semesteran	4 Dokumen			925.000	1.063.750	
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunann Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)	1 Dokumen			976.750	1.123.262	
7	01	01	2.03		Administrasi Umum									366.411.660	421.373.410		
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	750 surat			1.260.000	1.449.000	
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Rekening Jasa Sumber Daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening			28.200.000	32.430.000	
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan Yang diservice dan Berizin	4 Unit			3.500.000	4.025.000	
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah SDM SIMDA Keuangan Setiap Bulan	1 orang			32.574.000	37.460.100	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan	1 orang			22.746.244	26.158.181	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Dan Jenis ATK yang dibeli	160 Jenis			20.353.918	23.407.006	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan Digandakan	40 Jenis			8.020.906	9.224.042	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang dibeli	50 Jenis			2.163.006	2.487.457	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16 Unit			23.049.432	26.506.847	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Bahan Bacaan Yang Dibeli Tiap Bulan	24 Jenis			6.120.000	7.038.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Makanan dan Minuman yang Dibeli	12 kali			23.368.000	26.873.200	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	30 kali			22.136.000	25.456.400	
7	01	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	2 Jenis			26.690.086	30.693.599	
7	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	4 unit			37.923.932	43.612.522	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Pengamanan Setiap Bulan	2 orang			67.790.000	77.958.500	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Kendaraan Yang Dipelihara	4 Unit			25.516.136	29.343.556	
7	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	5 Unit			7.500.000	8.625.000	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Pemeliharaan Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 Jenis			7.500.000	8.625.000	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									68.599.500	78.889.425		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Pakaian Dinas	22 set			8.599.500	9.889.425	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang mengikuti	10 orang			60.000.000	69.000.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK									16.960.000	19.504.000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan									16.960.000	19.504.000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Dalam Daerah yang dilaksanakan	320 kali			16.960.000	19.504.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									14.996.000	17.245.400		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									14.996.000	17.245.400		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Musrenbang Desa YAng Di mOnitoring	7 desa			4.142.000	4.763.300	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat		12 bulan			10.854.000	12.482.100			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											56.202.740	64.633.151			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											56.202.740	64.633.151			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa		12 bulan			9.900.000	11.385.000			
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di		1 Kegiatan			36.906.740	42.442.751			
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cigugur, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan		12 bulan			9.396.000	10.805.400			
Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08.00 KECAMATAN LANGKAPLANCAR																1.754.263.477	2.017.403.000			
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN													1.754.263.477	2.017.403.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													1.626.980.143	1.871.027.165	
7	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													31.004.000	35.654.600	
7	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Simral Perencanaan setiap bulan		12 Bulan			31.004.000	35.654.600			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													1.273.959.704	1.465.053.660	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS yang dibayarkan		10 Orang			1.218.148.540	1.400.870.821			
7	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga		2 Orang			54.517.000	62.694.550			
7	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran		4 Dokumen			420.000	483.000			
7	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Dokumen Laporan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun (CALK)		4 Dokumen			874.164	1.005.289			
7	01	01	2.03		Administrasi Umum													252.793.239	290.712.225	
7	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Non PNS, surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim		236 Buah			1.500.000	1.725.000			
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan		3 Rekening			18.000.000	20.700.000			
7	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin		1 Tahun			4.500.000	5.175.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
7	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Simda Keuangan setiap bulan	12 Bulan			31.297.000	35.991.550	
7	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	1 Orang			17.400.000	20.010.000	
7	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah ATK yang dibeli	35 Jenis			17.541.991	20.173.290	
7	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jenis dan Jumlah Barang yang di cetak dan digandakan	40 Jenis			8.850.000	10.177.500	
7	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penurunan Resiko Bencana		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli	36 Jenis			3.041.490	3.497.713	
7	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang diperlukan	1 Tahun			11.262.068	12.951.378	
7	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	2 Jenis			3.600.000	4.140.000	
7	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah makanan dan minuman yang dibeli	1 Tahun			14.075.000	16.186.250	
7	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	1 Tahun			6.308.000	7.254.200	
7	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis Mebeleur yang dibeli	20 Set/Unit			21.165.872	24.340.753	
7	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah SDM Pengamanan setiap bulan	2 Orang			38.802.000	44.622.300	
7	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jenis dan jumlah kendaraan yang dipelihara	12 Bulan			18.000.000	20.700.000	
7	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	16 unit			37.449.818	43.067.291	
7	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									69.223.200	79.606.680		
7	01	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah pakaian Dinas	24 Stel			9.223.200	10.606.680	
7	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat	10 Orang			24.000.000	27.600.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe			
7	01	01	2.04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat		15 Orang			36.000.000	41.400.000	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											65.400.000	75.210.000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											27.600.000	31.740.000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang diikuti		12 Bulan			27.600.000	31.740.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											37.800.000	43.470.000	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Penyelenggaraan PATEN		12 Bulan			37.800.000	43.470.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											24.983.234	28.730.720	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa											24.983.234	28.730.720	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Musrenbang desa yang dimonitoring		15 Desa			10.094.250	11.608.388	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa		12 Bulan			14.888.984	17.122.332	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA											36.900.100	42.435.115	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa											36.900.100	42.435.115	
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Langkaplancar			Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintahan		12 Bulan			11.463.164	13.182.639	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di		2 kegiatan			14.509.608	16.686.049	
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Langkaplancar, Semua Kelurahan			jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Desa		12 orang/kegiatan			10.927.328	12.566.427	
Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.00 INSPEKTORAT															14.511.027.134	16.687.681.204		
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN													
6	01				INSPEKTORAT DAERAH											14.511.027.134	16.687.681.204	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											9.325.829.550	10.724.703.982	
6	01	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											128.607.000	147.898.050	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan		3 Dokumen			24.036.000	27.641.400	
6	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD dan Perubahannya		6 Dokumen 1 Orang/Bulan			84.070.000	96.680.500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
6	01	01	2.01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Evaluasi Pertriwulan	4 Laporan			5.433.000	6.247.950	
6	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Koordinasi	12 Laporan			15.068.000	17.328.200	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan									7.243.020.500	8.329.473.575		
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi,			Jumlah Kinerja Pegawai	490 Orang/Bulan			7.128.692.500	8.197.996.375	
6		01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen LKIP Inspektorat Jumlah Tenaga Jasa Operator WEB, Operator Kepegawaian, Operator Administrasi Umum dan	1 Dokumen 4 Orang/Bulan			106.388.000	122.346.200	
6		01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran	1 Dokumen			3.970.000	4.565.500	
6		01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen			3.970.000	4.565.500	
6	01	01	2.03		Administrasi Umum									1.577.402.280	1.814.012.622		
6	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	325 Lembar/ Paket			4.054.000	4.662.100	
6		01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	3 Rekening			75.480.000	86.802.000	
6		01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Gedung Kantor yang di sewa	1 Unit			150.000.000	172.500.000	
6		01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang berizin Jumlah SDM Pengemudi/Supir dan SDM Administrasi Perkantoran setiap bulan	11 Unit 1 Orang			33.200.000	38.180.000	
6		01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Tenaga Jasa Operator Keuangan (SIMDA)	1 Orang/Bulan			21.000.000	24.150.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
6	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Peralatan Kebersihan yang dibeli Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	15 Jenis 2 Orang			27.996.512	32.195.989	
6	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis ATK yang dibeli	50 Jenis			80.410.892	92.472.526	
6	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	2 Jenis			11.660.700	13.409.805	
6	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	8 Jenis			3.325.355	3.824.158	
6	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	1000 Eksemplar			28.908.000	33.244.200	
6	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jenis makanan dan minuman yang dibeli	8 Jenis			92.455.625	106.323.969	
6	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas selama 1 Tahun	150 Laporan			443.714.000	510.271.100	
6	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli Jumlah Peralatan Kantor yang dibeli Jumlah Peralatan Komputer yang tersedia	10 Unit 5 Unit 12 Unit			175.444.108	201.760.724	
6	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah mebeleur yang dibeli	15 Unit			61.656.652	70.905.150	
6	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara Jumlah SDM Keamanan Kantor setiap bulan	20 Unit 3 Orang/Tahun			34.800.000	40.020.000	
6	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Kendaraan yang diservis	11 Unit			233.846.436	268.923.401	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
6	01	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	20 Unit			99.450.000	114.367.500	
6	01	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									376.799.770	433.319.735		
6	01	01	2.04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	50 Stel/Paket			17.500.000	20.125.000	
6	01	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Karangbenda			Jumlah SDM Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pendidikan dan	45 Orang 36 Orang			359.299.770	413.194.735	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN									4.509.116.973	5.185.484.519		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal									2.142.514.600	2.463.891.790		
6	01	02	2.01	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Audit Dana BOS Jumlah laporan Audit Dana Desa Jumlah Laporan Audit	24 Laporan 30 Laporan 6 Laporan			514.415.000	591.577.250	
6	01	02	2.01	02	Review Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Review DAK Fisik Tahap 2 Jumlah Laporan Review DAK Fisik Tahun Sebelumnya Jumlah Laporan Reviu Laporan Keuangan Kabupaten Pangandaran Jumlah Laporan Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Reviu LPPD Jumlah Laporan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) Jumlah Laporan Reviu RPJMD dan Renstra PD Jumlah Laporan Reviuw	9 Laporan 2 Laporan 36 Laporan 36 Laporan 1 Laporan 72 Laporan 36 Laporan 9 Laporan			504.137.500	579.758.125	
6	01	02	2.01	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran/Pemeriksaan Kas Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Jumlah Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	35 laporan 1 laporan 6 laporan			287.787.000	330.955.050	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
6		01	02	2.01	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Evaluasi Hasil Pemeriksaan APIP (Gelar Pengawasan Daerah)				836.175.100	961.601.365	
											Jumlah Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)						
											Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	1 Laporan					
											Jumlah Laporan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Jumlah Laporan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	4 Laporan					
											Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko	35 Laporan					
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu									2.366.602.373	2.721.592.729		
6		01	02	2.02	01	Audit Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Audit Kegiatan Invenstasi Daerah				1.314.802.500	1.512.022.875	
											Jumlah Laporan Audit Ketaatan	2 Laporan					
											Jumlah Laporan Pemeriksaan Banprov	12 Laporan					
											Jumlah Laporan Pemeriksaan Fisik	6 Laporan					
											Jumlah Laporan Pemeriksaan Investigatif	40 Laporan					
											Jumlah Laporan Probitry	5 Laporan					
6		01	02	2.02	02	Review Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Hasil Reviu HPS	1 Laporan			7.410.000	8.521.500	
6		01	02	2.02	03	Pemantauan Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Operasionalisasi Saber Pungli Jumlah Laporan Pengendalian Gratifikasi	1 Laporan			947.977.873	1.090.174.554	
											Jumlah Laporan Survei	12 Laporan					
6		01	02	2.02	04	Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan PMPRB	10 Laporan			96.412.000	110.873.800	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI										676.080.611	777.492.703	
6	01	03	2.02		Asistensi dan Pendampingan										676.080.611	777.492.703	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan			
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan			
										Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe		
6		01	03	2.02	02	Asistensi dan Pendampingan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Asistensi Desa Jumlah Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah Laporan Penilaian Internal Zona Integritas Jumlah Laporan Verifikasi LHKPN Jumlah SDM APIP yang	10 Laporan 10 Laporan 1 Laporan 1 laporan 36 Orang			676.080.611	777.492.703				
Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														17.069.495.863	19.234.996.795						
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01					PERENCANAAN													15.405.272.838	17.507.593.267	
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													7.284.555.428	8.372.696.244	
5	01	01	2.01			Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													112.867.500	129.797.625	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen yang disusun	6 dokumen			22.400.000	25.760.000					
5	01	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	4 Dokumen			84.857.500	97.586.125					
5	01	01	2.01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Dokumen yang disusun	3 dokumen			5.610.000	6.451.500					
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan													4.132.975.938	4.752.922.329		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			jumlah Pegawai ASN Bappeda				3.991.340.938	4.590.042.079					
5	01	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah operator SIMDA Barang Daerah yang dibayar tiap bulan dan jumlah bimtek yang diikuti Jumlah operator yang dibayar tiap bulan	12 Bulan 12 Bulan			133.200.000	153.180.000					
5	01	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah dokumen realisasi keuangan semesteran	3 Dokumen			3.325.000	3.823.750					
5	01	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah dokumen realisasi keuangan akhir tahun	1 Dokumen			5.110.000	5.876.500					
5	01	01	2.03		Administrasi Umum													3.038.711.990	3.489.976.290		
5	01	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Materai yang dibeli	200 Buah			10.500.000	12.075.000					
5	01	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tiap bulan	12 Bulan			439.800.000	505.770.000					
5	01	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah gedung yang disewa	1 Gedung			180.000.000	207.000.000					
5	01	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah kendaraan yang diperpanjang ijinnya tiap	12 Bulan			38.700.000	44.505.000					
5	01	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah operator SIMDA Keuangan Daerah yang dibayar tiap bulan dan jumlah bimtek yang diikuti	2 Orang			102.850.000	118.277.500					

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
5	01	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah pegawai kebersihan yang dibayar tiap bulan	12 Bulan			17.400.000	20.010.000	
5	01	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah ATK yang dibeli	85 Jenis			134.208.645	154.339.942	
5	01	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah perlengkapan administrasi perkantoran yang dibayar	1 Tahun			35.510.400	40.836.960	
5	01	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang dibeli	1 Jenis			18.444.650	21.211.348	
5	01	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	15 Jenis			131.719.584	151.477.522	
5	01	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga kantor	10 Jenis			268.741.737	309.052.998	
5	01	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang25undangan yang dibayar	25 Jenis			32.628.000	37.522.200	
5	01	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah makanan dan minuman yang dibayar setiap	12 Bulan			105.480.000	121.302.000	
5	01	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan ke luar daerah dalam 1	12 Bulan			762.600.000	876.990.000	
5	01	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah peralatan kantor yang dibeli	15 Jenis			432.717.634	493.082.779	
5	01	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Mebeler yang di beli	6 Jenis			63.435.300	72.950.595	
5	01	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung			87.205.000	100.285.750	
5	01	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah kendaraan untuk mobilisasi operasional yang dipelihara	10 Unit			137.021.040	157.574.196	
5	01	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	1 Gedung			39.750.000	45.712.500	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										4.284.630.052	4.723.396.561	
5	01	02	2.01		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah										3.657.743.126	4.117.568.649	
5	01	02	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun	5 Dokumen			2.245.383.500	2.527.829.950	
5	01	02	2.01	03	Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan dan diikuti	3 Kegiatan			309.368.700	255.712.189	
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah data kesepakatan hasil Musrenbang RKPD yang dilaksanakan	2 Dokumen			74.308.418	146.607.368	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
										Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
5		01	02	2.01	07	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah sistem aplikasi yang dimplementasikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabelerah Yang Disusun	1 Sistem			919.688.228	1.062.075.720	
5		01	02	2.01	09	Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Data Informasi Pembangunan Daerah	40 Data			108.994.280	125.343.422	
5		01	02	2.02		Perencanaan Pendanaan Pembangunan Daerah										513.829.926	475.812.362	
5		01	02	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penganggaran di daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen yang Disusun	3 Dokumen			210.525.380	193.073.362	
5		01	02	2.02	03	Analisa dan Pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengkajian Pembangunan Daerah Yang	1 Dokumen			303.304.546	282.739.000	
5		01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah										113.057.000	130.015.550	
5		01	02	2.03	01	Monitoring Program dan Kegiatan Perangkat Daerah			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Evaluasi RKPD yang dilaksanakan	2 Dokumen			113.057.000	130.015.550	
5		01	03			PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA										975.404.002	1.121.714.602	
5		01	03	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan										739.146.500	850.018.475	
5		01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen RPJMD 2021 - 2025 yang di Susun Jumlah Kegiatan pembinaan Perencanaan Pembanguunan Desa Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Kerjasama Wilayah Perbatasan Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen 10 Kecamatan 1 Laporan			295.343.500	339.645.025	
5		01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang di monitoring	10 Kecamatan			295.398.000	339.707.700	
5		01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Evaluasi RPJMD Jumlah Dokumen LKIP Kabupaten Pangandaran	1 Dokumen 1 Dokumen			148.405.000	170.665.750	
5		01	03	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia										129.243.502	148.630.027	
5		01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia			Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Indikator Makro Kabupaten Pangandaran	1 Dokumen			100.018.502	115.021.277	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
5		01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publikdan Kinerja Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Jumlah Laporan Hasil	1 Dokumen 1 Laporan			29.225.000	33.608.750	
5	01	03	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat											107.014.000	123.066.100	
5		01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya	1 Laporan			107.014.000	123.066.100	
5	01	04			PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM											701.322.000	806.520.300	
5	01	04	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian											140.724.000	161.832.600	
5		01	04	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang	1 Dokumen			140.724.000	161.832.600	
5	01	04	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif											281.649.000	323.896.350	
5		01	04	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			108.883.000	125.215.450	
5		01	04	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sektor Ekonomi	1 Dokumen			86.383.000	99.340.450	
5		01	04	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sektor Ekonomi Kreatif	1 Dokumen			86.383.000	99.340.450	
5	01	04	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam											278.949.000	320.791.350	
5		01	04	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sektor Sumber Daya Alam	1 Dokumen			106.983.000	123.030.450	
5		01	04	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sektor Sumber Daya	1 Dokumen			85.983.000	98.880.450	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
5		01	04	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Cakupan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sektor Sumber Daya Alam	1 Dokumen			85.983.000	98.880.450	
5		01	05			PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN									2.159.361.356	2.483.265.560	
5		01	05	2.01		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup									488.776.745	562.093.257	
5		01	05	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Neraca Sumber Daya Alam Yang Disusun	1 Dokumen			488.776.745	562.093.257	
5		01	05	2.02		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan									194.269.000	223.409.350	
5		01	05	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Perencanaan Bidang Prasarana Wilayah	1 Dokumen			194.269.000	223.409.350	
5		01	05	2.03		Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan									1.476.315.611	1.697.762.953	
5		01	05	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	Reformasi Birokrasi	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Yang Disusun Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Prasana Wilayah Jumlah Mou Jumlah Peta Dasar 1:5000 Kabupaten Pangandaran Jumlah Peta Tematik	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 10 Dokumen			1.476.315.611	1.697.762.953	
5		05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									1.664.223.025	1.727.403.528	
5		05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									1.664.223.025	1.727.403.528	
5		05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan									751.720.400	678.025.510	
5		05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen LKPJ Bupati Pangandaran sebagai Dasar Evaluasi Kinerja Selama Satu Tahun	2 Dokumen			317.904.400	365.590.060	
5		05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Laporan Indeks Daya Saing Daerah Jumlah Laporan Inovasi Government Award Pengelolaan Aplikasi Satu Data	1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan			433.816.000	312.435.450	
5		05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan									279.901.000	321.886.150	
5		05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Reformasi Birokrasi	Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kajian Pembangunan Sektor Geoharitage	1 Dokumen			279.901.000	321.886.150	
5		05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									482.221.625	554.554.868	

Kode						Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
										Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
										Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
5		05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Kajian Potensi Investasi Kabupaten Pangandaran Jumlah Dokumen Kajian Potensi Unggulan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen			217.462.875	250.082.306	
5		05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Master Plan Agropolitan Kabupaten Pangandaran	1 Dokumen			264.758.750	304.472.562	
5		05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi										150.380.000	172.937.000	
5		05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Reformasi Birokrasi		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah Dokumen Roadmap SIDA	1 Dokumen			150.380.000	172.937.000	
Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01.00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																107.514.029.190	123.641.133.569	
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5		02				KEUANGAN										107.514.029.190	123.641.133.569	
5		02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										12.479.221.377	14.351.104.584	
5		02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										63.000.000	72.450.000	
5		02	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen dan SDM NON PNS dalam perencanaan program dan	7 Dokumen dan Orang			63.000.000	72.450.000	
5		02	01	2.02		Administrasi Keuangan										8.993.340.136	10.342.341.156	
5		02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Persentase Gaji ASN yang terbayarkan	100 %			8.733.640.136	10.043.686.156	
5		02	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Jumlah SDM Non PNS dalam kegiatan teknis perkantoran tiap bulan Jumlah SDM Non PNS pengelolaan barang daerah tiap bulan Jumlah SDM Non PNS pengelolaan pendapatan daerah tiap bulan Jumlah SDM Non PNS pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian tiap	8 Dokumen 1 Orang 1 Orang 1 Orang 2 Orang			242.100.000	278.415.000	
5		02	01	2.02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran	1 Dokumen			8.800.000	10.120.000	
5		02	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen			8.800.000	10.120.000	
5		02	01	2.03		Administrasi Umum										3.282.333.033	3.774.682.989	
5		02	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah surat yang dikelola, surat bermaterai, serta jumlah dokumen terkirim	500 Lembar			6.800.000	7.820.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur	Target	Tolok	Targe			
5	02	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar	7 Rekening			446.110.000	513.026.500	
5	02	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah gedung kantor yang tersedia	3 Unit			200.000.000	230.000.000	
5	02	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Kendaraan yang diservis dan berizin Jumlah SDM Pengemudi setiap	60 Unit 1 Orang			61.794.000	71.063.100	
5	02	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SDM Non PNS pengelolaan keuangan tiap bulan	1 Orang			53.700.000	61.755.000	
5	02	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SDM Kebersihan setiap bulan	6 Orang			120.997.696	139.147.350	
5	02	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jenis ATK yang dibeli	95 Jenis			149.999.991	172.499.990	
5	02	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jenis Barang yang di cetak dan digandakan	10 Jenis			77.100.044	88.665.051	
5	02	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jenis komponen instalasi listrik yang dibeli	6 Jenis			29.998.879	34.498.711	
5	02	01	2.03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah peralatan gedung kantor yang dibeli Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dibeli	35 Jenis 35 Jenis			597.063.945	686.623.537	
5	02	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	6 Jenis			13.080.000	15.042.000	
5	02	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jenis makanan dan minuman yang dibeli	3 Jenis			67.000.000	77.050.000	
5	02	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang diikuti	250 Kali			305.996.000	351.895.400	
5	02	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah komputer yang dibeli	17 Unit			370.000.000	425.500.000	
5	02	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah mebeleur yang dibeli	30 Jenis			277.743.074	319.404.535	
5	02	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah gedung kantor yang dipelihara Jumlah SDM Keamanan setiap bulan	7 Unit 6 Orang			136.950.000	157.492.500	
5	02	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	60 Unit			164.999.404	189.749.315	
5	02	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 Jenis			153.000.000	175.950.000	
5	02	01	2.03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah mebeleur yang dipelihara	10 Jenis			50.000.000	57.500.000	
5	02	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									140.548.208	161.630.439		
5	02	01	2.04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	155 Stel			109.775.800	126.242.170	
5	02	01	2.04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Pakaian yang Tersedia	155 Stel			30.772.408	35.388.269	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan				Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
											Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
											Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
5	02	02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												17.508.246.900	20.134.483.935		
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												9.472.518.900	10.893.396.735		
5	02	02	2.01	01	Penyusunan KUA dan PPAS	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Dokumen KUA,PPAS	2 Dokumen			475.000.000	546.250.000			
5	02	02	2.01	02	Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Dokumen KUPA,PPASP	2 Dokumen			475.000.000	546.250.000			
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SKPD yang di asistensi	35 SKPD			700.000.000	805.000.000			
5	02	02	2.01	04	Penyusunan dan Review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SKPD yang di asistensi APBD Perubahan	35 SKPD			700.000.000	805.000.000			
5	02	02	2.01	05	Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Raperbup dan Perbup Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Raperda dan Perda Tentang APBD yang disusun	2 Raperbup,Pe rbup 2 Raperda,Per			1.500.000.000	1.725.000.000			
5	02	02	2.01	06	Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Raperbup dan PerbupPerubahan Penjabaran APBD yang disusun Jumlah Raperda dan Perda Tentang Perubahan APBD yang disusun	2 Raperbup,Pe rbup 2 Raperda,Per da			2.300.000.000	2.645.000.000			
5	02	02	2.01	08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Aplikasi			512.543.900	589.425.485			
5	02	02	2.01	09	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Dokumen Hasil Kajian Pengelolaan	3 Dokumen			899.975.000	1.034.971.250			
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah pengelola keuangan desa yang meningkat pemahamannya mengenai pengelolaan keuangan desa Jumlah SKPD yang memahamii Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah SKPD yang	186 Desa 35 SKPD 35 SKPD			1.910.000.000	2.196.500.000			
5	02	02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												2.484.041.000	2.856.647.150		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Dokumen yang Disusun Jumlah Laporan Kas Umum Daerah yang Disusun Jumlah sistem Transaksi Non Tunai	12 Dokumen 12 Dokumen 1 Sistem			1.265.000.000	1.454.750.000			
5	02	02	2.02	03	Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Laporan/LKT yang Disusun Jumlah SKPD yang Mengikuti Sosialisasi Pengelolaan Dana	4 Laporan 35 SKPD			199.979.000	229.975.850			
5	02	02	2.02	04	Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SP2D yang Diterbitkan Jumlah waktu Pelaksanaan Penatausahaan Belanja	4700 SP2D 34 SKPD			395.000.000	454.250.000			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
5	02	02	2.02	05	Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SKPD yang Dikelola	35 SKPD			174.936.000	201.176.400	
5	02	02	2.02	06	Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD Semester I Prognosis 6 Bulan berikutnya yang disusun	1 Dokumen			449.126.000	516.494.900	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									5.431.767.000	6.246.532.050		
5	02	02	2.03	04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Raperbup Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun Jumlah Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disusun	1 Raperbup 1 Raperda			1.068.038.000	1.228.243.700	
5	02	02	2.03	05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah dokumen Laporan Akhir Tahun Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disusun Jumlah SKPD Yang melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	1 Dokumen 35 SKPD			1.052.979.000	1.210.925.850	
5	02	02	2.03	07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Jumlah Tahapan Pengajuan	9 SKPD 3 Kali			118.650.000	136.447.500	
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah	9 SKPD			172.100.000	197.915.000	
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Aplikasi yang diupdate	1 Aplikasi			2.000.000.000	2.300.000.000	
5	02	02	2.03	11	Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Dokumen Pengajuan Pencairan Hibah Bansos, Bankeu	8 Dokumen			450.000.000	517.500.000	
5	02	02	2.03	12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah SDM yang mengikuti pembinaan pengelola	85 Orang 85 Orang			570.000.000	655.500.000	
5	02	02	2.04		Kegiatan Penunjang Urusan									119.920.000	137.908.000		
5	02	02	2.04	03	Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Laporan Hibah Bansos yang Disusun	12 Laporan			119.920.000	137.908.000	
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									67.958.491.328	78.152.265.027		
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah									67.958.491.328	78.152.265.027		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
5	02	03	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah bidang tanah yang tersedia Bagi Kepentingan Umum untuk pembangunan Fasilitas Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan Jumlah Lahan (Tanah PT. KAI) tersedia	1 Bidang Tanah 235 Unit 1 Lokasi			60.875.842.500	70.007.218.875	
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yang di update Jumlah Pelaksanaan Penghapusan	1 Aplikasi 3 Kali			202.900.000	233.335.000	
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Dokumen sensus barang milik daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi	1 Dokumen 1 Dokumen			5.714.010.578	6.571.112.165	
5	02	03	2.01	07	Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah kasus TPTGR yang ditangani Jumlah Kasus TPTGR yang ditangani Jumlah Tanah yang disertifikatkan	2 Kasus 2 Kasus 19 Bidang Tanah			533.845.750	613.922.612	
5	02	03	2.01	10	Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Aset yang diselesaikan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang beralih kepemilikan dari Kabupaten Ciamis ke	1 Laporan 58 Unit			284.910.000	327.646.500	
5	02	03	2.01	11	Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah SKPD yang melaksanakan Rekonsiliasi BMD	37 Laporan			185.000.000	212.750.000	
5	02	03	2.01	13	Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek	70 Orang			161.982.500	186.279.875	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH										9.568.069.585	11.003.280.023	
5	02	04	2.02		Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah										9.568.069.585	11.003.280.023	
5	02	04	2.02	01	Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Aplikasi Pengelolaan PBB P2 dan jumlah printonix Pembinaan Terhadap Wajib Pajak Pendataan Potensi Pajak Daerah	6 Aplikasi, printonix 40 Wajib Pajak 1 Dokumen			651.000.000	748.650.000	
5	02	04	2.02	02	Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Objek Pajak	6000 Objek Pajak			424.999.885	488.749.868	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe		
5	02	04	2.02	03	Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sistem pajak hotel dan restoran Jumlah SDM Pengelola	100 Orang 2 Orang			250.350.000	287.902.500	
5	02	04	2.02	04	Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah permohonan Pembatalan, Keberatan, Pengurangan dan Mutasi Obyek Pajak Jumlah petugas Pemungutan PBB P2 Jumlah reklame yang diterbitkan	345 Dokumen 465 petugas pemungut 50 Reklame			897.000.000	1.031.550.000	
5	02	04	2.02	05	Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Desa yang lunas dalam Pembayaran Pajak PBB-P2 dalam masa pajak Jumlah hasil Rekonsiliasi dan Evaluasi PBB P2 Jumlah Wajib Pajak peserta Sosialisasi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Daerah	93 Desa 93 Laporan 150 Wajib Pajak			642.625.000	739.018.750	
5	02	04	2.02	06	Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah alat sistem online pajak hotel dan restoran Jumlah waktu pengelolaan pajak hotel dan restoran	50 Unit 12 Kali			1.087.999.900	1.251.199.885	
5	02	04	2.02	07	Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Hasil Penagihan Pajak Daerah Jumlah laporan data PBB-P2 Jumlah laporan Monitoring Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa	7300 Dokumen 12 Laporan 93 Laporan			832.291.000	957.134.650	
5	02	04	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Aplikasi Yang Dikelola Jumlah Aplikasi Yang di Update Jumlah Aplikasi Yang di Updatee Jumlah SPPT yang didistribusikan	3 Aplikasi 1 Aplikasi 1 Aplikasi 465.000 SPPT			1.469.402.800	1.689.813.220	
5	02	04	2.02	09	Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Cash Register Jumlah Data Obyek Pajak dan Subjek Pajak PBB P2 Jumlah Objek Pajak Jumlah Objek Pajak yang Ternilai	40 Unit 18.666 Objek Pajak 10 Objek Pajak			1.718.000.000	1.975.700.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan		
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe	
5	02	04	2.02	10	Pemeriksaan Pajak Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sistem pajak hotel dan restoran Jumlah SDM Pengelola	100 Orang 2 Orang			470.852.000	541.479.800			
5	02	04	2.02	11	Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Reformasi Birokrasi		Kab. Pangandaran, Cijulang, Cijulang			Jumlah Hotel dan restoran Jumlah Objek Pajak yang dimonitoring	483 Objek Pajak 500 Objek Pajak			1.123.549.000	1.292.081.350			
Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH															19.031.101.938	21.885.767.230			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	03				KEPEGAWAIAN												11.558.362.938	13.292.117.380	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												6.176.238.438	7.102.674.205	
5	03	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												21.000.000	24.150.000	
5	03	01	2.01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD	2 Dokumen			21.000.000	24.150.000			
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan												3.226.313.778	3.710.260.845	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah ASN yang bayarkan gaji dan tunjangannya	1 Kantor			3.113.733.778	3.580.793.845			
5	03	01	2.02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 Laporan			112.580.000	129.467.000			
5	03	01	2.03		Administrasi Umum												2.757.745.660	3.171.407.510	
5	03	01	2.03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Materai 6000 dan 3000 yang dikeluarkan Jumlah sistem yang dibangun	416 Materai 1 Sistem			98.998.000	113.847.700			
5	03	01	2.03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah rekening jasa komunikasi, sumbe daya air dan listrik yang disediakan	2 Rekening			66.600.000	76.590.000			
5	03	01	2.03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah gedung kantor yang disediakan	1 Gedung Kantor			330.000.000	379.500.000			
5	03	01	2.03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaannya	6 Unit			22.200.000	25.530.000			
5	03	01	2.03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah jasa administrasi keuangan kantor yang disediakan	1 Orang			21.000.000	24.150.000			
5	03	01	2.03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	1 Orang			17.400.000	20.010.000			
5	03	01	2.03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	1 Paket			84.404.519	97.065.197			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok			
5	03	01	2.03	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis			57.352.373	65.955.229	
5	03	01	2.03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah jenis alat listrik yang disediakan	7 Jenis			4.671.986	5.372.784	
5	03	01	2.03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan			29.324.199	33.722.829	
5	03	01	2.03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah waktu yang disediakan untuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan			29.508.000	33.934.200	
5	03	01	2.03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah jenis makanan dan minuman yang disediakan	3 Jenis			13.324.000	15.322.600	
5	03	01	2.03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aktivitas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang disediakan	85 Kali Perjalanan			332.820.000	382.743.000	
5	03	01	2.03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket			947.661.053	1.089.810.211	
5	03	01	2.03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket			408.688.825	469.992.149	
5	03	01	2.03	25	Pengadaan Mebeleur	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah mebeleur yang disediakan	2 Jenis			38.667.545	44.467.677	
5	03	01	2.03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung Kantor			34.800.000	40.020.000	
5	03	01	2.03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah kendaraan yang disediakan jasa pemeliharaannya	6 Unit			197.865.160	227.544.934	
5	03	01	2.03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung Kantor			16.490.000	18.963.500	
5	03	01	2.03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan jasa pemeliharaannya	1 Gedung Kantor			5.970.000	6.865.500	
5	03	01	2.04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									171.179.000	196.855.850		
5	03	01	2.04	08	Pemindahan Tugas PNS	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah PNS non struktural yang ditempatkan sesuai kompetensi	200 Orang			94.529.000	108.708.350	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok				Targe
5	03	01	2.04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Semua Kabupaten/Kot a, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		30 Orang			76.650.000	88.147.500	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH											5.382.124.500	6.189.443.175	
5	03	02	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN											175.964.000	202.358.600	
5	03	02	2.01	01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen ASN dan Manajemen Naskah dan Dokumen ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Sistem yang Dikembangkan		1 Sistem			119.008.000	136.859.200	
5	03	02	2.01	03	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Waktu yang Dikelola Sistem Informasi Kepegawaian Daerah		1 Tahun			56.956.000	65.499.400	
5	03	02	2.02		Administrasi Kepegawaian											1.837.369.000	2.112.974.350	
5	03	02	2.02	01	Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah dokumen formasi pegawai		1 Dokumen			1.401.672.000	1.611.922.800	
5	03	02	2.02	04	Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah SK pensiun yang ditetapkan		200 SK			90.988.000	104.636.200	
5	03	02	2.02	10	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah SK kenaikan pangkat yang ditetapkan		500 SK			344.709.000	396.415.350	
5	03	02	2.03		Peningkatan Kapastitas ASN											2.259.383.500	2.598.291.025	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi		170 Orang			731.634.500	841.379.675	
5	03	02	2.03	02	Pengembangan Penilaian Kinerja ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah dokumen penilaian kinerja		1 Dokumen			230.434.000	264.999.100	
5	03	02	2.03	05	Fasilitasi Profesi ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah Kartu yang diterbitkan		750 Kartu			31.944.000	36.735.600	
5	03	02	2.03	07	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah ASN penerima bantuan beasiswa Tugas Belajar dan Ikatan Dinas		8 Orang			1.265.371.000	1.455.176.650	
5	03	02	2.04		Pengembangan Karir ASN											943.640.000	1.085.186.000	
5	03	02	2.04	01	Pengembangan Karir dan Promosi ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah dokumen penyusunan rencana pembinaan karier PNS yang dikelola		1 Dokumen			943.640.000	1.085.186.000	
5	03	02	2.05		Pembinaan ASN											165.768.000	190.633.200	
5	03	02	2.05	01	Pembinaan Disiplin ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah laporan pegawai yang melaksanakan ketentuan jam kerja		12 Laporan			126.793.000	145.811.950	
5	03	02	2.05	02	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah SK penjatuhan hukuman disiplin		8 SK			38.975.000	44.821.250	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											7.472.739.000	8.593.649.850	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA											7.472.739.000	8.593.649.850	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan	
									Tolok	Targe	Tolok Ukur		Target	Tolok	Targe			
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional											7.472.739.000	8.593.649.850	
5	04	02	2.02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi / Uji Kompetensi Pemerintah	10 Orang			153.898.000	176.982.700		
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)		Kab. Pangandaran, Parigi, Parigi			Jumlah ASN Eselon II,III, dan IV yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Jumlah CPNS yang mengikuti pendidikan dan	150 Orang 316 Orang			7.318.841.000	8.416.667.150		

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Otonomi daerah merupakan bagian dari desentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah mempunyai hak serta kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Dengan hak tersebut maka setiap Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan Pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator yang ditetapkan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan indikator yang harus terpenuhi terlebih dahulu, karena SPM menjadi kewenangan masing-masing daerah.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang disajikan dalam tabel lampiran ini. Dalam tabel lampiran ini indikator dapat diperbaharui secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

6.1 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Utama

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2019, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2021, maka Pemerintah Kabupaten Pangandaran menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dikawal dan dicapai, yaitu:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Pangandaran.
Capaian tahun 2019 dan Target Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019	Target Indikator Kinerja Tahun 2021
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	68,21	68,78
2	Persentase Penduduk Miskin	%	7,71	6,77
3	Index Gini	Poin	0,345	0,33
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,48	3,69
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi/ Persentase Pertumbuhan PDRB	%	5,96	4,39
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	61,62	63,36
7	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari GSTC	Jumlah	0	1

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021
BPS Kabupaten Ciamis



6.2 Penetapan Indikator dan Target Kinerja Sasaran (Impact)

Pentapan Indikator dan target Kinerja Sasaran telah tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten pangandaran 2016 – 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.2
Proyeksi Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kabupaten Pangandaran
Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	TARGET KINERJA SASARAN			Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani							
1.1	Opini BPK terhadap LKPD	Status Laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKD
1.2	Tingkat Kapabilitas APIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	3	3	3	Inspektorat
1.3	Tingkat Kematangan implementasi SPIP (1 s/d 5)	Skor	2	2	3	3	3	Inspektorat
1.4	Nilai AKIP	Nilai	CC	B	B	BB	BB	Setda/Bagian Organisasi
1.5	Persentase Penggunaan E-Procurement thd Belanja Pengadaan	Persen	85	87	88	90	90	Setda/Bagian Barang/Jasa
1.6	Indeks Profesionalitas ASN (1 s/d 100)	Skor	55	60	65	70	70	BKPSDM
1.7	Indeks E-Goverment Nasional (0 s/d 4)	Indeks	1	2	2,25	3	3	Dinas Kominfo SP
1.8	Indeks Reformasi Birokrasi (1 s/d 100)	Indeks	40	45	55	60	60	Setda/Bagian Organisasi
1.9	Persentase Unit Kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Daerah	Persen	0	7,4	18,5	29,6	29,6	Inspektorat
1.10	Survey Kepuasan Masyarakat	Predikat	Cukup	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Setda/Bagian Organisasi
2	Misi 2 : Mewujudkan penataan ruang yang harmonis dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan							
2.1	Ketaatan terhadap RTRW	persen	10	20	30	40	40	DPUTRPRKP
2.2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,50	62,46	62,91	63,36	63,36	DLHK
3	Misi 3 : Menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas							
3.1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persen	55	70	85	95	95	DPUTRPRKP
3.2	Tingkat kecelakaan lalu lintas	Orang/ Sejuta Km Kendaraan per Tahun	0,033	0,032	0,031	0,029	0,029	Dishub
3.3	Rasio jaringan irigasi teknis dalam kondisi baik	Rasio	55	60	65	70	70	DPUTRPRKP
3.4	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses air minum	Persen	50	55	65	75	75	DPUTRPRKP
3.5	Indeks Risiko Sanitasi	Indeks	40	38	36	34	34	DPUTRPRKP
3.6	Indeks Risiko Bencana	Indeks	155	150,6	145	140	140	BPBD



NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	Kinerja pada Awal Periode RPJMD Perubahan	TARGET KINERJA SASARAN			Target Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	PD PENANGGUNG JAWAB
			2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	Persentase sarana dan prasarana pusat pemerintahan yang terpenuhi	Persen	5	18	22	80	80	DPUTRPRKP
4	Misi 4 : Memperkuat ketahanan nilai-nilai kearifan lokal							
4.1	Persentase Pemajuan Kebudayaan Lokal	Persen	25	35	70	80	80	Diparbud
4.2	Persentase skala sikap peserta didik yang berkepribadian baik	Persen	70	75	85	90	90	Disdikpora
4.3	Angka Konfilk Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan	Angka	12	11	10	8	8	Kesbangpol
4.4	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persen	80,5%	81%	81,5%	82%	82%	Kesbangpol
5	Misi 5: Membangun sumberdaya manusia yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing							
5.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	67,44	67,67	68,17	68,78	68,78	Dinkes, Disdik, Gabungan SKPD
5.2	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	DKBPPPA
5.3	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	65,45	65,67	66,55	66,55	66,55	DKBPPPA
5.4	Indeks Pembangunan Kepemudaan	Indeks	0,24	0,25	0,26	0,27	0,27	Disdikpora
5.5	Indeks Pembangunan Keolahragaan	Indeks	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85	Disdikpora
5.6	Persentase penurunan angka kemiskinan	Persen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	Dinsospmd
6	Misi 6 : Membangun Perekonomian Yang Tangguh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan							
6.1	Indeks Gini	Indeks	0,345	0,30	0,34	0,33	0,33	Dinsospmd
6.2	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	persen	3,58	3,46	3,91	3,69	3,69	Disnakerintrans
6.3	Persentase pertumbuhan PDRB	persen	4,22	4,28	4,34	4,40	4,40	Gabungan
6.4	Persentase Usaha Mikro terhadap UMKM	persen	95,3	96	97	98	98	Dinas Perdagangan KUKM
6.5	Jumlah Koperasi yang sehat	jumlah	0	1	2	2	2	Dinas Perdagangan KUKM
6.6	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	82	91	94	97	97	DKPKP
6.7	Jumlah kunjungan wisata	Jumlah	4,5 Juta	5 Juta	5,5 Juta	6 Juta	6 juta	Disparbud
6.8	Jumlah destinasi wisata yang memperoleh pengakuan dari <i>Global Sustainable Tourist Council</i> (GSTC)	Jumlah	0	0	0	1	1	Disparbud

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Pangandaran 2016-2021



BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran yang memuat visi dan misi, kebijakan umum dan prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menyatakan bahwa RKPD merupakan pedoman untuk penyusunan rancangan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini telah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 merupakan dokumen acuan dalam rangka menyusun Rancangan RKPD Tahun 2021, selain itu juga sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta guna mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Adapun kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat dan dunia usaha, berkewajiban berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, RKPD ini juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran.
4. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021. Renja PD tersebut disusun dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan.
5. Pemangku kepentingan pembangunan baik unsur pemerintah, dunia usaha dan atau masyarakat menggunakan RKPD ini sebagai arah dan wujud partisipasi dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan.
6. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta berkaitan dengan pendanaan pembangunan terhadap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat menjalankan fungsi *social control* dalam pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.



Demikian RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dan selaku pelaku pembangunan di Kabupaten Pangandaran, untuk dapat melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada Tahun 2021 secara sinergis dan terintegrasi.

BUPATI PANGANDARAN



H. JEJE WIRADINATA

